



LAPORAN AKHIR

**ANALISIS**

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2014-2018**

KERJA SAMA  
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH BAPPEDA  
DAN BADAN PUSAT STATISTIK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2019



**LAPORAN AKHIR**

**Analisis**

**Produk Domestik Regional Bruto**

**Daerah Istimewa Yogyakarta**

**2014-2018**

**KERJA SAMA**  
**BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH BAPPEDA DIY**  
**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DIY**  
**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi provinsi atau di bawahnya, dengan definisi yang sama dan wilayah penghitungan yang disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2018” ini merupakan publikasi yang membahas kinerja ekonomi melalui data PDRB beserta indeks turunannya serta berbagai aspek data terkait pada kurun waktu 2014 hingga 2018. Pembahasan analisis selain secara sektoral juga melakukan perbandingan antarprovinsi terdekat dan antarwilayah kabupaten/kota.

Analisis indeks turunan dalam publikasi ini, diantaranya: struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks perkembangan. Sementara analisis lintas sektor dilakukan dengan melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan beberapa indikator makro ekonomi dan indikator sosial ekonomi lainnya, seperti: inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan manusia, dan ketenagakerjaan. Untuk memperkaya pembahasan diantaranya juga melakukan identifikasi potensi ekonomi kabupaten/kota dan mendeteksi tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota. Pada akhir bab disajikan kesimpulan dari pembahasan analisis dan juga mencoba merumuskan rekomendasi kebijakan untuk tindaklanjut perencanaan dan implementasi program pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, Mei 2019

Badan Pusat Statistik  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala,

**Johanes De Britto Priyono**

## KATA SAMBUTAN

Perencanaan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan data dan indikator statistik sebagai evaluasi kinerja dari implementasi pembangunan. RPJMD dan RKPD juga merumuskan indikator-indikator sebagai tolok ukur capaian target pencapaian dan juga menjadi pijakan bagi perumusan rencana pembangunan yang akan datang.

Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2018”, sebagai produk kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis ini ditunggu-tunggu oleh lembaga eksekutif dan legislatif daerah karena merupakan salah satu bahan untuk menyusun kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun-tahun mendatang. Hasil analisis dalam publikasi ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi realisasi dari target indikator pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Melalui analisis data PDRB dan indikator turunannya, potensi perekonomian daerah terukur dan teridentifikasi. Di samping itu analisis yang mengaitkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketenagakerjaan, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antardaerah serta capaian pembangunan manusia menjadikan publikasi ini layak menjadi acuan baik oleh pemerintah daerah maupun peneliti untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan lebih mendalam. Konteks pembangunan DIY yang unik, yang terpotret di satu sisi indikator-indikator mencerminkan prestasi yang membanggakan namun di sisi lain mencerminkan kondisi yang masih memerlukan kerja keras untuk memperbaiki format perencanaan dan implementasi pembangunan di wilayah D.I. Yogyakarta di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerja sama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu menghasilkan dokumen yang bermanfaat untuk evaluasi dan rumusan perencanaan pembangunan. Dampak lain dari hasil analisis ini adalah bermanfaat mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala,

**Budi Wibowo**



## ABSTRAKSI

Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara makro membaik. Kondisi ini direfleksikan oleh tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat seiring dengan terkendalinya inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah pada posisi yang aman.

Situasi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi. Perkembangan kinerja perekonomian DIY selama lima tahun terakhir, yaitu dari 2014 hingga 2018, telah membawa perubahan skala pertumbuhan ekonomi DIY di level atas dibanding provinsi-provinsi lain. Pada tahun 2018 nilai PDRB Provinsi DIY atas dasar harga berlaku mencapai Rp129,88 triliun, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp98,03 triliun. Selama setahun terakhir perekonomian DIY atas dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 6,20 persen. Sementara bila dikaji selama lima tahun terakhir, perekonomian tumbuh rata-rata sebesar 5,36 persen per tahun. Kategori-kategori usaha yang rata-rata pertumbuhannya di atas 6 persen adalah konstruksi (F), informasi dan komunikasi (J), jaa lainnya (RSTU), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (I).

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat juga mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2018 struktur ekonomi DIY ditopang oleh tiga kategori dengan pangsa distribusi terbesar, yaitu industri pengolahan (C), konstruksi (F), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (I), masing-masing sebesar 12,99 persen, 10,28 persen, dan 10,22 persen. Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) sebesar 9,78 persen, dan sehingga turun di urutan keempat.

Nilai PDRB per kapita riil (atas dasar harga konstan 2010) tahun 2018 sebesar Rp25,67 juta. Selama lima tahun terakhir PDRB per kapita riil meningkat sebesar Rp3,9 juta, atau tumbuh rata-rata sebesar 4,20 persen per tahun. PDRB DIY belum terbagi secara merata wilayah kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari ukuran ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota (Indeks Williamson) dan juga ketimpangan pendapatan penduduk (Rasio Gini).

Pada tahun 2018 (September 2018), penduduk miskin DIY masih sekitar 11,81 persen dari jumlah penduduk. Demikian pula distribusi pendapatan antarpenduduk DIY masih terjadi ketimpangan meskipun dalam skala moderat, yaitu angka Rasio Gini sebesar 0,42. Indeks ketimpangan antarwilayah yang diukur dengan Indeks Williamson juga mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar karena kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah semakin kecil menerima bagian distribusi pendapatan (tren lima tahun terakhir).

*Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, ketimpangan pendapatan antarwilayah (Indeks Wiliamson), ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), dan kemiskinan.*



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Sambutan .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Dasar Pelaksanaan .....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Sasaran .....	7
E. Manfaat.....	7
F. Lokasi Kegiatan.....	7
G. Sumber Pendanaan .....	7
H. Tenaga Ahli dan Pendukung .....	8
I. Rencana Kerja .....	8
J. Lingkup Pekerjaan .....	8
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pembangunan .....	11
1. Konsepsi Pembangunan .....	11
2. Pembangunan Kewilayahan .....	12
3. Pembangunan Manusia .....	13
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
1. Definisi PDRB .....	15
2. Pendekatan Penghitungan .....	15
3. Metode Penghitungan .....	16
4. Turunan PDRB .....	18
5. PDRB menurut Lapangan Usaha.....	19
6. PDRB menurut Pengeluaran.....	20
7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008 .....	22



C. Indikator Utama Pembangunan di DIY .....	23
1. Pertumbuhan Ekonomi .....	23
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi .....	25
3. Ketimpangan (Disparitas) .....	25
4. Kemiskinan .....	32
D. Ketenagakerjaan dan Pengangguran .....	33
1. Ketenagakerjaan .....	35
2. Pengangguran .....	38
<b>III METODOLOGI.....</b>	<b>39</b>
A. Sumber Data .....	41
B. Kerangka Pikir Analisis .....	41
C. Indikator Penyajian PDRB .....	42
1. Distribusi Persentase .....	42
2. PDRB per Kapita .....	42
3. Indeks Perkembangan .....	42
4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan) .....	42
5. Indeks Harga Implisit .....	43
6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi Harga Produsen) ...	43
D. Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY .....	43
1. Pertumbuhan, Rata-rata Pertumbuhan, dan Andil Pertumbuhan Ekonomi	43
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi/Deflasi .....	46
3. Indikator Ketenagakerjaan dan Pengangguran .....	47
4. Indikator Kemiskinan .....	51
5. Indikator Ketimpangan (Disparitas) .....	54
<b>IV. PDRB Menurut Lapangan Usaha .....</b>	<b>61</b>
A. Struktur Perekonomian PDRB .....	63
B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan .....	67
1. Pertumbuhan menurut Kategori .....	67
2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota .....	71
C. PDRB Per Kapita .....	73
D. Indeks Perkembangan Kategori .....	74
E. Perbandingan Nilai PDRB Antarkabupaten/Kota .....	75



F. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi .....	79
<b>V. PDRB Menurut Pengeluaran .....</b>	<b>83</b>
A. Struktur PDRB Pengeluaran .....	85
1. Konsumsi Rumah Tangga .....	85
2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) .....	89
3. Konsumsi Pemerintah .....	89
4. Investasi .....	90
5. Ekspor dan Impor .....	93
B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran .....	94
<b>VI. Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY .....</b>	<b>97</b>
A. Pertumbuhan Ekonomi .....	99
1. Pertumbuhan Ekonomi .....	99
2. Sebaran Pertumbuhan Ekonomi .....	102
B. Stabilitas Harga .....	105
1. Perbandingan Laju Inflasi Yogyakarta dan Nasional .....	105
2. Andil Inflasi Kelompok dan Subkelompok Konsumsi .....	108
3. Perubahan Harga dan Andil Inflasi Terbesar Beberapa Komoditas terhadap Inflasi Yogyakarta .....	109
C. Ketenagakerjaan dan Pengangguran .....	111
1. Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio/DR</i> ) .....	111
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	113
3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	114
4. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) .....	116
5. Produktivitas Tenaga Kerja .....	117
6. Pengurangan Angka Pengangguran .....	121
7. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran .....	121
D. Kemiskinan dan Ketimpangan .....	123
1. Perkembangan Kemiskinan .....	123
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan .....	126
3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	127
E. Pembangunan Manusia .....	129
1. Perkembangan dan Posisi Pembangunan Manusia DIY .....	129

2. Kualitas Hidup .....	130
3. Kualitas Pengetahuan .....	131
4. Standar Hidup Layak .....	132
5. Capaian IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	132
6. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemajuan Pembangunan Manusia .....	133
F. Potensi dan Disparitas Ekonomi Kewilayahan .....	134
1. Sektor Ekonomi Potensial di Kabupaten/Kota .....	134
2. Ketimpangan Regional .....	136
3. Disparitas Sektoral ( <i>Shift Share Analysis</i> ) .....	137
<b>VII. Kesimpulan dan Rekomendasi .....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan .....	145
B. Rekomendasi .....	148
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>149</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>153</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2014 – 2018 .....	56
Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori, Rata-rata Pertumbuhan per Tahun, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2018 di DIY (persen), 2014-2018.....	60
Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun, dan Andil Pertumbuhan 2018 di DIY (persen), 2014-2018 .....	64
Tabel 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita DIY, 2014–2018.....	65
Tabel 4.5. Indeks Perkembangan PDRB DIY menurut Kategori, 2014-2018 (2010=100) .....	67
Tabel 4.6. Nilai PDRB Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2014–2018 .....	68
Tabel 4.7. Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2018***) .....	70
Tabel 4.8. Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di DIY (persen), 2016-2018 .....	71
Tabel 4.9. Nilai PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2014 - 2018 .....	72
Tabel 4.10. Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2018 .....	73
Tabel 5.1. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2014–2018 .....	80
Tabel 5.2. Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2014–2018.....	81
Tabel 5.3. Struktur PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2014–2018 .....	82
Tabel 5.4. Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2014–2018 .....	85
Tabel 5.5. Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2014–2018..	88
Tabel 6.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2018 (Persen) .....	95
Tabel 6.2. Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran	100

Tahun 2018 (Persen) .....	
Tabel 6.3. IHK, Inflasi, dan Andil Per Kelompok dan Subkelompok Kota Yogyakarta (2012=100), tahun 2018 .....	101
Tabel 6.4. Perubahan Harga dan Andil 10 Besar Barang Terhadap Inflasi Kota Yogyakarta 2018 .....	103
Tabel 6.5. TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2018*) .....	109
Tabel 6.6. Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY (persen), 2014-2018 .....	110
Tabel 6.7. Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2014–2018 .....	112
Tabel 6.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Penurunan Pengangguran di DIY (persen), 2014-2018 .....	117
Tabel 6.9. Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2014 - 2018 .....	124
Tabel 6.10. Indeks Pembangunan Manusia DIY menurut Komponen, 2014-2018 ....	126
Tabel 6.11. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2017-2018 .....	129
Tabel 6.12. Indeks LQ Tahun 2018 dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Analisis (RPa) 2014-2018 menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	131
Tabel 6.13. Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010–2018 .....	135
Tabel 6.14. Proportional Shift (PS) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014–2018 ....	136
Tabel 6.15. Different Shift (DS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2014–2018 .....	138
Tabel 6.16. Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2014-2018 .....	139
Tabel 6.17. Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2010-2018 .....	140

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan DIY (persen), 2011-2016 .....	3
Gambar 1.2. Perkembangan Laju Inflasi Nasional dan Kota Yogyakarta (persen), 2011-2017 .....	3
Gambar 3.1. Kerangka Pikir Analisis .....	33
Gambar 3.2. Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita .....	38
Gambar 3.3. Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja .....	41
Gambar 3.4. Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan .....	45
Gambar 3.5. Kurva Lorenz .....	47
Gambar 4.1. Produk Domestik Regional Bruto DIY (triliun rupiah), 2014-2018 .....	55
Gambar 4.2. Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2014- 2018.....	58
Gambar 4.3. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2018 .....	61
Gambar 4.4. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2018.....	62
Gambar 4.5. Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah), 2014-2018 .....	69
Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY (persen), 2014-2018 .....	81
Gambar 5.2. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di DIY, 2014-2018 .....	87
Gambar 6.1. Pertumbuhan Kategori-Kategori dengan Pangsa Terbesar dalam PDRB DIY (persen), 2014-2018 .....	92
Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran (persen) 2014-2018 .....	93
Gambar 6.3. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014 .....	96
Gambar 6.4. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018 .....	97
Gambar 6.5. Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional, 2008 – 2018 (persen) .....	98
Gambar 6.6. Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional 2018 (persen) .....	99



Gambar 6.7.	Komoditas Utama Penyumbang dan Penahan Inflasi Kota Yogyakarta 2018 .....	102
Gambar 6.8.	Angka Beban Tanggungan Penduduk Kabupaten/Kota dan DIY, 2010-2018 .....	105
Gambar 6.9.	Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah (persen), 2014-2018 .....	106
Gambar 6.10.	TKK dan TPT Penduduk DIY (persen), 2014-2018 .....	108
Gambar 6.11.	Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2014 .....	113
Gambar 6.12.	Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2018 .....	113
Gambar 6.13.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY (persen), 2014-2018 (Maret) .....	115
Gambar 6.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di DIY (persen), 2014-2018 .....	116
Gambar 6.15.	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2014 – 2018 .....	119
Gambar 6.16.	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di DIY, 2014 – 2018 .....	121
Gambar 6.17.	Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Laju Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di DIY, 2014-2018 .....	122
Gambar 6.18.	Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas Maret 2018 .....	123
Gambar 6.19.	Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40% Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY (persen) 2014–2018 .....	124
Gambar 6.20.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DIY dan Indonesia, 2010-2018 .....	126
Gambar 6.21.	Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota di DIY, 2014-2018 .....	130
Gambar 6.22.	Scatterplot Indeks LQ 2018 dan Rasio Pertumbuhan 2014-2018 menurut Kategori Usaha dan Kabupaten/Kota di DIY .....	132
Gambar 6.19.	Indeks Williamson DIY, 2014-2018 .....	133

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Manfaat
- F. Lokasi Kegiatan
- G. Sumber Pendanaan
- H. Tenaga Ahli dan Pendukung
- I. Rencana Kerja
- J. Lingkup Pekerjaan





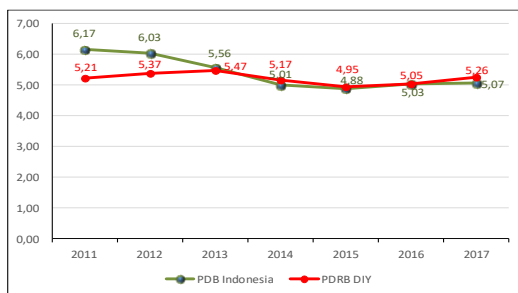


## BAB I PENDAHULUAN

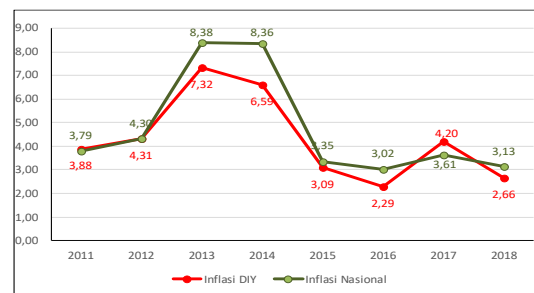
### A. Latar Belakang

Selama periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, perekonomian mengalami pertumbuhan yang kurang menggembirakan karena hingga 2015 tren perkembangannya menurun. Baru di tahun 2016 geliat pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan arah meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibanding nasional dalam kurun waktu 2013-2017 terlihat memiliki tren lebih baik (Gambar 1.1). Untuk itu di tahun 2018 pemerintah daerah memiliki keyakinan bahwa pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan meneruskan tren pertumbuhan yang terus meningkat.

Gambar 1.1.  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan DIY  
(persen), 2011-2017



Gambar 1.2.  
Perkembangan Laju Inflasi Nasional dan  
Kota Yogyakarta (persen), 2011-2018



Indikator makro ekonomi yang biasa didampingkan dengan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat atau inflasi harga atau biasa disebut inflasi saja. Kedua indikator ini mempunyai keterkaitan erat karena tingkat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga barang dan jasa. Sementara faktor yang mempengaruhi perubahan harga barang dan jasa adalah ketersediaan atau distribusi dan juga pola dikonsumsi masyarakat. Perkembangan perubahan harga konsumen atau inflasi selain menjadi tolok ukur stabilitas harga-harga barang dan jasa juga berpengaruh besar pada perubahan aktivitas berbagai bidang sektor ekonomi.

Fenomena perubahan harga barang dan jasa di tingkat konsumen di DIY direpresentasikan oleh inflasi Kota Yogyakarta. Selama kurun waktu 2011-2018 inflasi Yogyakarta mengalami fluktuasi. Periode 2011-2013 inflasi bergerak terus meningkat, namun setelah itu angka inflasi terus bergerak turun hingga hanya 2,29 persen di tahun 2016. Inflasi kembali meningkat di tahun 2017 menjadi sebesar 4,20 persen. Sejak tujuh tahun terakhir untuk pertama kalinya inflasi Kota Yogyakarta berada di atas angka inflasi

nasional. Inflasi Kota Yogyakarta menurun lagi menjadi 2,66 persen di tahun 2018 dan posisinya juga lebih rendah dibanding inflasi nasional (Gambar 1.2). Secara sederhana kenaikan inflasi menjelaskan adanya pergerakan dan peningkatan permintaan di pasar yang lebih tinggi dari ketersediaan sisi penawaran. Adanya peningkatan inflasi yang masih terkendali seperti yang terjadi di 2017 mencerminkan sinyal positif bahwa konsumsi masyarakat semakin menguat. Namun, bila tingkat inflasi tersebut menunjukkan gejala yang tinggi menunjukkan adanya instabilitas ekonomi di masyarakat.

Kinerja perekonomian secara makro membaik bila pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi terkendali, dan nilai tukar rupiah menguat. Inflasi terkendali artinya perubahan harga wajar tidak turun tajam dan tidak naik drastis. Inflasi yang terus menurun atau bahkan menjadi deflasi dalam kurun waktu yang berkelanjutan mencerminkan perekonomian yang tidak kondusif karena bisa jadi kondisi ekonomi sedang lesu dan geliat ekonomi sangat lemah. Sebaliknya, inflasi yang bergerak naik terus perlu diwaspadai karena menunjukkan tidak seimbangnya tingginya permintaan dengan persediaan jumlah barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi disebabkan di antaranya meningkatnya permintaan atau daya beli masyarakat, meningkatnya likuiditas atau uang beredar, meningkatnya biaya produksi barang atau jasa, adanya perilaku spekulasi, dan bisa juga karena adanya kekacauan ekonomi dan politik di suatu negara.

Oleh karena itu agar perekonomian bisa tumbuh dengan baik maka fluktuasi inflasi perlu dijaga untuk mendorong perekonomian tumbuh sehat. Sejak tahun 2011 hingga 2018 fluktuasi inflasi di Kota Yogyakarta lebih terjaga dibanding dengan angka inflasi nasional. Meskipun demikian di tahun 2016 menurut para pengamat ekonomi sedikit meresahkan karena terus melambat sehingga dapat mengancam aktivitas ekonomi. Namun kekhawatiran berakhir karena di tahun 2017 laju inflasi meningkat menjadi 4,20 persen. Artinya, dari sisi pasar barang dan jasa geliat perekonomian memperlihatkan adanya peningkatan. Selama tahun 2018, gejala harga-harga lebih terkendali dan inflasi kalender 2018 tercatat sebesar 2,66 persen. Kondisi ini mencerminkan kondisi geliat ekonomi yang kurang menggairahkan.

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI), berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengumumkan penutupan per 31 Desember 2018 rupiah berada di level Rp14.385 per dollar Amerika Serikat (AS). Sepanjang tahun 2018, sejak Januari hingga Desember, rupiah terdepresiasi 5,7%, demikian dijelaskan Nanang Hendarsah, Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI melalui keterangan tertulis, Senin (31/12/2018). Hal ini berarti bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas harga barang-barang dan jasa domestik yang dibutuhkan masyarakat meskipun kurs rupiah cenderung melemah.

Pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah pada hakekatnya dimaksudkan untuk menyejahteraan penduduknya. Untuk itu agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas maka harus ada peningkatan pemerataan distribusi pendapatan kepada penduduknya. Rasio gini merupakan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan penduduk. Rasio gini DIY tergolong tertinggi dibanding dengan provinsi-provinsi di Indonesia, meskipun masih di level moderat. Pada September 2017 rasio gini DIY sebesar 0,44, merupakan tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan rasio gini DIY selama periode 2010-2018 nilainya bertengger di sekitar angka 0,42 hingga 0,44 dengan tren perkembangan cenderung meningkat. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk tergolong tinggi. Dengan demikian permasalahan distribusi pendapatan masih menjadi masalah yang serius bagi pembangunan ekonomi di DIY.

Secara spasial, kondisi perekonomian wilayah di kelima kabupaten/kota DIY memang beragam. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tumbuh sebagai daerah perkotaan yang memiliki sarana dan prasarana ekonomi serta ragam sektor yang lengkap dibanding tiga kabupaten lainnya, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Oleh karena itu sangat tepat bila landasan tonggak pembangunan masa depan bergeser dengan menempatkan megaproyek di ketiga wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah yang hingga tahun 2016 masih terlihat tinggi meskipun masih dalam skala ketimpangan sedang. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota di DIY yang menggunakan ukuran Indeks Williamson perkembangannya cenderung menurun dari 0,476 tahun 2011 menjadi 0,466 di tahun 2016. Untuk itu pengurangan ketimpangan wilayah juga seharusnya menjadi prioritas penanganan permasalahan dalam pembangunan ekonomi di DIY.

Kemiskinan penduduk juga masih menjadi permasalahan pelik bagi pemerataan pembangunan di DIY. Meskipun perkembangan persentase kemiskinan dari tahun ke tahun sudah menunjukkan adanya tren menurun namun masih dalam kelompok provinsi dengan kemiskinan yang tinggi. Terlebih di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa persentase penduduk miskin DIY masih yang tertinggi. Untuk itu masih perlu menggali informasi yang lebih akurat untuk menemukan karakteristik dan kantong-kantong kemiskinan sehingga selanjutnya dapat memformulasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY dan indikator-indikator makro ekonomi-sosial seperti yang disebut di atas, dipandang perlu untuk menganalisis potensi ekonomi DIY. Melalui optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, Analisis PDRB diharapkan memberikan manfaat untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di DIY. Selain itu, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dalam analisis PDRB diharapkan searah dengan kerangka penyusunan perencanaan dan



mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 serta terapkan dalam pelaksanaan pembangunan tahunan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 008 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola;
11. Peraturan Kepala BPS Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA DIY Nomor: 46/DPA/2018.

**C. Maksud dan Tujuan****1. Maksud**

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY 2014-2018 adalah memperoleh data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di DIY.

**2. Tujuan**

Tujuan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Mengetahui struktur dan dinamika ekonomi DIY 2014-2018 berdasarkan PDRB tahun dasar 2010.
2. Menyediakan angka pertumbuhan ekonomi dan indeks turunan PDRB DIY lainnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-DIY periode 2014-2018.
3. Menyediakan analisis pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan capaian indikator makro ekonomi lainnya.
4. Menyediakan hasil analisis sektoral PDRB DIY dan antar wilayah kabupaten/kota periode 2014-2018.
5. Menyediakan kesimpulan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan akurasi perencanaan serta validitas implementasi program pembangunan.

**D. Sasaran**

Data PDRB DIY tahun 2014-2018 menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan dilengkapi data pendukung lain yang terkait, serta indikator ekonomi sosial lainnya.

**E. Manfaat**

Manfaat hasil Penyusunan Analisis PDRB DIY 2014–2018 adalah sebagai bahan evaluasi perencanaan dan implementasi program pembangunan. Selain itu rekomendasi menjadi bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan dan sasaran pembangunan daerah termasuk di kabupaten/kota se-D.I. Yogyakarta ke depan.

**F. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan pengumpulan data, penghitungan, dan analisis adalah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**G. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2018 seluruhnya dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2019 pada Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Bappeda D.I. Yogyakarta.

### H. Tenaga Ahli dan Pendukung

Dalam pelaksanaan Analisis PDRB DIY 2014-2018 ini menggunakan tenaga ahli dan pendukung yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah: yang terdiri dari unsur pimpinan di Bappeda DIY;
2. Tim Pelaksana: 60 orang dari BPS Provinsi DIY dan BPS Kabupaten/Kota se-DIY yang berpendidikan S3, S2, S1/D4, dan SLTA.
3. Konsultan Ahli: 1 orang dari Dosen/Fungsional Tertentu/Eselon II/III.

### I. Rencana Kerja

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan Analisis PDRB DIY 2014-2018, urutannya sebagai berikut:

1. Pemrosesan berkas-berkas Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);
2. Penyusunan metodologi pengumpulan data dan analisis;
3. Pengumpulan data sekunder;
4. Kompilasi dan pengolahan data;
5. Penghitungan indikator;
6. Analisis dan penyajian;
7. Penyerahan *draft* publikasi.

### J. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan penyusunan Analisis PDRB DIY 2014-2018 Tahun Anggaran 2019, meliputi:

1. Menyediakan angka PDRB DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY 2014-2018 menurut lapangan usaha dan penggunaan;
2. Menganalisis gambaran dan dinamika struktur perekonomian daerah serta peranan masing-masing kategori dan subkategori (kelompok) lapangan usaha;
3. Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi DIY menurut lapangan usaha dan juga penggunaan;
4. Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi kabupaten/kota di DIY;
5. Menganalisis kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan;
6. Menganalisis hubungan PDRB perkapita, disparitas pendapatan, dan disparitas regional;
7. Menganalisis tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk di DIY, wilayah perkotaan dan pedesaan termasuk pengangguran menurut tingkat pendidikan;
8. Menganalisis potensi ekonomi kabupaten/kota.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pembangunan
- B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- C. Kualitas Pertumbuhan
- D. Ketenagakerjaan dan Pengangguran





## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pembangunan

#### 1. Konsepsi Pembangunan

Konsep pembangunan di tahun 1970-an yang cukup populer adalah yang didefinisikan oleh Portes (1970), yang mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Situasi lingkungan juga mempengaruhi konsepsi pembangunan yang muncul. Di era tahun 1990-an, Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Konsepsi mengenai pembangunan juga dikemukakan Alexander (1994), yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Menurut Rogers (2011) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, maka makna terpenting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

## **2. Pembangunan Kewilayahan**

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu negara maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga mempunyai kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Pembahasan pembangunan ekonomi secara nasional dititikberatkan pada analisis ekonomi makro, sementara pembahasan pembangunan ekonomi di tingkat wilayah membahas kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ke berbagai lokasi dalam suatu ruang ekonomi (*economic space*) tertentu (Sukirno, 1976).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan atau kesempatan kerja baru serta untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Blakely, 1989 dalam Mudrajat Kuncoro, 2004). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang No 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi lain dari kedua UU tersebut yaitu adanya bagian pemberian kewenangan urusan, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Terkait dengan urusan pembiayaan, makna terpenting adalah daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber daya potensi ekonomi serta sumber daya alamnya tanpa adanya intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah sehingga kemajuan daerah lebih cepat tercapai.

Pembangunan suatu daerah juga mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Hoover dan Fisher (Nurcahyani, 2001) menyebutkan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi regional, meliputi: pertama, ekonomi subsisten. Dalam tahapan ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-sehari. Kehidupan penduduk sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian dan pengumpulan hasil-hasil alamnya.

Kedua, pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal. Pada tahap kedua ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana maupun sarana transportasi yang mengakibatkan terjadinya beberapa spesialisasi pada lokasi-lokasi tertentu. Di kalangan masyarakat petani timbul spesialisasi baru di luar pertanian dimana hasil produksi, bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian bersangkutan.

Ketiga, perdagangan antardaerah. Hal ini terjadi karena telah terdapat perbaikan dalam bidang transportasi dan terjadi perubahan-perubahan di sektor kegiatan dari arah produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititikberatkan ke intensifikasi. Hasil sampingannya juga dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk kegiatan industri pedesaan.

Keempat, industrialisasi. Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi dari peningkatan produksi pertanian dan produksi ekstraktif lainnya, daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja yaitu melalui industrialisasi yang lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri-industri manufaktur serta pertambangan dan galian.

Kelima, spesialisasi daerah. Dalam tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi kegiatan, baik barang dan jasa-jasa untuk keperluan penjualan ke daerah lain yang termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus lainnya.

Keenam, aliran faktor produksi antardaerah. Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya meningkatkan tingkat mobilisasi faktor produksi antardaerah.

Di awal era otonomi daerah, permasalahan pokok pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Bila dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan kurang akurat maka permasalahan ini berlarut-larut dan menyebabkan kemajuan perekonomian daerah berjalan di tempat. Energi sumber daya dan pembiayaan pembangunan yang seharusnya sudah dimanfaatkan untuk implementasi lanjut bagi pengembangan potensi daerah masih berkutat untuk menentukan skala prioritas kebijakan.

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely tersebut di atas pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur besaran nilai tambahnya yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Boediono (1999, 1), faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan kerja di daerah.

### **3. Pembangunan Manusia**

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.



Bank Dunia dalam terbitan laporannya menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah....memperbaiki kualitas kehidupan” (*World Development Report-World Bank, 1991*). Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan.

Pembangunan manusia dimaknai sebagai proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan salah satu indikator komposit untuk mengukur capaian atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas kehidupan manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ukuran IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi yang terakhir dilakukan pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* mulai tahun 2010.

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- **Umur panjang dan hidup sehat** (*a long and healthy life*)

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk pada saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat.

- **Pengetahuan** (*knowledge*)

Dimensi pengetahuan dalam IPM dibentuk oleh dua indikator pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan variabel stok atau akumulasi pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas).

- **Standar hidup layak** (*decent standard of living*)

Dimensi ketiga yang terangkum dalam ukuran IPM adalah standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli penduduk (harga konstan 2012).

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

## **B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **1. Definisi PDRB**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

### **2. Pendekatan Penghitungan**

#### **a. Pendekatan Produksi**

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Pengangkutan dan Pergudangan; I. Pengangkutan dan Komunikasi; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estat; M,N. Jasa

Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

### b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, dan ekspor neto.

### c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

**Angka PDRB** hasil perhitungan dari **ketiga pendekatan** tersebut **secara teoritis akan sama**. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar **harga pasar** karena mencakup **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

## 3. Metode Penghitungan

### a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung digunakan jika semua indikator lengkap, yaitu harga, output, dan biaya antara. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

### b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan). Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

**Revaluasi**

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

**Ekstrapolasi**

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2010. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2010, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

**Deflasi**

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

**Deflasi Berganda**

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia

secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

#### **4. Turunan PDRB**

##### **a. PDRB atas dasar Harga Pasar**

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah/ wilayah, termasuk penyusutan dan pajak tak langsung neto.

##### **b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar Harga Pasar**

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

##### **c. PDRN atas dasar Biaya Faktor**

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRN atas dasar biaya faktor disebut sebagai **Pendapatan Regional**.

##### **d. PDRB per Kapita**

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan **jumlah penduduk pada pertengahan tahun**. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil). Data penduduk yang digunakan adalah hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota berdasarkan SP2010. Data PDRB per kapita menunjukkan rata-rata nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada setiap penduduk wilayah tersebut. Namun PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah.

Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

### e. Indeks Perkembangan Kategori

Indeks perkembangan merupakan gambaran perkembangan nilai tambah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks perkembangan sektoral dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui sektor-sektor mana yang berkembang cepat, lambat atau bahkan menurun sejak tahun dasar (2010). Selanjutnya, dengan menelusuri besaran indeks ini akan dapat diketahui sektor yang prospektif pada masa yang akan datang.

Supaya hasilnya dapat dibandingkan secara nasional, analisis makro ekonomi suatu daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa indikator analisis perekonomian nasional. Namun tidak semua analisis perekonomian nasional dapat diterapkan secara mutlak di tingkat regional, sehingga perlu dipahami perbedaan prinsipnya. Satu contoh yang secara nyata membedakan *region* dengan *nation* adalah bahwa *region* tidak mempunyai kedaulatan sebagaimana *nation*. Hal ini menyebabkan adanya **keterbukaan hubungan antar-region**, sehingga arus barang dan jasa antardaerah sangat bebas, tidak seperti *nation* di mana arus barang dan jasa dari dan ke luar negeri harus melalui pihak bea dan cukai. Keterbukaan antar-region ini menyebabkan teori ekonomi tertutup sangat sulit diterapkan pada tingkat regional. Di satu sisi, keterbukaan antar-region memungkinkan hubungan spasial yang sangat kuat antar *region*. Adanya hubungan spasial tersebut menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah di sekitarnya baik positif maupun negatif. Korelasi spasial tersebut sebenarnya dapat lebih akurat bila dilihat dari hasil analisis *spillover effect*, namun analisis tersebut tidak dilakukan dalam analisis PDRB ini.

Semenjak era otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota memiliki hak untuk mengatur sendiri kebijakan fiskal sekaligus menentukan arah pembangunannya. Sehingga perkembangan kinerja perekonomian daerah/wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh masing-masing pembuat kebijakan (*decision maker*).

### 5. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 17 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.



Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam **Sektor Primer**. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam **Sektor Sekunder**. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai **Sektor Tersier**.

## **6. PDRB menurut Pengeluaran**

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

### **a. Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun. Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil pengolahan SUSENAS BPS Provinsi DIY. Sementara untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi (harga konsumen) diperoleh dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS Provinsi DIY.

### **b. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)**

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

### **c. Konsumsi Pemerintah**

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran

pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3 dari BPS. Apabila diteliti lebih jauh maka pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya. Subsidi tidak dimasukkan, karena pengeluarannya merupakan transfer.

Kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah dan tidak termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

#### **d. Investasi**

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTDB dibedakan atas pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi, pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan/kendaraan, dan pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTDB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing pelaku usaha (17 sektor). Sementara kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang (*commodity flows*).

Perkiraan nilai PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke region dan barang modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/ bangunan. Sementara perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga konstan tahun 2010 diperoleh dengan cara mendeflate/ membagi nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga berlaku dengan IHPB barang impor, dan dengan IHPB sektor industri untuk barang modal antar pulau. Data mengenai investasi diperoleh dari BI Yogyakarta dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Pemda DIY.

Pengertian inventori adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik

barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Perubahan inventori/stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai inventori/ stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai inventori/stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan).

#### **e. Ekspor dan Impor**

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

### **7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008**

Selama satu dekade terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan regional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional dan regional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar tersebut dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *2008 System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Table* (SUT).

Implikasi dari perubahan harga tahun dasar memberikan dampak, antara lain: meningkatkan nominal PDB/PDRB yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara/wilayah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi, dan pergeseran struktur perekonomian. Dampak lain adalah merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi, dan juga berdampak pada perubahan input data untuk *modelling* dan *forecasting*.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut: secara umum perekonomian Indonesia relatif stabil; selama 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi perubahan struktur ekonomi terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun; teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008; tersedianya sumber data baru untuk perbaikan

PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan indeks harga produsen (*producer price index/PPI*); dan tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB/PDRB.

### C. Indikator Utama Pembangunan di DIY

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah terlalu bermakna. Namun meraih keduanya secara bersamaan bukanlah perkara mudah. Para ekonom pun punya pandangan berbeda mengenai hal ini. Mengorbankan pemerataan seringkali diperlukan guna meraih pertumbuhan, kata para ekonom penganut aliran *capital fundamentalism*. Pertumbuhan hanya bisa berlangsung ketika ketimpangan justru eksis dalam masyarakat, terutama pada fase awal pembangunan, kata ekonom Simon Kuznets, 60 tahun lampau.

Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitman Rostow (1916-1979) yang juga diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru telah menimbulkan permasalahan kesenjangan distribusi pendapatan yang menganga. Di samping itu tahapan pembangunan juga telah menimbulkan kesenjangan sosial dan afiliasi politik yang berujung terjadinya krisis ekonomi dan sosial di tahun 1998.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (*stagnasi*). Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Teori pertumbuhan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut Sukirno (1997), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Todaro (2015) mengatakan, ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pendapatan yang diinvestasikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) yang pada akhirnya akan diinvestasikan lagi dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Kondisi demikian akan memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan kerja secara umum. Sementara kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal secara lebih produktif.

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam mencapai pembangunan secara makro atau agregasi dari semua lapangan usaha. Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, biasanya dicantumkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Laju dan andil pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB, dapat diamati dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Jika diterapkan dalam analisis spasial kewilayahan kabupaten/kota maka akan diperoleh posisi relatif kemajuan pembangunan suatu kabupaten/kota dalam lingkup wilayah yang lebih besar.

Tingkat keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*). Laju pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun berikutnya. Metode ini sudah menghilangkan

faktor kenaikan harga dalam penghitungan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya (*the real economic growth*). Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi dari nilai PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, dianggap kurang tepat karena dalam PDB/PDRB harga berlaku tersebut masih dipengaruhi oleh perubahan harga.

## **2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi**

IHK merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 komoditas. Untuk Kota Yogyakarta mencakup 398 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

Laju inflasi/deflasi adalah persentase perubahan indeks setiap bulan diperoleh dengan cara mengurangkan indeks (IHK subkelompok/kelompok/umum) suatu bulan dengan indeks (IHK subkelompok/kelompok/ umum) bulan sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan indeks (IHK subkelompok/kelompok/umum) bulan sebelumnya dan dikalikan 100.

## **3. Ketimpangan (Disparitas)**

Menurut Arsyad (1997), penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan kebebasan untuk memilih. Uppal dkk, (1986), mengatakan bahwa penurunan kesenjangan antar daerah dapat disebabkan karena adanya alokasi dana pembangunan, antar lain seperti misalnya transfer pemerintah pusat melalui berbagai grant dan pengeluaran pemerintah pusat di masing-masing provinsi melalui daftar isian proyek (DIP).

Pendiri ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo (dalam Lipsey, 1985), sangat memperhatikan distribusi pendapatan di antara tiga kelas sosial yang besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka menentukan tiga faktor produksi : tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas dalam masyarakat. Smith dan Ricardo tertarik pada apa yang menentukan pendapatan masing-masing kelompok dari pendapatan nasional, dan bagaimana suatu pertumbuhan dalam pendapatan nasional mempengaruhi distribusi pendapatan ini. Teori ini meramalkan bahwa kalau masyarakat mengalami perkembangan tuan tanah akan menjadi makmur dan kapitalis akan menjadi semakin melarat.



**Ketimpangan (Disparitas) Antarwilayah**

Ketimpangan antarwilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada pula yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor infrastruktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah kepada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan wilayah yang seimbang adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/daerah belakang sehingga taraf hidupnya sejajar atau setara dengan taraf hidup penduduk di wilayah perkotaan/maju melalui pembangunan sektor pertanian, industri, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Alam, 2006).

Setiap wilayah memiliki potensi lapangan usaha unggulan yang berbeda-beda yang akan diintegrasikan dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih efisien dan memiliki daya saing. Identifikasi potensi lapangan usaha potensial atau unggulan setiap wilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur potensi ekonomi suatu wilayah adalah metode *Economic Base Approach*. Metode ini mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan setiap lapangan usaha serta mengelompokkannya menjadi lapangan usaha unggulan dan non unggulan. Pendekatan yang paling populer digunakan adalah menggunakan indeks *Location Quotient* atau LQ, analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis kuadran. Indeks LQ lebih mengkaji potensi setiap kategori usaha dari sisi andil, sementara MRP mengkaji potensi dari sisi pertumbuhan setiap kategori usaha. Dalam analisis MRP nilai rasio pertumbuhan daerah analisis ( $RP_a$ )  $> 1$  menggambarkan bahwa kategori usaha tersebut memiliki potensi pada level regional. Sebaliknya, jika  $RP_a \leq 1$  menggambarkan kategori usaha tersebut tidak potensial pada level regional. Berdasarkan nilai indeks LQ dan  $RP_a$  dapat disusun sebuah *scatterplot* yang menggambarkan sebaran potensi setiap kategori usaha menurut wilayah dari sisi *share* secara ekonomi maupun dari sisi pertumbuhan. Lapangan usaha yang potensial akan memiliki nilai Indeks LQ  $> 1$  dan nilai  $RP_a > 1$  atau terletak di kuadran I. Sebaliknya, lapangan usaha yang tidak potensial akan memiliki nilai Indeks LQ  $\leq 1$  dan nilai  $RP_a \leq 1$  atau terletak di kuadran III.

Menurut Yadiansyah (2007), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Indonesia adalah, yang pertama: konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan

pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terpusat di Pulau Jawa, sehingga membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi provinsi di luar Jawa, khususnya Indonesia Bagian Timur. Kedua, alokasi investasi. Pola distribusi nilai tambah industri antardaerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Terpusatnya investasi di Pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa (Tambunan, 1996).

Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarpulau. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antardaerah. Keempat, yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran "klasik" sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA-nya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik di banding daerah di luar Jawa yang miskin SDA, tetapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi. Kelima, adalah perbedaan kondisi demografis antardaerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan antardaerah. Ketidklancaran ini disebabkan terutama oleh keterbatasan sarana prasarana transportasi dan komunikasi, perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input antara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa jadi terganggu.

Tambunan (2001) mengatakan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis "*development gap*" atau "disparitas" antar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, yaitu:

- a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Konsumsi rumah tangga per kapita.

Asumsi yang digunakan untuk menganalisis konsumsi rumah tangga per kapita adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran tidak berubah.

- c. *Human Development Index*.

Asumsi semakin baik pembangunan di wilayah, maka semakin tinggi HDInya.

- d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB.

Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

- e. Struktur Fiskal.

Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, dilihat dari pendapatan riil perkapita yang tinggi, penerimaan pemerintah daerah tersebut (PAD asli) juga tinggi.

Selain itu, menurut Tambunan (2001), distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan akan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pengsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

### **Ketimpangan Antarwilayah dengan Indeks Williamson**

Berdasarkan data PDRB per kapita kabupaten/kota dan provinsi serta data jumlah penduduk dapat diukur indikator ketimpangan antarwilayah dalam provinsi. Salah satu indikatornya adalah Indeks Williamson, yang dimaknai sebagai tingkat ketimpangan antarkabupaten/kota.

Untuk memahami konvergensi dan divergensi dalam perkembangan suatu wilayah, Williamson mengamati tingkat kesenjangan diberbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan data PDB perkapita serta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat perkembangan ekonomi (berdasarkan tingkat PDB) negara-negara tersebut dari Kuznets. Berdasarkan penggabungan kedua perhitungan tersebut, Williamson menyatakan bahwa ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional. Tingkat ketidaksamaan regional adalah sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Dapat dikatakan juga bahwa pada waktu tingkat perkembangan perekonomian suatu negara masih rendah, maka tingkat kesenjangan pun semakin rendah (nilai CV rendah). Nilai CV ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan ekonomi negara semakin tinggi maka nilai CV-nya semakin rendah. Bagi negara-negara yang telah maju ternyata nilai CV-nya rendah, seperti negara-negara yang sangat belum berkembang. Apabila

hubungan antara Indeks Williamson dengan perkembangan ekonomi digambarkan dengan grafik, maka grafik tersebut akan berbentuk huruf U terbalik (Williamson, 1975).

Menurut Williamson (1975), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antarwilayah, yaitu :

a. *Labor Migration* ( Perpindahan Tenaga Kerja)

Perpindahan tenaga kerja antar daerah mungkin sangat selektif karena baik oleh hambatan keuangan dari pada tingkat pendapatan yang rendah atau kelambanan tradisional di masyarakat pedesaan, dan daerah non industri yang miskin. Orang-orang yang pindah mungkin ditandai sebagai orang-orang yang bersemangat dan berjiwa *entrepreneur*, terdidik dan mempunyai keterampilan dan dalam unsur-unsur produktif. Perpindahan penduduk yang selektif semacam ini akan memberikan penekanan terhadap adanya tendensi kearah terpencarnya pendapatan regional, tingkat partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin. Lebih dari itu, *human capital* yang berharga cenderung mengalir keluar dari daerah miskin ke daerah kaya yang membuat sumber-sumber regional perkapita yang dimiliki akan lebih pincang dan ketidaksamaan akan lebih besar.

b. *Capital Migration* (Perpindahan Modal)

Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. Faedah eksternal ekonomis dan faedah umum yang berasal dari aglomerasi dari proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal dari daerah miskin, hal ini cenderung memperjelas ketidaksamaan regional dan memperluas perpecahan antar daerah kaya dan daerah miskin. Resiko yang tinggi, kekurangan kemampuan *entrepreneur*, dan pasar modal yang belum berkembang boleh jadi akan menekan kegiatan investasi dan akumulasi modal di daerah miskin.

c. *Central Government Policy* (Kebijakan Pemerintah Pusat)

Pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menimbulkan peningkatan ketidaksamaan regional. Jika keadaan politik di wilayah yang miskin kurang memuaskan maka pemerintah pusat dapat saja mengalihkan investasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar. Tetapi apabila pemerintah pusat cenderung berlaku adil maka kebijaksanaannya dapat mengurangi kesenjangan ini. Dengan memperhatikan pola investasi regional pemerintah pusat, hendaknya jelas bahwa setelah pembangunan berlangsung, maka investasi pemerintah diharapkan semakin berkurang, dan dalam banyak hal investasi pemerintah akan dibiayai oleh investasi sebelumnya.

d. *Interregional Linkages* ( Keterkaitan antar Daerah)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada permulaan pembangunan mungkin efek menyebar dari perubahan teknologi dan perubahan sosial serta pengandaan pendapatan adalah kecil., tetapi selanjutnya diharapkan pada saat pembangunan telah berjalan, peningkatan disuatu daerah akan memberikan efek yang menyebar ke daerah di sekitarnya.

### **Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Menurut Ray (1998) ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antargolongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antardaerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antaradaerah perkotaan dan daerah pedesaan bisa dilihat dari segi perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari dua indikator, yaitu: perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita di daerah perkotaan dan pedesaan dan disparitas dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan (perbedaan dalam pendapatan rata-rata antarakedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antardaerah adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antardaerah.

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Beberapa ukuran yang cukup populer dan digunakan dalam kajian ini mencakup Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan Kriteria Bank Dunia. Ketiga ukuran ini cukup mampu menjelaskan besaran ketimpangan secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga tingkat perubahan dari tahun ke tahun dapat diamati.

Ketimpangan pendapatan antarindividu penduduk yang diukur menggunakan Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia cukup populer digunakan sebagai salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain indikator disparitas pendapatan antar individu, disparitas pendapatan antar wilayah juga perlu dicermati sebagai indikator ketimpangan antar kabupaten/kota.

### **Ketimpangan (Disparitas) Sektoral**

Berdasarkan kategori lapangan usaha ekonomi suatu daerah mempunyai ciri khas yang unik antara yang satu dengan yang lainnya. Besaran kinerja hasil output sektor ekonomi daerah tersebut membuat perbedaan skala ekonomi antardaerah dan bila perbedaan tersebut mencolok timpang maka menimbulkan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan yang signifikan dari pendapatan masing-masing sektor ekonomi.

Kesenjangan output antarkategori dalam perekonomian dikenal dengan istilah disparitas sektoral dan dikaji dengan analisis pergeseran (*shift share analysis*). Analisis *shift share* juga berguna untuk mengkaji pergeseran serta peranan perekonomian di suatu daerah. Model ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah tertentu dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Di samping itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang lebih tinggi.

Implementasi analisis *shift share* perekonomian dalam provinsi, disparitas sektoral dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dampak pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di sekitarnya, dampak pertumbuhan ekonomi provinsi acuannya, dan juga karena kemampuan pelaku ekonomi dalam kabupaten/kota itu sendiri. Berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi, maka dipengaruhi oleh peran kabupaten/kota terhadap provinsi dan juga hubungan antarsektor atau kategori. Suatu kabupaten/kota atau sektor di kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, belum tentu memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan provinsi acuannya, karena tergantung pada perannya terhadap provinsi juga.

**a. Analisis Pangsa Regional (PR)**

Pemilihan periode waktu dalam analisis *shift share* sangat menentukan hasil atau output. Artinya, untuk suatu periode yang dipilih dengan periode yang lain memungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan. Oleh karena itu dalam analisis ini, analisis *shift share* digunakan untuk mengkaji struktur perekonomian beserta perubahannya selama periode 2010-2018. Pertimbangan dipilihnya periode tersebut adalah untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dalam periode satu windu terakhir. Bila periode yang diamati terlalu pendek, maka pergeserannya struktur ekonomi tidak terlihat begitu nyata. Pangsa Regional (PR) merupakan komponen andil pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi nasional atau regional yang lebih tinggi.

**b. Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)**

Analisis pergeseran dalam analisis *shift share* dapat digunakan untuk meneliti struktur ekonomi dan perubahannya sebagai indikator kegiatan ekonomi dalam periode 2010-2018. Komponen analisis pergeseran (*Shift Analysis*) terdiri dari nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Different Shift* (DS). Kelompok pertama (Kuadran I) merepresentasikan daerah yang perekonomiannya maju pesat. Kelompok kedua (Kuadran II) mencakup daerah yang memiliki nilai PS bertanda positif dan nilai DS bertanda negatif. Kuadran II ini merepresentasikan daerah yang perekonomiannya cenderung berpotensi. Kelompok ketiga (Kuadran III) mencakup daerah yang memiliki nilai PS dan DS dengan arah negatif dan merepresentasikan daerah yang perekonomiannya tertinggal dan memiliki daya saing lemah. Kelompok keempat (Kuadran IV) mencakup daerah dengan nilai PS negatif



dan nilai DS positif. Kuadran IV ini merepresentasikan daerah yang perekonomiannya sedang berkembang atau tumbuh.

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan suatu situasi pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber daya berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, heterogenitas karakteristik suatu wilayah menjadi pemicu ketimpangan antardaerah atau antarsektor di suatu wilayah. Masalah ketimpangan ekonomi antardaerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi. Ardani (1992) mengemukakan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

#### **4. Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali DIY. Dimensi persoalan kemiskinan sangat terkait dengan berbagai aspek seperti kesenjangan pendapatan penduduk, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, ketimpangan, dan permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan selalu menjadi primadona yang mewarnai proses pembangunan di semua wilayah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau kesuksesan kepemimpinan di suatu wilayah sering dikaitkan dan diukur dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan. Namun, kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan dapat diukur menggunakan dua pendekatan yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Sementara, kemiskinan relatif mencakup kondisi seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seseorang atau sekelompok

orang disebut hampir miskin, bila sebelumnya berkecukupan menjadi hampir miskin karena kondisi usahanya yang merosot.

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Kemiskinan yang disajikan dalam pembahasan merupakan kemiskinan yang diukur dengan pendekatan absolut. Angka kemiskinan ini sudah dirilis secara berkala oleh BPS dan digunakan secara resmi oleh pemerintah.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk nominal uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nilai kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Penghitungan garis kemiskinan menggunakan data dasar hasil survei pengeluaran rumah tangga Susenas yang dilakukan secara berkala. Seseorang dianggap miskin jika memiliki pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan. Melalui pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain seperti **indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau  $P_1$ )** dan **indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau  $P_2$ )**. Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran  $P_1$  dan  $P_2$  dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

#### D. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan subyek yang paling penting dalam pembangunan di sebuah negara atau wilayah. Mulai sektor ekonomi, sosial, budaya,

hingga ke sektor politik. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan masalah pekerjaan baik masalah pekerjaan itu sendiri, tenaga kerjanya, upah, hingga masalah yang ada pada sektor.

Permasalahan yang biasanya muncul dalam pembangunan terkait kependudukan, antara lain: angka kelahiran atau kematian yang tinggi, eksodus migrasi, persebaran yang tidak merata, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, tingkat pendidikan yang rendah, pemukiman kumuh, tingkat kesehatan yang rendah, dan lain-lain. Sementara isu yang biasa muncul dalam hal ketenagakerjaan di antaranya adalah pengangguran, upah yang minimum, dan lapangan atau kesempatan kerja yang minim.

Sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam pembangunan ekonomi, permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan, perumusan program, dan implikasi pembangunan. Pembahasan berikut akan mengurai permasalahan penting yang dapat menjadi penyebab berbagai simpul permasalahan yang mempengaruhi hasil akhir pembangunan yang diukur dengan PDRB.

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Dalam proses transisi demografi, periode perubahan dibagi atas empat tahap. *Tahap Pertama*, adalah periode dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sama-sama tinggi. Pada *tahap kedua*, karena adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan, tingkat kematian menurun. Namun penurunan yang terjadi pada tingkat kematian ini tidak disertai dengan penurunan tingkat kelahiran, akibatnya pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Pada *tahap ketiga*, penurunan tingkat kematian diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berpikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada tahap akhir proses transisi ini baik tingkat kelahiran maupun tingkat kematian sudah tidak banyak berubah lagi. Angka kelahiran dan kematian yang secara alamiah memang harus terjadi. Akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah (Susanti, 1995).

Apabila proses transisi demografi dikaitkan dengan proses peningkatan pendapatan perkapita, maka pada awal proses pembangunan peningkatan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan penurunan angka kematian yang begitu cepat daripada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kematian yang cepat ini disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat ini juga akan menyebabkan penerimaan pajak pemerintah

meningkat, dan hal ini tentu saja memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, akibat lain dari penurunan angka kematian yang lebih cepat daripada penurunan angka kelahiran adalah tingginya jumlah penduduk usia muda dan usia tua pada struktur penduduk menurut umur, akibat dari hal ini adalah jumlah penduduk yang hidupnya ditanggung oleh penduduk usia kerja menjadi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita, perubahan pada aspek sosial-ekonomi dan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kelahiran juga akan turun dengan cepat. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk menurun dan dengan sendirinya jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja akan menurun.

### **1. Ketenagakerjaan**

Menurut konsep BPS, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja ( contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen.

Menurut Tambunan (1996), tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun yang kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Angkatan kerja adalah penduduk yang berdasarkan usia sudah bisa bekerja. Menurut Subri (2003), tenaga kerja adalah usia kerja ( berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan itu dapat berupa lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja dan lebih besarnya permintaan di banding penawaran tenaga kerja.

Sementara menurut Ananta (1990), tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun ke atas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang dan jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Thomas Robert Malthus dalam Albert WS Kusen (2013), menyebutkan bahwa ukuran pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika Pendapatan Nasional Bruto (PNB) potensialnya meningkat. Sektor yang paling dominan adalah sektor industri dan pertanian. Jika output di kedua sektor itu ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa di tingkatkan. Menurut Thomas Robert Malthus ada dua faktor yang sangat menentukan pertumbuhan yaitu faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi; dan juga faktor nonekonomis seperti keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Tetapi, diantara faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor akumulasi modal.

Meski relasi antara pertumbuhan dan ketimpangan telah memicu debat panjang para ahli, namun tetap ada keinginan kuat untuk "mengawinkan" keduanya. Oleh karena kompleksitasnya permasalahan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ini, dalam dua dekade terakhir telah memunculkan sejumlah gagasan konseptual agar implikasi pembangunan lebih baik, mulai dari *redistribution with growth*, *the quality of growth*, *broad-based growth*, *pro-poor growth*, hingga *inclusive growth*. Analisis PDRB ini hanya berfokus membahas tentang konsep kualitas pertumbuhan (*the quality of growth*).

### **1.1. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio/DR*)**

Angka beban tanggungan dikenal juga sebagai angka ketergantungan, beban ketergantungan, atau rasio ketergantungan. Angka ini menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif (kelompok umur 15-64 tahun) yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi dibagi golongan umur non produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas). Angka ketergantungan memberikan makna jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung setiap 100 orang penduduk yang produktif secara ekonomis.

### **1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Salah satu faktor produksi yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, dan juga dari pengalaman. Tenaga kerja

seperti ini sangat diperlukan oleh dunia usaha karena merupakan modal manusia (*human capital*) untuk meningkatkan produktivitas, yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

TPAK menggambarkan ketersediaan angkatan kerja diantara penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Ketersediaan angkatan kerja menunjukkan kemampuan penduduk dalam beraktivitas secara ekonomi, karena mencakup jumlah penduduk yang bekerja dan penduduk yang berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Sebagai pembanding adalah penduduk usia kerja atau berumur 15 tahun ke atas.

### 1.3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka TKK merupakan indikator ketenagakerjaan yang lebih spesifik. Angka ini menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian karena TKK merupakan bagian angkatan kerja yang benar-benar bekerja untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan. Oleh karena itu TKK dapat disajikan menurut lapangan usaha.

Kelompok penduduk lain yang merupakan bagian dari angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja. Kelompok ini terdiri dari tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat kategori yang masih menjadi bagian dari angkatan kerja tersebut dikenal dengan istilah sebagai penganggur dan indikator pengukurannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

### 1.4. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) menunjukkan besarnya persentase jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta terhadap besarnya persentase perubahan jumlah output atau pertumbuhan pada setiap sektor. Analisis EKK dapat menggunakan metoda *Ordinary Least Square* (OLS) atau dapat juga menggunakan rasio antara rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

Melalui EKK, diperoleh indikasi secara makro bahwa kesempatan kerja suatu sektor atau lapangan usaha bersifat elastis atau inelastis. Kesempatan kerja bersifat *elastis*, bila setiap perubahan output sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan kesempatan kerja lebih besar dari 1 persen (*increasing return to scale*). Kesempatan kerja bersifat *inelastis*, bila setiap perubahan output sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*), dan kesempatan kerja bersifat *unitary*, artinya persentase perubahan output sama besarnya dengan persentase perubahan kesempatan kerja (*constan return to scale*).

### 1.5. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja menghasilkan produk (Pangestu, 1997:41). Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya keterkaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk



menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Menurut J. Ravianto, (1986:3), tingkat produktivitas tenaga kerja diukur menggunakan pendekatan perbandingan antara nilai tambah dengan sumber daya yang terpakai.

## **2. Pengangguran**

Konsep dan definisi ketenagakerjaan dan pengangguran Badan Pusat Statistik merujuk pada konsepsi *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang mana mereka tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Pengangguran tidak semata masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindakan kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan, dan bahkan lebih luas merambah *chaos* politik bagi pemerintahan.

Setiap manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk bertahan hidup. Manusia juga butuh biaya untuk interaksi sosial dengan lingkungannya agar diterima di masyarakat. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup bila tidak bekerja, karena Tuhan juga mewajibkan manusia untuk mencari nafkah untuk kehidupan dirinya. Demikian pula berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar semua penduduknya bekerja. Melalui bekerja berarti seseorang memiliki produksi. Oleh karena itu seberapa pun hasil yang didapat dari bekerja akan lebih baik dari pada tidak memiliki produksi sama sekali.

### **BAB 3**

### **METODOLOGI**

- A. Sumber Data
- B. Kerangka Pikir Analisis
- C. Indikator Penyajian PDRB
- D. Analisis Potensi dan Kualitas Indikator  
Pertumbuhan PDRB





## BAB III METODOLOGI

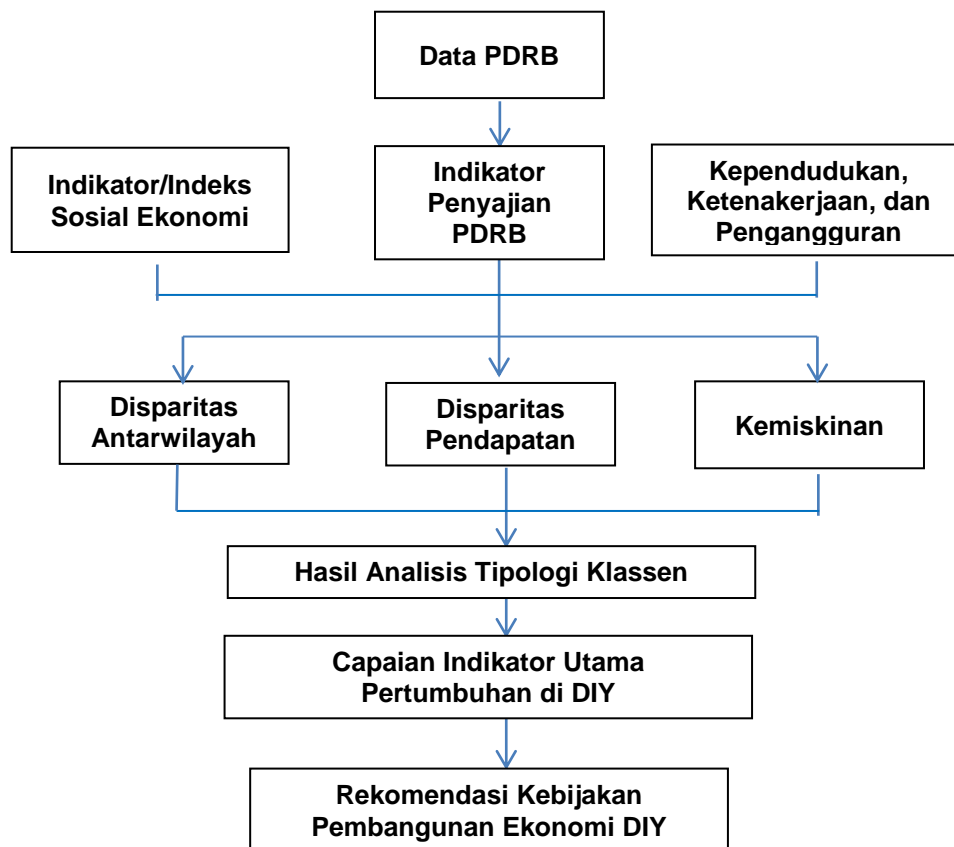
### A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Analisis PDRB 2014-2018 ini bersumber dari data PDRB DIY dan PDRB Kabupaten/Kota yang merupakan hasil pengolahan data dari kegiatan Survei Khusus Neraca Produksi dan Neraca Konsumsi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), survei dan kompilasi data keuangan dari Pemerintah Daerah DIY maupun kabupaten/kota, kompilasi data keuangan dari Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, Survei Statistik Harga Konsumen, Survei Statistik Niaga dan Jasa, Survei Statistik Pertanian, Survei Industri Besar Sedang (IBS), Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK), Angka Kemiskinan 2010-2018, dan data-data dari publikasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka (DDA DIY).

### B. Kerangka Pikir Analisis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan sumber data, maka kerangka pikir analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1.**  
**Kerangka Pikir Analisis**



### C. Indikator Penyajian PDRB

Data PDRB yang digunakan dalam buku Analisis PDRB Provinsi DIY ini terdiri dari PDRB menurut sektor/ lapangan usaha dan menurut pengeluaran, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Nilai PDRB juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu distribusi persentase (kontribusi/peran), PDRB per kapita, indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks harga implisit.

#### 1. Distribusi Persentase

**Distribusi persentase** diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor/penggunaan dengan total PDRB. Distribusi persentase mengindikasikan struktur PDRB menurut sektor atau menurut penggunaan.

$$Share(\%) = \frac{ntb \text{ sektor / penggunaan}}{PDRB_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.1)$$

#### 2. PDRB per Kapita

**PDRB per kapita** diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_t}{\sum \text{penduduk}_t} \dots\dots\dots(3.2)$$

#### 3. Indeks Perkembangan

**Indeks perkembangan** diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun dasarnya. Formulasi Indeks Perkembangan, sebagai berikut:

$$IP_t = \frac{PDRB_t - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\% \dots\dots\dots(3.3)$$

#### 4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan)

**Indeks berantai** diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Apabila indeks berantai dikurangi dengan 100, maka diperoleh **angka laju pertumbuhan**.

$$IB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.4)$$

## 5. Indeks Harga Implisit

**Indeks harga implisit** diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga di level produsen.

$$II_t = \frac{PDRB_{adhb}_t}{PDRB_{adhk}_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.5)$$

## 6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi Harga Produsen)

Selanjutnya, apabila dari indeks harga implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga suatu tahun terhadap tahun sebelumnya (laju inflasi).

$$IIB_t = \frac{II_t - II_{t-1}}{II_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.6)$$

## D. Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY

### 1. Pertumbuhan, Rata-rata Pertumbuhan, dan Andil Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi mengacu pada fungsi produksi yang diperkenalkan oleh **Cobb-Douglass** (Mankiw, 2004), yaitu:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta \dots\dots\dots(3.9)$$

keterangan:

- $Y_t$  = tingkat produksi (output) pada periode t
- $T_t$  = tingkat teknologi pada periode t
- $K_t$  = jumlah stok modal pada periode t
- $L_t$  = jumlah tenaga kerja pada periode t
- $\alpha$  = produktivitas modal
- $\beta$  = produktivitas tenaga kerja

Formula di atas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi berikut:

$$Y = f(T, K, L)$$

Dari rumusan fungsi produksi Cobb-Douglas tampak bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap teknologi, kapital, dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena peningkatan teknologi, kapital atau tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor

penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.10)$$

keterangan:

- $LPE$  = Laju pertumbuhan ekonomi
- $PDRB_t$  = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t
- $PDRB_{(t-1)}$  = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke (t-1)

Jika pertumbuhan ekonomi diamati dalam suatu periode waktu beberapa tahun, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dihitung dengan formula:

$$r = \left( \sqrt[n-1]{\left( \frac{PDRB_{t_n}}{PDRB_{t_0}} \right)} - 1 \right) \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.11)$$

keterangan:

- $r$  = Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun
- $n$  = Jumlah tahun periode (dihitung mulai dari 1 sampai dengan n)
- $t_n$  = Tahun terakhir periode
- $t_0$  = Tahun awal periode

Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat baik dari sisi lapangan usaha, wilayah (kabupaten/kota), maupun penggunaan. Ukuran andil terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan formula berikut:

$$Andil_{it} = \frac{(LPE_{it} \times DP_{i(t-1)})}{100} \quad \dots\dots\dots(3.12)$$

- $Andil_i$  = Andil sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap pertumbuhan ekonomi
- $LPE_i$  = Laju pertumbuhan ekonomi sektor/ wilayah/ komponen ke-i
- $DP_{i(t-1)}$  = Distribusi persentase sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap total PDRB pada tahun sebelumnya
- $i$  = 1, 2, ..., 17.
- $t$  = tahun observasi

Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan secara relatif posisi wilayah tersebut terhadap



wilayah lainnya. Perbandingan absolut antar kabupaten/kota atau menurut Sjafrizal (1997) disebut sebagai **Tipologi Klassen** disajikan pada Gambar 3.2 dalam bentuk “**diagram empat kuadran**”, di mana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horisontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horisontal) digambarkan garis tegak lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horisontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran. Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah).

Apabila suatu kabupaten/kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan DIY. Apabila terletak di kuadran II, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata DIY. Suatu kabupaten/kota terletak di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita DIY, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan DIY. Selanjutnya dengan mudah dapat diinterpretasikan bahwa suatu titik di kuadran IV menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita DIY, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan DIY.

Kabupaten/kota di kuadran I disebut “daerah maju dan cepat tumbuh” yang secara relatif menunjukkan daerah–daerah sudah maju perekonomiannya, dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-rata DIY. Kabupaten/ kota yang terletak di kuadran II disebut “daerah maju tapi tertekan” atau *Retarded Region*, merupakan daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata DIY. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran III merupakan “daerah relatif tertinggal” atau *Relatively Backward Region*, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya. Sementara itu, kabupaten/kota yang digambarkan di Kuadran IV menunjukkan bahwa daerah tersebut “daerah berkembang” atau *Growing Region*, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata DIY.

The diagram is a 2x2 matrix with 'PDRB per Kapita' on the horizontal axis and 'Tingginya Penduduk' on the vertical axis. The origin is labeled 'Rata-rata' and '0'. The quadrants are:

- Kuadran I: Daerah Maju dan Cepat Tumbuh** (Top Right): High population growth and high PDRB per capita. Marked with '+' on both axes.
- Kuadran II: Daerah Maju tapi Tertekan** (Bottom Right): High PDRB per capita but low population growth. Marked with '-' on the vertical axis and '+' on the horizontal axis.
- Kuadran III: Daerah Tertinggal** (Bottom Left): Low PDRB per capita and low population growth. Marked with '-' on both axes.
- Kuadran IV: Daerah Berkembang Cepat** (Top Left): High population growth but low PDRB per capita. Marked with '+' on the vertical axis and '-' on the horizontal axis.

Metode yang digunakan dalam penghitungan IHK adalah *Formula Laspeyres* yang telah dimodifikasi, yaitu:

Keterangan:

Persentase (%) perubahan IHK (laju inflasi/deflasi) bulanan diperoleh dari:

Keterangan:

46 *Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018*

Persentase perubahan IHK dalam satu tahun dihitung dengan menggunakan metode *point to point*, tetapi sebelum April 1998 menggunakan metode kumulatif bulanan.

### 3. Indikator Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

#### a. Pendidikan Penduduk

Pendidikan mencerminkan kualitas pengetahuan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka kualitas pengetahuan dan ketrampilannya diasumsikan semakin baik. Pendidikan tertinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk.

#### b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha merupakan mata pencaharian penduduk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Kategori lapangan usaha mengacu pada lapangan usaha 17 (tujuh belas) kategori atau lapangan usaha seperti yang digunakan dalam uraian PDRB tahun dasar 2010.

#### c. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio - DR*)

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{Jml\ Penduduk_{0-14} + Jml\ Penduduk_{65+}}{Jml\ Penduduk_{15-64}} \dots\dots\dots(3.13)$$

Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

#### d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kesempatan memperoleh pekerjaan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD'45) pasal 27 ayat 2. Setiap penduduk yang mampu dan mau

bekerja diharapkan akan memperoleh pekerjaan yang sesuai disertai dengan jaminan perlindungan kerja yang manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh upah yang cukup untuk hidup layak. Namun harapan tersebut masih jauh dari kenyataan yang terjadi.

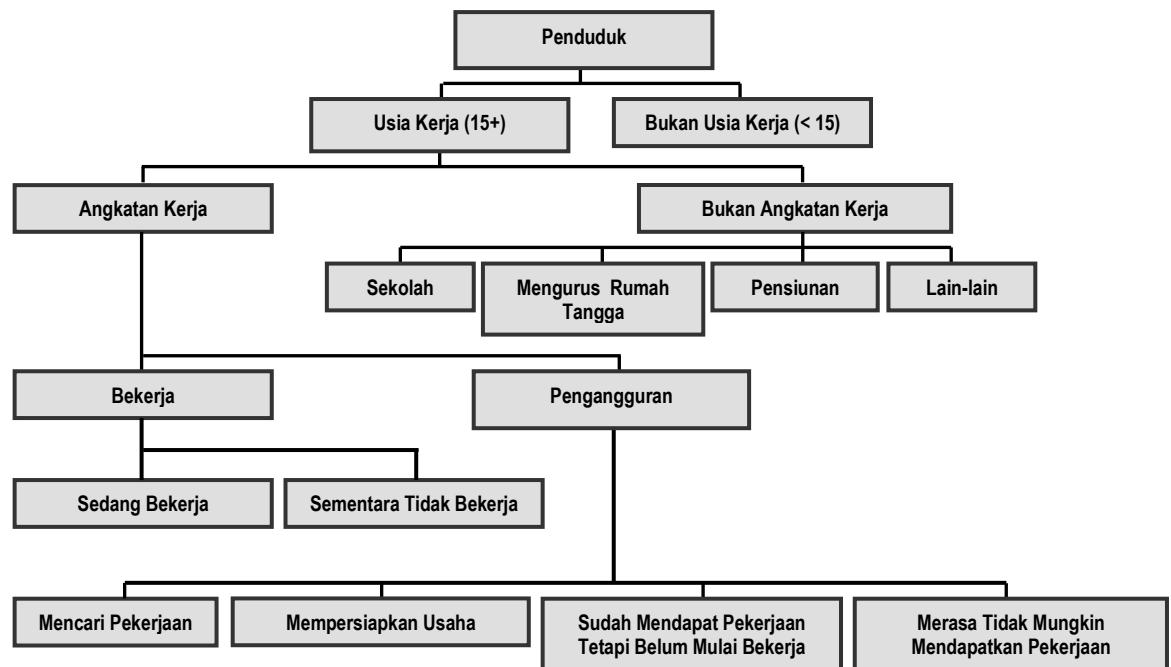
Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *the International Labor Organization (ILO)*, penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

Penduduk **bekerja** adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. **Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. **Pengangguran terbuka** adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep tersebut digambarkan dalam Gambar 3.3.

Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.
- **Penghasilan** mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.
- **Hari kerja** adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- **Jam kerja** adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.

**Gambar 3.3**  
**Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja**



Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.14)$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

#### e. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Menurut Simanjutak (2001), kesempatan kerja adalah penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor. Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.15)$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah.

Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung **laju pertumbuhan kesempatan kerja ( $r_{KK}$ )**, yaitu perbandingan antara selisih jumlah kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(3.16)$$

keterangan:

$B_t$  = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t  
 $B_{t-1}$  = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t-1

#### **f. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran. Dalam analisis ini indikator pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(3.17)$$

#### **g. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)**

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya.

Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Menurut Simanjutak (2001), Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi/ produk domestik bruto (regional bruto (PDB/PDRB). Dengan demikian elastisitas kesempatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{KK} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}} \quad \dots\dots\dots(3.18)$$

keterangan:

$E_{KK}$  = Elastisitas kesempatan kerja

$r_{KK}$  = Laju pertumbuhan kesempatan kerja  
 $r_{PDRB}$  = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

#### h. Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_i = \frac{PDRB_i}{TK_i} \dots\dots\dots(3.19)$$

keterangan:

$PTK_i$  = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i  
 $PDRB_i$  = PDRB sektor ke-i  
 $TK_i$  = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

#### 4. Indikator Kemiskinan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai *"inability of the individual to meet basic needs"* (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Amartya Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *"the failure to have certain minimum capabilities"*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan **nilai standar kebutuhan minimum**, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut



digunakan sebagai **garis pembatas** untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. *Uppal (1985)* menyebutkan garis pembatas tersebut sebagai **garis kemiskinan** (*poverty line*) atau **batas kemiskinan** (*poverty treshold*).

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara **2.100 kilo kalori per kapita per hari** dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. Biaya untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**. Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. **Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan** merupakan **indikator kemiskinan** yang sering digunakan dan biasa disebut **Head Count Index (HCI)**.

Kajian tentang kemiskinan tidak cukup hanya mempelajari jumlah dan persentase penduduk miskin saja yang diukur dari metode HCI. Salah satu kelemahan metode HCI adalah tidak memperhitungkan kedalaman kemiskinan serta ketimpangan sebaran pada kelompok miskin (*distribution among the poor*). Dua indikator berikut ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam melihat perubahan tingkat hidup penduduk miskin. Indikator tersebut adalah **Indeks Kedalaman Kemiskinan** (*poverty gap index* atau  $P_1$ ) dan **Indeks Keparahan Kemiskinan** (*poverty severity index* atau  $P_2$ ).

Penurunan angka pada  $P_1$  mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman dari insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan dari  $P_2$  mengidentifikasi berkurangnya (membaiknya) ketimpangan di antara penduduk miskin.

Pada tahun 1994 **Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT)** memperkenalkan suatu rumusan yang mengandung tiga jenis indikator kemiskinan. Rumusan FGT inilah yang kemudian digunakan sebagai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, dengan formula sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = (I/N) \sum_{j=1}^Q \left( \frac{(Z - Y_j)}{Z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots(3.20)$$

Keterangan:

- $P_{\alpha}$  = Indeks kemiskinan (  $\alpha = 0,1,2$ )
- $N$  = Jumlah penduduk
- $Z$  = Garis kemiskinan
- $Y_j$  = Pengeluaran perkapita penduduk di bawah garis kemiskinan  $Z$

$Q$  = Banyaknya penduduk miskin

Pengeluaran penduduk miskin perkapita dapat langsung dihitung dari hasil SUSENAS yang menggambarkan perbedaan antara pengeluaran si miskin (*proxy* pendapatan) dengan garis kemiskinan. Perbedaan tersebut dinyatakan dengan :

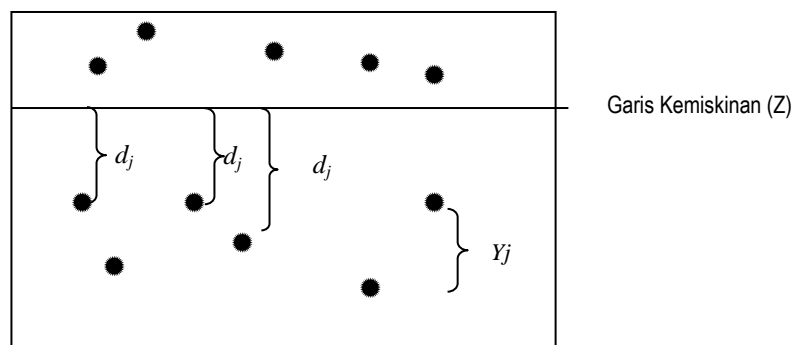
$$d_j = Z - Y_j \quad \dots\dots\dots(3.21)$$

bila persamaan ini dimasukkan ke dalam rumus FGT di atas, maka akan diperoleh :

$$P_\alpha = (1/N) \sum_{j=1}^Q \left( \frac{d_j}{Z} \right)^\alpha \quad \dots\dots\dots(3.22)$$

Keterangan:  $d_j/Z$  disebut **rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap ratio*)**.

**Gambar 3.4**  
**Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan**



Gambar 3.4 adalah *plotting* pengeluaran per kapita ( $Y_j$ ) dengan garis kemiskinan ( $Z$ ). Jarak antara pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap batas kemiskinan ditunjukkan oleh setiap titik  $d_j$  yang terdistribusikan di bawah garis kemiskinan. **Golongan penduduk sekitar garis miskin** relatif lebih mudah ditanggulangi, tetapi **rentan terhadap perubahan harga**. Jika harga naik menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas, maka mereka yang berada di atas garis kemiskinan akan mudah jatuh ke dalam kategori penduduk miskin. Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke bawah, maka mereka akan masuk ke dalam kategori penduduk tidak miskin. Golongan penduduk seperti inilah yang dikenal sebagai ***the near non-poor*** yang sensitif terhadap perubahan harga.

Dari rumusan FGT diperoleh tiga macam indeks, yaitu :

- i. Jika  $\alpha = 0$  maka  $P_0 = Q/N$  rasio ini tidak lain adalah **Head Count Index**, dan bila dikalikan dengan 100 menjadi **persentase penduduk miskin**. Jika 20 persen dari total penduduk diklasifikasikan sebagai miskin, maka  $P_0 = 0,2$ .

- ii. Jika  $\alpha = 1$  maka  $P_1$  menunjukkan ukuran **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index*)**.  $P_1$  merupakan persentase rata-rata kesenjangan antar pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah seluruh penduduk (baik yang di bawah atau di atas garis kemiskinan). Misal  $P_1 = 0,15$  ini berarti bahwa kesenjangan antara total pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jika dirata-ratakan terhadap seluruh rumah tangga (baik rumah tangga miskin atau tidak miskin) adalah sebesar 15 persen. Karena nilai  $P_1$  belum menggambarkan kesenjangan riil yang dihadapi oleh penduduk miskin, maka nilai  $P_1$  harus dikoreksi dengan jumlah penduduk yang berada di atas GK dengan rumus:

$$\frac{P_1}{P_2} = \sum_{j=1}^Q \left( \frac{Z - Y_j}{Q} \right) \dots\dots\dots(3.23)$$

Rasio  $P_1/P_2$  merupakan persentase rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain rasio tersebut merupakan rata-rata kesenjangan taraf hidup yang diukur dengan pengeluaran.

- iii. Jika  $\alpha = 2$  maka  $P_2$  menunjukkan ukuran **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau *distribution sensitive index*)** yang menggambarkan ketimpangan antar penduduk miskin. Tidak seperti dua ukuran terdahulu, ukuran ini sensitif terhadap penyebaran pengeluaran (*proxy* pendapatan) yang terjadi di antara penduduk miskin, dan juga dapat dipakai untuk mengetahui intensitas kemiskinan (*severity*). Ukuran ini dianggap yang paling memenuhi aksioma-aksioma untuk ukuran kemiskinan yang diinginkan oleh berbagai literatur, termasuk *Amartya Sen* (1976) dengan '*transfer axiom*'-nya, yaitu jika terjadi transfer pengeluaran dari penduduk miskin kepada penduduk yang lebih miskin berarti secara rata-rata telah terjadi suatu penurunan kemiskinan (BPS, 1992).

## 5. Indikator Ketimpangan (Disparitas)

### a. Ketimpangan Pendapatan

Para pengamat ekonomi banyak yang menaruh perhatian pada permasalahan distribusi pendapatan atau pembagian pendapatan seperti diawali oleh *Sundrum* (1973) serta *King* dan *Weldon* (1975). Dalam waktu relatif singkat bermunculan para ahli ekonomi yang melakukan penelitian seperti *Hendra Esmara* (1974 dan 1978), kemudian *Parera* (1977) atau *Sam F. Poli* (1978). Tetapi sebagian besar hanya bertujuan mengetahui gambaran ketimpangan/ kesenjangan/ *gap* dalam pembagian pendapatan, yang biasanya dinyatakan dalam ukuran **Gini Ratio**. Sedangkan pengukuran jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka masih jarang dilakukan.

Selama ini, pemerintah di banyak negara berkembang dalam kebijakan politik dan ekonominya lebih menekankan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam upaya terciptanya kemakmuran bagi penduduknya. Terdapat dua pilihan antara:

memperbesar 'kue' terlebih dahulu, baru kemudian dibagi merata, atau dilakukan pembagian secara merata terlebih dahulu berapapun besar 'kue' yang diperoleh. Namun terlepas dari polemik dikhotomi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih berarti jika terjadi pemerataan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas.

#### a.1. Rasio Gini (*Gini Ratio*)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (selanjutnya disebut **Kurva Lorenz**) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

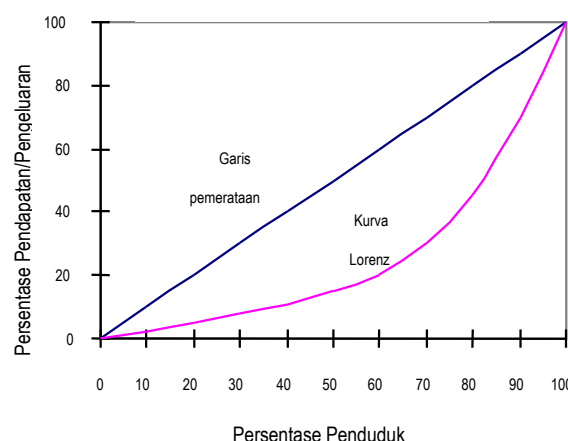
$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots(3.24)$$

Keterangan :

- $P_i$  = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i
- $Q_i$  = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i
- $k$  = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin **mendekati 1** maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati **ketimpangan sempurna**. Sebaliknya, semakin **mendekati 0** distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati **pemerataan sempurna**. Menurut **Harry T. Oshima**, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "**rendah**"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "**moderat**"; dan jika nilainya **lebih besar dari 0,5** dikatakan berada dalam ketimpangan "**tinggi**".

Gambar 3.5. Kurva Lorenz



**a.2. Ketimpangan Kriteria Bank Dunia (KBD)**

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan, yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- Tingkat ketimpangan **rendah**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **moderat**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12 sampai dengan 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **tinggi**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima **kurang dari 12** persen jumlah pendapatan.

**b. Ketimpangan Sektoral Antar Kabupaten/Kota**

Selain tingkat ketimpangan pendapatan, disparitas ekonomi juga dapat digambarkan dengan disparitas sektoral antar wilayah. Indikator disparitas antar wilayah merupakan ukuran yang menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau kombinasi antara berbagai aspek secara sektoral.

• **Indeks Ketimpangan Regional**

Indeks Williamson adalah salah satu ukuran ketimpangan antar wilayah (region). Pengukuran ini didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar region (yang berupa besaran PDRB). Kriteria pengukuran adalah: semakin besar nilai indeks, semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi masing-masing region dengan rata-ratanya; sebaliknya, **semakin kecil nilai indeks menunjukkan tingkat pemerataan antar region yang semakin baik.**

Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \dots\dots\dots(3.25)$$

keterangan:

- IW* : Indeks Williamson  
*y* : Rata-rata pendapatan (PDRB) di Provinsi DIY  
*y<sub>i</sub>* : Rata-rata pendapatan (PDRB) di region ke-i

- $f_i/n$  : Proporsi jumlah penduduk region ke-i terhadap jumlah penduduk Provinsi DIY
- $i$  : 1,2, ..., 5 (Kabupaten/ kota di Provinsi DIY).

- **Analisis Pergeseran (*Shift Share Analysis*)**

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan salah satu metode analisis penting yang umum digunakan dalam studi-studi ekonomi regional. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional, menelusuri jejak kecondongan dan sebab-sebab perubahan dalam lapangan kerja, serta menentukan besar dan arah perubahan industri regional. Disamping itu analisis SS juga digunakan sebagai alat dalam analisis deskriptif untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan.

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan teknik yang relatif sederhana untuk mengevaluasi posisi relatif dan perubahan struktur suatu perekonomian lokal (misalnya kabupaten atau propinsi) dalam hubungannya dengan perekonomian acuan (nasional). Metode analisis ini bertitik tolak pada anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yakni:

- Pertumbuhan nasional (*national growth component*)**, perubahan output atau pendapatan (atau indikator ekonomi lainnya seperti jumlah kesempatan kerja) suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan nasional secara umum, perubahan kebijaksanaan ekonomi nasional, atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian seluruh wilayah dan sektor secara seragam.
- Pertumbuhan sektoral (*industrial mix component*)**, timbul karena perbedaan permintaan output akhir, ketersediaan bahan baku, kebijaksanaan sektoral, serta perilaku dan kinerja struktur pasar setiap sektor nasional.
- Pertumbuhan daya saing wilayah (*competitive effect component*)**, terjadi karena peningkatan atau penurunan output atau pendapatan suatu wilayah yang lebih cepat atau lambat dari wilayah lainnya.

Perubahan nilai tambah bruto (NTB) atau PDRB suatu sektor  $i$  di suatu wilayah  $j$  dalam 2 periode, yaitu periode  $o$  dan periode  $t$  dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^t - Q_{ij}^o$$

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^o (Y_t/Y_o - 1) + Q_{ij}^o (Q_i^t/Q_i^o - Y_t/Y_o) + Q_{ij}^o (Q_{ij}^t/Q_{ij}^o - Q_i^t/Q_i^o) \dots\dots\dots (3.26)$$

Dari persamaan diatas dapat kita asumsikan bahwa pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah disebabkan oleh 3 komponen pertumbuhan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

keterangan:

- $PR_{ij}$  = Pangsa Regional sektor i pada wilayah j  
 $PS_{ij}$  = Proportional Shift (pergeseran proporsional) sektor ke-i pada wilayah j  
 $DS_{ij}$  = Different Shift (pergeseran yang berbeda) sektor ke-i pada wilayah j  
 $Y_o$  dan  $Y_t$  = Total PDRB Wilayah pada tahun 0 dan pada tahun t  
 $Q_{ij}^o$  dan  $Q_{ij}^t$  = PDRB sektor i propinsi j pada tahun 0 dan pada tahun t  
 $Q_i^o$  dan  $Q_i^t$  = Total PDRB Wilayah sektor i pada tahun 0 dan pada tahun t

$$PR_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Y_t}{Y_o} - 1 \right\} \dots\dots\dots (3.27)$$

$$PS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_i^t}{Q_i^o} - \frac{Y_t}{Y_o} \right\} \dots\dots\dots (3.28)$$

$$DS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_{ij}^t}{Q_{ij}^o} - \frac{Q_i^t}{Q_i^o} \right\} \dots\dots\dots (3.29)$$

**Analisis SS dapat dibagi ke dalam 2 bagian:**

### **1) Analisis Pangsa Regional (*Share Analysis*)**

Untuk melihat struktur atau posisi relatif provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia atau di tingkat propinsi. Sebagai indikator bisa dipergunakan nilai output, nilai tambah, atau jumlah tenaga kerja yang bekerja. *Share analysis* akan mengukur proporsi dari, misalnya, PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi. Oleh sebab itu bila nantinya ditemukan satu atau beberapa kabupaten di suatu propinsi memiliki pangsa yang tinggi maka kabupaten tersebut dikatakan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB propinsi. Disamping itu analisis ini juga digunakan untuk melihat peranan/kontribusi sektor yang signifikan di suatu wilayah.

### **2) Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)**

Dalam analisis pertumbuhan regional komponen pergeseran lebih penting daripada komponen PR. Total pergeseran (total shift) terdiri dari:

- ∞ Perubahan secara proporsional atau Proportionality Shift (PS) mengukur sejauh mana laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah berbeda dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat wilayah. Jadi PS memperlihatkan struktur ekonomi dan perubahannya di suatu wilayah.
- ∞ Perubahan yang berbeda atau Different Shift (DS) terjadi apabila laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pada sektor yang sama di wilayah lain. Perbedaan ini mencerminkan posisi keuntungan lokasi (*locational advantage position*) suatu wilayah yang mempunyai dampak



positif terhadap pertumbuhan satu atau beberapa sektor tertentu di wilayah tersebut.

Berdasarkan besaran PS dan DS beberapa wilayah dalam suatu daerah dapat di kelompokkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat (*rapid growth region*),

Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah yang pertumbuhannya tertekan tapi berkembang (*depressed region* yang berkembang),

Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah yang tertekan namun cenderung berpotensi (*depressed region* yang berpotensi)

Kategori IV (PS dan DS negatif) adalah wilayah *depressed region* dengan daya saing lemah dan juga peranan terhadap wilayah rendah.

Keunggulan analisis *shift share* antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *shift share* tergolong sederhana.
2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Kelemahan Analisis *Shift-Share*, yaitu:

1. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*.
2. Masalah *benchmark* berkenaan dengan *homothetic change*, apakah  $t$  atau  $(t+1)$  tidak dapat dijelaskan dengan baik.
3. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap.
4. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
5. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor.
6. Tidak ada keterkaitan antardaerah.

## **BAB 4**

### **PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA**

- A. Struktur Perekonomian PDRB
- B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil  
Pertumbuhan
- C. PDRB Per Kapita
- D. Indeks Perkembangan Kategori
- E. Perbandingan Nilai PDRB Antar  
Kabupaten/Kota
- F. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi





## BAB IV

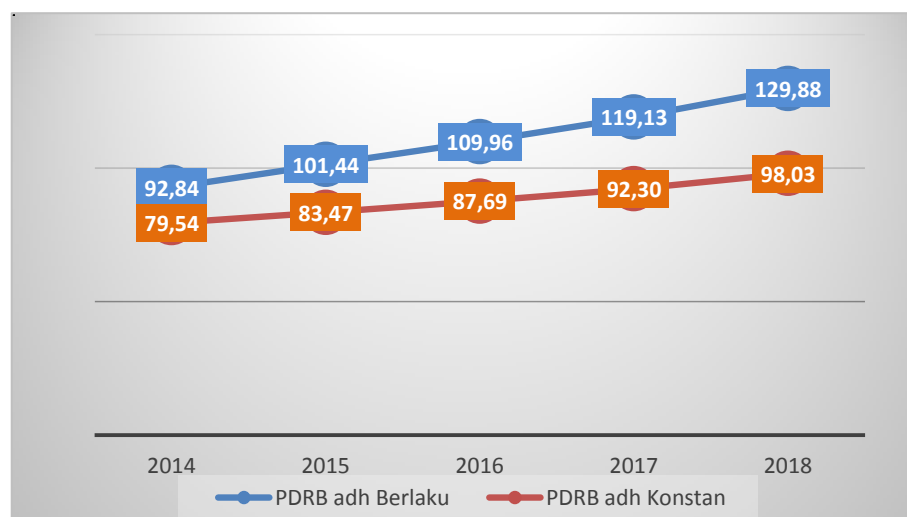
### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT LAPANGAN USAHA

#### A. Struktur Perekonomian PDRB

Tahun 2018 merupakan periode awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2017-2022. Dalam periode RPJMD sebelumnya, 2012-2017, perkembangan ekonomi mengalami anomali krisis ekonomi sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Namun dengan kembalinya tren pertumbuhan ke arah yang positif sejak 2016 memberikan harapan besar bahwa dalam periode RPJMD DIY 2017-2022 perekonomian akan terus tumbuh.

Nilai PDRB DIY selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan nilai PDRB DIY di tahun 2018 mencapai 10,7 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 5,7 triliun rupiah atas dasar harga konstan. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan yang tertinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dengan peningkatan tersebut, tercipta nilai PDRB tahun 2018 sebesar 129,9 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan sebesar 98,0 triliun rupiah atas dasar harga konstan.

**Gambar 4.1. Produk Domestik Regional Bruto DIY (triliun rupiah),  
2014-2018**



Penghitungan struktur PDB Indonesia dan PDRB provinsi/kabupaten/kota menggunakan dasar *System National Accounts*, 2008 (SNA2008) yang direkomendasikan

PBB terdiri dari 17 kategori atau lapangan usaha. Struktur perekonomian DIY tahun 2018 atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa komposisi lapangan usaha di DIY beragam.

Tiga lapangan usaha yang kontribusinya terbesar adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Masing-masing lapangan usaha tersebut memberi kontribusi sebesar 12,99 persen, 10,30 persen, dan 10,22 persen. Peningkatan kontribusi lapangan usaha konstruksi yang sangat tajam mampu menggeser posisi penyediaan akomodasi dan makan minum yang semula berada pada urutan kedua menjadi urutan ketiga, sedangkan pertanian yang semula berada pada urutan ketiga menjadi urutan keempat. Pergeseran tersebut dapat diprediksi dengan melihat kontribusi lapangan usaha pertanian yang cenderung menurun sedangkan konstruksi cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya volume kegiatan konstruksi. Peningkatan volume kegiatan konstruksi mampu menggeser peran kontribusi menjadi posisi ke dua.

Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan untuk skala industri besar-sedang terutama berasal dari kontribusi sub kategori industri makanan dan minuman dan industri tekstil dan pakaian jadi. Lebih dari setengahnya (55,7 persen) dari nilai tambah kategori industri merupakan kontribusi dari sub kategori industri makanan dan minuman, dan sekitar sepersepuluhnya (10,8 persen) merupakan kontribusi sub kategori industri tekstil dan pakaian jadi.

**Tabel 4.1. Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2014 – 2018**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	10,52	10,64	10,42	10,02	9,78
2	Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,56	0,54	0,52	0,53
3	Industri Pengolahan	13,59	13,11	13,23	13,12	12,99
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,11	0,12	0,13	0,15	0,14
5	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	9,40	9,37	9,35	9,50	10,28
7	Perdag. dan Reparasi Mobil dan Motor	8,27	8,22	8,46	8,58	8,59
8	Pengangkutan dan Pergudangan	5,72	5,68	5,68	5,69	5,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,04	10,24	10,24	10,33	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	8,51	8,13	8,15	8,21	8,10
11	Jasa Keuangan	3,88	3,97	3,94	3,90	3,93
12	Real Estat	7,00	7,02	7,09	7,02	6,95
13	Jasa Perusahaan	1,03	1,03	1,01	1,02	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	8,07	8,26	8,38	8,57	8,43
15	Jasa Pendidikan	8,19	8,48	8,19	8,14	8,11
16	Jasa Kesehatan	2,45	2,52	2,51	2,52	2,48
17	Jasa-jasa Lainnya	2,53	2,55	2,57	2,61	2,60
<b>PDRB</b>		100,00	100,00	100,0	100,00	100,00

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Mengingat posisi kontribusinya yang selalu masuk dalam tiga besar, dapat dikatakan bahwa lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor ekonomi andalan di DIY. Hal ini sangat wajar mengingat DIY merupakan salah satu icon wisata di Indonesia. Banyak tujuan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Tujuan wisata yang ramai dikunjungi meliputi wisata pantai, situs budaya, situs bersejarah, wisata belanja di Malioboro, kuliner, dan masih banyak lagi. Puncak peningkatan nilai tambah lapangan usaha ini biasanya terjadi pada saat musim liburan. Dilihat menurut golongan pokok usaha, penyediaan makan minum menjadi penyumbang utama lapangan usaha ini yaitu sekitar 78 persen dari total nilai tambah lapangan usaha atau kategori ini. Sementara penyediaan akomodasi memberikan sumbangan sekitar 22 persen terhadap nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Setelah tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar tersebut, ada lima kategori usaha ekonomi sebagai lapisan kedua yang juga cukup kuat kontribusinya dalam struktur ekonomi DIY. Kontribusi lapangan usaha tersebut dalam PDRB DIY sekitar 7 hingga 9 persen, yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan dan reparasi mobil dan motor; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa informasi dan komunikasi.

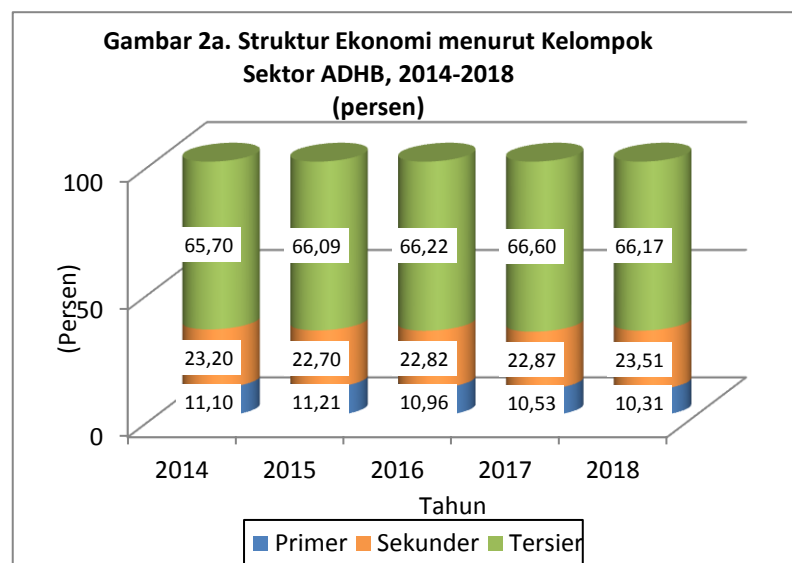
Hingga tahun 2017, pertanian masih termasuk dalam tiga besar kontributor terbesar PDRB DIY. Namun di tahun 2018, pertanian berada pada urutan ke empat. Hal ini terjadi karena nilai tambah yang tercipta dari lapangan usaha pertanian tumbuh lebih lambat terutama jika dibandingkan dengan tiga lapangan usaha kontributor terbesar lainnya. Meskipun demikian, pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat DIY. Kontributor utama lapangan usaha pertanian adalah sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, yang menyumbang sekitar 87,8 persen terhadap nilai tambah pertanian. Sedangkan kontributor utama sub lapangan usaha ini adalah tanaman pangan, sekitar 41 persen, diikuti tanaman hortikultura sebesar 30,8 persen, dan peternakan sebesar 23 persen.

Melihat tiga kategori usaha sebagai penyumbang utama dan lima kategori pada kelompok pelapis kedua tersebut memperlihatkan bahwa struktur perekonomian DIY menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Kondisi ini juga selaras dengan Visi DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**. Demikian pula dikaitkan kondisi ekonomi DIY tersebut juga mempunyai keterpaduan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yaitu **“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**.

Berdasarkan sifat output barang yang dihasilkan, dari 17 kategori lapangan usaha PDRB diagregasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Ada dua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B). Selanjutnya, sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Ada empat lapangan usaha yang termasuk sektor sekunder, yaitu: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Sementara 11 lapangan usaha lainnya termasuk dalam sektor tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estat, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.

Distribusi kelompok sektor primer, sekunder, dan tersier dalam PDRB menunjukkan komposisi yang relatif sama dari tahun ke tahun. Namun, di tahun 2018 kontribusi sektor primer dan tersier menurun, sebaliknya kontribusi sektor sekunder terlihat meningkat. Pada tahun 2018 sektor tersier memegang peran 66,17 persen dari total PDRB atau turun 0,43 poin dibanding tahun sebelumnya. Sektor primer turun 0,22 persen, menjadi 10,31 persen jika dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kontribusi sektor sekunder naik sebesar 0,64, menjadi 23,51 persen.

**Gambar 4.2. Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2014- 2018**



Sektor tersier terdiri dari 11 sektor. Cakupan sektor ini meliputi aktivitas perdagangan dan jasa-jasa. Sektor tersier telah menjadi tulang punggung perekonomian



DIY. Hampir dua pertiga bagian dari total PDRB DIY merupakan sumbangan dari sektor ini. Tiga kontributor tertinggi di sektor tersier adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Dilihat lebih rinci pada golongan usaha, penguatan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum bersumber pada golongan usaha penyediaan makan minum, seperti restoran, warung makan, kedai makan dan minum, dan sejenisnya. Semakin menjamurnya usaha kuliner di Jogja, baik untuk jenis usaha menu makanan utama maupun kudapan, seperti warung kopi dan angkringan semakin merupakan bukti dari semakin menguatnya aktivitas ekonomi golongan usaha ini. Menguatnya usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor terlihat dari kondisi jalan raya yang semakin padat di berbagai jalur, Kondisi ini menuai kemacetan terutama di waktu-waktu strategis, seperti waktu berangkat dan pulang sekolah atau kerja. Sementara menguatnya peran lapangan usaha jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib lebih disebabkan oleh peningkatan tren porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun porsi terbesar masih bersumber dari pos belanja pegawai. Demikian pula peningkatan jasa pemerintahan juga disumbangkan oleh meningkatnya dana alokasi khusus Dana Keistimewaan (danais) DIY hingga realisasi pelaksanaan tahun 2018.

## **B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan**

### **1. Pertumbuhan menurut Kategori**

Penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2010 sudah menggunakan ketentuan dalam SNA2008. Salah satu implikasinya adalah adanya perubahan nomenklatur penggolongan. Selain itu, perubahan istilah sektor menjadi industri atau kategori atau masih bisa juga menggunakan istilah lapangan usaha. Namun, dalam pembahasan tertentu istilah sektor kadang-kadang masih digunakan, tujuannya agar kalimat yang disampaikan lebih mudah dipahami maknanya.

Perekonomian DIY tahun 2018 tumbuh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen di tahun 2017, tumbuh menjadi 6,20 persen di tahun 2018. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi ini sudah terlihat sejak tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi telah mengalami masa pemulihan setelah krisis yang dialami. Membaiknya kondisi ekonomi di DIY juga ditunjukkan oleh pertumbuhan lapangan usaha yang seluruhnya menghasilkan angka positif selama empat tahun terakhir.

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha konstruksi (kategori F) mengalami kecenderungan pertumbuhan yang lebih cepat dibanding lapangan usaha lainnya. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan konstruksi yang mencapai 7,39 persen per tahun. Terakselerasinya pertumbuhan konstruksi tidak terlepas dari andil pembangunan bandara

baru YIA dan infrastruktur pendukung di sekitarnya. Pada kondisi normal, seperti yang terlihat di pertumbuhan tahun 2014 hingga 2015, lapangan usaha ini tumbuh sekitar 4 hingga 5,6 persen. Pertumbuhan mulai melejit di dua tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sebesar 6,94 persen dan melejit mencapai 13,10 persen di tahun 2018. Oleh karenanya di tahun 2018 lapangan usaha konstruksi mampu memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan total sebesar 1,25 persen.

Selain konstruksi, lapangan usaha lain yang mempunyai rata-rata pertumbuhan tinggi adalah informasi dan komunikasi (kategori J), jasa lainnya (kategori RSTU), penyediaan akomodasi dan makan minum (kategori I), dan perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor (kategori G). Keempat lapangan usaha tersebut selama lima tahun terakhir selalu tumbuh di atas 5 persen meskipun dengan pola tren pertumbuhan yang berbeda-beda. Lapangan usaha informasi dan komunikasi mempunyai akselerasi kinerja tertinggi di tahun 2016. Lapangan usaha jasa lainnya dan perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor laju pertumbuhan tertingginya terjadi di tahun 2015. Sementara penyediaan akomodasi dan makan minum akselerasi kinerja tertinggi terjadi di tahun 2014 dan 2018.

**Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori, Rata-rata Pertumbuhan per Tahun, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2018 di DIY (persen), 2014-2018**

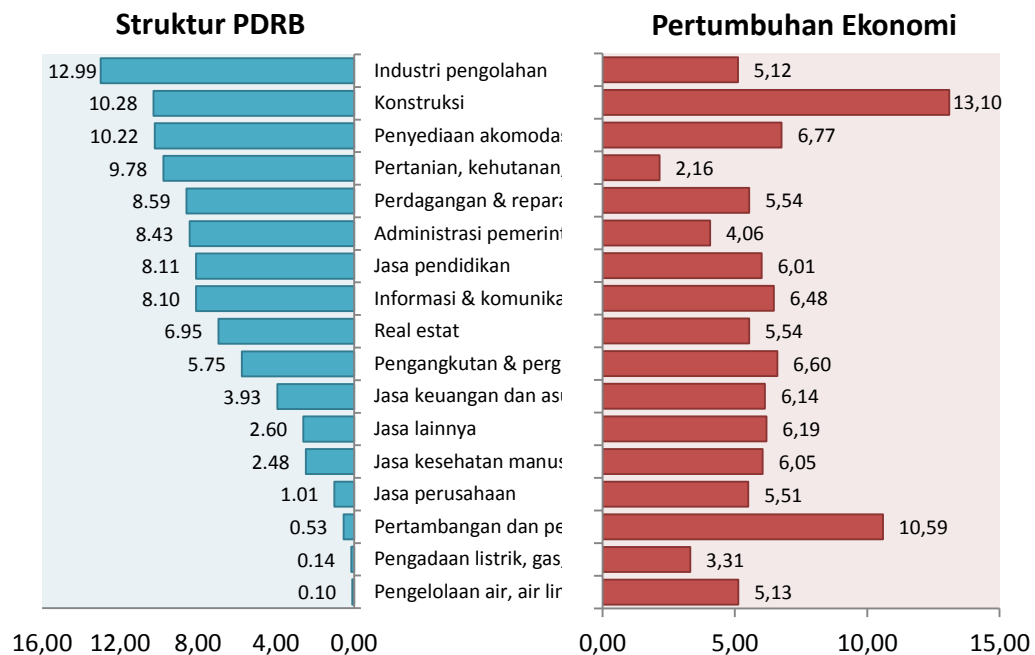
Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>***)</sup>	Rata-rata 2014-2018	Andil Pertumbuhan 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	-2,10	2,11	1,46	1,94	2,16	1,92	0,19
2. Pertambangan & Penggalian	2,11	0,13	0,42	3,39	10,59	3,55	0,06
3. Industri Pengolahan	3,82	2,13	5,07	5,74	5,12	4,50	0,66
4. Pengadaan Listrik, Gas	6,83	2,19	14,26	3,96	3,31	5,82	0,01
5. Pengadaan Air	3,91	2,90	2,36	3,46	5,13	3,46	0,01
6. Konstruksi	5,65	4,24	5,42	6,94	13,10	7,39	1,25
7. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,69	6,19	6,09	5,72	5,54	5,88	0,47
8. Pengangkutan & Pergudangan	3,80	3,73	4,61	4,75	6,60	4,92	0,36
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	5,77	5,51	6,21	6,77	6,07	0,64
10. Informasi dan Komunikasi	6,13	5,11	8,32	6,14	6,48	6,51	0,72
11. Jasa Keuangan	8,27	8,27	4,98	2,80	6,14	5,53	0,22
12. Real Estat	7,77	6,05	5,14	4,94	5,54	5,41	0,40
13. Jasa Perusahaan	7,61	7,31	3,43	5,86	5,51	5,55	0,06
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,90	5,57	5,57	4,51	4,06	4,93	0,31
15. Jasa Pendidikan	7,91	7,28	3,07	5,56	6,01	5,46	0,53
16. Jasa Kesehatan	7,65	7,15	4,52	5,84	6,05	5,89	0,16
17. Jasa Lainnya	5,29	8,00	5,70	5,76	6,19	6,41	0,17
<b>PDRB</b>	<b>5,17</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>5,36</b>	<b>6,20</b>

Keterangan: \*) angka sementara; \*\*\*) angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D,I,Yogyakarta

Di sisi lain, dalam kurun waktu lima tahun terakhir kinerja ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) masih kurang menggembirakan. Rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 1,92 persen per tahun. Bahkan, di tahun 2014 mengalami kontraksi sebesar 2,10 persen. Namun demikian karena lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan lapangan pekerjaan masyarakat petani di perdesaan dan kontribusinya terhadap

**Gambar 4.3. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (persen),**



total PDRB juga masih menempati urutan empat besar maka perkembangan kinerjanya masih diharapkan memberikan kesejahteraan pelaku usahanya. Optimisme itu cukup mendasar karena dalam tiga tahun terakhir tren pertumbuhannya cukup bagus.

Hampir seluruh lapangan usaha yang berada di kelompok sektor tersier menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat di tahun 2018, meskipun laju pertumbuhan tertinggi tahun ini ada di kelompok sektor sekunder yaitu konstruksi. Lapangan usaha di sektor tersier yang mempunyai laju pertumbuhan yang relatif tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan.

Gambaran potensi ekonomi daerah dapat dilihat lebih dekat dari pangsa distribusi sekaligus dengan pertumbuhannya, seperti yang terlihat pada Gambar 4.3. Industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum adalah tiga lapangan usaha yang mempunyai pangsa paling tinggi. Selain pangsa yang tinggi, lapangan usaha konstruksi juga memiliki laju pertumbuhan yang tertinggi, sehingga sangat potensial dalam mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

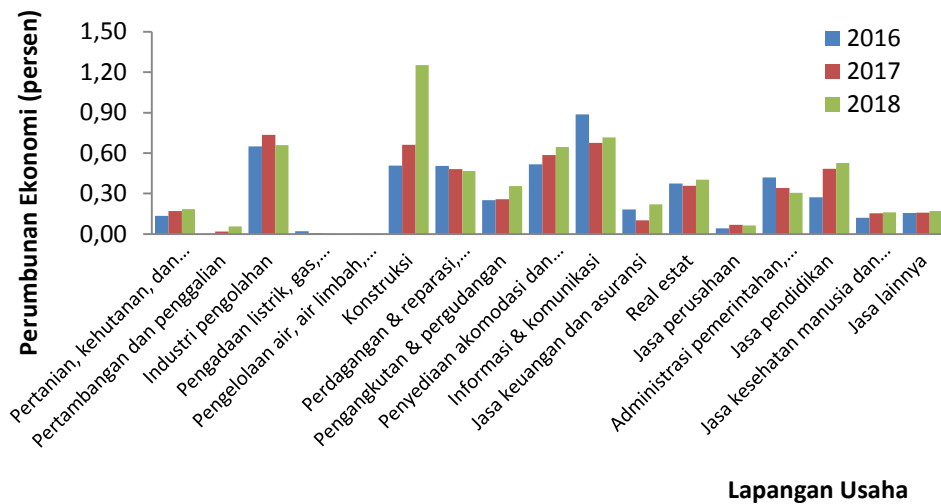
Industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, memiliki laju pertumbuhan yang besarnya rata-rata, namun memiliki pangsa yang tinggi sehingga juga potensif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, melejitnya laju pertumbuhan ekonomi pertambangan dan penggalian tidak terlalu mampu mendorong tumbuhnya perekonomian karena pangasanya kecil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhannya lapangan usaha pertanian berada dalam urutan terakhir karena pertumbuhannya paling rendah. Namun demikian, pangsa kontribusinya menempati urutan tertinggi keempat. Lapangan usaha ini masih harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam struktur ekonomi DIY, karena masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk DIY. Semakin berkurangnya luas area pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi kendala utama dalam menjaga peran dan mengembangkan potensi lapangan usaha pertanian.

Industri pengolahan (kategori C) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (kategori I) merupakan kategori usaha yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain peranannya besar, pertumbuhan keduanya juga tinggi. Jumlah usaha industri pengolahan menurut skala usaha didominasi oleh usaha mikro dan kecil, yaitu 99,5 persen dari total usaha kategori industri pengolahan (BPS, SE2016). Demikian juga untuk penyediaan akomodasi dan makan minum, didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil, yaitu 99,4 persen. Oleh karena skala usaha yang dominan adalah usaha mikro dan kecil, pengembangan kedua lapangan usaha tersebut masih menghadapi kendala yaitu keterbatasan kemampuan berproduksi.

Meskipun lapangan usaha Informasi dan komunikasi terlihat sudah melewati masa puncak *booming*-nya, namun lapangan usaha ini masih mempunyai prospek yang menjanjikan dalam upaya peningkatan PDRB, mengingat semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, maka pengembangan lapangan usaha ini harus didistribusikan merata secara proporsional ke kabupaten/kota agar pertumbuhan ekonominya juga menyebar secara wilayah, bukan hanya dari sisi sektoral saja.

**Gambar 4.4. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2018**



Peran masing-masing kategori terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dapat diamati lebih lanjut dari andil pertumbuhannya. Masing-masing lapangan usaha memberikan andil yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2018. Berbeda dengan potensi yang dimiliki, kategori yang memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2018 yang sebesar 6,20 persen adalah kategori konstruksi dengan andil sebesar 1,25 persen. Selanjutnya diikuti oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 0,72 persen dan kategori industri pengolahan dengan andil sebesar 0,66 persen. Urutan keempat dan kelima andil terbesar berikutnya adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan andil sebesar 0,64 persen dan jasa pendidikan dengan andil sebesar 0,53 persen. Kategori pertanian yang masih menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk hanya mampu memberikan andil bagi pertumbuhan sebesar 0,17 persen.

## 2, Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota

Luas wilayah DIY relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Secara administrasi, wilayah DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, di antaranya: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kelima kabupaten/kota tentunya memiliki nilai PDRB yang berbeda-beda, namun pertumbuhan ekonominya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan hingga tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2017 berada pada kisaran 4,57 hingga 5,97 persen. Dibanding tahun sebelumnya, level pertumbuhan juga meningkat dan kesenjangan pertumbuhan antarkabupaten/kota semakin menyempit.

Namun kondisi ini mulai terlihat berbeda di tahun 2018. Dimulainya mega proyek di atas lahan sekitar 600 hektar di Kulon Progo, menjadikan kabupaten ini unggul dalam pertumbuhan ekonominya dibandingkan empat kabupaten/kota yang lain. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yang mencapai dua digit di tahun 2018 dicapai Kabupaten Kulon Progo,

yakni sebesar 10,62 persen, kemudian diikuti oleh Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing-masing tumbuh sebesar 6,43 persen dan 5,49 persen. Urutan keempat dan kelima adalah Bantul dan Gunungkidul yang tumbuh masing-masing sebesar 5,48 persen dan 5,14 persen. Pergeseran urutan pertumbuhan kabupaten/kota tahun 2018 ini sangat signifikan, karena biasanya Sleman menempati urutan pertama sedangkan Kulon Progo pada urutan keempat.

Melesatnya laju pertumbuhan ekonomi Kulon Progo sangat didukung oleh pertumbuhan di lapangan usaha konstruksi dan pertambangan dan penggalian, masing-masing tumbuh sebesar 59,73 persen dan 25,70 persen (lihat Lampiran 15). Pertumbuhan sektor konstruksi yang sangat tinggi tercipta dari pembangunan bandara baru bertaraf internasional dan sarana dan prasarana penunjang, seperti pembangunan *under pass*, pelebaran jalan dan jembatan, terutama di sepanjang jalan negara yang melintas di wilayah Kulon Progo. Di samping itu, peningkatan nilai tambah pertambangan dan penggalian didorong oleh aktivitas penggalian batu dan tanah yang tinggi untuk mendukung persiapan lahan bandara baru maupun relokasi pemukiman baru bagi warga yang terkena dampak pembangunan bandara tersebut.

**Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun, dan Andil Pertumbuhan 2018 di DIY (persen), 2014-2018**

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	2014	2015	2016	2017*	2018***	Rata-rata 2014-2018	Andil Pertumbuhan 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kulonprogo	4,57	4,62	4,76	5,97	10,62	6,47	0,57
2. Bantul	5,04	4,97	5,05	5,10	5,48	5,15	1,10
3. Gunungkidul	4,54	4,82	4,88	5,01	5,14	4,96	0,76
4. Sleman	5,30	5,18	5,22	5,34	6,43	5,54	2,15
5. Yogyakarta	5,28	5,09	5,11	5,24	5,49	5,23	1,61
<b>DIY</b>	5,17	4,95	5,05	5,26	6,20	5,36	6,20

Ket: \* angka sementara; \*\*\* angka sangat sangat sementara  
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Perbedaan luas wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, serta ketersediaan teknologi yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah dari luas wilayah DIY (46,63 persen), menciptakan nilai PDRB sebesar 17,54 triliun rupiah di tahun 2018 atau 13,50 persen dari total PDRB DIY. Kulon Progo yang luas wilayahnya kurang dari seperlima bagian dari luas wilayah DIY (sebesar 18,40 persen) mampu meraih total PDRB sebesar 10,3 triliun rupiah, dengan persentase terhadap total PDRB DIY terendah yaitu 7,91 persen. Luas wilayah Kabupaten Sleman hampir sama dengan Kulon Progo, sekitar 18,04 persen dari luas wilayah DIY menghasilkan total PDRB sebesar 43,8 triliun rupiah atau sekitar 33,72 persen dari total PDRB DIY. Kabupaten Bantul memberikan

sumbangan terhadap PDRB DIY persen dengan nilai PDRB sebesar 24,5 triliun rupiah atau sekitar 18,84. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen dari luas wilayah DIY, memberikan sumbangan sebesar 33,9 triliun rupiah atau sekitar 26,03 persen terhadap total PDRB DIY. Berbeda dengan empat kabupaten yang lain, Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi non pertanian dan non penggalian. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB DIY, persentase PDRB Kulon Progo dan Sleman meningkat, sedangkan Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta menurun.

Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, andil PDRB Sleman terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 1,86 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2018 yang sebesar 6,20 persen. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya dari Kota Yogyakarta yaitu 1,61 persen, dan diikuti oleh Bantul sebesar 1,10 persen. Tahun 2018, andil perekonomian Gunungkidul sebesar 0,76 persen. Andil Gunungkidul selalu meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan aktivitas perekonomian Gunungkidul yang mulai menggeliat. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di DIY, namun andil pertumbuhan Kulon Progo menunjukkan nilai yang paling rendah, karena kontribusi Kulon Progo terhadap PDRB DIY masih tergolong rendah. Hadirnya mega proyek di wilayah ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan ekonomi wilayah di DIY secara bertahap.

### C. PDRB per Kapita

Angka PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku tahun 2018 tercatat sebesar 4,15 juta rupiah (Tabel 4.4). Jika dihitung berdasarkan harga konstan 2010 per kapita, diperoleh PDRB per kapita DIY sebesar 25,78 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010, mencerminkan pendapatan riil yang tercipta. Dalam bahasa mudah, dapat dikatakan bahwa nilai PDRB DIY sebesar 98 triliun rupiah jika dibagi rata untuk setiap penduduk maka setiap penduduk memperoleh bagian sekitar 2,15 juta rupiah bulannya. Namun dalam kenyataan kehidupan sosial ekonomi distribusi pendapatan realitanya tidaklah demikian. PDRB tidak terbagi merata seperti dalam hitungan matematis. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antarpenduduk.

**Tabel 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita DIY, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh, berlaku (juta rupiah)	92.842.484	101.440.518	110.009.487	119.172.906	129.877.458
PDRB adh, konstan 2010 (juta rupiah)	79.536.082	83.474.452	87.688.200	92.300.660	98.026.564
Penduduk pertengahan tahun (orang) <sup>1)</sup>	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.167	3.802.872



## Bab 4 | PDRB menurut Lapangan Usaha

PDRB per kapita adh, Berlaku:(rupiah)	25.526.402	27.571.532	29.552.527	31.665.527	34.152.466
PDRB per kapita adh, konstan 2010 (rupiah)	21.867.898	22.688.352	23.565.677	24.534.270	25.776.982
Pertumbuhan PDRB per kapita adh, berlaku (%)	8,05	8,01	7,18	7,15	7,85
Pertumbuhan PDRB per kapita adh, konstan (%)	3,95	3,75	3,87	4,11	5,07
Keterangan :	1) Hasil Backcasting dan Proyeksi SP 2010 *) Angka sementara      **) Angka sangat sementara				
Sumber :	BPS D.I.Yogyakarta				

### D. Indeks Perkembangan Kategori

Hingga tahun 2018 kategori jasa keuangan di DIY memiliki indeks perkembangan atas dasar harga berlaku terbesar, yaitu 250,64. Indeks ini menunjukkan bahwa sejak 2010 hingga 2018 lapangan usaha jasa keuangan mampu telah berkembang lebih dari dua setengah kali lipat. Namun, indeks perkembangan ini masih dipengaruhi kenaikan harga, sehingga perlu dilihat indeks perkembangan atas dasar harga konstan. Jika dilihat indeks perkembangan atas dasar harga konstan yang telah terbebas dari pengaruh inflasi, ternyata perkembangan kategori jasa keuangan menempati posisi tertinggi kedua, dengan indeks 172,11. Lapangan usaha informasi dan komunikasi berkembang lebih cepat bila dinilai atas dasar harga konstan dengan indeks perkembangannya sebesar 176 (Tabel 4.5).

**Tabel 4.5. Indeks Perkembangan PDRB DIY menurut Kategori, 2014-2018 (2010=100)**

Lapangan Usaha	PDRB Berlaku					PDRB Konstan				
	2014	2015	2016	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>***)</sup>	2014	2015	2016	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>***)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	134,70	148,83	157,96	164,53	175,22	103,54	105,72	107,27	109,34	111,70
Pertambangan dan Penggalian	132,18	140,92	145,84	151,44	169,08	115,74	115,89	116,37	120,32	133,06
Industri Pengolahan	136,89	144,36	157,86	169,67	183,06	113,61	116,03	121,91	128,90	135,50
Pengadaan Listrik, Gas	107,62	124,58	149,68	183,35	196,89	131,91	134,81	154,03	160,12	165,42
Pengadaan Air	134,90	144,13	150,79	159,34	168,34	108,86	112,02	114,66	118,63	124,72
Konstruksi	141,07	153,63	166,36	182,96	215,98	121,43	126,58	133,43	142,81	161,51
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149,25	162,10	180,66	198,59	216,78	127,08	134,95	143,13	151,32	159,71
Pengangkutan & Pergudangan	145,50	157,84	171,12	185,77	204,56	119,89	124,36	130,08	136,28	145,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	162,44	180,89	196,08	214,35	231,24	129,16	136,62	144,15	153,11	163,47

Informasi dan Komunikasi	127,70	133,30	144,84	158,23	170,17	136,77	143,76	155,72	165,29	176,00
Jasa Keuangan	176,82	197,43	212,76	227,86	250,64	138,75	150,23	157,73	162,16	172,11
Real Estat	144,44	158,21	173,41	186,05	200,58	127,50	135,22	142,15	149,13	157,39
Jasa Perusahaan	132,37	145,10	154,44	167,39	181,20	127,90	137,24	142,03	150,44	158,73
Adm, Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	156,82	175,38	192,92	213,77	229,18	125,00	131,97	139,32	145,61	151,52
Jasa Pendidikan	140,03	158,41	165,99	178,65	194,06	127,83	137,14	141,36	149,16	158,12
Jasa Kesehatan	147,81	165,80	179,20	195,03	209,14	133,95	143,52	150,01	158,77	168,38
Jasa Lainnya	136,50	150,26	163,95	180,43	195,91	123,00	132,84	140,42	148,51	157,70
<b>PDRB</b>	<b>143,54</b>	<b>156,84</b>	<b>170,01</b>	<b>184,19</b>	<b>200,80</b>	<b>122,97</b>	<b>129,06</b>	<b>135,57</b>	<b>142,71</b>	<b>151,56</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY

Lapangan usaha informasi dan komunikasi serta jasa keuangan menjadi lapangan usaha dengan perkembangan nilai tambah yang besar di DIY. Hal ini menunjukkan sudah modernnya kegiatan ekonomi di DIY ekonominya didasari teknologi maju. Lapangan usaha ini termasuk *capital intensive* sehingga perlu juga perhatian pemerintah dari sisi penggunaan tenaga kerja, baik jumlah ataupun pendidikannya.

Lapangan usaha lain yang juga mengalami perkembangan yang tercepat berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, juga perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi. Keempat lapangan usaha ini masing-masing mempunyai indeks perkembangan sebesar 231,24, 229,18, 216,78 dan 215,98. Sementara jika atas dasar harga konstan 2010, perkembangan tercepat berikutnya dicapai oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan kategori pengadaan listrik dan gas, masing-masing mempunyai indeks perkembangan sebesar 168,38 dan 165,42. Urutan laju perkembangan riil nilai tambah barang dan jasa memang berbeda dengan laju perkembangan atas dasar harga berlaku karena fluktuasi harga mempengaruhi laju perkembangan atas dasar harga berlaku.

Sementara itu, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY laju perkembangannya termasuk lambat baik atas dasar harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Bahkan, indeks perkembangan riil lapangan usaha pertanian ini paling rendah di antara semua lapangan usaha. Hal ini menunjukkan masih minimnya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi dalam lingkup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, sehingga perlu terobosan teknologi untuk pengelolaan usaha pertanian agar produktivitas output meningkat.

#### **E. Perbandingan Nilai PDRB Antarkabupaten/Kota**

Lima wilayah administratif kabupaten/kota di DIY memiliki keterkaitan erat secara sosial demografis, sehingga dalam melakukan analisis kinerja perekonomian, kelima kabupaten/kota tersebut tidak dapat dipisahkan dari **analisis spasial (tata ruang/geografis)**. Di tingkat provinsi, untuk membandingkan perkembangan perekonomian makro secara relatif antardaerah, dapat dilakukan dengan melihat besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota sebagai salah satu indikator makro.

Sebagai daerah penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sleman masih memiliki potensi untuk terus berkembang lebih cepat, namun Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah ke titik jenuh. Bantul sebagai penyanggah kedua wilayah perkotaan juga berkembang relatif cepat. Kulon Progo yang diharapkan akan meroket perkembangan ekonominya seiring dengan pembangunan mega proyek *Yogyakarta International Airport* (YIA), laju pertumbuhan memang sudah melesat paling tinggi meskipun secara absolut, nilainya masih yang paling kecil. Sementara Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dan kepariwisataan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Gunungkidul sudah menembus angka 5 persen sejak tahun 2017, namun untuk memacu perkembangan ekonominya, Gunung kidul masih membutuhkan suntikan investasi yang lebih tinggi.

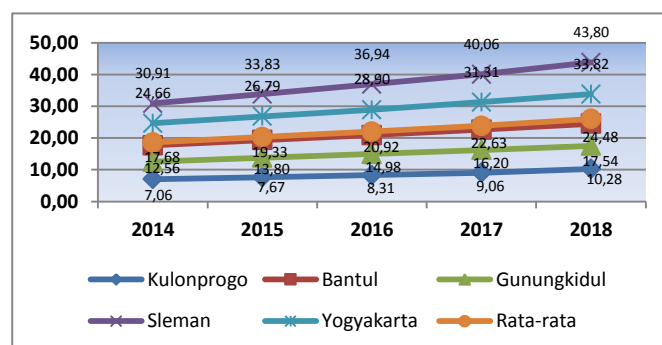
**Tabel 4.6. Nilai PDRB Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2014–2018**

Kabupaten/Kota/Provinsi	2014	2015	2016	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>***)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	7.056.572	7.671.548	8.312.455	9.063.335	10.281.013
Bantul	17.682.925	19.325.203	20.919.336	22.633.737	24.480.270
Gunungkidul	12.557.371	13.798.657	14.980.281	16.199.842	17.538.629
Sleman	30.912.239	33.826.505	36.937.043	40.063.434	43.803.585
Kota Yogyakarta	24.664.285	26.791.936	28.895.413	31.309.045	33.818.853
<b>DIY</b>	<b>92.842.484</b>	<b>101.440.518</b>	<b>110.009.486</b>	<b>119.172.905</b>	<b>129.877.458</b>

Keterangan: \*) Angka sementara      \*\*\*) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

**Gambar 4.5. Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah), 2014 - 2018**



Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata DIY pada periode tahun 2014-2018. Ternyata Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih menjadi penopang utama perekonomian di DIY. Kabupaten Bantul berada pada level dekat dengan nilai rata-rata DIY. Sementara kinerja ekonomi Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masih di bawah rata-rata DIY dan jarak dengan rata-rata DIY juga masih relatif besar. Dari gambar tersebut juga terlihat kesenjangan nilai PDRB yang paling lebar antar Sleman dengan Kulon Progo.

Dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul masih menempati urutan keempat sampai dengan tahun 2018. Kegiatan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha pertanian yang diusahakan masih di lahan pertanian pegunungan berbatu karena kondisi tanahnya memang demikian. Hal ini yang membuat Gunungkidul sulit untuk memacu produktivitas pertanian terutama untuk komoditas padi dan sayuran yang memerlukan tanah yang subur dan banyak air. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah dan juga jumlah penduduk terkecil mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar, yakni menempati urutan kedua. Sebagai ibu kota DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih maju, sehingga semua aktivitas ekonomi tersedia, kecuali pertanian dan penggalian.

**Tabel 4.7. Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2018<sup>\*\*\*</sup>)**

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	1.788.439	3.376.082	4.247.160	3.234.968	50.621
Pertambangan dan Penggalian	168.785	134.976	213.331	169.102	1.149
Industri Pengolahan	1.239.285	3.687.881	1.657.720	5.777.651	4.485.033
Pengadaan Listrik, Gas	9.016	34.822	16.787	50.236	75.277
Pengadaan Air	12.979	19.243	27.654	19.930	48.378
Konstruksi	1.376.341	2.357.547	1.758.730	5.159.978	2.683.151
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.374.164	2.126.762	1.659.975	3.441.651	2.550.075
Pengangkutan & Pergudangan	766.582	1.156.327	859.503	3.367.001	1.326.612
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	385.438	2.870.293	1.023.602	4.457.070	4.578.377
Informasi dan Komunikasi	502.814	1.777.372	1.252.636	3.480.673	3.521.879
Jasa Keuangan	314.797	693.598	404.314	1.422.868	2.269.743
Real Estat	323.861	1.597.757	631.985	3.380.572	3.072.637
Jasa Perusahaan	27.289	116.878	75.780	723.571	365.438
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	920.017	1.909.089	1.678.922	2.987.919	3.486.756
Jasa Pendidikan	573.165	1.672.874	1.077.731	4.124.554	3.101.518

Jasa Kesehatan	139.758	449.913	346.613	1.016.164	1.283.065
Jasa Lainnya	358.283	498.855	606.190	989.677	919.144
<b>PDRB</b>	<b>10.281.013</b>	<b>24.480.270</b>	<b>17.538.629</b>	<b>43.803.585</b>	<b>33.818.853</b>

Keterangan : \*\*\*) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY.

Komposisi struktur ekonomi masing-masing daerah menurut kategori menarik untuk dicermati karena dapat mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi antar kabupaten/kota. Struktur dan kontribusi kategori PDRB menurut lapangan usaha di kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Beberapa produk komoditas pertanian unggulan DIY berasal dari tiga kabupaten ini, seperti: padi, pisang, cabai, bawang merah, kelapa, kakao, dan lain-lain. Penggerak utama perekonomian di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan. Kedua wilayah ini selain merupakan pusat bisnis seperti supermarket, *hipermart*, rumah pertokoan, hotel, dan bisnis hiburan, juga menjadi sentra industri baik usaha mikro-kecil maupun usaha menengah-besar. Sementara itu, penopang perekonomian di Kota Yogyakarta adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Idealnya, Pencapaian PDRB yang tinggi disertai pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Jika tidak, maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Walaupun indikator pemerataan pendapatan yang akurat sangat sulit diperoleh, namun indeks gini dan PDRB per kapita dapat digunakan untuk melihat pendekatan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi pendapatan daerah kepada penduduknya. Konsep dan makna angka PDRB per kapita telah dijelaskan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan indeks gini akan dibahas lebih jauh di Bab 6.

**Tabel 4.8. Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di DIY (persen), 2016 - 2018**

Kabupaten/kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2016	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>***)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian	19,96	18,93	17,40
	2. Konstruksi	8,55	9,11	13,39
	3. Perdagangan	13,61	14,03	13,37
Bantul	1. Industri Pengolahan	15,18	15,24	15,06
	2. Pertanian	14,39	13,91	13,79
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,67	11,74	11,72
Gunungkidul	1. Pertanian	25,28	24,48	24,22
	2. Konstruksi	9,40	9,649	10,03
	3. Adm, Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9,42	9,653	9,57
Sleman	1. Industri Pengolahan	13,38	13,27	13,19
	2. Konstruksi	10,72	10,92	11,78

	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,27	10,34	10,18
Yogyakarta	1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,37	13,55	13,54
	2. Industri Pengolahan	13,69	13,47	13,26
	3. Informasi dan Komunikasi	10,38	10,44	10,41

Keterangan: \*\*\*) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Hasil hitungan PDRB per kapita kabupaten/kota di DIY menunjukkan kesenjangan pendapatan antarwilayah cukup besar. Sampai dengan tahun 2017 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu 79,1 juta rupiah (Tabel 4.9). Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai PDRB-nya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya relatif sedikit. Sementara itu Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai PDRB paling tinggi mencatat PDRB per kapita sebesar 36,3 juta rupiah, jauh di bawah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Sleman cukup besar yaitu 2,8 kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. PDRB per kapita terendah adalah Gunungkidul yaitu 23,8 juta rupiah. Sementara itu, Bantul dan Kulon Progo berbeda tipis, masing-masing 24,3 juta rupiah dan 24,1 juta rupiah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018 Kulon Progo mulai melampaui Gunungkidul. Kondisi ini masih mungkin berkembang selama dua hingga tiga tahun mendatang.

**Tabel 4.9. Nilai PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2014-2018**

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2014	2015	2016	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>***)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	17.307.864	18.611.318	19.949.109	21.513.038	24.147.552
Bantul	18.430.369	19.891.904	21.269.712	22.741.440	24.317.537
Gunungkidul	17.741.562	19.291.212	20.734.555	22.210.915	23.822.862
Sleman	26.775.411	28.973.924	31.289.877	33.567.684	36.299.889
Yogyakarta	60.501.060	64.918.044	69.170.145	74.063.580	79.108.798
<b>DIY</b>	<b>25.526.402</b>	<b>27.571.532</b>	<b>29.552.527</b>	<b>31.665.527</b>	<b>34.152.466</b>

Keterangan: \*\*\*) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS D.I. Yogyakarta

#### F. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi

Perekonomian provinsi-provinsi di Pulau Jawa mempunyai peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa empat besar provinsi yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDB (total PDRB 34 provinsi) berada di Pulau Jawa, antara lain: DKI Jakarta (17,3 persen), Jawa Timur (14,6 persen), Jawa Barat (13,1 persen), dan Jawa Tengah (8,5 persen). Jika dijumlahkan, terlihat bahwa lebih dari setengah bagian nilai PDB merupakan kontribusi Pulau Jawa, yakni 58,5 persen. Hal ini menunjukkan

bahwa kegiatan ekonomi masih dominan di Pulau Jawa. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih banyak didominasi oleh aktivitas industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Selanjutnya, sebagai pemegang kontribusi ekonomi terbesar kelima diduduki oleh Provinsi Riau (5,04 persen). Dalam pembentukan perekonomian Pulau Jawa, kontribusi perekonomian provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, dan Banten meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Tengah menurun.

**Tabel 4,10, Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2018**

PROPINSI	2018				
	ADHB (Juta Rp)	ADHK (Juta Rp)	Pertum- buhan (%)	Kontribusi (%)	
				Thd Pulau	Thd 34 Prov
<b>Sumatera</b>	<b>3.233.250.324,18</b>	<b>2.229.523.882,19</b>	<b>4,54</b>	<b>100,00</b>	<b>21,58</b>
01. Aceh	155.912.315,34	126.824.491,42	4,61	4,82	1,04
02. Sumatra Utara	741.192.693,75	512.765.628,04	5,18	22,92	4,95
03. Sumatra Barat	230.528.812,66	163.995.268,35	5,14	7,13	1,54
04. Riau	755.274.285,01	482.087.215,74	2,34	23,36	5,04
05. Jambi	208.378.559,43	142.995.279,81	4,71	6,44	1,39
06. Sumatra Selatan	419.723.108,47	298.569.335,15	6,04	12,98	2,80
07. Bengkulu	66.412.895,04	44.171.161,19	4,99	2,05	0,44
08. Lampung	333.681.431,48	232.214.280,17	5,25	10,32	2,23
09. Kep. Bangka Belitung	73.069.313,34	52.212.088,31	4,45	2,26	0,49
10. Kepulauan Riau	249.076.909,67	173.689.134,01	4,46	7,70	1,66
<b>Jawa</b>	<b>8.764.674.064,49</b>	<b>6.192.835.264,54</b>	<b>5,72</b>	<b>100,00</b>	<b>58,49</b>
11. DKI Jakarta	2.599.173.748,68	1.736.195.619,87	6,17	29,66	17,34
12. Jawa Barat	1.962.231.581,05	1.419.689.115,90	5,64	22,39	13,09
13. Jawa Tengah	1.268.700.965,90	941.283.278,28	5,32	14,48	8,47
14. DI Yogyakarta	129.877.458,01	98.026.563,57	6,20	1,48	0,87
15. Jawa Timur	2.189.783.696,95	1.563.756.368,75	5,50	24,98	14,61
16. Banten	614.906.613,90	433.884.318,17	5,81	7,02	4,10
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	<b>457.389.660,14</b>	<b>310.415.811,87</b>	<b>2,68</b>	<b>100,00</b>	<b>3,05</b>
17. Bali	234.430.724,43	154.150.978,73	6,35	51,25	1,56
18. Nusa Tenggara Barat	123.871.683,63	90.323.419,50	-4,56	27,08	0,83
19. Nusa Tenggara Timur	99.087.252,08	65.941.413,63	5,13	21,66	0,66
<b>Kalimantan</b>	<b>1.228.885.101,76</b>	<b>875.935.542,47</b>	<b>3,91</b>	<b>100,00</b>	<b>8,20</b>
20. Kalimantan Barat	194.032.851,45	130.584.092,05	5,06	15,79	1,29
21. Kalimantan Tengah	138.740.715,77	94.595.743,89	5,64	11,29	0,93
22. Kalimantan Selatan	171.935.747,93	128.106.382,26	5,13	13,99	1,15
23. Kalimantan Timur	638.116.899,82	464.823.485,35	2,67	51,93	4,26
24. Kalimantan Utara	86.058.886,79	57.825.838,92	6,04	7,00	0,57
<b>Sulawesi</b>	<b>931.896.287,74</b>	<b>643.347.705,85</b>	<b>6,65</b>	<b>100,00</b>	<b>6,22</b>
25. Sulawesi Utara	119.543.612,13	84.258.691,29	6,01	12,83	0,80
26. Sulawesi Tengah	150.636.318,64	103.617.685,51	6,30	16,16	1,01
27. Sulawesi Selatan	462.341.955,42	309.243.627,68	7,07	49,61	3,09
28. Sulawesi Tenggara	118.092.655,33	88.328.518,19	6,42	12,67	0,79
29. Gorontalo	37.736.271,07	26.722.592,91	6,51	4,05	0,25
30. Sulawesi Barat	43.545.475,15	31.176.590,27	6,23	4,67	0,29

<b>Maluku dan Papua</b>	<b>369.866.535,88</b>	<b>274.697.966,97</b>	<b>6,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>
31. Maluku	43.064.611,68	29.465.362,49	5,94	11,64	0,29
32. Maluku Utara	36.497.642,54	25.050.118,48	7,92	9,87	0,24
33. Papua Barat	79.644.467,55	60.453.560,39	6,24	21,53	0,53
34. Papua	210.659.814,10	159.728.925,61	7,33	56,96	1,41

Kontribusi PDRB DIY terhadap PDB nasional maupun terhadap PDRB Pulau Jawa meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun tidak terlalu signifikan. Peningkatannya hanya 0,01 poin, yaitu dari 1,47 persen menjadi 1,48 persen, dan peringkatnya terendah di antara enam provinsi. Sementara kontribusi terhadap 34 provinsi di Indonesia masih bertahan di posisi 0,87, hanya meningkat tipis sebesar 0,01 poin dibandingkan sebelumnya. Peningkatan kontribusi perekonomian DIY, baik di level Pulau Jawa dan level nasional tidak terlalu signifikan. Kontribusi DIY yang relatif stagnan tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi DIY meskipun di atas pertumbuhan nasional namun masih belum mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDB Indonesia karena ternyata banyak provinsi lain yang pertumbuhannya melaju lebih cepat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi DIY biasanya menduduki posisi terendah, kali ini pertumbuhan ekonomi DIY menunjukkan angka tertinggi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 6,20 persen, melampaui lima provinsi lainnya. Hal ini memberikan tantangan terhadap perencanaan pembangunan DIY untuk dapat lebih mendorong peningkatan pertumbuhan terutama untuk lapangan usaha potensial atau komoditas unggulan.

Di tingkat regional Kawasan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), posisi PDRB DIY berada di atas NTB dan NTT, tetapi di bawah Bali dan semua provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini berarti pula bahwa DIY berada pada peringkat ke-7 di antara sejumlah 9 provinsi di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), naik satu peringkat dibanding tahun sebelumnya.





## **BAB 5**

### **PDRB MENURUT PENGELUARAN**

A. Struktur PDRB Pengeluaran

B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran





## BAB V

### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai PDRB dari sisi pengeluaran (*expenditure*). PDRB menurut pengeluaran menjelaskan alokasi pengeluaran nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor produksi dari masing-masing pelaku ekonomi dalam bentuk barang konsumsi akhir (*final goods*). Komponen yang dihitung dalam PDRB menurut pengeluaran meliputi pengeluaran untuk konsumsi akhir baik rumah tangga, pemerintah, maupun lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), ekspor luar negeri, impor luar negeri, ekspor antardaerah, dan impor antardaerah, serta perubahan inventori. Sesuai kebutuhan, ekspor-impor kadang disajikan menjadi satu yaitu ekspor neto baik ekspor-impor luar negeri maupun ekspor-impor antardaerah.

#### A. Struktur PDRB Pengeluaran

##### 1. Konsumsi Rumah Tangga

Perkembangan ekonomi secara umum sangat dipengaruhi oleh besaran serta pola dari setiap komponen permintaan akhir. Setiap komponen memiliki sifat yang khas mengikuti kondisi perekonomian yang terjadi serta kebijakan ekonomi yang diambil. Secara umum dan mencari ciri khas perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama roda perekonomian dari sisi pengeluaran. Demikian pula dengan perekonomian DIY, sebagian besar pendapatan yang diperoleh masih digunakan untuk memenuhi permintaan akhir konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran.

Secara nominal PDRB DIY dari tahun ke tahun terus meningkat. Ditinjau atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB Provinsi DIY meningkat dari sekitar 92,8 triliun di tahun 2014 menjadi 129,8 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2018, nilai konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp 86,7 triliun dari total nilai PDRB DIY yang sebesar Rp 129,8 triliun atau mencapai sekitar 66,80 persen. Pangsa konsumsi rumah tangga ini sedikit menurun dibanding dengan pangsa 2017 yang sebesar 68,2 persen. Porsi konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi dalam pengeluaran PDRB di satu sisi menguntungkan karena mencerminkan aktivitas ekonomi bergairah dan permintaan domestik biasanya lebih stabil. Perekonomian yang ditopang oleh konsumsi domestik merupakan aset yang bisa menjaga pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Namun, di sisi lain perlu disadari

bahwa komponen ini bersifat konsumtif sehingga dalam jangka panjang tidak akan menggerakkan investasi sebagai penggerak ekonomi yang ideal. Oleh karena itu harus ada kesesuaian dengan komponen lainnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dari sisi pengeluaran, yaitu perlunya dorongan dari investasi dan kinerja ekspor yang lebih optimal.

**Tabel 5.1. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2014–2018**

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	62.875.141	68.730.528	74.429.796	81.335.810	86.753.197
a. Makanan dan Minuman	26.694.388	28.969.375	31.379.792	33.878.342	36.043.724
b. Bukan Makanan	36.180.753	39.761.153	43.050.003	47.457.468	50.709.473
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	2.948.427	3.171.193	3.225.070	3.756.395	4.095.046
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	15.347.428	17.214.154	18.321.761	19.508.072	21.346.113
4. Pembentukan modal tetap bruto	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.111.436	43.173.678
5. Perubahan Inventori	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491
6. Ekspor Luar Negeri	5.465.423	6.266.264	6.495.282	7.436.959	8.749.632
7. Impor Luar Negeri	4.085.245	5.066.145	5.922.732	6.540.719	7.206.068
8. Net Ekspor Antardaerah	-18.433.682	-20.826.153	-21.311.589	-24.845.137	-28.469.631
<b>P D R B</b>	<b>92.842.484</b>	<b>101.440.518</b>	<b>109.962.354</b>	<b>119.131.999</b>	<b>129.877.458</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY

Ket : \* angka sementara; \*\* angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, yaitu produk barang dan jasa dinilai dengan harga pada tahun dasar, yaitu tahun 2010. Berdasarkan penghitungan PDRB ADH Konstan di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Tabel 5.2 memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi DIY selama kurun waktu 2014-2018 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik pada PDRB ADHB maupun ADHK komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi pengeluaran.

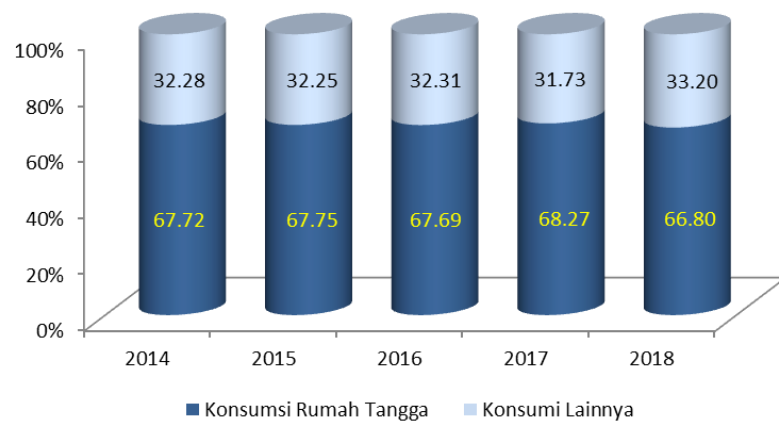
**Tabel 5.2.** Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2014–2018

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	47.923.893	50.193.386	52.619.164	55.364.064	57.552.317
a. Makanan dan Minuman	18.492.697	19.195.190	19.920.604	20.834.663	21.570.908
b. Bukan Makanan	29.431.196	30.998.196	32.698.560	34.529.401	35.981.409
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	2.317.123	2.384.374	2.362.344	2.589.250	2.657.427
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	12.056.063	12.719.134	12.949.746	13.104.559	13.559.566
4. Pembentukan modal tetap bruto	21.358.622	22.286.615	23.616.948	24.791.862	27.313.862
5. Perubahan Inventori	930.599	974.645	1.045.164	1.066.314	1.104.088
6. Ekspor Luar Negeri	4.278.248	4.416.252	4.400.889	4.808.527	5.424.803
7. Impor Luar Negeri	3.228.540	3.728.749	4.492.511	4.905.222	5.210.391
8. Net Ekspor Antardaerah	(6.099.926)	(5.771.205)	(4.815.934)	(4.517.332)	(4.375.109)
<b>P D R B</b>	<b>79.536.082</b>	<b>83.474.452</b>	<b>87.685.810</b>	<b>92.302.022</b>	<b>98.026.564</b>

Keterangan : \*) angka sementara; \*\* angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY

**Gambar 5.1.** Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY (persen), 2014-2018



Bila dilihat lebih jauh menurut jenis barang yang dikonsumsi rumah tangga, selama periode 2014-2018 persentase konsumsi bukan makanan selalu lebih besar dibandingkan konsumsi makanan (Tabel 5.3). Pada tahun 2018, porsi konsumsi makanan dan bukan makanan sebesar 27,8 persen dan 39 persen terhadap total PDRB. Konsumsi bukan makanan dengan nilai proporsi terbesar adalah pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya, transportasi/angkutan, dan pengeluaran untuk pendidikan.

**Tabel 5.3. Struktur PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2014 – 2018**

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	67,72	67,75	67,69	68,27	66,80
a. Makanan dan Minuman	28,75	28,56	28,54	28,44	27,75
b. Bukan Makanan	38,97	39,20	39,15	39,84	39,04
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	3,18	3,13	2,93	3,15	3,15
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	16,53	16,97	16,66	16,38	16,44
4. Pembentukan modal tetap bruto	29,88	30,36	30,40	31,15	33,24
5. Perubahan Inventori	1,06	1,14	1,18	1,15	1,11
6. Ekspor Luar Negeri	5,89	6,18	5,91	6,24	6,74
7. Impor Luar Negeri	4,40	4,99	5,39	5,49	5,55
8. Net Ekspor Antardaerah	-19,85	-20,53	-19,38	-20,86	-21,92
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan : \*) angka sementara; \*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY

Tabel 5.3 menunjukkan besarnya kontribusi seluruh komponen terhadap total PDRB, terlihat semua komponen cenderung meningkat, kecuali ekspor antardaerah neto. Kecenderungan meningkatnya impor luar negeri di satu sisi mengurangi cadangan devisa yang tersedia, namun di sisi lain peningkatan impor berupa barang modal mencerminkan adanya geliat peningkatan permintaan produksi. Hal ini juga akan mendorong peningkatan investasi dan output bila dilihat dari sisi produksi. Net ekspor antardaerah cenderung menurun, artinya nilai arus barang dan jasa yang masuk lebih besar dibandingkan dengan yang keluar. Sisi positifnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan untuk konsumsi akhir maupun konsumsi antara meningkat karena menggeliatnya ekonomi DIY. Namun menurunnya porsi net ekspor antardaerah juga bisa bermakna terbatasnya penyediaan untuk memenuhi konsumsi internal daerah. Oleh karena itu kondisi ini dapat menjadi pendorong bagi unit-unit produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas produksi sehingga memiliki daya saing lebih terhadap produk luar daerah. Demikian pula seharusnya juga menjadi ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dengan akurasi kebijakan perencanaan maupun terobosan implementasinya untuk menyiapkan berbagai insentif investasi yang mudah dalam birokrasinya untuk dapat mendorong pembangunan industri berorientasi ekspor dan pabrikan yang menghasilkan produk kebutuhan di wilayah domestik.

## **2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)**

Di Provinsi DIY, konsumsi akhir LNPRT memiliki besaran dan kontribusi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan komponen lainnya pada PDRB menurut pengeluaran. Namun demikian, dengan berjalannya waktu, diharapkan peranan LNPRT bagi perekonomian DIY semakin meningkat. Tabel berikut menunjukkan peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB DIY selama lima tahun terakhir.

**Tabel 5.4 Perkembangan dan Struktur Konsumsi LNPRT DIY, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Konsumsi LNPRT (Miliar Rupiah)</b>					
a. ADHB	2.948	3.171	3.225	3.756	4.095
b. ADHK 2010	2.317	2.384	2.362	2.589	2.657
<b>Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)</b>	<b>3,18</b>	<b>3,13</b>	<b>2,93</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>10,58</b>	<b>2,90</b>	<b>-0,92</b>	<b>9,61</b>	<b>2,63</b>

Dilihat dari perkembangan selama lima tahun terakhir, total konsumsi LNPRT baik ADHB maupun ADHK cenderung mengalami peningkatan. Kontribusi LNPRT terhadap PDRB DIY relatif ajeg, pada kisaran 3 persen terhadap total PDRB DIY.

Dari sisi pertumbuhannya, selama lima tahun terakhir komponen LNPRT cukup berfluktuasi. Pertumbuhan komponen ini berturut-turut 10,58 persen, 2,90 persen, -0,92 persen, 9,61 persen, dan 2,63 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2017, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,58 persen dan 9,61 persen. Peningkatan tersebut disebabkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada tahun 2014 dan pelaksanaan pilkada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017.

### 3. Konsumsi Pemerintah

Menurut tatanan kehidupan bernegara, lembaga eksekutif pemerintah bukan hanya sebagai penyusun regulasi atau pembuat kebijakan dalam mengatur kehidupan bernegara, namun juga sebagai pelaksana kegiatan ekonomi, yakni sebagai konsumen akhir melalui instrumen belanja pemerintah. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan, seperti sebagai penyelenggara pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran pemerintah juga bisa hadir dalam bentuk intervensi program yang diperuntukkan membantu penduduk



yang berpenghasilan rendah berupa subsidi atau dalam bentuk hibah. Kegiatan-kegiatan tersebut selain membutuhkan anggaran yang tertuang dalam RAPBN/RAPBD, juga memerlukan biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau disingkat Konsumsi Pemerintah.

**Tabel 5.5 Perkembangan dan Struktur Konsumsi Pemerintah DIY, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rupiah)</b>					
a. ADHB	15.347	17.214	18.322	19.508	21.346
b. ADHK 2010	12.056	12.719	12.950	13.105	13.560
<b>Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)</b>	<b>16,53</b>	<b>16,97</b>	<b>16,66</b>	<b>16,38</b>	<b>16,44</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>4,35</b>	<b>5,50</b>	<b>1,81</b>	<b>1,20</b>	<b>3,47</b>

Secara total komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 15.347 miliar rupiah, kemudian terus meningkat hingga mencapai 21.346 miliar rupiah pada tahun 2018. Selama periode 2014-2018, kontribusi konsumsi pemerintah cenderung berfluktuasi meskipun relatif stabil, dengan kisaran nilai 16,33 persen sampai dengan 16,97 persen (Tabel 5.3). Indikasi ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian DIY cukup stabil, baik melalui kebijakan perencanaan maupun dalam tahapan implementasi pembangunan tahun demi tahun. Konsumsi pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang, nilai tambah belanja modal, output Bank Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

#### **4. Investasi**

Kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memerlukan penanaman modal atau investasi untuk menggerakkannya. Investasi dipenuhi dari penanaman modal domestik maupun asing. Investasi digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya peningkatan investasi baru sudah seharusnya akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan investasi selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan

penduduk melalui peluang kerja yang diciptakan dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Dalam buku *A System of National Accounts (SNA)* yang diterbitkan oleh PBB (*United Nations*), dijelaskan bahwa realisasi investasi di suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan nilai pembentukan modal tetap (domestik) bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif, sedangkan inventori (stok) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, berbentuk barang setengah jadi, barang input yang belum digunakan, atau juga berbentuk barang jadi yang belum terjual. **Untuk selanjutnya, jika disebut investasi fisik maka sudah merupakan gabungan/penjumlahan antara PMTB dan perubahan inventori.**

Nilai PMTB di DIY tahun 2018 mencapai Rp 43,17 triliun atau naik sekitar Rp 6,1 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp37,11 triliun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang naik sekitar Rp3,7 triliun. Sementara secara total investasi fisik 2018 sebesar Rp44,61 triliun. Selama lima tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di DIY cukup pesat, nilai investasi naik 55,30 persen. Akselerasi kinerja investasi tersebut selain sebagai dampak dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan, pengangkutan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan juga ditopang oleh berbagai pembangunan infrastruktur strategis di DIY, antara lain pembangunan *Yogyakarta International Airport* (YIA), Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS), revitalisasi kawasan Malioboro, serta pembangunan *underpass* Kentungan. Pertumbuhan komponen PMTB tahun 2018 mencapai sebesar 10,17 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi selama satu dekade terakhir.

Peran investasi terhadap perekonomian daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sumbangan investasi fisik terhadap PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 sebesar 30,94 persen naik menjadi 34,35 persen di tahun 2018 (Tabel 5.3). Peningkatan kontribusi tersebut didominasi oleh komponen PMTB yang naik dari 31,15 persen menjadi 33,24 persen.

Dalam menggerakkan roda perekonomian, investasi tidak hanya dinilai dari besarnya investasi yang masuk namun perlu dilihat seberapa efektif investasi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat efisiensi penanaman modal adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan pertambahan output dalam periode tertentu. Dalam pembahasan ini, ICOR yang digunakan adalah konsep ICOR yang dihitung dengan *time-lag* 0. Artinya, investasi yang ditanam pada tahun tertentu akan menghasilkan

tambahan output pada tahun itu juga. Untuk memudahkan perhitungan karena keterbatasan data yang tersedia, maka sebagai pendekatan ICOR digunakan ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*).

Selama periode 2014-2018 angka ICVAR DIY menunjukkan perkembangan yang positif, yang bermakna produktivitas dari investasi yang ditanamkan sudah mulai menunjukkan kemajuan, meskipun masih sedikit kurang efisien. ICVAR tahun 2014 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 5,70 persen. Kemudian selama rentang waktu 4 tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 pertumbuhan kebutuhan investasi yang diperlukan menunjukkan penurunan, yaitu 4,96 persen (Tabel 5.6). Angka ini dimaknai bahwa untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi satu persen pertumbuhan investasi yang diperlukan menjadi sebesar 4,96 persen. Namun perlu diperhatikan bahwa ICVAR (ICOR) ini hasil penghitungan dengan *time-lag* 0, artinya hanya dilihat dampak investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Padahal, dilihat dari sifat investasi yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian adalah investasi jangka panjang. Sehingga, manfaat investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru akan dirasakan pada tahun-tahun mendatang. Pembahasan lebih rinci tentang ICOR selanjutnya akan diuraikan pada publikasi Analisis ICOR DIY.

**Tabel 5.6. Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2014–2018**

Uraian	2014	2015	2016 <sup>*)</sup>	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PMTB (juta rupiah)	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.111.436	43.173.678
Share thd. PDRB (persen)	29,88	30,36	30,40	31,15	33,24
2. Perubahan Inventori (juta rupiah)	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491
Share thd. PDRB (persen)	1,06	1,14	1,18	1,15	1,11
3. PMTB + Perubahan Inventori (juta rp)	28.724.991	31.950.678	34.724.766	38.479.620	44.609.170
(persen)	30,94	31,50	31,58	32,30	34,35
4. ICOR, Investasi = PMTB (lag 0)	5,46	5,66	5,61	5,37	4,77
5. ICOR, Investasi = PMTB + Perubahan Inventori (lag 0)	5,70	5,91	5,86	5,60	4,96

Keterangan : \*) angka sementara      \*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY, data diolah

## **5. Ekspor dan Impor**

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian halnya dalam aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah), maupun PMTB dan inventori di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor.

Sebagai kota pelajar, kota wisata, dan kota budaya, DIY memiliki potensi yang besar dalam komponen ekspor dan impor ini, baik ekspor/impor barang maupun jasa. Kinerja pemerintah dalam mendorong pembangunan kepariwisataan serta industri kreatif dan inovatif ditunjukkan dengan makin berkembangnya industri kerajinan khas DIY baik industri makanan/minuman maupun industri barang dan jasa lain. Sebagian produk industri tersebut menjadi komoditas ekspor. Sebaliknya, oleh karena Yogyakarta menjadi destinasi utama kegiatan wisata dan pendidikan, dampak kegiatan ekonomi yang timbul adalah DIY menjadi pusat pemasaran bagi produk-produk dari daerah lain atau dari impor luar negeri.

Aktivitas ekspor dan impor adalah indikator penerapan perekonomian terbuka di suatu wilayah. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya ekspor impor, antara lain disebabkan karena kelebihan atau kekurangan produk barang dan jasa di suatu wilayah/negara, motivasi untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan, perbedaan kekayaan sumber daya antar wilayah/negara, serta perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik (residen) tetapi diperuntukkan bagi konsumsi oleh pihak luar negeri (*nonresiden*). Berbeda dengan ekspor, komponen impor mencatat tambahan penyediaan (*supply*) produk barang dan jasa di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari luar negeri atau non residen.

Pada tahun 2018 nilai ekspor luar negeri Provinsi DIY tercatat sebesar 8,75 triliun rupiah. Pada periode 2014-2018, DIY mengalami surplus perdagangan luar negeri dengan nilai tertinggi dicapai pada periode tahun 2018 yaitu sebesar 1,5 triliun rupiah. Dibandingkan tahun 2017 surplus perdagangan luar negeri DIY tahun 2018 meningkat sebesar 647 milyar rupiah.

Sementara itu, komponen impor DIY selama tahun 2014-2018 juga tumbuh berfluktuasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, impor tertinggi terjadi di tahun 2016. Tingginya nilai impor dan menurunnya nilai ekspor mengakibatkan net ekspornya tumbuh

negatif. Tingginya nilai impor di tahun 2016 tersebut sebagai akibat berlipatnya arus barang dari Hongkong dan Tiongkok yang masuk ke DIY selama tahun 2016.

Terjadinya aktivitas ekspor-impor tidak selalu berawal dari komunikasi formal pemerintah namun bisa bermula dari komunikasi atau transaksi perdagangan yang terjadi antara wisatawan dan pedagang. Aktivitas ekonomi lebih lanjut dari proses tersebut dapat berpeluang membentuk jaringan pemasaran produk-produk domestik lebih luas bahkan juga ke daerah-daerah lain. Produk sektor industri mempunyai pangsa transaksi komoditas yang cukup dominan dalam kegiatan ekspor antarprovinsi, sedangkan jasa hotel, restoran, jasa angkutan, dan jasa informasi dan komunikasi yang dinikmati oleh wisatawan merupakan bentuk transaksi ekspor jasa.

Selama kurun waktu 2014-2018 nilai komponen ekspor neto antarprovinsi DIY bernilai negatif. Artinya, nilai impor barang dan jasa yang masuk DIY melebihi nilai ekspor barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan barang dan jasa dari luar provinsi jauh lebih besar. Barang dan jasa impor tersebut dapat berkaitan dengan kegiatan sektor pertanian maupun sektor ekonomi lainnya. Tingginya konsumsi impor ini, untuk DIY lebih banyak bernilai positif karena menggerakkan sektor produksi yang ada. Namun perkembangan impor antarprovinsi perlu dipantau karena menjadi beban bagi perencanaan bila hanya menjadi pasar ekspor barang/jasa dari luar DIY. Kekurangan pasokan kebutuhan barang dan jasa seharusnya menjadi peluang bagi produsen/penyedia dari lokal DIY dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada.

Dalam kurun waktu 2014-2018, rata-rata pertumbuhan ekspor 6,12 persen sedangkan impor 12,71 persen. Rata-rata pertumbuhan ekspor antardaerah masih tumbuh -7,97 persen yang dipicu di antaranya oleh terjadinya kontraksi sebesar 16,55 persen di tahun 2016. Pada tahun 2018 net ekspor antardaerah mengalami perlambatan sebesar 4,82 persen.

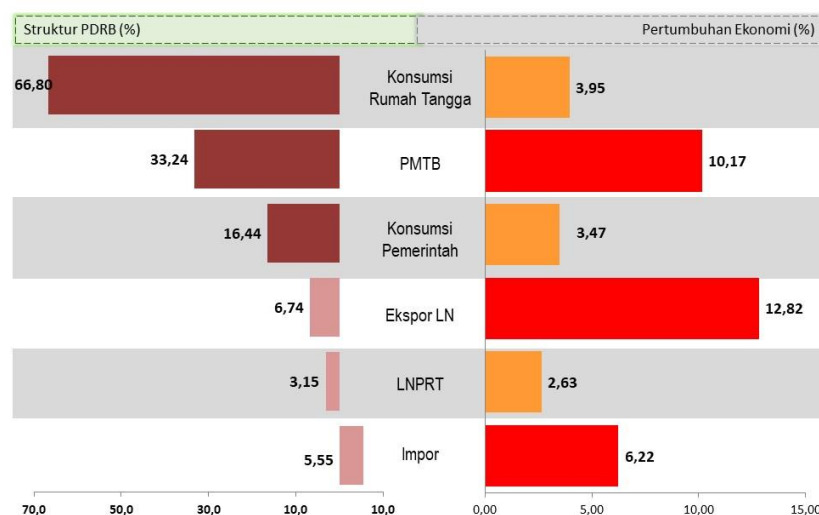
#### **B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran**

Kebijakan pertumbuhan ekonomi merupakan aspek terpenting dalam setiap perumusan kebijakan makro yang disusun oleh pemerintah, selain upaya untuk menekan laju inflasi, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, maupun untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta defisit neraca pembayaran (Nellis dan Parker, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Pertumbuhan ekonomi DIY dari sisi pengeluaran menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. Dari tahun 2014 hingga tahun 2018 pertumbuhan ekonomi DIY berturut-turut adalah 5,17 persen, 4,95 persen, 5,05 persen, 5,26 persen, dan 6,20 persen (Tabel 5.7). Tahun 2014 komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi adalah impor dan ekspor luar negeri yang masing-masing tumbuh sebesar 44,03 persen dan 20,80 persen.

Sementara di tahun 2018 komponen dengan pertumbuhan tertinggi bergeser pada komponen ekspor luar negeri dan PMTB, masing-masing tumbuh sebesar 12,82 persen dan 10,17 persen. Meskipun bukan komponen dengan andil yang dominan di DIY, ekspor luar negeri dan PMTB mampu mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi. Tercapainya pertumbuhan yang tinggi pada komponen ekspor dan investasi menunjukkan fenomena positif pada perekonomian suatu wilayah. Demikian pula yang terjadi di DIY. Salah satu pendorong pertumbuhan komponen ini adalah karena mega proyek bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang mampu menstimulasi kegiatan perekonomian sebagian wilayah yang terdampak langsung dengan proyek YIA, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian DIY.

**Gambar 5.2. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di DIY, 2018**



Meskipun struktur pengeluaran di DIY didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, namun komponen ini hanya mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,95 persen di tahun 2018. Menurut jenis pengeluaran komponen rumah tangga, antara kelompok makanan dan bukan makanan juga tumbuh cukup baik, yaitu masing-masing sebesar 3,53 persen dan 4,21 persen. Pertumbuhan kelompok makanan tidak lebih tinggi

dibanding dengan tahun sebelumnya yang tumbuh di atas empat persen. Demikian halnya dengan kelompok bukan makanan, pertumbuhan kelompok bukan makanan tahun 2018 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir (Tabel 5.7).

**Tabel 5.7. Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2014–2018**

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017 *	2018 ***	Rata-rata 2014-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	4,94	4,74	4,83	5,22	3,95	4,68
a. Makanan dan Minuman	3,01	3,80	3,78	4,59	3,53	3,92
b. Bukan Makanan	6,18	5,32	5,49	5,60	4,21	5,15
2. Pengeluaran konsumsi LNPR	10,58	2,90	-0,92	9,61	2,63	3,49
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	4,35	5,50	1,81	1,20	3,47	2,98
4. Pembentukan modal tetap bruto	5,78	4,34	5,97	4,97	10,17	6,34
5. Perubahan Inventori	11,78	4,73	7,24	2,02	3,54	4,37
6. Ekspor Luar Negeri	20,80	3,23	-0,35	9,26	12,82	6,12
7. Impor Luar Negeri	44,03	15,49	20,48	9,19	6,22	12,71
8. Net Ekspor Antardaerah	1,42	-5,39	-16,55	-6,20	-3,15	-7,97
<b>P D R B</b>	<b>5,17</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>5,36</b>

Keterangan : \*) angka sementara; \*\*) angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Kondisi perekonomian DIY yang semakin membaik ditunjukkan dengan angka PDRB yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan kondisi ekonomi tersebut tercermin dari nilai PDRB ADHB dan ADHK serta pertumbuhan total PDRB. Tabel 5.7 memperlihatkan perkembangan pertumbuhan seluruh komponen PDRB menurut pengeluaran selama kurun waktu tahun 2014-2018. Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2014-2018 secara rata-rata mencapai 5,36 persen per tahun, dengan pertumbuhan masing- masing tahun sebesar 5,17 persen (2014); 4,95 persen (2015); 5,05 persen (2016); 5,26 persen (2017); dan 6,20 persen (2018). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 (6,20%), sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 (4,95%).

## **BAB 6**

### **ANALISIS INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN di DIY**

- A. Pertumbuhan Ekonomi
- B. Stabilitas Harga
- C. Ketenagakerjaan dan Pengangguran
- D. Kemiskinan dan Ketimpangan
- E. Pembangunan Manusia
- F. Potensi dan Disparitas Ekonomi Kewilayahan







## **BAB VI**

### **ANALISIS INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DI DIY**

Pembangunan merupakan proses multidimensional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Untuk mengukur capaian pembangunan tersebut indikator pembangunan yang digunakan tidak hanya indikator ekonomi, namun juga indikator sosial.

Saat ini indikator strategis yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan mendatang di antaranya adalah inflasi, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, gini ratio (rasio gini), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai salah satu indikator strategis, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi sasaran target dalam perencanaan pembangunan. Namun perlu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup bila ternyata belum mampu menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, serta berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi seharusnya juga diperhatikan, yaitu: pertumbuhan yang diiringi oleh pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran.

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

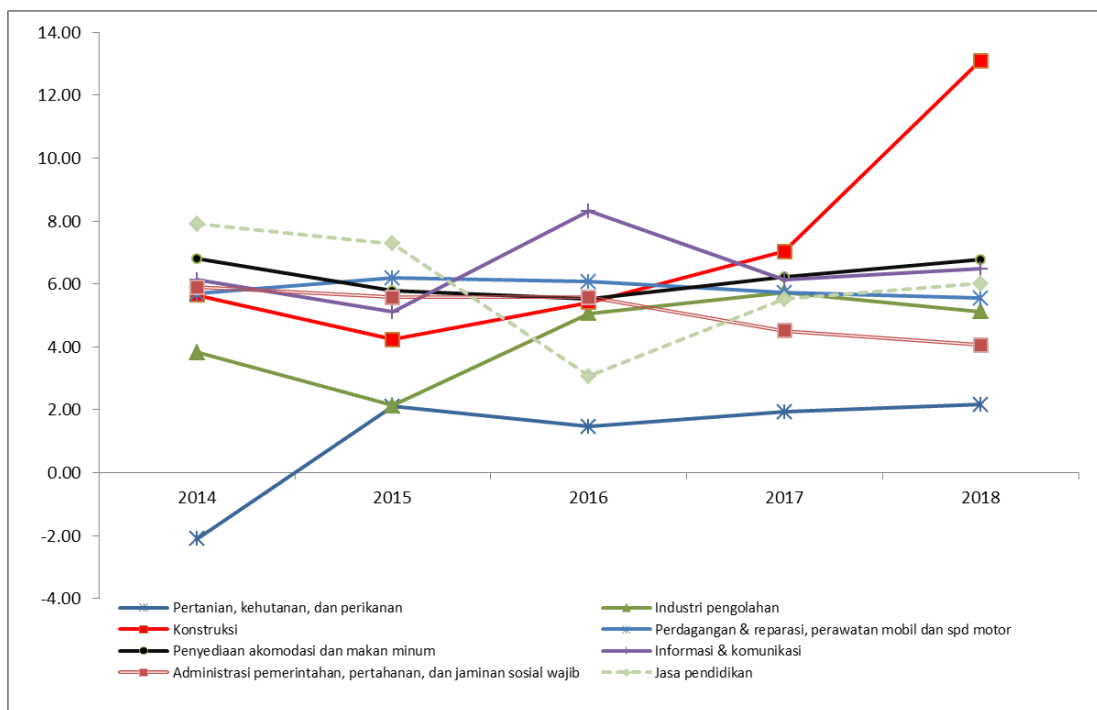
###### **a. Tren Pertumbuhan Kategori**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk merepresentasikan fenomena ekonomi makro suatu negara maupun wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bermakna perkembangan kesejahteraan suatu negara atau wilayah, yang tercermin pada peningkatan output per kapita sehingga mendorong atau memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, atau dalam bahasa lain meningkatkan daya beli masyarakat.

Selama kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan ekonomi DIY sudah pada kondisi tren yang menggembirakan. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5,36 persen per tahun, tetapi arah pertumbuhan ekonomi DIY dalam dua tahun terakhir sudah menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi menurut kategori tampak masih terjadi fluktuasi yang relatif tinggi dan bahkan kategori pertanian mengalami kontraksi pada tahun tersebut. Kondisi perekonomian DIY mulai ke arah pertumbuhan yang kondusif sejak tahun 2015, hal ini ditunjukkan oleh perkembangan semua lapangan usaha yang tumbuh positif dan berlanjut hingga tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam *recovery* ekonomi menunjukkan hasilnya, meskipun belum sepenuhnya membaik.

**Gambar 6.1. Pertumbuhan Kategori-Kategori dengan Pangsa Terbesar dalam PDRB DIY (persen), 2014-2018**



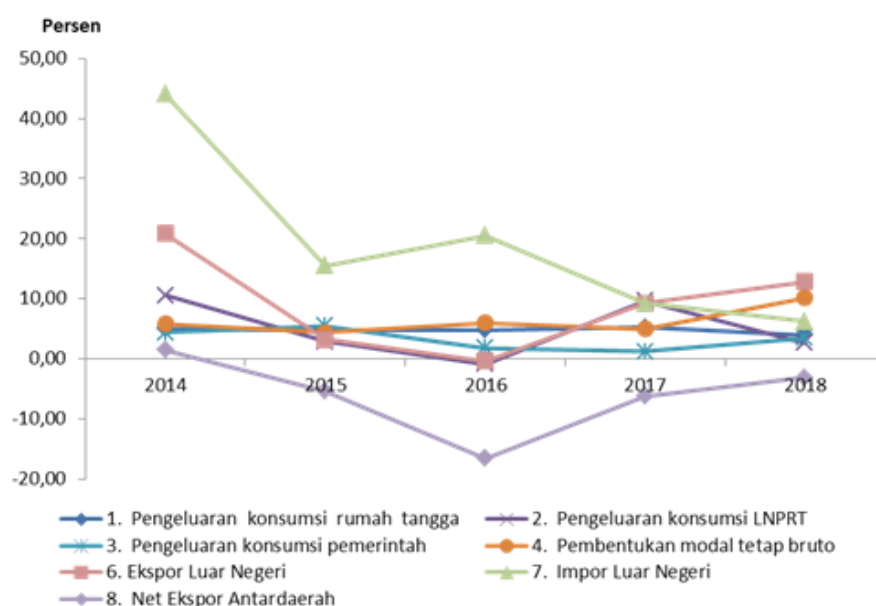
DIY berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup gemilang pada tahun 2018, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen. Kondisi ekonomi DIY dari sudut pandang pertumbuhan produksi lapangan usaha atau kategori ekonomi cukup membanggakan. Landasan ekonomi DIY cukup mantap, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB DIY, antara lain yaitu industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan. Dilihat tren pertumbuhan, kategori konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum mempunyai prospek semakin membaik. Sementara yang perlu menjadi perhatian dari pergerakan laju pertumbuhan kategorial adalah pada kategori jasa keuangan dan asuransi. Setelah menjadi kategori usaha dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2014 dan 2015, di tahun-tahun selanjutnya lapangan usaha ini masih tertahan pertumbuhannya. Bahkan, peringkat pertumbuhan di tahun 2016 dan 2017 merosot cukup jauh.

**b. Tren Pertumbuhan Konsumsi**

Pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran dibangun oleh 8 (delapan) komponen utama, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan ekspor antardaerah netto. Menurut Eachern (2000: 149) untuk memahami pendekatan PDRB sisi pengeluaran, agregat sembilan komponen tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran/pembelian pemerintah, dan ekspor netto. Oleh karena itu dalam pembahasan ini pengamatan tren pertumbuhan PDRB sisi pengeluaran difokuskan pada empat komponen tersebut.

Pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2014-2018 terlihat menunjukkan arah perkembangan yang lebih baik. Pada tahun 2018 pertumbuhan lebih banyak dikendalikan oleh kegiatan pembentukan modal tetap bruto, ekspor luar negeri, dan impor luar negeri. Meskipun berperan mengendalikan pertumbuhan ekonomi DIY, tetapi peran komponen impor dalam dua tahun terakhir sudah mengalami pergeseran. Impor luar negeri merupakan faktor pengurang dalam PDRB. Bila impor luar negeri tidak dikondisikan dengan baik dalam jangka panjang akan mempengaruhi cadangan devisa DIY. Ekspor luar negeri yang diharapkan menjadi andalan perdagangan DIY, selama dua tahun terakhir sudah mulai menunjukkan peningkatan untuk mengimbangi kebutuhan arus masuk barang dan jasa dari luar negeri. Setelah mengalami kontraksi di 2016, ekspor luar negeri DIY tahun 2018 tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 12,82 persen. Sementara itu, kinerja pertumbuhan ekspor antar daerah DIY masih sering mengalami kontraksi.

**Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran (persen), 2014-2018**



Dengan demikian, dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi DIY digerakkan oleh semua komponen. Selama kurun waktu 2014-2018 pertumbuhan ekonomi pada kisaran angka 4,95 hingga 6,20 persen per tahun. Meskipun pertumbuhannya tidak tinggi namun relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36 persen. Rata-rata pertumbuhan ini masih sedikit lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan periode 2013-2017 yang sebesar 5,11 persen.

Dari sisi pengeluaran, tren pertumbuhan ekonomi juga mencatatkan bahwa DIY masih menjadi ladang pemasaran produk luar provinsi baik dari hasil produk pertanian maupun industri pengolahan. Hal ini menyangkut kebutuhan komoditas dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain yang harus disuplai dari luar provinsi karena produksi lokal tidak mencukupi. Sementara dari industri pengolahan penyebab tingginya impor ditengarai dari bahan baku industri besar-sedang dan juga industri mikro-kecil DIY yang didatangkan dari luar provinsi bahkan harus impor dari luar negeri, seperti bahan kerajinan perak.

## **2. Sebaran Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada level provinsi pada hakikatnya merupakan agregasi atau gabungan dari pertumbuhan semua wilayah kabupaten/kota yang berada di bawahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki andil atau kontribusi pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan ukuran ekonomi maupun tingkat perubahannya. Besarnya andil pertumbuhan juga sangat ditentukan oleh arah kebijakan pembangunan yang dijalankan apakah terpusat di suatu wilayah tertentu atau tersebar secara merata di seluruh wilayah.

Kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap struktur perekonomian DIY 2014-2018 cukup bervariasi. Secara umum, Kabupaten Sleman memiliki kontribusi nilai tambah terbesar dengan proporsi mencapai 33,72 persen terhadap total PDRB DIY 2018 dan diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar 26,03 persen. Kedua wilayah ini memiliki ukuran ekonomi yang paling besar, karena aktivitas perekonomian DIY terpusat di kedua wilayah. Sementara, Kabupaten Kulon Progo tercatat memiliki ukuran ekonomi paling kecil dengan kontribusi sebesar 7,91 persen terhadap perekonomian DIY tahun 2018.

Sebaran pertumbuhan yang dicapai oleh seluruh kabupaten/kota memiliki pola yang cukup bervariasi. Kabupaten Sleman tercatat menjadi wilayah yang selalu memiliki pertumbuhan ekonomi di atas level DIY. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul selalu menjadi wilayah yang pertumbuhan ekonominya di bawah level DIY. Perubahan pola pertumbuhan ekonomi terjadi selama periode 2017-2018. Kabupaten Kulon Progo yang pertumbuhannya selama 2014-2016 selalu lebih rendah dari level DIY, mulai tahun 2017-2018 mampu melejit di atas level pertumbuhan DIY. Bahkan, pertumbuhan selama periode tersebut tercatat paling tinggi di DIY dan mampu menembus angka dua digit yakni 10,62

persen di tahun 2018. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya aktivitas investasi terutama pembangunan bandar udara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Aktivitas pembangunan ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi DIY hingga mencapai level paling tinggi selama lebih dari dua dekade terakhir. Secara statistik, dampak lanjutan dari aktivitas pembangunan YIA adalah akan meningkatnya PDRB per kapita Kulon Progo baik nominal maupun riil. Namun, seberapa besar manfaat yang mampu dinikmati oleh penduduk Kulon Progo sangat tergantung dari seberapa besar keterlibatan mereka dalam aktivitas pembangunan tersebut. Apakah posisinya hanya sebagai penonton atau mampu menjadi bagian dari proses.

**Tabel 6.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2018 (Persen)**

Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017		2018	
	Pertum buhan	Andil	Pertum buhan	Andil	Pertum buhan	Andil	Pertum buhan	Andil	Pertum buhan	Andil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	4,57	0,35	4,62	0,34	4,76	0,35	5,97	0,45	10,62	0,81
Bantul	5,04	0,96	4,97	0,91	5,06	0,94	5,10	0,95	5,48	1,03
Gunungkidul	4,54	0,62	4,82	0,63	4,89	0,65	5,00	0,66	5,13	0,69
Sleman	5,30	1,81	5,18	1,72	5,25	1,75	5,35	1,80	6,38	2,18
Yogyakarta	5,28	1,43	5,09	1,34	5,11	1,36	5,24	1,40	5,48	1,49
<b>DIY</b>	<b>5,17</b>		<b>4,95</b>		<b>5,05</b>		<b>5,26</b>		<b>6,20</b>	

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data PDRB 2014-2018

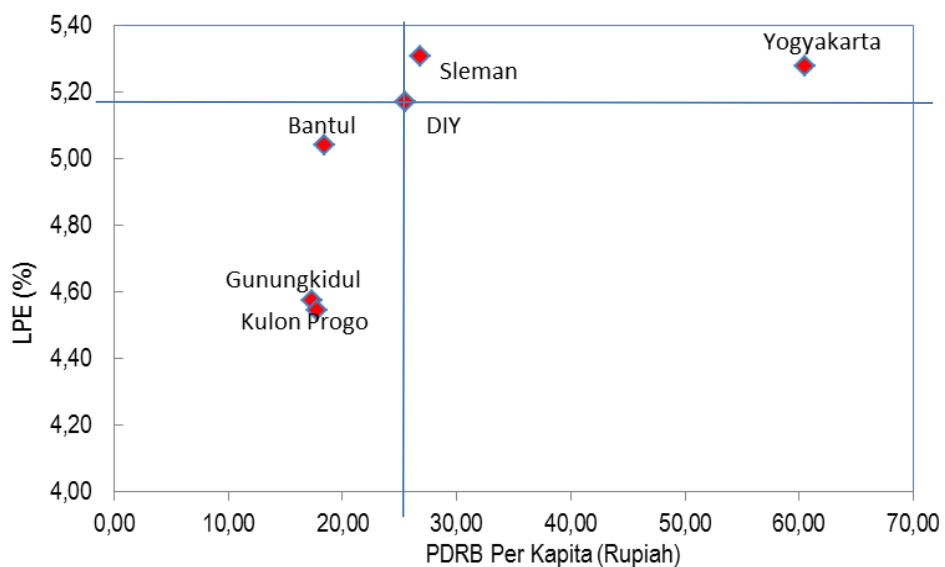
Andil pertumbuhan yang disumbang oleh semua kabupaten/Kota selama periode 2014-2018 juga cukup bervariasi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi dua wilayah yang memiliki andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Andil kedua wilayah masing-masing tercatat sebesar 2,18 dan 1,49 poin persen terhadap pertumbuhan DIY 2018 (Tabel 6.1). Andil pertumbuhan terbesar berikutnya disumbang oleh Kabupaten Bantul. Kabupaten Kulon Progo yang selalu memiliki andil pertumbuhan paling rendah, mulai tahun 2018 mampu melampaui Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan andil ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang mampu tumbuh dua digit.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran wilayahnya. Perlu ditinjau lebih jauh sebaran dan tingkat kesenjangan sebaran pertumbuhannya. Salah satu ciri disebut mempunyai pertumbuhan ekonomi berkualitas bila sebaran pertumbuhan relatif merata di wilayah cakupannya dan tidak ada perbedaan yang mencolok tingkat pendapatan penduduknya. Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah pada periode 2014–2018 dapat dilihat dari posisi masing-masing kabupaten/kota terhadap DIY pada **bidang pencaran (*scattered plot*)** yang semula diperkenalkan oleh Klassen dengan sebutan **Tipologi Klassen**. Berdasar pada metode Tipologi Klassen ini, laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita

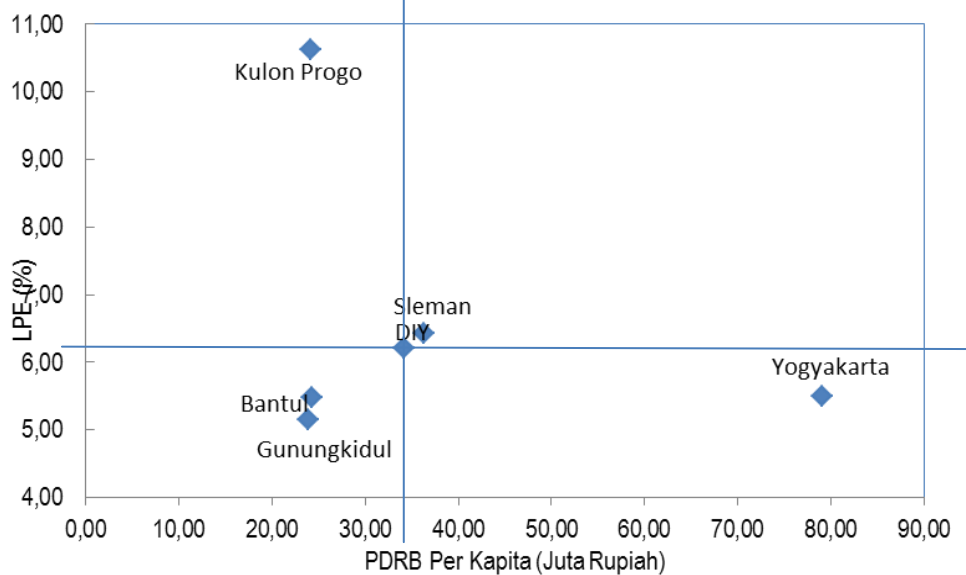
kabupaten/kota dapat dipetakan dan hasilnya seperti yang terlihat pada Gambar 6.3 dan Gambar 6.4.

Pada tahun 2014, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman berada pada kuadran I, yang berarti menjadi daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo berada pada kuadran III yang merupakan daerah tertinggal dalam lingkup perbandingan lokal DIY. Meskipun Sleman berada di kuadran I bersama Kota Yogyakarta sebagai daerah yang maju dan cepat tumbuh, namun posisi Sleman masih rentan karena di ambang batas bawah (Gambar 6.3).

**Gambar 6.3. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014**



**Gambar 6.4. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018**



Pada tahun 2018 Kulon Progo melesat naik di kuadran IV yaitu menjadi daerah yang berkembang cepat karena laju pertumbuhannya meloncat melampaui rata-rata provinsi meskipun PDRB per kapita Kulon Progo masih di bawah rata-rata provinsi. Sementara Kabupaten Sleman posisinya tetap di Kuadran I yaitu daerah yang maju dan cepat tumbuh. Selama lima tahun terakhir Kota Yogyakarta menjadi daerah yang maju tetapi tertekan karena mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga rata-rata pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata. Posisi Gunungkidul dan Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir stagnan pada kategori daerah tertinggal meskipun level pertumbuhan ekonominya bergerak ke atas mendekati rata-rata provinsi (Gambar 6.4).

Skema Tipologi Klassen menurut kabupaten/kota wilayah DIY di atas menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Beberapa mega proyek sudah dalam proses berjalan, seperti pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo melesat di atas pertumbuhan semua kabupaten/kota di DIY. Pergerakan dari tahun 2014 ke 2018 tersebut mengindikasikan kesenjangan antarwilayah mulai dapat ditekan, dengan menggerakkan sumber pertumbuhan untuk Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Hanya saja, untuk PDRB per kapita masih terdapat ketimpangan yang lebar terutama dengan Kota Yogyakarta. Dengan demikian hingga tahun 2018 ini pembangunan sudah dapat berhasil meningkatkan level ekonomi karena laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota makin tinggi namun masih menyisakan kesenjangan pendapatan penduduk antarwilayah.

## **B. Stabilitas Harga**

Pembahasan mengenai perekonomian dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembahasan stabilitas harga. Stabilitas harga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di DIY pada khususnya, dan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya. Apabila terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan kenaikan harga tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya, maka hal ini dikatakan terjadi inflasi.

Terjadinya inflasi dapat berpengaruh terhadap masyarakat dan perekonomian suatu negara. Bagi masyarakat umum inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Bagi pelaku usaha laju inflasi menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu keputusan. Dan bagi pemerintah laju inflasi menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

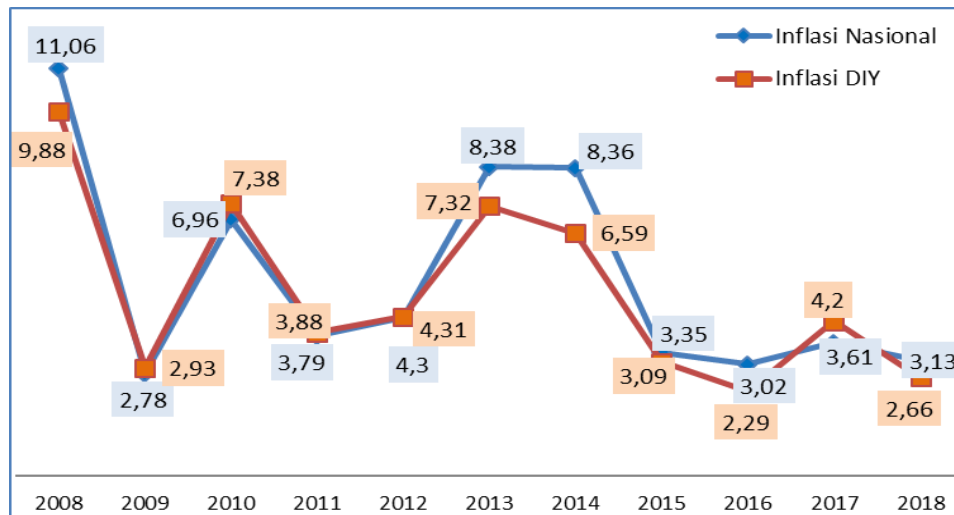
### **1. Perbandingan Laju Inflasi Yogyakarta dan Nasional**

Kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat pada dasarnya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di daerah. Sehingga, perkembangan IHK dan inflasi secara



nasional tidak terlepas dari perkembangan IHK dan inflasi di daerah. Berikutnya, pada bab ini akan dibahas perkembangan inflasi dengan mengulas secara deskriptif perkembangan inflasi nasional dan analisa tentang perkembangan inflasi Kota Yogyakarta secara umum. Adapun perkembangan inflasi Yogyakarta dan Indonesia selama kurun waktu tahun 2008-2018 dapat dilihat pada Gambar 6.5.

**Gambar 6.5. Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional, 2008 – 2018**  
(persen)



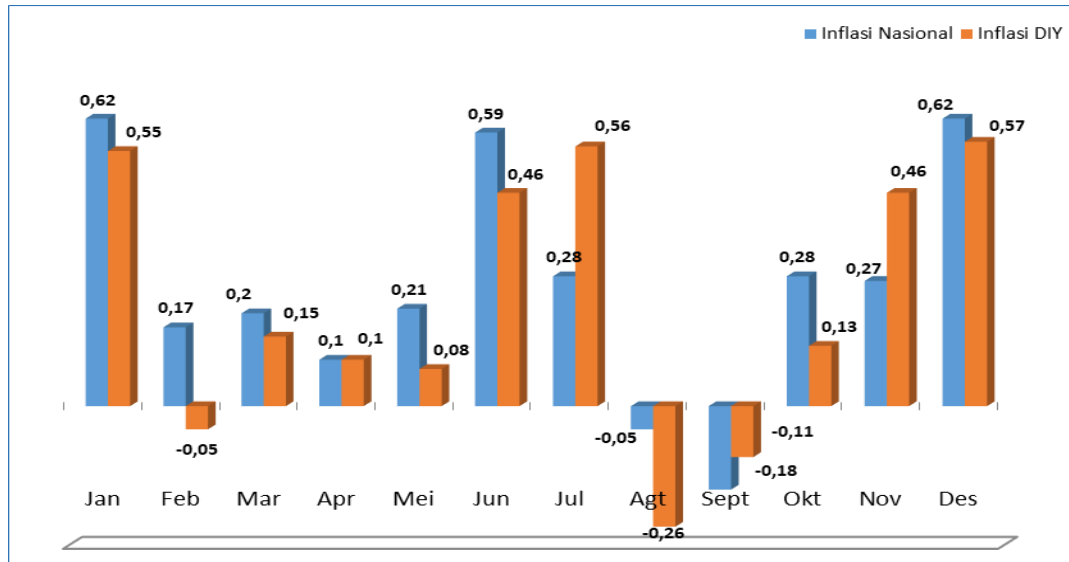
Jika dilihat series inflasi tahunan sepanjang tahun 2008-2018, inflasi nasional selama tiga tahun terakhir relatif rendah dan stabil. Inflasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bergerak pada kisaran 3,02 persen hingga 3,61 persen. Demikian pula dengan inflasi Yogyakarta, fluktuasi inflasi tahunan Yogyakarta sedikit lebih rendah, namun menunjukkan pergerakan yang seirama.

Pada tingkat nasional, sepanjang tahun 2018 terjadi inflasi sebanyak sepuluh kali, dan deflasi sebanyak dua kali (Gambar 6.6). Inflasi tertinggi tercatat pada bulan Januari dan Desember dengan laju inflasi masing-masing sebesar 0,62 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada bulan tersebut antara lain: kelompok bahan makanan, sandang, dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara itu deflasi tertinggi selama tahun 2018 terjadi pada bulan September, sebesar -0,18 persen. Deflasi tersebut terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran yang didominasi oleh penurunan harga bahan makanan dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

Pada tingkat Yogyakarta, selama kurun waktu 12 bulan di tahun 2018, terjadi inflasi sebanyak 9 (sembilan) kali, dan deflasi sebanyak 3 (tiga) kali. Inflasi tertinggi tercatat terjadi pada bulan Desember dengan tingkat inflasi sebesar 0,57 persen. Kelompok komoditas

yang yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tersebut adalah kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan perumahan.

**Gambar 6.6. Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional 2018 (persen)**



Inflasi Indonesia menurut kelompok pengeluaran selama tahun 2018 menunjukkan bahwa seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 3,41 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 3,91 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 2,43 persen; kelompok sandang sebesar 3,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,14 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 3,15 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 3,16 persen.

**Tabel 6.2. Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2018 (Persen)**

Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	
	Yogyakarta	Nasional
(1)	(2)	(3)
<b>Umum</b>	<b>2,66</b>	<b>3,13</b>
Bahan Makanan	3,15	3,41
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	2,63	3,91
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	2,43	2,43
Sandang	3,61	3,59
Kesehatan	1,19	3,14
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	3,34	3,15
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	2,46	3,16

Kelompok komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi di Yogyakarta selama tahun 2018 antara lain: sandang; pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan bahan

makanan. Sedangkan komoditas yang berperan memberikan sumbangan deflasi di DIY selama tahun 2018 adalah bahan makanan berupa lemak dan minyak, serta sayur-sayuran, dan rekreasi.

Terkendalnya inflasi di Kota Yogyakarta dibandingkan inflasi nasional didukung oleh terjaganya 7 komponen inflasi. Hal ini tidak terlepas dari beragam upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY dalam menjaga stabilitas inflasi sepanjang tahun. TPID juga berupaya mengoptimalkan operasi pasar BULOG DIY dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY di titik distribusi utama baik di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperpendek arus distribusi pangan.

## 2. Andil Inflasi dan Subkelompok Konsumsi

Tahun 2018 seluruh kelompok pengeluaran barang dan jasa mengalami inflasi di Kota Yogyakarta. Kelompok sandang tercatat mengalami inflasi paling tinggi yaitu sebesar 3,61 persen. Pada urutan kedua yaitu kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga yang sebesar 3,34 persen, yang kemudian disusul oleh kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 3,15 persen.

Bila dilihat dari sumbangan atau andil masing-masing kelompok pengeluaran terhadap inflasi Kota Yogyakarta tahun 2018, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tercatat memberikan sumbangan inflasi terbesar yaitu 0,63 persen. Tingginya andil inflasi pada kelompok ini utamanya dipicu oleh meningkatnya biaya tempat tinggal di Kota Yogyakarta. Yogyakarta sebagai Kota Pelajar menjadi salah satu tujuan utama untuk menempuh pendidikan disini. Hal ini yang turut menyebabkan meningkatnya biaya tempat tinggal di Yogyakarta.

Kelompok pengeluaran yang turut memberikan sumbangan inflasi terbesar kedua adalah bahan makanan dengan andil inflasi sebesar 0,60 persen. Tingginya andil kelompok pengeluaran bahan makanan disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas buah-buahan dan daging serta hasil-hasilnya.

**Tabel 6.3. IHK, Inflasi, dan Andil Per Kelompok dan Subkelompok Kota Yogyakarta (2012=100), tahun 2018**

Kelompok dan Sub Kelompok		IHK Des 2018	Inflasi 2018	Andil 2018
(1)		(2)	(5)	(6)
<b>A</b>	<b>UMUM</b>	<b>131,81</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>
<b>B</b>	<b>BAHAN MAKANAN</b>	<b>147,42</b>	<b>3,15</b>	<b>0,60</b>
1	Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	133,90	0,67	0,03
2	Daging dan Hasil-hasilnya	156,51	6,94	0,22
3	Ikan Segar	161,85	9,92	0,10
4	Ikan Diawetkan	192,92	5,06	0,03

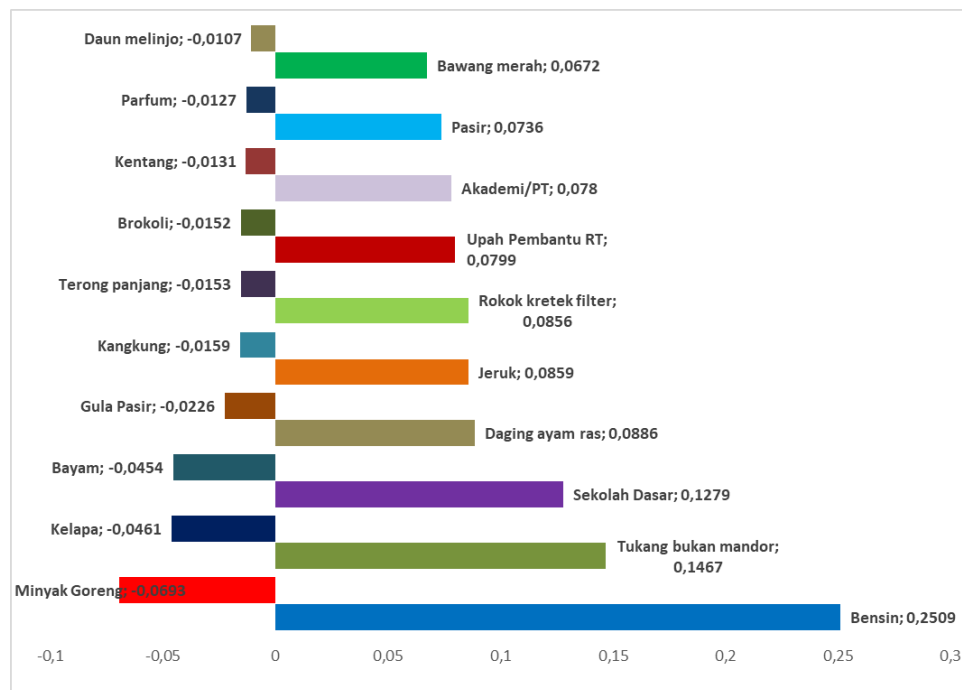
5	Telur, Susu dan Hasil-hasilnya	138,76	1,43	0,04
6	Sayur-sayuran	166,37	-4,48	-0,07
7	Kacang - kacang	131,10	0,55	0,00
8	Buah - buahan	164,59	11,92	0,23
9	Bumbu - bumbu	167,47	8,71	0,13
10	Lemak dan Minyak	118,55	-8,36	-0,12
11	Bahan Makanan Lainnya	153,64	5,97	0,01
<b>C</b>	<b>MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK &amp; TEMBAKAU</b>	<b>132,11</b>	<b>2,63</b>	<b>0,47</b>
1	Makanan Jadi	131,72	2,44	0,29
2	Minuman yang Tidak Beralkohol	123,46	1,08	0,03
3	Tembakau dan Minuman Beralkohol	141,47	4,57	0,16
<b>D</b>	<b>PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS &amp; BAHAN BAKAR</b>	<b>133,74</b>	<b>2,43</b>	<b>0,63</b>
1	Biaya Tempat Tinggal	125,42	3,83	0,46
2	Bahan Bakar, Penerangan dan Air	155,13	0,10	0,01
3	Perlengkapan Rumah tangga	114,40	2,33	0,03
4	Penyelenggaraan Rumah tangga	128,22	3,56	0,12
<b>E</b>	<b>SANDANG</b>	<b>125,39</b>	<b>3,61</b>	<b>0,19</b>
1	Sandang Laki-laki	130,02	2,78	0,04
2	Sandang Wanita	120,44	2,25	0,03
3	Sandang Anak-anak	131,98	4,48	0,06
4	Barang Pribadi dan Sandang Lain	119,81	5,25	0,06
<b>F</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>124,31</b>	<b>1,19</b>	<b>0,07</b>
1	Jasa Kesehatan	120,81	0,68	0,02
2	Obat-obatan	119,15	2,94	0,04
3	Jasa Perawatan Jasmani	124,38	4,31	0,01
4	Perawatan Jasmani dan Kosmetika	132,46	0,30	0,01
<b>G</b>	<b>PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA</b>	<b>116,50</b>	<b>3,34</b>	<b>0,29</b>
1	Pendidikan	119,61	5,42	0,26
2	Kursus-kursus / Pelatihan	130,55	0,24	0,00
3	Perlengkapan / Peralatan Pendidikan	103,84	1,51	0,02
4	Rekreasi	112,77	-0,20	0,00
5	Olahraga	122,44	2,97	0,01
<b>H</b>	<b>TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN</b>	<b>126,84</b>	<b>2,46</b>	<b>0,42</b>
1	Transpor	131,37	2,85	0,31
2	Komunikasi Dan Pengiriman	109,22	1,03	0,04
3	Sarana dan Penunjang Transpor	143,28	3,32	0,07
4	Jasa Keuangan	122,22	0,00	0,00

### 3. Perubahan Harga dan Andil Inflasi Terbesar Beberapa Komoditas terhadap Inflasi Yogyakarta

Besarnya nilai perubahan indeks inflasi maupun deflasi yang terjadi setiap bulan ataupun tahun adalah merupakan gabungan sumbangan atau andil dari jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan atau tahun yang bersangkutan. Setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga dapat diketahui besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi, baik di daerah maupun secara nasional.

Gambar 6.7 menyajikan 10 besar barang-barang yang memberikan andil positif (menyumbang inflasi) dan andil negatif (penahan inflasi) terbesar terhadap inflasi sepanjang tahun 2018. Konsumsi barang-barang yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi tahun 2018 antara lain bensin, tukang bukan mandor, sekolah dasar, daging ayam ras, jeruk, rokok kretek filter, upah pembantu rumah tangga, akademi/ perguruan tinggi, pasir, dan konsumsi bawang merah. Sementara, konsumsi barang-barang yang memberikan andil negatif terhadap inflasi sepanjang tahun 2018 antara lain konsumsi minyak goreng, kelapa, bayam, gula pasir, kangkung, terong panjang, brokoli, kentang, parfum, dan daun melinjo.

**Gambar 6.7. Komoditas Utama Penyumbang dan Penahan Inflasi Kota Yogyakarta 2018**



Tabel 6.4 menyajikan persentase perubahan harga 10 barang dan jasa yang dominan menyumbang inflasi dan dominan menahan inflasi Kota Yogyakarta tahun 2018 terhadap tahun 2017. Perubahan harga 10 barang/jasa paling dominan tersebut cukup bervariasi. Rata-rata barang penyumbang inflasi mengalami kenaikan harga antara 3 hingga 19 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah jeruk, yaitu 19,15 persen. Sedangkan komoditas barang yang mengalami kenaikan harga terendah adalah pengeluaran jasa akademi/perguruan tinggi, sebesar 3,77 persen.

Sementara barang-barang penahan inflasi tahun 2018 rata-rata mengalami penurunan harga sekitar 4 sampai dengan 25 persen. Barang dengan penurunan harga tertinggi adalah daun melinjo, dengan penurunan sebesar 25,58 persen. Sedangkan barang

dengan penurunan harga terkecil adalah parfum yang hanya turun sebesar 4,51 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

**Tabel 6.4. Perubahan Harga dan Andil 10 Besar Barang Terhadap Inflasi Kota Yogyakarta 2018**

NO	Jenis Barang	Persentase Perubahan Harga Terhadap tahun 2017	Andil Terhadap Inflasi selama Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sepuluh besar yang mempunyai andil positif</b>			
1	Bensin	7,5049	0,2509
2	Tukang Bukan Mandor	6,8629	0,1467
3	Sekolah Dasar	15,3285	0,1279
4	Daging ayam ras	9,7714	0,0886
5	Jeruk	19,1543	0,0859
6	Rokok kretek filter	5,6800	0,0856
7	Upah Pembantu RT	3,9895	0,0799
8	Akademi/Perguruan Tinggi	3,7751	0,0780
9	Pasir	8,9978	0,0736
10	Bawang Merah	18,6003	0,0672
<b>Sepuluh besar yang mempunyai andil negatif</b>			
1	Minyak Goreng	-8,0475	-0,0693
2	Kelapa	-10,1542	-0,0461
3	Bayam	-21,0183	-0,0454
4	Gula Pasir	-5,0412	-0,0226
5	Kangkung	-14,2467	-0,0159
6	Terong Panjang	-23,5681	-0,0153
7	Brokoli	-15,1194	-0,0152
8	Kentang	-10,1858	-0,0131
9	Parfum	-4,5130	-0,0127
10	Daun Melinjo	-25,5880	-0,0107

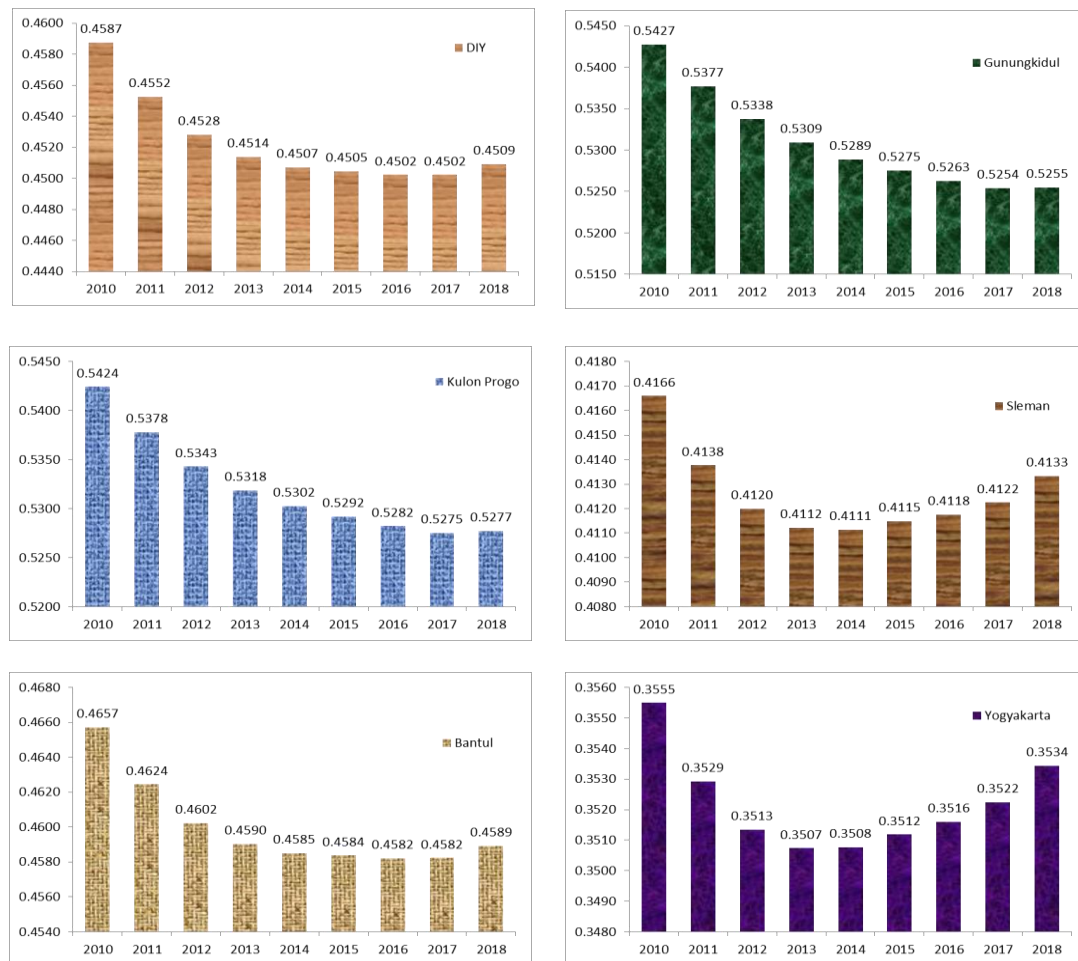
### C. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

#### 1. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio/DR*)

Hingga tahun 2017, angka beban tanggungan penduduk DIY masih menunjukkan penurunan, meskipun secara perlahan. Angka beban tanggungan sebesar 45,87 di tahun 2010, menurun menjadi 45,02 di tahun 2017. Selama tujuh tahun, angka beban tanggungan DIY turun sekitar 0,75 poin. Di tahun 2018, angka ini naik 0,07 poin menjadi 45,09. Secara absolut, memang belum terlihat adanya pengurangan yang signifikan terhadap beban yang

harus ditanggung oleh setiap seratus penduduk usia produktif. Namun dari sisi ekonomi, hal ini menunjukkan kondisi yang lebih baik, meskipun hanya sedikit. Secara tidak langsung, kesejahteraan penduduk akan naik karena lebih sedikit penduduk usia non produktif yang menikmati pendapatan penduduk usia produktif. Jika pendapatan penduduk usia produktif tetap atau meningkat setara dengan angka inflasi harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, artinya belum ada peningkatan kesejahteraan yang dirasakan penduduk DIY.

**Gambar 6.8. Angka Beban Tanggungan Penduduk Kabupaten/Kota dan DIY, 2010-2018**



Angka beban tanggungan akan dikatakan tinggi jika nilainya lebih dari 41. Dengan demikian, angka beban tanggungan DIY yang berada pada kisaran 45 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab penghambat ekonomi DIY karena banyak usia non produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif.

Pada periode 2010 hingga 2018, angka beban tanggungan di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul memiliki pola yang mirip dengan DIY, yaitu menurun hingga tahun 2017 dan naik perlahan di tahun 2018. Sedangkan Sleman dan Kota Yogyakarta mempunyai pola yang mirip, namun berbeda dengan DIY. Angka ketergantungan Sleman turun hingga 2014, kemudian naik lagi di 2015 hingga 2018. Angka ketergantungan Kota Yogyakarta turun hingga 2013, kemudian naik lagi di 2014 hingga 2018. Meskipun angka

ketergantungan menunjukkan perbedaan level di setiap kabupaten/kota, namun seluruhnya menunjukkan kecenderungan menurun selama sewindu terakhir.

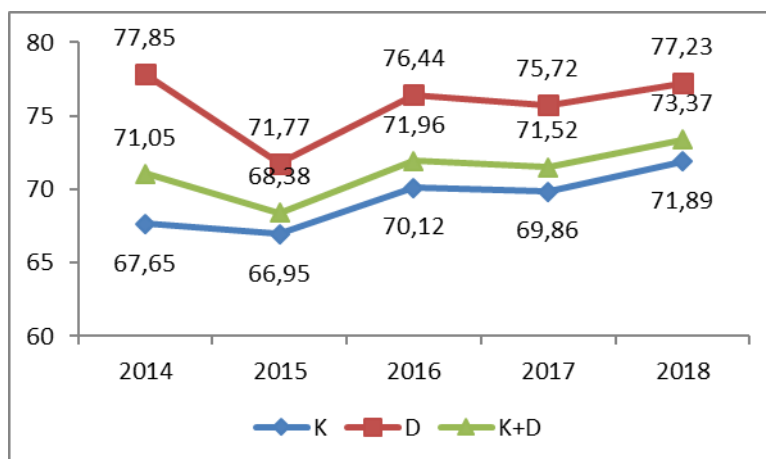
Di awal periode, 2010, angka ketergantungan tertinggi ada di Gunungkidul, sebesar 54,27, Selanjutnya adalah Kulon Progo dan Bantul masing-masing sebesar 54,24 dan 46,57 dan terendah adalah Kota Yogyakarta, sebesar 35,55. Namun bila dilihat dari laju penurunannya, ternyata yang tertinggi juga Gunungkidul, yaitu sebesar 1,72. Berikutnya adalah Bantul dan Kulon Progo, masing-masing 1,68 dan 1,47. Sedangkan kota Yogyakarta hanya turun 0,2 poin, Paling rendah. Hal ini menjelaskan bahwa dalam periode 2010 hingga 2018 angka beban ketergantungan penduduk penduduk tidak produktif terhadap produktif semakin berkurang. Komposisi penduduk produktif dan tidak produktif di Gunungkidul menunjukkan perkembangan yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Kota Yogyakarta mempunyai angka beban tanggungan yang selalu lebih rendah dibanding kabupaten lainnya di DIY karena kehidupan sosial dan ekonominya lebih maju.

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka TPAK DIY periode tahun 2014-2018 menunjukkan tren yang meningkat, dari 71,05 persen menjadi 73,37 persen, namun sempat turun menjadi 68,38 persen di tahun 2015. TPAK tahun 2018 naik 1,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau memperoleh kesempatan kerja pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017. Sehingga dapat dikatakan bahwa proporsi penduduk yang terserap pada lapangan kerja dan yang siap masuk ke bursa kerja mengalami peningkatan.

Dilihat dari klasifikasi daerah, TPAK daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan. Di tahun 2014, terlihat celah yang lebar antara TPAK daerah perdesaan

**Gambar 6.9. Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah (persen), 2014-2018**





dan perkotaan, sebesar 10,20 persen. Namun celah tersebut mulai menyempit di tahun 2015 selama 4 tahun terakhir, menjadi 5,34 persen di tahun 2018.

TPAK perdesaan lebih tinggi jika diandingkan dengan TPAK perkotaan. Artinya, proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. TPAK perdesaan mencapai 77,85 persen di tahun 2014 dan berfluktuasi namun cenderung menurun menjadi 77,23 persen di tahun 2018. TPAK daerah perkotaan juga mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat selama periode 2014-2018. TPAK daerah perkotaan sebesar 67,75 meningkat menjadi 71,89 .

Angka TPAK daerah perdesaan lebih tinggi dibanding dengan TPAK daerah perkotaan namun kesenjangannya semakin berkurang. Hal ini terjadi karena perbedaan komposisi penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan . Di daerah perkotaan, penduduk berusia 15 tahun ke atas jumlahnya banyak, namun mayoritas masuk dalam golongan bukan angkatan kerja karena mereka sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan yang merasa sudah cukup dan tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi, serta lain-lain yang tidak melakukan kegiatan apapun yang bernilai ekonomi. Lain halnya dengan penduduk di daerah perdesaan, kondisi yang ada menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengerjakan lahan pertanian. Biasanya mereka dibantu oleh anggota keluarga atau famili lain sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Pekerja keluarga yang merupakan anggota rumah tangga, biasanya mempunyai kegiatan utama sebagai ibu rumah tangga, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi masih sekolah. Penentuan kegiatan utama tersebut sesuai dengan konsep ketenagakerjaan, yaitu berdasarkan waktu terbanyak yang digunakan .biasanya sebagai ibu rumah tangga, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi masih sekolah. Komposisi penduduk juga mempengaruhi angka TPAK. Di daerah perdesaan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikannya biasanya cenderung lebih memilih merantau ke kota sehingga proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas di perdesaan lebih rendah.

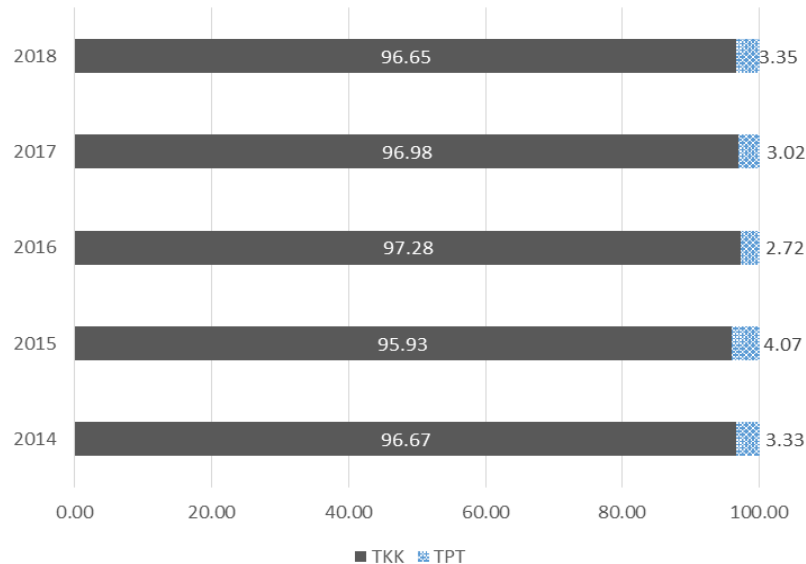
### **3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Jumlah penduduk usia bekerja atau usia 15 tahun ke atas di DIY pada Agustus 2018 mencapai 2,99 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen dibanding keadaan pada Agustus 2017 yang sebanyak 2,96 juta orang atau bertambah 27.126 orang. Bertambahnya penduduk usia bekerja tersebut juga diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja, yaitu bertambah sebanyak 74.555 orang, atau terjadi peningkatan sebesar 3,52 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di DIY pada Agustus 2018 juga mengalami peningkatan sebanyak 3,18 persen dibanding keadaan pada Agustus 2017, yaitu dari 2,05 juta orang menjadi 2,12 juta orang, atau bertambah sekitar 65.224 orang.

Profil tenaga kerja dapat juga diamati dari penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sampai dengan Agustus 2018, sektor-sektor yang mempunyai kontribusi

besar dalam penyerapan tenaga kerja adalah pertanian sebesar 20,40 persen, perdagangan sebesar 18,57 persen, dan industri pengolahan 16,38 persen (BPS, Sakernas Agustus 2018).

**Gambar 6.10. TKK dan TPT Penduduk DIY (persen), 2014-2018**



Jumlah penduduk yang bekerja meningkat di tahun 2018, namun tidak diimbangi dengan meningkatnya tingkat kesempatan kerja (TKK) sehingga TKK sedikit menurun dari 96,98 persen di tahun 2017 menjadi 96,65 persen di tahun 2018. Hal ini juga berdampak pada naiknya tingkat penganggur terbuka (TPT) dari 3,02 persen menjadi 3,35 persen. Namun demikian, dalam lima tahun terakhir TKK dan TPT bisa dikatakan relatif stagnan.

Menurut klasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan, TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. TPT perdesaan dan perkotaan tahun 2018 masing-masing sebesar 1,60 persen dan 4,07 persen. Lapangan usaha di daerah perdesaan karena didominasi oleh pertanian, sehingga penyerapan tenaga kerja relatif tinggi. Selain itu, penduduk desa yang telah selesai sekolah dan merasa cukup pendidikannya sebagian besar memilih merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. Bahkan, sebagian angkatan kerja di perdesaan sudah terbiasa menjadi pekerja keluarga dalam rumah tangga meskipun belum mempunyai pekerjaan tetap.

Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat pengangguran cenderung tinggi untuk mereka yang berpendidikan SMA ke atas dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Pada tahun 2018, TPT tertinggi tercatat pada kelompok berpendidikan SMA, yaitu sebesar 1,56, selanjutnya kelompok berpendidikan Diploma(I/II/Sarjana) sebesar 1,23 persen. Sementara untuk kelompok pendidikan SMP ke bawah, nilai TPTnya kurang dari 0,5. Jika dilihat menurut wilayah, TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, masing-masing sebesar 3,01 dan 0,49. Jumlah

pengangguran yang lebih banyak di kota daripada di desa ini, terutama untuk yang berpendidikan SMA ke atas. Demikian juga jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu 1,94 persen dan 1,55 persen (Tabel 6.5).

**Tabel 6.5. TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2018 \*)**

Pendidikan	Kota	Desa	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. <= SD	0,16	0,04	0,17	0,03	0,21
2.SMP	0,35	0,00	0,27	0,09	0,36
2.SLTA	1,19	0,36	0,79	0,77	1,56
5. D(I/II/III)/Univ.	1,17	0,05	0,63	0,60	1,23
Total	3,01	0,49	1,94	1,55	3,49

Keterangan: \* Kondisi Agustus 2018

Sumber : BPS Provinsi DIY

#### **4. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)**

Dalam analisis ini, TKK dihitung menggunakan metoda rasio antara rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2014-2018. Tingkat kesempatan kerja yang tercipta di DIY pada tahun 2014 mencapai 96,67 persen, sedangkan tahun 2018, sedikit menurun menjadi 96,65 persen.

Secara umum kesempatan kerja juga bersifat *inelastis*, yaitu hanya 0,38. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, disertai peningkatan kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*), Angka EKK yang *inelastis* ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut lebih bersifat padat modal (*capital Intensive*) dan masih kurang bisa menyerap peluang kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mungkin lebih berbasis pada industri dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga kesempatan kerja yang tersedia semakin sedikit. Namun angka EKK pada periode 2014-2018 lebih rendah dibanding dengan hasil penghitungan periode kajian 2013-2017 yang sebesar 0,42.

Selama periode tersebut, terlihat hanya 6 lapangan usaha yang memiliki kesempatan kerja bersifat *elastis*. Sementara, 11 lapangan usaha lainnya bersifat *inelastis*. Perekonomian DIY 2018 telah mulai tumbuh lebih cepat namun belum banyak memberikan kesempatan kerja. Sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB semakin menurun ternyata juga mempengaruhi tingkat elastisitas kesempatan kerja, bahkan *inelastis* bernilai negatif. Selain pertanian, masih ada lapangan usaha yang mempunyai nilai *inelastis* negatif, yaitu real estat.

Sektor pengadaan listrik dan gas mempunyai EKK yang tertinggi, yaitu sebesar 4,86. Selanjutnya pengelolaan air dan pertambangan dan penggalian, masing-masing sebesar 2,78 dan 2,36. Jika dilihat pertumbuhan kesempatan kerja, ketiga lapangan usaha tersebut memang mempunyai angka yang tinggi.

**Tabel 6.6. Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY (persen), 2014-2018**

Kategori/Lapangan Usaha	Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	Elastisitas Kesempatan Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
				2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	-3,44	1,92	-1,79	25,41	20,40
2. Pertambangan dan penggalian	8,36	3,55	2,36	0,70	0,89
3. Industri pengolahan	5,10	4,50	1,13	14,54	16,38
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	28,31	5,82	4,86	0,11	0,28
5. Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan remediasi	9,60	3,46	2,78	0,19	0,25
6. Konstruksi	2,36	7,39	0,32	7,48	7,58
7. Perdagangan & reparasi, perawatan mobil dan spd motor	0,36	5,88	0,06	19,82	18,57
8. Pengangkutan & pergudangan	9,80	4,92	1,99	2,69	3,60
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	11,51	6,07	1,90	6,87	9,81
10. Informasi & komunikasi	2,69	6,51	0,41	0,75	0,77
11. Jasa keuangan dan asuransi	2,12	5,53	0,38	1,62	1,62
12. Real estat	-18,74	5,41	-3,47	0,23	0,09
13. Jasa perusahaan	5,11	5,55	0,92	2,09	2,36
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	3,48	4,93	0,71	3,29	3,49
15. Jasa pendidikan	0,26	5,46	0,05	5,98	5,58
16. Jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial	2,89	5,89	0,49	1,61	1,66
17. Jasa lainnya	2,18	6,41	0,34	6,64	6,68
<b>Total</b>	<b>2,01</b>	<b>5,36</b>	<b>0,38</b>	<b>100,00</b>	<b>20,40</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY, diolah dari data SAKERNAS bulan Agustus

## 5. Produktivitas Tenaga Kerja

Secara umum, produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir mampu tumbuh sebesar 6,61 persen per tahun, meningkat dibanding periode 2013-2017 yang mencapai 6,55 persen per tahun. Sangat kondusif untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,36 persen per tahun. Selama periode 2014-2018, ada lima lapangan usaha mengalami rata-rata pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) di atas 7 persen per tahun, yaitu: real estat sebesar 33,60, pertanian sebesar 10,60 persen, perdagangan 9,39 persen, konstruksi 8,68, dan jasa pendidikan 8,22, dan jasa

lainnya 7,12 persen. Jasa asuransi dan keuangan mengalami rata-rata pertumbuhan PTK kurang dari 7 tetapi masih di atas rata-rata pertumbuhan DIY, yaitu 6,85 (Tabel 6.7).

**Tabel 6.7. Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2014–2018**

Kategori/Lapangan Usaha	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ Org./ Th.)		Rata-rata Pertumbuhan 2014 – 2018 (%)		Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas TK 2014-2018 (%)
	2014	2018	Ekonomi	Kesempatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	19,66	29,41	1,92	-3,44	10,60
2. Pertambangan dan penggalian	39,49	36,63	3,55	8,36	-1,86
3. Industri pengolahan	44,36	48,63	4,50	5,10	2,32
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	45,84	30,94	5,82	28,31	-9,36
5. Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan remediasi	28,04	24,25	3,46	9,60	-3,57
6. Konstruksi	59,60	83,14	7,39	2,36	8,68
7. Perdagangan & reparasi, perawatan mobil dan spd motor	19,81	28,37	5,88	0,36	9,39
8. Pengangkutan & pergudangan	101,15	97,85	4,92	9,80	-0,83
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	69,38	63,88	6,07	11,51	-2,04
10. Informasi & komunikasi	541,48	648,94	6,51	2,69	4,63
11. Jasa keuangan dan asuransi	113,95	148,52	5,53	2,12	6,85
12. Real estat	1.448,02	4.612,79	5,41	-18,74	33,60
13. Jasa perusahaan	23,36	26,20	5,55	5,11	2,91
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	116,27	148,19	4,93	3,48	6,25
15. Jasa pendidikan	65,02	89,17	5,46	0,26	8,22
16. Jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial	72,51	91,55	5,89	2,89	6,00
17. Jasa lainnya	18,12	23,85	6,41	2,18	7,12
<b>Total</b>	<b>47,46</b>	<b>61,31</b>	<b>5,36</b>	<b>2,01</b>	<b>6,61</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY

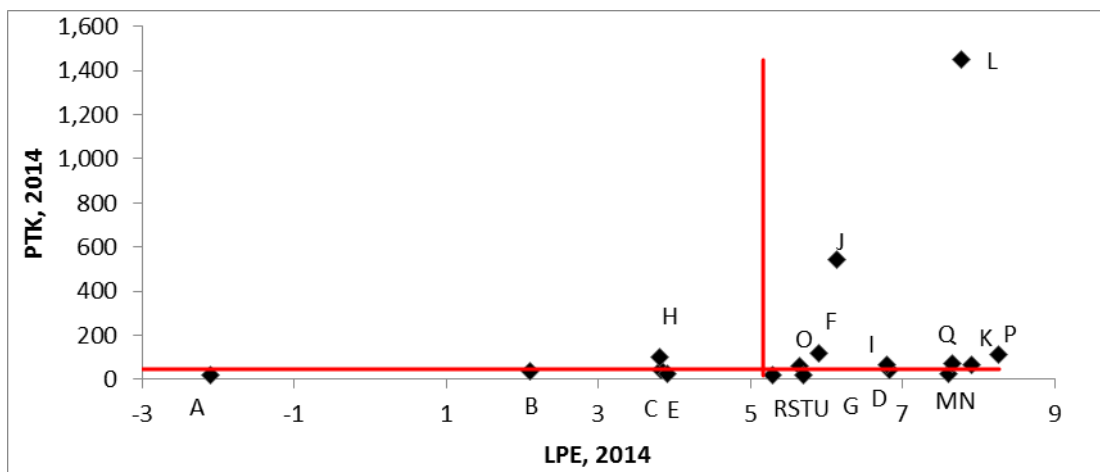
Produktivitas tenaga kerja di awal periode 2014 produktivitas tenaga kerja DIY sebesar Rp47,46 juta per pekerja selama satu tahun, atau sekitar Rp130 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau Rp152 ribu per orang per hari untuk 6 hari kerja seminggu. Produktivitas tenaga kerja tahun 2018 naik mencapai Rp61,3 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp168 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau sekitar Rp196 ribu per orang per hari bila dihitung untuk 6 hari kerja seminggu.

Menurut lapangan usaha, produktivitas tertinggi adalah sektor real estat dan sektor informasi dan komunikasi yang masing-masing memiliki produktivitas Rp1.448 juta per pekerja setahun dan Rp588,2 juta per pekerja setahun di tahun 2014. Di tahun 2018, masing-masing produktivitasnya Rp4.613 juta per pekerja setahun dan Rp649 juta per pekerja per tahun. Nilai produktivitasnya kedua sektor tersebut jauh melampaui sektor-

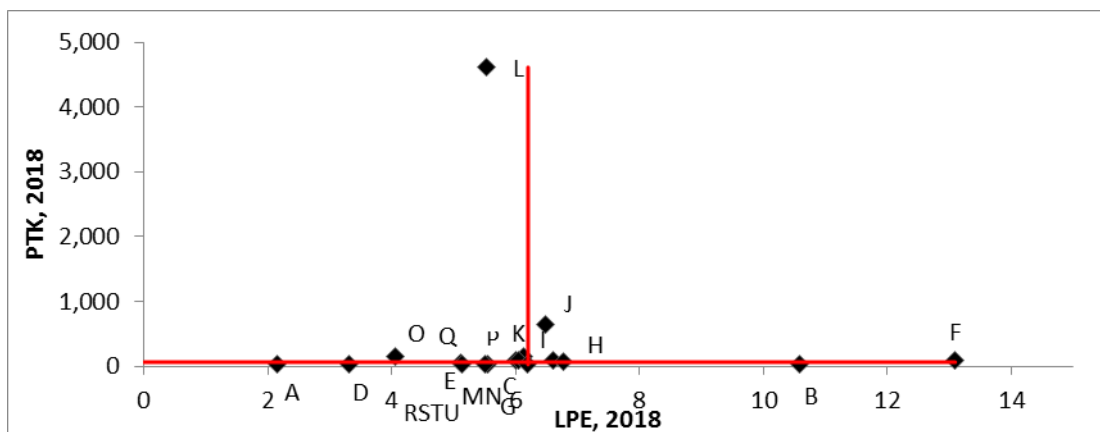
sektor yang lain dan secara konsisten memimpin, baik di awal maupun di akhir periode kajian.

Gambar 6.11 dan 6.12 merupakan hasil analisis Tipologi Klassen dengan periode kajian tahun 2014 dan 2018. Dalam waktu lima tahun telah terjadi perubahan capaian pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. Kondisi pertumbuhan ekonomi level makro yang mengalami perlambatan dari tahun 2014 hingga 2015 dan setelah itu bergerak naik hingga tahun 2018, sehingga dampak kinerja produktivitas sektor-sektor pun berbeda-beda.

**Gambar 6.11. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2014**



**Gambar 6.12. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2018**



Pada tahun 2014 dan 2018 lapangan usaha konstruksi (kategori F), akomodasi dan makan minum (kategori I), dan informasi dan komunikasi (kategori J), mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Menurut analisis Tipologi Klassen ketiga kategori tersebut dikatakan sebagai “sektor yang produktif dan tumbuh cepat”.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian (kategori B) dan pengangkutan dan pergudangan (kategori H), pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerjanya mampu tumbuh di atas rata-rata di tahun 2014. Padahal pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata di tahun 2014. Hal ini berarti pada kedua sektor lapangan usaha tersebut termasuk kategori sektor yang “produktif dan tumbuh pesat”. Meningkatnya produktivitas pertambangan dan penggalian selama periode tersebut terjadi karena output yang tumbuh pesat untuk penyokong kegiatan konstruksi, sebagai salah satu sektor yang produktif dan tumbuh cepat. Sementara penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut tidak secepat pertumbuhan outputnya.

Kondisi sebaliknya terjadi untuk lapangan usaha dan jasa keuangan dan asuransi (kategori K), real estat (L), administrasi pemerintahan (O) dan jasa pendidikan (kategori P)). Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja empat lapangan usaha ini bertahan di atas rata-rata namun pertumbuhan ekonominya turun dari di atas rata-rata menjadi di bawah rata-rata. Dengan demikian kategori K,L,O, dan P di tahun 2018 turun dari kelompok “sektor yang produktif dan tumbuh pesat” menjadi “sektor yang maju tetapi tertekan (kurang produktif)”. Tingginya produktivitas real estat tidak lepas dari icon DIY sebagai Kota Pelajar. Meningkatnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun menjadi daya tarik sendiri bagi para investor untuk menyediakan

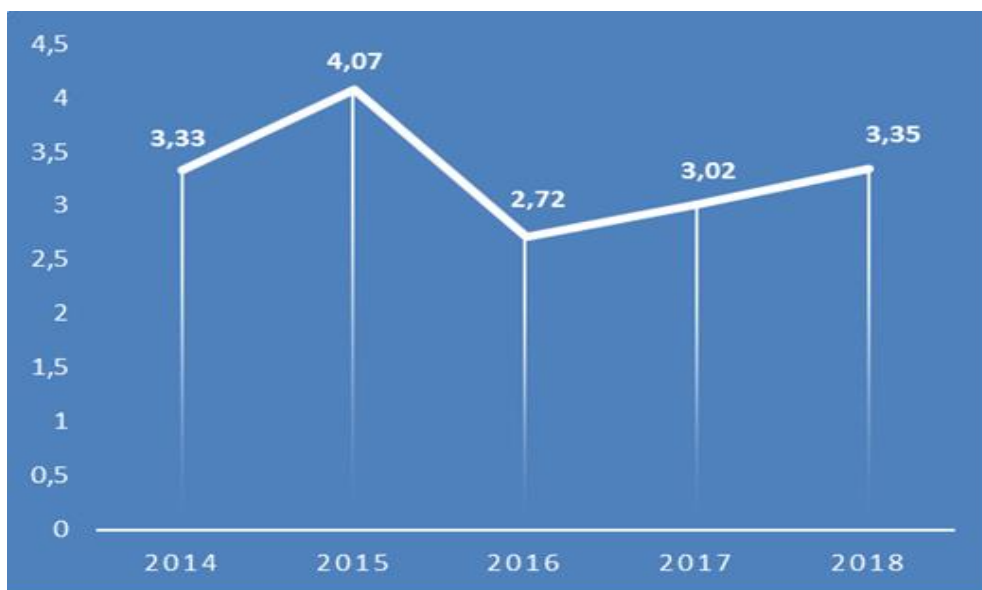
Dilihat secara parsial dari dimensi pencapaian produktivitas, secara rata-rata terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kategori Konstruksi (F), jasa keuangan dan asuransi (K), real estat (L), dan jasa pendidikan (P), di tahun 2014 dan 2018 produktivitasnya di atas rata-rata produktivitas total, ternyata juga mempunyai rata-rata pertumbuhan produktivitas di atas pertumbuhan rata-rata agregatnya yang sebesar 6,61 persen (Tabel 6.6). Sementara itu, kategori pengadaan listrik dan gas merupakan yang tertinggi pertumbuhan kesempatan kerjanya, yaitu 28,31 persen per tahun.

Dengan demikian sektor yang dapat diandalkan dari sisi pertumbuhan dan produktivitasnya adalah konstruksi (kategori F), akomodasi dan makan minum (kategori I), dan informasi dan komunikasi (kategori J). Tingginya harga tanah di wilayah DIY, mengubah arah tren investasi *landed* menjadi *high rise* atau hunian *vertical* atau apartemen. Sehingga tidak heran jika bisnis ini mulai menjamur di DIY dan mendorong pesat laju pertumbuhan output konstruksi. Hal ini memberikan indikasi bahwa arah penguatan ekonomi D.I.Yogyakarta bertumpu pada kelompok sektor sekunder. Sementara sektor industri pengolahan dan perdagangan karena pangsa distribusinya cukup besar masih perlu dipacu kinerja ekonominya. Inovasi produksi, perluasan kualitas dan kuantitas pemasaran, dan promosi perlu diintensifkan lagi untuk mendatangkan pemodal besar sehingga tertarik mengembangkan usahanya di D.I. Yogyakarta.

**6. Pengurangan Angka Pengangguran**

Pada tahun 2014 di DIY masih terdapat sekitar 67,4 ribu orang yang menganggur dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bukan karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Mereka yang menganggur ini adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran 2014 yang sebesar 3,33 persen meskipun tergolong rendah namun pemerintah mempunyai komitmen program untuk tersebut dikurangi. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional, dengan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah DIY dalam mengatasi pengangguran. Pada tahun 2018 angka pengangguran masih di kisaran 3,35 persen, dengan jumlah pengangguran sekitar 73,35 ribu orang.

**Gambar 6.13.** Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY (persen), 2014-2018 (Maret)

**7. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran**

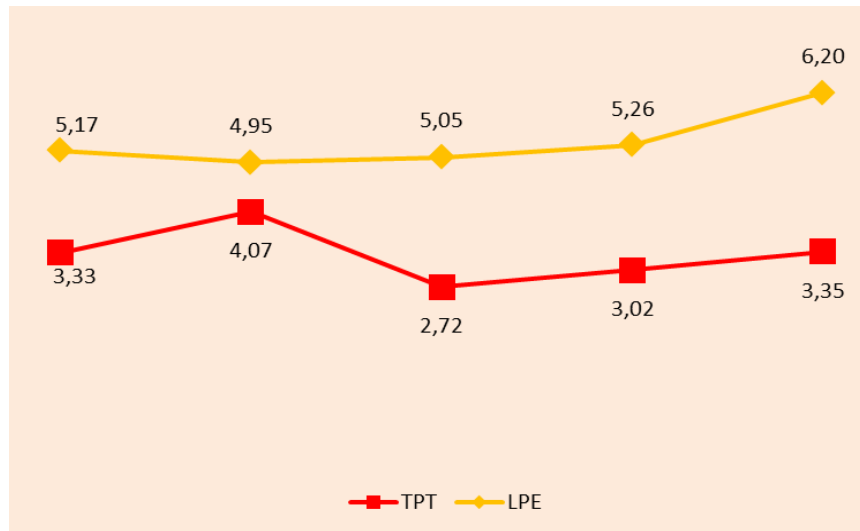
Pada tahun 2016, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dirancang untuk data estimasi kabupaten/kota. Oleh karena itu data tingkat pengangguran terbuka tidak tersedia sampai dengan level kabupaten/kota. Untuk itu dalam bahasan ini akan dilihat hubungan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran di level provinsi.

Gambar 6.14 memperlihatkan hubungan pergerakan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) DIY untuk tahun 2014 hingga 2018. Ada kecenderungan yang dapat dijelaskan bahwa bila laju pertumbuhan ekonomi meningkat



maka persentase tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, bila pertumbuhan ekonomi melambat maka akan diiringi meningkatnya persentase tingkat pengangguran, seperti kondisi tahun 2015 hingga 2016. Namun di 2017 dan 2018 terjadi anomaly karena pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan dampak pada penurunan angka pengangguran.

**Gambar 6.14.** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di DIY (persen), 2014-2018



Sisi lain untuk melihat hubungan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran adalah menggunakan elastisitas dari laju penurunan pengangguran terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Tabel 6.8 menunjukkan laju dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi DIY dan laju pertumbuhan dan rata-rata laju pertumbuhan tingkat pengangguran. Berdasarkan dua indikator ini maka dihitung elastisitas pengurangan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi (EPP).

EPP dihitung berdasarkan rata-rata penurunan persentase pengangguran dan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2014-2018. Makna EPP dalam Tabel 6.8 adalah seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka akan diikuti oleh pengurangan persentase pengangguran sebesar 0,023 persen. Pada kurun waktu ini pertumbuhan ekonomi elastis dengan pengurangan persentase pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut mampu mempengaruhi penurunan angka pengangguran. Pada tahun 2014 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 67,4 ribu orang, maka angka EPP tersebut dapat diartikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen pada periode 2014-2018 akan mengurangi jumlah pengangguran rata-rata hanya sebanyak 23 orang, atau bisa juga bermakna setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menarik kesempatan kerja sebanyak 23 orang penganggur. Hal ini

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang dipacu kurang efektif untuk menekan jumlah pengangguran di DIY.

**Tabel 6.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Penurunan Pengangguran di DIY (persen), 2014-2018**

Rincian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan/ Penurunan	Elastisitas Pertumbuhan Pengangguran (EPP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,17	4,95	5,05	5,26	6,20	5,36	
Laju Pertumbuhan Jumlah Pengangguran	2,75	22,23	-33,26	11,30	10,68	0,12	0,023

Sumber: BPS Provinsi DIY, data diolah.

## D. Kemiskinan dan Ketimpangan

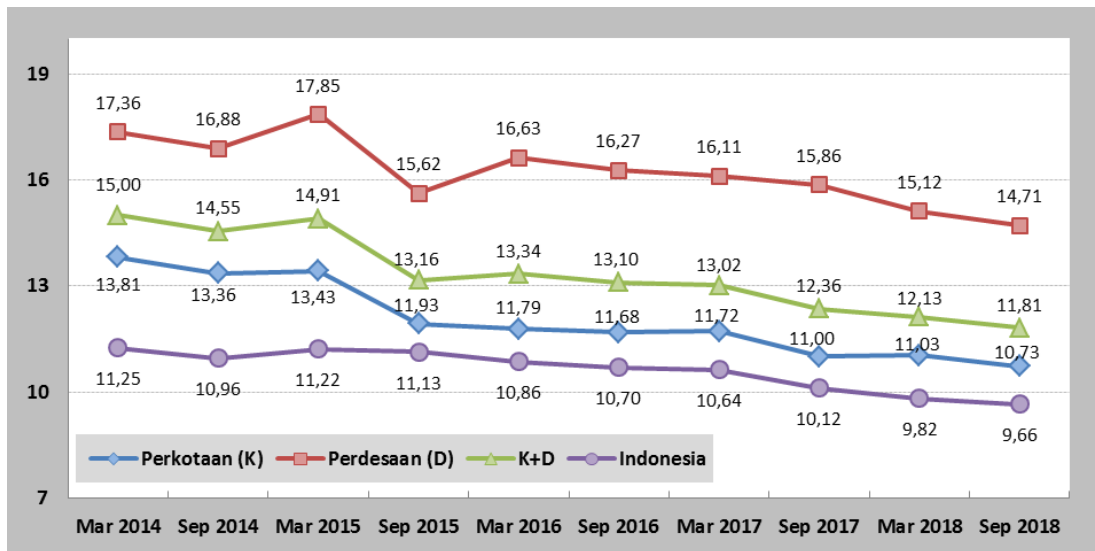
### 1. Perkembangan Kemiskinan

Garis kemiskinan (GK) yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan jumlah penduduk miskin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada kondisi September 2014 Garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp321.056,- per kapita sebulan dan meningkat menjadi Rp414.899,- per kapita sebulan pada kondisi September 2018. Artinya, garis kemiskinan secara nominal meningkat sebesar 29,23 persen selama lima tahun terakhir. Kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga (inflasi) komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan perubahan jenis komoditas barang atau jasa yang dikonsumsi. Secara umum, garis kemiskinan perkotaan selalu lebih tinggi dari garis kemiskinan pedesaan. Demikian pula, komposisi garis kemiskinan makanan juga lebih dominan dari garis kemiskinan non makanan. Proporsi garis kemiskinan makanan mencapai 71,26 persen, sementara non makanan hanya 28,64 persen dari garis kemiskinan DIY kondisi September 2018.

Perkembangan persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) DIY Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) terlihat semakin menurun, meskipun polanya sedikit berfluktuasi. Pada kondisi Maret 2014, proporsi penduduk miskin tercatat sebesar 15,00 persen. Angka ini secara bertahap menurun menjadi 11,81 persen pada kondisi September 2018. Artinya, terjadi penurunan proporsi penduduk miskin sebesar 2,74 persen selama periode 2014-2018. Sementara, jumlah penduduk miskin DIY secara absolut pada kondisi Maret 2014 tercatat sebanyak 544,87 ribu jiwa dan semakin berkurang menjadi 450,25 ribu jiwa pada kondisi September 2018. Secara rata-rata jumlah penduduk miskin di DIY turun 4,11 persen per tahun. Perkembangan tingkat kemiskinan di DIY memiliki pola yang hampir sama dengan kemiskinan pada level nasional. Namun demikian, secara persentase tingkat

kemiskinan di DIY masih berada di atas level nasional. Pada kondisi September 2018 persentase penduduk miskin secara nasional tercatat sebanyak 9,66 persen (Gambar 6.15). Hal ini menyiratkan bahwa dengan pendekatan ekonomi/moneter tingkat kemiskinan DIY lebih tinggi dari nasional.

**Gambar 6.15. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2014 – 2018**

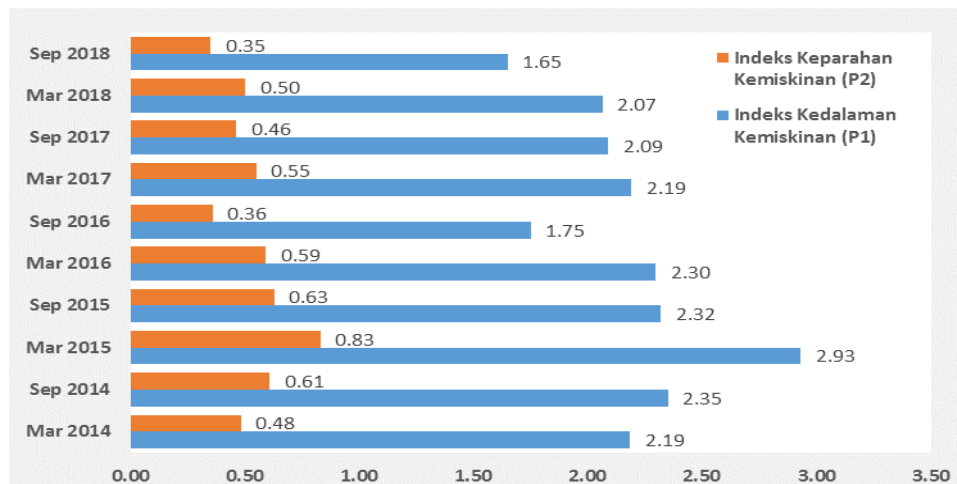


Masyarakat perkotaan dan pedesaan mempunyai pola hidup yang berbeda, baik dari sisi mata pencaharian, tingkat konsumsi, maupun dimensi kehidupan sosialnya. Pada umumnya, daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sehingga jenis lapangan usaha yang tersedia juga lebih beragam. Sementara, daerah pedesaan lebih didominasi oleh aktivitas ekonomi yang berbasis pertanian, sehingga kesempatan kerja yang tersedia lebih terbatas dan lebih seragam pada aktivitas yang terkait dengan pertanian. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan antar wilayah beserta perkembangannya. Sampai dengan kondisi September 2018, persentase penduduk miskin di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Namun demikian, tren penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan berjalan lebih cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan yang dijalankan berhasil memacu pengurangan kemiskinan terutama di kawasan pedesaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan pada kondisi September 2014 sebesar 16,88 persen dan turun menjadi 14,71 persen pada kondisi September 2018. Sementara, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 13,36 persen pada September 2014 menjadi 10,73 persen pada September 2018.

Dari sisi pengurangan jumlah penduduk miskin, kawasan pedesaan mampu berjalan lebih cepat. Jumlah penduduk miskin di pedesaan sejak September 2018 hingga September 2018 rata-rata berkurang sebesar 7,59 persen. Sementara, di kawasan

perkotaan jumlahnya turun sebesar 2,06 persen per tahun. Dalam kurun waktu yang sama kesenjangan persentase kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan tampak tidak mengalami perbedaan yang berarti. Meskipun ini dapat dimaknai mencerminkan ada keselarasan program pengentasan kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan, namun rasanya lebih penting untuk mengevaluasi programnya karena angka kemiskinan DIY secara posisi masih relatif tinggi baik secara nasional maupun bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

**Gambar 6.16. Indeks Kedalaman ( $P_1$ ) dan Keparahan ( $P_2$ ) Kemiskinan DIY, 2014–2018**



Perkembangan Indeks kedalaman ( $P_1$ ) dan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) selama periode 2014 hingga 2018 secara umum menunjukkan arah penurunan, meskipun polanya berfluktuasi. Kondisi  $P_1$  dan  $P_2$  terburuk terjadi pada bulan Maret 2015. Kedua indeks terlihat meningkat secara nyata, akibat pengaruh kondisi perekonomian makro yang sedikit melambat, nilai tukar mata uang yang melemah, serta pengurangan subsidi energi yang berimbas pada kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada kelas menengah ke bawah menerima dampak yang paling parah, sehingga kedua indeks tersebut tercatat meningkat. Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir kedua terlihat semakin menurun. Indeks  $P_1$  menurun hingga 1,65 pada kondisi September 2018. Penurunan ini menggambarkan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan di DIY semakin berkurang. Sementara, Indeks  $P_2$  menurun hingga level 0,35 di Bulan September 2018. Penurunan indeks  $P_2$  ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang semakin berkurang.

Secara umum, indeks  $P_1$  dan  $P_2$  di daerah pedesaan tercatat lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini menyiratkan bahwa persoalan kemiskinan pedesaan lebih kompleks dari sisi ukuran maupun penanganannya dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan. Namun demikian, gap kedua indeks di daerah perkotaan dan pedesaan secara bertahap semakin mengecil. Melalui dua ukuran ini ( $P_1$  dan  $P_2$ ) juga bisa

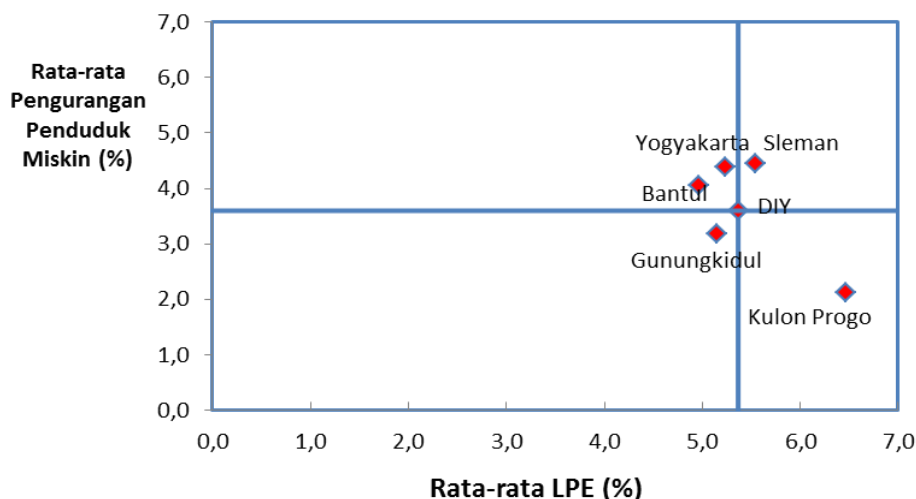
dilihat keberhasilan dari program-program percepatan pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6.17 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan penjelasan sebagai berikut.

**Pertama**, Kabupaten Gunung Kidul terletak di kuadran III, merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan pengurangan kemiskinan juga di bawah rata-rata provinsi DIY (*low-growth, less pro-poor*). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah mempercepat program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang.

**Gambar 6.17.** Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Laju Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di DIY, 2014-2018



**Kedua**, Kabupaten Kulon Progo yang pada periode sebelumnya berada di kuadran III bersama Gunungkidul, pada periode 2014-2018 bergeser di kuadran IV menjadi daerah yang berkembang cepat, dengan rata-rata pengurangan penduduk miskin di bawah rata-rata provinsi, tetapi rata-rata pertumbuhannya di atas rata-rata provinsi. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya pembangunan mega proyek Bandar udara YIA yang melesatkan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi dan pertambangan dan penggalian.

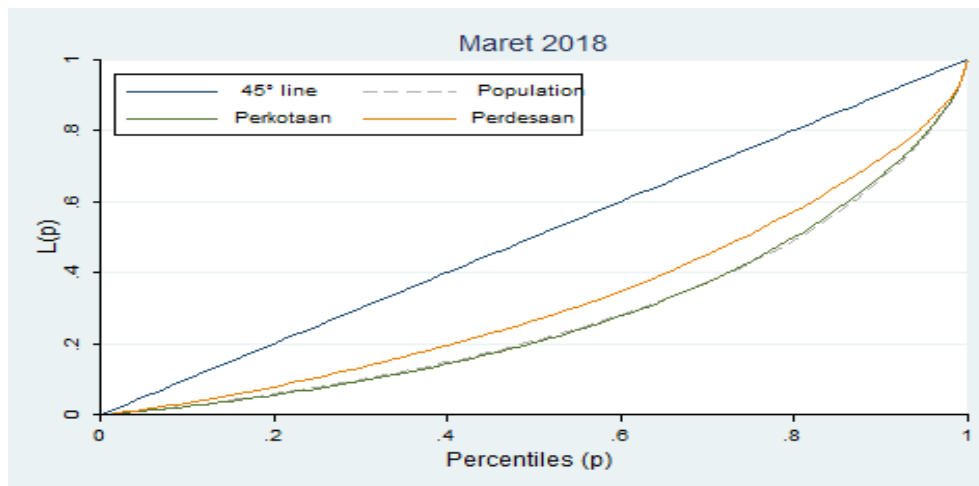
**Ketiga**, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta menjadi daerah yang maju tetapi tertekan atau berada di kuadran II, yaitu rata-rata pengurangan penduduk miskin lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi, tetapi rata-rata pertumbuhannya lebih lambat dibanding rata-rata pertumbuhan provinsi (*low growth, pro-poor*).

**Keempat**, Kabupaten Kabupaten Sleman terletak di kuadran I, merupakan satu-satunya kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi (*pro-growth, pro-poor*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut perlu dijaga dan selalu diupayakan untuk memberikan dampak penurunan angka kemiskinan. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pemerataan pengembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

### 3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, kondisi distribusi pendapatan yang diproksi menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita menunjukkan adanya gejala ketimpangan atau ketidakmerataan. Hal ini bisa dapat dilihat dari bentuk Kurva Lorenz dalam Gambar 6.18. Kurva Lorenz DIY pada kondisi Maret 2018 masih jauh dari garis diagonal utama. Kondisi ini mencerminkan distribusi pendapatan di DIY masih timpang atau belum merata. Artinya, total pengeluaran penduduk pada kelompok berpendapatan tinggi masih mendominasi total pengeluaran penduduk DIY. Sebaliknya, andil pengeluaran penduduk pada kelompok berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran masih rendah. Sebagai catatan, Kurva Lorenz hanya mampu menyimpulkan kondisi distribusi menggunakan pendekatan grafis dan belum mampu memberi kesimpulan kondisi distribusi secara kuantitatif. Secara relatif, kondisi distribusi pendapatan/pengeluaran di wilayah perkotaan cenderung lebih timpang dibandingkan dengan kondisi distribusi pendapatan di wilayah perdesaan. Atau dengan kata lain distribusi pendapatan perdesaan lebih merata.

Gambar 6.18. Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas Maret 2018

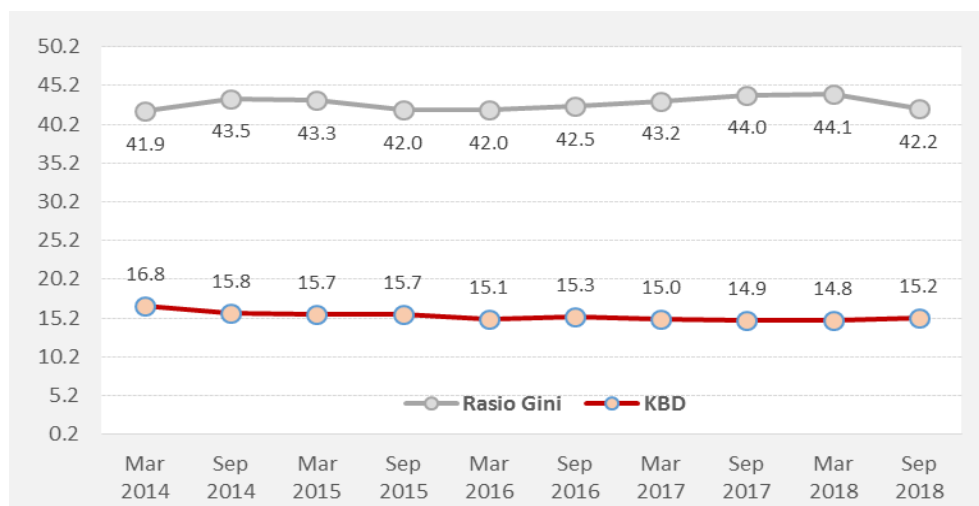


Untuk melihat level ketimpangan/ketidakmerataan dalam distribusi secara kuantitatif dilakukan menggunakan pendekatan ukuran Rasio Gini. Gambar 6.19 menyajikan tingkat pemerataan pendapatan yang diukur menggunakan Rasio Gini selama periode 2014-2018. Perkembangan Rasio Gini selama periode 2014-2018 masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan, yakni selalu di atas level 0,4. Ketimpangan pendapatan yang diterima antarpenduduk tercatat masih dalam kategori moderat, tetapi

posisinya sudah dekat dengan batas kategori timpang. Rasio Gini DIY pada kondisi September 2018 menembus angka 0,42. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai level tertinggi (0,45) dalam beberapa dekade terakhir. Secara umum, level Rasio Gini ini menggambarkan adanya ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang cukup lebar. Kenaikan Rasio Gini menggambarkan ketimpangan yang semakin melebar, sebaliknya penurunan Rasio Gini menggambarkan ketimpangan pendapatan yang makin mengecil. Secara umum, ketimpangan pendapatan antarpenduduk di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau dengan kata lain distribusi pendapatan di perdesaan lebih merata. Hal ini terkait dengan karakteristik sosial ekonomi terutama lapangan usaha serta tingkat upah di wilayah perkotaan yang lebih heterogen mulai dari sektor formal sampai sektor informal.

Indikator lain untuk mendeteksi tingkat distribusi pendapatan adalah ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD). Hasil hitungan ukuran ketimpangan KBD menjelaskan kondisi yang hamper sama dengan Rasio Gini. Persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah terlihat semakin menurun dari 16,8 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 15,2 persen pada tahun 2018. Demikian pula dengan 40 persen penduduk berpendapatan menengah, porsi distribusi pendapatannya juga relatif stabil dan bahkan cenderung menurun. Sebaliknya, pada golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi memiliki porsi distribusi total pendapatan yang semakin meningkat.

**Gambar 6.19. Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40% Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY (persen) 2014–2018**



Fenomena kenaikan Rasio Gini dan penurunan persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa kondisi distribusi pendapatan penduduk di DIY masih **timpang** atau belum merata. Meskipun demikian, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh H.T Oshima ketimpangan pendapatan

antarpenduduk di DIY masih dalam skala ketimpangan moderat (pada kisaran 30-50 persen). Berdasarkan skala ukuran kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk DIY juga masuk di skala moderat (*range* 12-17 persen).

**Tabel 6.9. Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2014 - 2018**

Indikator	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Mar 2017	Mar 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Andil Pendapatan					
a. 40% Penduduk Pendapatan Terendah (%)	16,82	15,65	15,08	14,96	14,83
b. 40% Penduduk Pendapatan Menengah (%)	33,16	34,07	37,13	34,94	34,38
c. 20% Penduduk Pendapatan Tertinggi (%)	50,03	50,28	47,79	50,12	50,79
2. Rasio Kuznet (c/a)	2,97	3,21	3,17	3,35	3,42
3. Rasio Gini	0,42	0,43	0,42	0,43	0,44

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SUSENAS bulan Maret

Selama periode 2014–2018, pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah berkurang sebesar 1,99 poin. Sementara, 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk yang berpendapatan tertinggi menerima tambahan masing-masing sebesar 1,22 poin dan 0,76 poin. Dengan kondisi ini seharusnya ketimpangan akan bertambah, namun indikator Rasio Gini justru sedikit berkurang di bulan Maret 2018. Penyebabnya adalah kelompok penduduk yang berpendapatan menengah menerima tambahan porsi yang lebih besar dibanding kelompok yang berpendapatan tertinggi. Secara umum, rasio antara proporsi pendapatan dari 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi dengan 40 persen penduduk berpendapatan terendah tercatat sebesar 3,4 kali lipat.

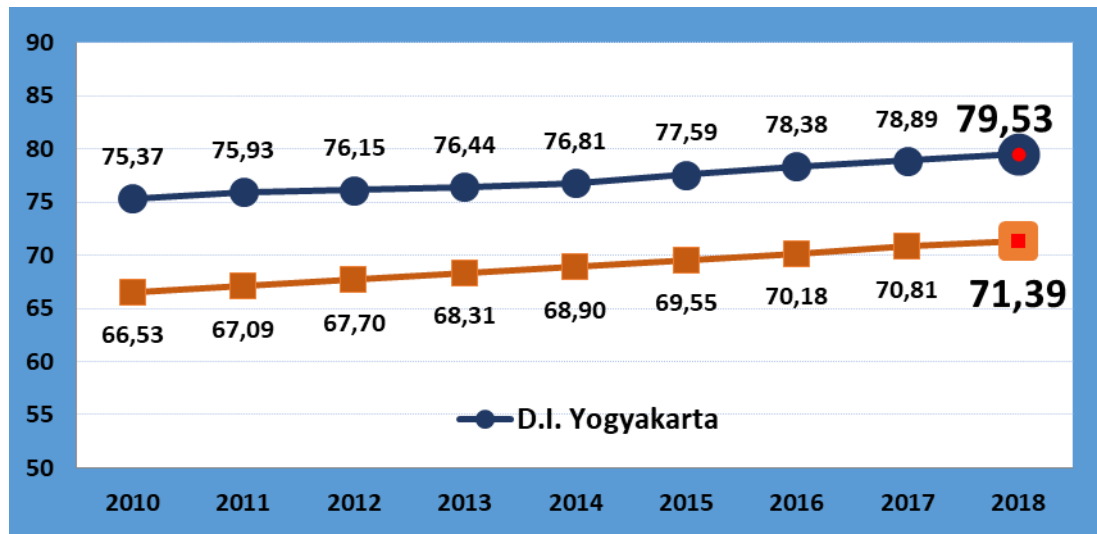
## E. Pembangunan Manusia

### 1. Perkembangan dan Posisi Pembangunan Manusia DIY

Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2018 berada pada posisi 79,53. Secara umum, capaian posisi ini terus mengalami kemajuan dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,53 pada tahun 2018 (Gambar 6.20). Artinya, setiap tahun IPM DIY rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen. Perkembangan posisi IPM ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM DIY selama periode 2010-2018 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi. Sejak tahun 2010 sampai 2018, capaian IPM DIY selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.



Gambar 6.20. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DIY dan Indonesia, 2010-2018



Tabel 6.10. Indeks Pembangunan Manusia DIY menurut Komponen, 2014-2018

Komponen	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,50	74,68	74,71	74,74	74,82
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,85	15,03	15,23	15,42	15,56
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,84	9,00	9,12	9,19	9,32
Pengeluaran Riil per Kapita Setahun	Rp 000	12 294	12 684	13 229	13 521	13 946
<b>IPM</b>		<b>76,81</b>	<b>77,59</b>	<b>78,38</b>	<b>78,89</b>	<b>79,53</b>
<b>Pertumbuhan IPM</b>	%	<b>0,48</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>	<b>0,65</b>	<b>0,81</b>

Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun (Tabel 6.10).

## 2. Kualitas Hidup

Indikator ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2014-2018, UHH penduduk DIY telah meningkat dari 74,50 tahun menjadi 74,82 tahun. Artinya, terjadi peningkatan usia harapan hidup pada saat lahir sebesar 0,32 tahun atau tumbuh sebesar 0,11 persen per tahun. UHH sebesar 74,82 tahun menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2018 hingga akhir hayatnya

dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dibandingkan dengan rata-rata secara nasional, level UHH penduduk DIY tercatat lebih tinggi dan menempati peringkat tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Tingginya level capaian UHH DIY maupun peningkatannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang murah, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk; peningkatan usia perkawinan pertama bagi wanita; peningkatan pendidikan wanita usia subur; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tata cara perawatan selama kehamilan; penanganan proses persalinan, dan pasca kelahiran. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kasus kejadian kematian bayi dan balita di seluruh wilayah DIY dalam beberapa dekade terakhir dan berimbas pada kenaikan usia harapan hidup.

### **3. Kualitas Pengetahuan**

Kedua indikator, baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menggambarkan kualitas pendidikan penduduk DIY yang semakin membaik.

Harapan Lama Sekolah penduduk DIY meningkat secara nyata dari 14,85 tahun di tahun 2010 menjadi 15,56 tahun di tahun 2018. Artinya, terjadi kenaikan lama sekolah sebesar 0,71 tahun. Harapan lama sekolah sebesar 15,56 tahun ini menggambarkan perkiraan lamanya tahun sekolah yang akan dijalani oleh anak-anak usia 7 tahun yang sudah setara dengan jenjang pendidikan D3 atau D4/S1. Secara level, harapan lama sekolah penduduk DIY tercatat paling tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya capaian dan peningkatan harapan lama sekolah penduduk didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk serta level kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat.

Capaian indikator rata-rata lama sekolah penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 9,32 tahun. Angka ini menggambarkan rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk DIY berusia 25 tahun ke atas yang sudah setara dengan lulus pada jenjang SMP. Rata-rata lama sekolah penduduk ini meningkat cukup nyata jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang mencapai 8,84 tahun. Artinya, ada peningkatan level sebesar 0,48 tahun selama periode 2014-2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia DIY yang lebih baik. Secara nasional, rata-rata lama sekolah penduduk DIY termasuk dalam kelompok enam provinsi yang memiliki level tertinggi.

#### **4. Standar Hidup yang Layak**

Pengeluaran per kapita riil penduduk DIY yang disesuaikan mencapai level Rp13,95 juta selama tahun 2018. Angka ini semakin meningkat selama periode 2014-2018 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 3,2 persen. Peningkatan ini menggambarkan standar kehidupan penduduk yang semakin membaik, artinya kualitas kesejahteraannya semakin meningkat. Secara level, pengeluaran riil perkapita penduduk DIY tercatat berada di peringkat ketiga tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya level pengeluaran riil per kapita ini dipengaruhi oleh pola konsumsi penduduk DIY yang lebih bervariasi serta tingkat harga komoditas barang dan jasa yang secara relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga komoditas yang sama di provinsi lain. Dengan kata lain, daya beli penduduk DIY lebih tinggi dari provinsi lainnya.

#### **5. Capaian IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY**

Pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2018 cukup bervariasi. Level IPM pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 69,24 hingga 86,11. Capaian IPM Kota Yogyakarta sebesar 86,11 dan tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Level capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 83,42. IPM kedua daerah ini termasuk dalam kategori “sangat tinggi” ( $IPM \geq 80$ ). IPM Kabupaten Bantul (79,45) dan Kulon Progo (73,76) termasuk dalam kategori “tinggi” ( $70 \leq IPM < 80$ ). Sementara, IPM Kabupaten Gunungkidul (69,24) berada dalam kategori “sedang” ( $60 \leq IPM < 70$ ).

Indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota juga terlihat lebih bervariasi. Pada dimensi umur yang panjang dan sehat, indikator usia harapan hidup saat lahir berkisar antara 73,66 tahun (Bantul) hingga 75,12 tahun (Kulon Progo). Usia harapan hidup Kabupaten Kulon Progo tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,95 tahun (Gunungkidul) hingga 17,05 tahun (Kota Yogyakarta). Harapan lama sekolah Kota Yogyakarta juga tercatat paling tinggi di Indonesia. Rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,00 tahun (Gunungkidul) hingga 11,44 tahun (Kota Yogyakarta). Sementara, pengeluaran per kapita riil pada tingkat kabupaten/kota di DIY berkisar antara Rp9,16 juta per tahun (Gunungkidul) hingga Rp18,63 juta per tahun (Kota Yogyakarta).

Kemajuan pembangunan manusia sampai tahun 2018 dapat terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecepatan pertumbuhannya. Kulon Progo sejak tahun 2013 naik level dari status “sedang” menjadi “tinggi”. Sleman sejak tahun 2011 sudah naik level dari status “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Sementara itu, tiga wilayah lain tidak mengalami perubahan status. Bantul tetap berada pada status “tinggi”, Gunungkidul masih tetap di status “sedang”, dan Kota Yogyakarta sejak 2010 sudah masuk status “sangat tinggi”. Selama periode 2010-2018, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Meskipun dari sisi level capaian

paling rendah, Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo tercatat memiliki pertumbuhan atau tingkat kemajuan yang paling cepat. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama periode 2010-2018 di kedua daerah masing-masing tercatat sebesar 0,95 dan 0,87. Sebaliknya, meskipun secara level IPM paling tinggi tingkat kemajuan/pertumbuhan IPM di Kota Yogyakarta dan Sleman tercatat lebih lambat.

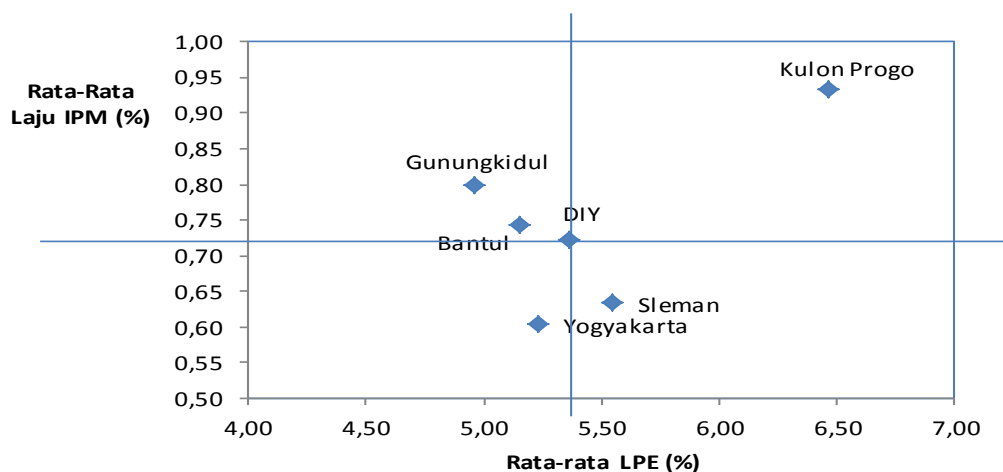
**Tabel 6.11. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2017-2018**

Kabupaten/ Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	75,06	75,12	14,23	14,24	8,64	8,65	9 277	9 698	73,23	73,76
Bantul	73,56	73,66	14,74	15,03	9,20	9,35	14 995	15 386	78,67	79,45
Gunungkidul	73,82	73,92	12,94	12,95	6,99	7,00	8 788	9 163	68,73	69,24
Sleman	74,63	74,69	16,48	16,71	10,65	10,66	15 365	15 844	82,85	83,42
Yogyakarta	74,35	74,45	16,82	17,05	11,43	11,44	18 005	18 629	85,49	86,11
DIY	74,74	74,82	15,42	15,56	9,19	9,32	13 521	13 946	78,89	79,53

## 6. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemajuan Pembangunan Manusia

Gambar 6.21 menunjukkan plot kabupaten/kota di DIY berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama kurun waktu 2014-2018 dengan penjelasan sebagai berikut. **Pertama**, Bantul dan Gunungkidul terletak di kuadran IV, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan peningkatan IPM juga di bawah rata-rata provinsi (*low-growth, pro human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa Bantul dan Gunungkidul akselerasi pembangunan manusia

**Gambar 6.21. Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota di DIY, 2014-2018**



melaju lebih cepat di atas rata-rata provinsi. Namun, dari sisi pertumbuhan ekonomi akselerasinya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal ini berarti pula bahwa selama lima tahun terakhir konsentrasi pembangunan lebih menitikberatkan pada pembangunan manusia. Untuk itu di masa yang akan datang pembangunan ekonomi diharapkan juga bisa dipacu lebih cepat lagi.

**Kedua**, Kabupaten Sleman memiliki kondisi sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekonomi mampu dipacu di atas rata-rata provinsi namun akselerasi pembangunan manusia di bawah rata-rata provinsi. Klasifikasi dalam Tipologi Klassen ada di kuadran IV (*high growth, less-pro human development*). Hal ini mencerminkan bahwa dalam lima tahun terakhir akselerasi pembangunan ekonomi Sleman mampu dipacu di atas rata-rata provinsi, namun sisi pembangunan manusia akselerasinya di bawah rata-rata provinsi.

**Ketiga**, Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi dari sisi perekonomian dan pembangunan manusia jauh lebih maju dibanding kabupaten/kota lain. Sehingga, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia selama lima tahun terakhir tidak secepat kabupaten/kota lain yang sedang dipacu untuk mengejar ketertinggalannya.

**Keempat**, Komitmen pemerintah untuk mengangkat ketertinggalan di sisi wilayah DIY telah secara nyata mengangkat pembangunan ekonomi dan juga pembangunan manusia di Kulon Progo. Selama lima tahun terakhir akselerasi pembangunan ekonomi Kulon Progo mampu dipacu melebihi rata-rata provinsi. Demikian pula pembangunan manusia juga mampu dipacu sehingga tumbuh di atas rata-rata provinsi. Dalam Tipologi Klassen Kulon Progo berada di Kuadran I (*high growth, pro human development*).

## **F. Potensi dan Disparitas Ekonomi Kewilayahan**

### **1. Sektor Ekonomi Potensial di Kabupaten/Kota**

Identifikasi potensi lapangan usaha unggulan di semua kabupaten/kota menggunakan indeks LQ pada tahun 2018 disajikan dalam Tabel 6.12. Lapangan usaha akan menjadi unggulan atau sektor basis di suatu wilayah jika memiliki nilai indeks  $LQ > 1$ . Sebaliknya, jika nilai indeks  $LQ \leq 1$  maka lapangan usaha tersebut tidak menjadi sektor basis atau kurang potensial. Kategori usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pertambangan dan penggalian (sektor primer) pada tahun 2018 menjadi sektor basis atau potensial di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul. Sementara, sebagian besar kategori usaha yang berbasis jasa (sektor tersier) menjadi sektor basis atau potensial di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kategori usaha industri manufaktur menjadi sektor basis di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sementara, kategori konstruksi menjadi sektor basis di Kulon Progo dan Sleman.

Nilai penghitungan  $RP_a$  2014-2018 menunjukkan hasil yang sangat bervariasi antarwilayah (Gambar 6.22). Secara umum, lapangan usaha pertanian; pertambangan dan penggalian; pengadaan air; transportasi dan pergudangan; dan administrasi pemerintahan

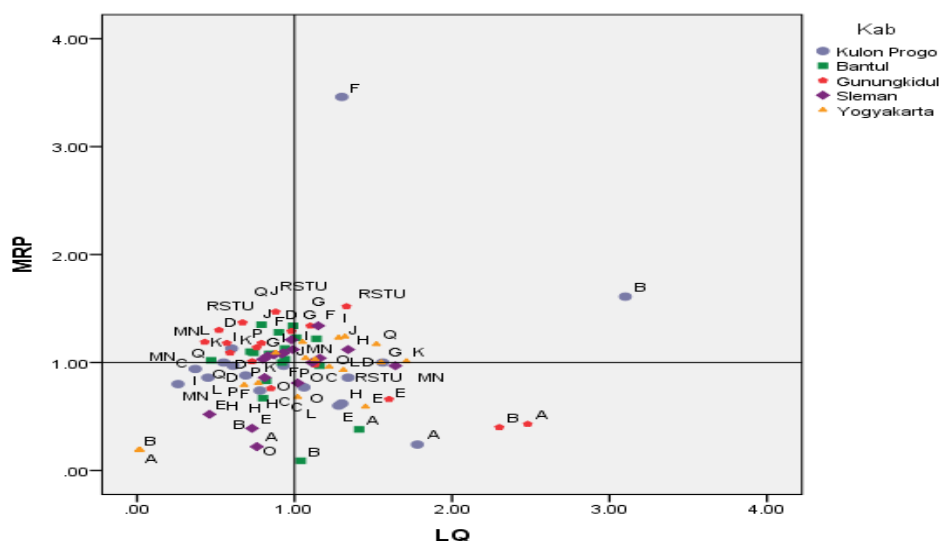
tidak menjadi potensi di hampir semua kabupaten/kota di DIY. Kategori industri manufaktur menjadi potensi di Kabupaten Bantul dan kategori potensi di semua kabupaten, kecuali Kota Yogyakarta. Sementara, kategori yang berbasis jasa menjadi potensi di semua kabupaten/kota kecuali Kulon Progo.

**Tabel 6.12. Indeks LQ Tahun 2018 dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Analisis (RP<sub>a</sub>) 2014-2018 menurut Kabupaten/Kota di DIY**

Kat	Uraian	Indeks LQ 2018					Rasio Pertumbuhan 2014-2018				
		KP	BTL	GK	SLM	YK	KP	BTL	GK	SLM	YK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian	1.78	1.41	2.48	0.76	0.02	0.24	0.38	0.43	0.22	0.19
B	Pertambangan dan Penggalian	3.10	1.04	2.30	0.73	0.01	1.61	0.09	0.40	0.39	0.19
C	Industri Pengolahan	0.93	1.16	0.73	1.02	1.02	0.97	0.97	1.01	0.81	0.68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.61	0.99	0.67	0.80	1.55	0.97	1.34	1.37	1.03	1.00
E	Pengadaan Air	1.28	0.80	1.60	0.46	1.45	0.60	0.67	0.66	0.52	0.59
F	Konstruksi	1.30	0.94	0.98	1.15	0.77	3.46	1.03	1.29	1.34	0.81
G	Perdagangan Besar dan Eceran	1.56	1.01	1.10	0.92	0.88	1.00	1.23	1.34	1.08	1.09
H	Transportasi dan Pergudangan	1.30	0.82	0.85	1.34	0.68	0.62	0.83	0.76	1.12	0.79
I	Akomodasi dan Makan Minum	0.37	1.14	0.57	0.99	1.32	0.94	1.22	1.18	1.12	1.24
J	Informasi dan Komunikasi	0.60	0.90	0.88	0.98	1.28	1.13	1.28	1.47	1.21	1.23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.78	0.72	0.59	0.83	1.71	0.74	1.10	1.09	1.06	1.01
L	Real Estate	0.45	0.94	0.52	1.11	1.31	0.86	1.13	1.30	1.00	0.93
MN	Jasa Perusahaan	0.26	0.47	0.43	1.64	1.07	0.80	1.02	1.19	0.97	1.04
O	Administrasi Pemerintahan	1.06	0.92	1.13	0.81	1.22	0.77	1.00	0.98	0.86	0.96
P	Jasa Pendidikan	0.69	0.84	0.76	1.16	1.13	0.88	1.08	1.14	1.04	1.03
Q	Jasa Kesehatan	0.55	0.74	0.79	0.93	1.52	1.00	1.09	1.18	1.09	1.17
RSTU	Jasa lainnya	1.34	0.79	1.33	0.87	1.05	0.86	1.35	1.52	1.07	1.19
PDRB		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data PDRB 2014-2018

**Gambar 6.22. Scatterplot Indeks LQ 2018 dan Rasio Pertumbuhan 2014-2018 menurut Kategori Usaha dan Kabupaten/Kota di DIY**

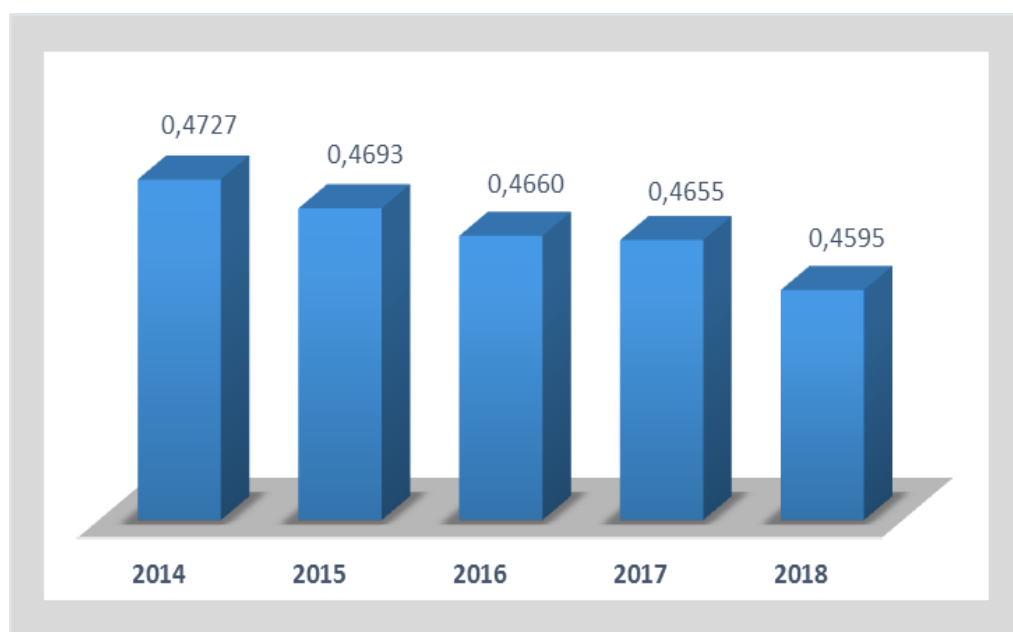


Berdasarkan *scatterplot* pada Gambar 6.22, kategori usaha konstruksi (F) dan pertambangan penggalian (B) menjadi lapangan usaha yang potensial dari sisi *share* maupun pertumbuhan di Kulon Progo. Hasil ini sangat terkait dengan aktivitas pembangunan YIA yang mendorong pertumbuhan kategori konstruksi dan pertambangan penggalian. Lapangan usaha potensial lainnya sebagian besar merupakan kategori usaha yang berbasis jasa di Kota Yogyakarta dan Sleman; serta perdagangan eceran (G) dan penyediaan akomodasi makan minum (I) di Bantul. Sebaliknya, lapangan usaha yang tidak potensial dari sisi *share* dan pertumbuhan diantaranya adalah kategori pertanian (A) dan pertambangan penggalian (B) di Kota Yogyakarta dan Sleman; administrasi pemerintahan (O) di Sleman; konstruksi (F) di Kota Yogyakarta; pengadaan air (E) di Sleman; transportasi (H), penyediaan akomodasi dan makan minum (I); jasa perusahaan (MN), dan real estat (L); serta jasa pendidikan (P) di Kulon Progo.

## 2. Ketimpangan Regional

Ketimpangan pendapatan regional di DIY yang diindikasikan oleh Indeks Williamson selama periode 2014-2018 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari 0,473 pada tahun 2014 menjadi 0,459 pada tahun 2018 (Gambar 6.23). Penurunan ini menggambarkan ketimpangan pendapatan antarregional di DIY yang semakin berkurang. Namun demikian, level ketimpangan pendapatannya tercatat masih cukup tinggi yakni di batas atas kriteria moderat. Penurunan indeks ketimpangan yang cukup tinggi terjadi selama 2017-2018 yang dipengaruhi oleh aktivitas investasi di wilayah pinggiran DIY terutama di Kulon Progo dan Gunungkidul.

**Gambar 6.23. Indeks Williamson DIY, 2014-2018**



### 3. Disparitas Sektoral (*Shift Share Analysis*)

#### a. Analisis Pangsa Regional (PR)

Berdasarkan hasil penghitungan dalam analisis *Shift Share* periode 2010-2018, nilai komponen PR yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman. Besarnya komponen PR di Kabupaten Sleman mencapai Rp11,09 triliun dan memiliki kontribusi sebesar 33,21 persen terhadap perekonomian DIY. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY selama kurun waktu 2010-2018. Dengan kata lain, Kabupaten Sleman menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di DIY. Hasil ini masih mirip dengan hasil analisis pada periode kajian sebelumnya. Pangsa terbesar berikutnya dicapai oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan kontribusi 26,60 persen dan 18,73 persen. Sementara, Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih tetap berada di urutan keempat dan kelima dengan kontribusi masing-masing sebesar 13,68 persen dan 7,78 persen.

**Tabel 6.13. Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010–2018**

Sektor	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	533 778	952 538	1 230 001	1 008 123	18 148	3 742 588
2. Pertambangan & Penggalian	38 822	47 059	72 159	51 429	408	209 877
3. Industri Pengolahan	334 092	1 015 296	453 690	1 638 929	1 313 508	4 755 514
4. Pengadaan Listrik, Gas	2 383	9 126	4 128	13 332	19 915	48 884
5. Pengadaan Air	4 044	5 853	8 260	6 074	15 046	39 276
6. Konstruksi	215 054	603 754	420 421	1 232 806	718 832	3 190 867
7. Perdagangan	324 794	491 483	395 282	817 071	627 123	2 655 753
8. Pengangkutan & Pergudangan	246 143	327 570	255 059	659 138	396 496	1 884 406
9. Akomodasi & Makan Minum	91 778	608 531	238 122	1 031 953	991 710	2 962 093
10. Informasi dan Komunikasi	145 754	546 955	343 951	1 012 839	1 141 917	3 191 417
11. Jasa Keuangan	64 756	138 688	77 339	285 170	485 400	1 051 354
12. Real Estat	89 090	393 087	149 019	871 302	818 786	2 321 284
13. Jasa Perusahaan	8 323	33 064	20 932	204 251	106 261	372 831
14. Administrasi Pemerintahan	201 562	413 497	387 500	668 346	794 534	2 465 439
15. Jasa Pendidikan	153 594	427 991	276 438	1 087 038	856 002	2 801 062
16. Jasa Kesehatan	35 655	107 990	83 920	242 868	324 314	794 747
17. Jasa-jasa	107 617	128 789	149 670	254 596	248 500	889 172
<b>PDRB</b>	<b>2 597 239</b>	<b>6 251 270</b>	<b>4 565 891</b>	<b>11 085 265</b>	<b>8 876 901</b>	<b>33 376 566</b>

Sumber : PDRB DIY dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Dengan mencermati nilai pangsa masing-masing sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Sleman maka nilai komponen PR tertinggi tercatat pada kategori usaha industri pengolahan (C) dan dibayangi oleh konstruksi (F). Kategori lain yang memiliki kontribusi cukup besar di Kabupaten Sleman adalah kategori jasa pendidikan (P); penyediaan akomodasi dan makan minum (I); informasi dan komunikasi (J); dan pertanian (A). Di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta nilai PR sektor industri pengolahan (C) juga



merupakan yang tertinggi. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul nilai PR kategori industri pengolahan berada pada urutan kedua setelah kategori pertanian. Secara umum, gambaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan di seluruh kabupaten/kota di DIY masih menjadi *leading sector* untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

**b. Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)**

Hasil perhitungan menggunakan data PDRB provinsi dan kabupaten/kota, nilai PS dengan arah positif tertinggi di DIY dimiliki oleh kategori informasi dan komunikasi (J) dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum (I). Nilai PS positif urutan terbesar berikutnya adalah kategori konstruksi (F); jasa keuangan (K), dan perdagangan (G). Sementara, kategori industri pengolahan (C), pertanian (A), dan pengangkutan dan pergudangan (H) memiliki nilai PS dengan arah negatif terbesar. Secara eksplisit, hal ini mengindikasikan bahwa dalam periode 2010-2018 struktur ekonomi DIY secara makro lebih bertumpu pada kelompok sektor tersier yang sifat output dari aktivitasnya berbasis jasa. Pangsa kategori pertanian dalam perekonomian DIY semakin menurun dan tergeser oleh kategori usaha lain yang semakin menguat, meskipun lapangan usaha pertanian masih menjadi mata pencaharian utama penduduk di wilayah perdesaan. Menguatnya lapangan usaha yang berbasis jasa juga menunjukkan pangsa ekonomi dari wilayah perkotaan semakin mendominasi, karena aktivitas yang berbasis jasa menjadi lapangan usaha utama sebagian besar penduduk wilayah perkotaan.

**Tabel 6.14. *Proportional Shift (PS)* menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014–2018**

Sektor	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	-412 443	-736 013	-950 404	-778 962	-14 023	-2 891 844
2. Pertambangan & Penggalian	-14 300	-17 334	-26 580	-18 944	-150	-77 307
3. Industri Pengolahan	-104 051	-316 208	-141 299	-510 435	-409 084	-1 481 076
4. Pengadaan Listrik, Gas	639	2 446	1 106	3 573	5 338	13 102
5. Pengadaan Air	-2 090	-3 025	-4 269	-3 139	-7 777	-20 299
6. Konstruksi	40 619	114 036	79 409	232 851	135 772	602 688
7. Perdagangan	50 222	75 997	61 121	126 341	96 970	410 651
8. Pengangkutan & Pergudangan	-30 282	-40 300	-31 379	-81 091	-48 779	-231 831
9. Akomodasi & Makan Minum	21 825	144 709	56 626	245 400	235 830	704 389
10. Informasi dan Komunikasi	69 104	259 320	163 073	480 203	541 401	1 513 101
11. Jasa Keuangan	25 707	55 056	30 702	113 206	192 692	417 362
12. Real Estat	9 925	43 792	16 602	97 069	91 218	258 606
13. Jasa Perusahaan	1 152	4 577	2 898	28 276	14 711	51 614
14. Administrasi Pemerintahan	503	1 031	966	1 666	1 981	6 146
15. Jasa Pendidikan	19 900	55 451	35 815	140 837	110 904	362 907
16. Jasa Kesehatan	11 617	35 185	27 343	79 130	105 667	258 942
17. Jasa-jasa	12 448	14 897	17 312	29 449	28 744	102 850
<b>PDRB</b>	<b>-299 505</b>	<b>-306 382</b>	<b>-660 958</b>	<b>185 431</b>	<b>1 081 414</b>	<b>0</b>

Sumber : PDRB DIY dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Hasil penghitungan komponen PS pada level kabupaten/kota menunjukkan bahwa nilai PS yang tertinggi selama periode 2010-2018 dicapai oleh Kota Yogyakarta. Hal ini masih sama seperti periode kajian sebelumnya. Nilai PS Kota Yogyakarta mencapai Rp1,08 triliun dan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Wilayah lain yang memiliki nilai PS positif adalah kabupaten Sleman. Secara umum, nilai PS positif di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman ini menggambarkan kedua wilayah yang memiliki keuntungan lokasi (*location advantage*). Sementara, ketiga kabupaten lain justru memiliki nilai PS dengan arah negatif dan yang paling besar tercatat di Kabupaten Gunungkidul. Penyebab nilai PS memiliki arah negatif untuk masing-masing kabupaten berbeda-beda, namun pada dasarnya dipengaruhi oleh besarnya nilai negatif PS pada empat kategori, yaitu: pertanian; industri pengolahan; pengangkutan dan perdagangan, serta pertambangan dan penggalian.

Pendorong tingginya nilai PS di Kota Yogyakarta dan Sleman adalah kategori informasi dan komunikasi (J); penyediaan akomodasi dan makan minum (I); jasa keuangan (K); konstruksi (F); jasa pendidikan (P); dan jasa kesehatan (Q). Keenam kategori tersebut juga memiliki nilai PS positif di tiga kabupaten lain, namun nilainya tidak mampu mengkompensasi tingginya nilai PS negatif pada kategori pertanian (A) dan industri pengolahan (C). Akibatnya nilai agregat PS di ketiga kabupaten tetap bernilai negatif. Tabel 6.11 juga menjelaskan bahwa hasil penghitungan PS negatif terbesar di semua kabupaten/kota di DIY adalah kategori pertanian (A) dan industri pengolahan (C). Spesialisasi Kota Yogyakarta terletak pada kategori yang berbasis perdagangan dan jasa, karena posisinya sebagai ibukota provinsi dan pusat perekonomian DIY. Dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai struktur ekonomi yang lebih menguntungkan (*favourable economic structure*) untuk kategori-kategori tersebut.

Kondisi perkembangan output kategori pertanian dan industri pengolahan secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya. Kategori pertanian terlihat semakin melambat pertumbuhannya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, terutama di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Sleman. Kategori industri pengolahan juga mengalami hal yang sama, meskipun perlambatannya tidak secepat kategori pertanian. Oleh karena pangsa kedua kategori tersebut dalam struktur ekonomi tergolong yang tertinggi, perkembangan ekonomi kabupaten/kota di DIY mempunyai keterkaitan yang tinggi dengan pertumbuhan kategori pertanian dan industri pengolahan.

Hasil perhitungan nilai *Different Shift* (DS) menunjukkan bahwa empat kabupaten memiliki nilai DS dengan arah positif, yakni Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Nilai DS positif memiliki makna bahwa daerah tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Sementara, Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang memiliki nilai DS dengan arah negatif atau memiliki daya saing yang paling rendah. Nilai DS tertinggi selama periode 2010-2018 dicapai oleh Kabupaten Sleman dan diikuti Kabupaten Kulon Progo. Nilai DS terbesar ini menjelaskan bahwa Kabupaten

Sleman dan Kulon Progo memiliki daya saing regional yang lebih kuat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Keunggulan daya saing perekonomian regional Sleman terutama ditopang oleh kategori usaha pengangkutan dan pergudangan (H) serta informasi dan komunikasi (J). Sementara, daya saing regional perekonomian Kulon Progo lebih didorong oleh kategori usaha konstruksi (F). Kondisi ini sedikit berbeda dengan hasil kajian pada periode sebelumnya. Daya saing regional Bantul terutama ditopang oleh kategori perdagangan (G); penyediaan akomodasi dan makan minum (I), real estat (L), dan industri pengolahan (C). Hasil ini masih sama dengan kondisi hasil kajian pada periode sebelumnya. Sementara itu, daya saing regional di Kabupaten Gunungkidul terutama ditopang oleh kategori informasi dan komunikasi (J), pertanian (A), industri pengolahan (C), dan perdagangan (G). Hasil ini relatif sama dengan kondisi hasil kajian pada periode sebelumnya. Nilai DS negatif di Kota Yogyakarta terutama dipengaruhi oleh kategori konstruksi (F); informasi komunikasi (J); pengangkutan dan pergudangan (H); serta real estat (L).

**Tabel 6.15. *Different Shift (DS)* menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2014–2018**

Sektor	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	40 913	10 615	61 632	-111 164	-1 996
2. Pertambangan & Penggalian	33 802	-17 009	-10 566	-6 065	-162
3. Industri Pengolahan	86 176	36 578	33 965	-101 584	-55 135
4. Pengadaan Listrik Gas	45	1 297	691	-386	-1 647
5. Pengadaan Air	-33	379	-106	-17	-223
6. Konstruksi	338 246	-107 002	-46 358	81 451	-266 337
7. Perdagangan	18 786	50 562	27 522	-2 699	-94 171
8. Pengangkutan & Pergudangan	-89 052	-33 846	-64 484	316 013	-128 631
9. Akomodasi & Makan Minum	-13 516	43 622	-8 241	-473	-21 393
10. Informasi dan Komunikasi	2 220	3 181	84 471	102 021	-191 892
11. Jasa Keuangan	-3 302	17 412	14 120	26 056	-54 285
12. Real Estat	-5 581	40 060	17 064	56 684	-108 227
13. Jasa Perusahaan	-1 593	-1 828	2 026	7 816	-6 421
14. Administrasi Pemerintahan	3 882	19 234	-4 219	-11 606	-7 292
15. Jasa Pendidikan	1 900	17 675	13 171	18 097	-50 843
16. Jasa Kesehatan	468	-2 249	6 382	17 937	-22 537
17. Jasa-jasa	-29 820	17 607	33 042	-206	-20 624
<b>PDRB</b>	<b>383 542</b>	<b>96 290</b>	<b>160 110</b>	<b>391 875</b>	<b>-1 031 818</b>

Sumber : PDRB DIY dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Nilai pergeseran neto positif (*upward different shift*) tertinggi diperoleh Kabupaten Sleman, karena delapan kategori bernilai positif, terutama pengangkutan dan pergudangan; informasi dan komunikasi, konstruksi, dan real estat. Artinya, Kabupaten Sleman merupakan lokasi yang sangat menguntungkan (*locational advantage*) bagi perkembangan lapangan usaha tersebut dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya (Tabel 6.15).

Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul dan Bantul memiliki nilai pergeseran neto negatif (*downward different shift*) tertinggi. Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kategori pertanian dan industri pengolahan yang berjalan lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi Gunungkidul secara agregat, padahal dari sisi andil atau *share* kedua kategori masih sangat dominan. Nilai pergeseran neto di Kota Yogyakarta tercatat positif, tapi levelnya sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena Kota Yogyakarta yang menjadi pusat perkotaan sudah mulai jenuh perkembangan ekonominya. Hampir semua kategori memiliki nilai DS negatif, terutama pada lapangan usaha konstruksi, informasi dan komunikasi, dan real estat bernilai negatif terbesar di Kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena pertumbuhan lapangan usaha ini sudah melewati era tren meningkat, sementara di kabupaten-kabupaten lain masih berkembang dan tumbuh.

**Tabel 6.16. Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2014-2018**

Kab/Kota	Perub. PDRB	Pangsa Regional	Nilai Pergeseran		Komponen Pergeseran		
			Netto	%	PS	DS	PS+DS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulon Progo	2 681 275	2 597 239	84 037	3.13	-299 505	383 542	84 037
Bantul	6 041 178	6 251 270	-210 092	-3.48	-306 382	96 290	-210 092
Gunungkidul	4 065 043	4 565 891	-500 848	-12.32	-660 958	160 110	-500 848
Sleman	11 662 571	11 085 265	577 306	4.95	185 431	391 875	577 306
Yogyakarta	8 926 498	8 876 901	49 597	0.56	1 081 414	-1 031 818	49 597

Sumber : PDRB DIY dan Kabupaten/Kota (data diolah)

**Tabel 6.17. Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2010-2018**

Kategori	Komponen Pertumbuhan		
	DS	PS	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab/Kota yang pertumbuhan ekonominya pesat (I):			
1. Kabupaten Sleman	185 431	391 875	6 38
Kab/Kota sedang berkembang (IV):			
1. Kabupaten Kulon Progo	-299 505	383 542	10 62
2. Kabupaten Bantul	-306 382	96 290	5 48
3. Kabupaten Gunungkidul	-660 958	160 110	5 13
Kab/Kota yang cenderung berpotensi (II):			
1. Kota Yogyakarta	1 081 414	-1 031 818	5 48

Sumber : PDRB DIY dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Berdasarkan nilai PS dan DS selama periode 2010-2018, kabupaten/kota di DIY dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori seperti yang disajikan pada Tabel 6.17. Hasil ini mirip dengan analisis pada periode sebelumnya yang juga terdiri dari tiga kelompok.

Kuadran I ditandai oleh nilai PS dan DS bertanda positif, dan terdapat satu kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok ini yakni Sleman.

Berdasarkan Tabel 6.17 terdapat satu daerah yang tercakup dalam Kuadran II yakni Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* 2010-2018 tidak ada kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran ini. Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil kajian pada periode sebelumnya. Kabupaten Kulon Progo, sebelumnya termasuk dalam kuadran III, namun mulai tahun 2018 sudah mampu keluar dan berpindah kuadran. Hasil analisis *Shift Share* 2010-2018 menunjukkan terdapat tiga daerah yang termasuk dalam Kuadran IV, yakni Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul.

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi





## BAB VII

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

1. Nilai PDRB DIY tahun 2018 atas dasar harga berlaku sebesar Rp129,9 triliun meningkat sekitar Rp37 triliun dari tahun 2014 yang sebesar Rp92,8 triliun. Sementara atas dasar harga konstan meningkat sekitar Rp18,5 triliun dari Rp79,5 triliun menjadi Rp98,0 triliun.
2. Tiga lapangan usaha yang kontribusinya terbesar adalah industri pengolahan (C), konstruksi (F), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (I). Masing-masing lapangan usaha tersebut memberi kontribusi sebesar 12,99 persen, 10,30 persen, dan 10,22 persen.
3. Pertanian tergeser dari urutan ketiga ke urutan keempat dan kontribusinya semakin menurun. Sementara tren kontribusi lapangan usaha konstruksi semakin meningkat seiring masifnya pembangunan mega proyek seperti bandara baru dan jalan jalur lintas selatan.
4. Industri pengolahan didominasi oleh subkategori/golongan industri makanan dan minuman dan industri tekstil dan pakaian jadi, yaitu 66,5 persen dari nilai tambah kategori industri pengolahan.
5. Performa perekonomian DIY lebih didominasi oleh kelompok sektor tersier yang mencakup 11 lapangan usaha yaitu perdagangan dan semua sektor jasa.
6. Lapangan usaha yang sedang tumbuh melesat adalah konstruksi (F) dan pertambangan dan penggalian (B). Sementara lapangan usaha andalan lainnya juga tumbuh cukup kuat di atas lima persen, yaitu industri pengolahan (C), penyediaan akomodasi makan dan minum (I), jasa pendidikan (P), informasi dan komunikasi (J), dan perdagangan (G).
7. Pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,20 persen dan termasuk dalam 14 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2018. Landasan pertumbuhan ekonomi cukup mantap karena digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar dalam PDRB DIY, antara lain yaitu: industri pengolahan (C), konstruksi (F), penyediaan akomodasi dan makan minum (I), pertanian, kehutanan, dan perikanan (A), dan perdagangan (G).
8. Hingga tahun 2018, PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku sebesar Rp34,1 juta. Sementara itu PDRB per kapita kabupaten/kota berkisar Rp24,1 juta hingga Rp79,1 juta dengan yang terendah di Kulon Progo dan tertinggi di Kota Yogyakarta.



9. Dilihat indeks perkembangan sektoral, lapangan usaha yang menjadi leading sektor karena berkembang cepat adalah informasi dan komunikasi (J), jasa keuangan (K), jasa kesehatan (Q), pengadaan listrik dan gas (D), akomodasi dan penyediaan makan minum (I), dan konstruksi (F) dengan nilai indeks atas dasar harga konstan di atas 160.
10. Dari sisi PDRB pengeluaran, geliat perekonomian DIY masih didominasi oleh aktivitas konsumsi rumah tangga yang mempunyai kontribusi 66,8 persen meskipun tren perkembangannya dalam lima tahun terakhir sedikit berkurang. Sementara itu, kontribusi komponen pembentukan modal tetap bruto bergerak terus meningkat, dari 29,9 persen menjadi 33,2 persen. Artinya, ada penguatan investasi yang cukup kuat dalam proses pembangunan di DIY. Tahun 2018 pertumbuhan PMTB menembus dua digit yaitu 10,2 persen.
11. Peningkatan investasi juga diiringi dengan membaiknya raport efisien investasinya, yaitu ICOR menurun dari 5,70 menjadi 4,96.
12. Net Ekspor luar negeri dan juga antardaerah DIY masih bernilai negatif. Artinya, neraca perdagangan DIY masih lebih besar digerakkan oleh aktivitas impor barang/jasa. Namun demikian dalam dua tahun terakhir kinerja ekspor cenderung meningkat dan tumbuh di atas 9 persen. Sementara pertumbuhan impor cenderung melambat.
13. Selama lima tahun terakhir, akselerasi pertumbuhan ekonomi Kulon Progo paling pesat, meskipun dari sisi andilnya masih yang terkecil. Hal ini dikarenakan PDRB Kulon Progo yang sebesar Rp10,2 triliun hanya memberikan kontribusi sekitar 7,9 persen terhadap total PDRB DIY. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kulon Progo dalam kurun waktu 2014-2018 sebesar 6,47 persen per tahun, di atas rata-rata pertumbuhan kabupaten/kota lain yang tumbuh pada kisaran 5,0-5,5 persen per tahun. Bahkan, pada tahun 2018 Kulon Progo tumbuh melesat dua digit sebesar 10,6 persen.
14. Andil pertumbuhan ekonomi terbesar dimiliki oleh Sleman dan Kota Yogyakarta karena kontribusi kedua wilayah tersebut masih dominan (59,8 persen dari total PDRB DIY).
15. Dalam sepuluh tahun terakhir pola perkembangan inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional mempunyai kemiripan dan Yogyakarta cenderung sedikit lebih rendah. Kelompok komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi di Yogyakarta selama tahun 2018, antara lain: sandang; pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan bahan makanan. Sementara, komoditas yang berperan memberikan sumbangan deflasi di DIY selama tahun 2018 adalah bahan makanan berupa lemak dan minyak, serta sayur-sayuran, dan rekreasi.

16. Nampaknya kebijakan kenaikan tarif tiket pesawat mempengaruhi penurunan kinerja pariwisata.
17. Perekonomian DIY 2018 telah mulai tumbuh lebih cepat namun belum banyak memberikan kesempatan kerja. Meskipun demikian dari sisi produktivitas tenaga kerja terdapat peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
18. Sejak 2014 hingga 2018, tiga kategori, yaitu konstruksi (F), akomodasi dan makan minum (I), dan informasi dan komunikasi (J) masuk dalam kelompok kategori yang produktif dan tumbuh cepat. Kategori pengangkutan dan pergudangan (H) baru di 2018 naik status menjadi produktif dan tumbuh cepat.
19. Melalui analisis *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dalam periode 2014-2018 lapangan usaha potensial untuk Kulon Progo adalah konstruksi (F) dan pertambangan dan penggalian (B), atau kelompok sektor sekunder. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mempunyai lapangan usaha potensial untuk lapangan usaha yang berbasis jasa (sektor tersier). Lapangan usaha potensial untuk Bantul adalah perdagangan eceran (G) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (I). Lapangan usaha potensi untuk Gunungkidul masih pertanian, kehutanan, dan perikanan (A), diiringi perdagangan (G), dan jasa perorangan lainnya (RSTU).
20. Tren persentase kemiskinan semakin menurun, meskipun masih relatif tinggi dibanding provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa dan juga lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan (P0) lebih besar ada di daerah perdesaan. Kantong kemiskinan DIY masih terdapat di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.
21. Indikator ketimpangan distribusi pendapatan Rasio Gini (RG) dan Kriteria Bank Dunia (KBD) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk masih relatif tinggi. Kenaikan persentase pendapatan lebih banyak dinikmati oleh 20% penduduk berpendapatan tertinggi.
22. Sementara ketimpangan antarwilayah yang diukur dengan Indeks Williamson (IW) menunjukkan tren menurun.
23. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai hasil yang memuaskan karena menempatkan DIY pada urutan kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia, di bawah DKI Jakarta. Hasil analisis Tipologi Klassen untuk *plotting* pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan manusia menunjukkan bahwa Kulon Progo menjadi daerah yang mampu tumbuh cepat secara ekonomi dan juga maju pembangunan manusianya (*high growth, pro human development*).

### B. Rekomendasi

1. Ketimpangan pendapatan antarwilayah, ketimpangan pendapatan penduduk, dan kemiskinan masih mewarnai perekonomian DIY. Oleh karena itu orientasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan untuk beberapa tahun ke depan diharapkan masih berpihak pada permasalahan ini.
2. Pembangunan mega proyek seperti penempatan bandara baru di Kulon Progo selayaknya dapat diikuti mega proyek lain untuk mengangkat perekonomian di daerah marginalnya DIY yang lain, yaitu Gunungkidul dan juga Bantul.
3. Perlu melakukan beberapa *review* target pembangunan karena realisasi pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir (2017-2018) sudah melesat melebihi target. Hal ini didasari semangat untuk mengoptimalkan pengejawantahan rumusan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD 2017-2022.
4. Master plan pembangunan tetap harus memperhatikan potensi yang dimiliki tiap daerah agar program dapat berdaya dan efisien dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga tujuan mengeliminir kesenjangan antar kabupaten/kota dapat tercapai (lihat analisis Tipologi Klassen).
5. Perbaikan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota sudah mulai nampak hasilnya, namun perlu diperhatikan bahwa penopang pertumbuhan saat ini bersifat sementara karena diungkit oleh mega proyek. Untuk itu sektor riil lainnya perlu digerakkan terutama yang mampu menggerakkan geliat perekonomian masyarakat, seperti perdagangan, akomodasi dan makan minum, dan jasa perusahaan, dan jasa perorangan lainnya.
6. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian. Artinya, sendi-sendi ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang harus lebih dipacu pertumbuhannya. Bila ini berjalan dengan baik, maka tidak hanya pertumbuhan yang dapat diperbaiki tetapi kesenjangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran juga dapat ditekan lebih rendah.
7. Dalam upaya lebih menekan angka pengangguran dan sekaligus peningkatan kesempatan kerja, pemerintah pusat dan daerah perlu mengambil kebijakan yang bisa mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor yang masih potensi seperti industri pengolahan, konstruksi, jasa keuangan, real estat, dan jasa perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA





## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik RI, 2017, ***"Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha"***, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2018, ***"Analisis ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta 2013-2017"***, Kerjasama Bappeda dan BPS DIY.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2018, ***"Analisis PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta 2013-2017"***, Kerjasama Bappeda dan BPS DIY.
- BPS Provinsi DIY, 2018, ***"Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2018"***, Yogyakarta.
- Herrick Bruce dan Kendleberger Charles P, 1988, ***"Economic Development (diterjemahkan oleh Drs. Komarudin, Drs. A. Hasyuri Ali, Drs. G. Kartasapoetra)"***, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, ***"Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan"***, PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2013, ***"Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi"***, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, ***"Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang"***, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mubyarto, 2003, ***"Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila"*** Seminar Bulanan III, PUSTEP-UGM, Yogyakarta 1 April 2003.
- Nellis, Joseph G. dan David Parker, 2002, ***"The Essence of The Economy"***, Second Edition, Prentice Hall of India, New Delhi.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018, ***"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022"***, Yogyakarta.
- Simanjuntak, P.J, 2001, ***"Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia"***, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjafrizal, ***"Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat"***, Prisma, LP3ES No. 3.
- Todaro, Michael P, and Smith, Stephen C, 2015, ***"Economic Development 12<sup>th</sup> Edition"***, Addison Wesley, London.
- Thomas, V., Dailami M., Dhareshwar A., Kaufmann D., Kishor N., Lopez R., and Wang Yang, 2001, ***"The Quality of Growth"***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widodo, Suseno Triyanto Hg, 1990, ***"Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia"***, Kanisius, Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko, 2008, ***"The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas"***. JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, \_\_\_.



# **LAMPIRAN**



**Lampiran Tabel 1.**  
**PDRB DIY Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 <sup>1)</sup>	2018 <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>9.769.112,4</b>	<b>10.793.840,1</b>	<b>11.456.173,0</b>	<b>11.932.787,9</b>	<b>12.708.218,9</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	8.545.054,9	9.442.590,2	10.036.120,9	10.423.478,0	11.157.343,4
	a. Tanaman Pangan	3.277.477,0	3.808.409,6	4.134.843,7	4.232.040,5	4.572.744,8
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	262.539,4	287.655,4	298.985,8	294.665,5	309.755,4
	c. Perkebunan Semusim	51.806,1	53.795,0	55.701,7	59.325,1	64.355,4
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2.601.564,0	2.735.787,8	2.815.065,7	2.974.072,0	3.121.359,1
	e. Perkebunan Tahunan	230.395,0	225.176,9	254.106,9	273.274,6	285.133,5
	f. Peternakan	1.930.499,3	2.136.761,6	2.265.239,7	2.358.965,9	2.561.088,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	190.774,1	195.003,9	212.177,4	231.134,5	242.906,8
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	816.386,5	902.903,4	955.185,0	1.004.944,9	1.020.262,4
	3 Perikanan	407.671,0	448.346,5	464.867,1	504.365,0	530.613,1
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>537.599,5</b>	<b>573.133,0</b>	<b>593.156,2</b>	<b>615.943,0</b>	<b>687.661,1</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	537.599,5	573.133,0	593.156,2	615.943,0	687.661,1
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>12.614.921,0</b>	<b>13.303.467,8</b>	<b>14.547.348,3</b>	<b>15.635.872,1</b>	<b>16.869.995,9</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	6.655.855,8	7.103.601,4	7.941.762,8	8.558.240,6	9.390.162,7
	3 Pengolahan Tembakau	732.370,8	742.297,4	794.422,8	910.077,8	981.946,4
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.339.987,1	1.458.642,5	1.602.087,3	1.736.475,9	1.892.258,0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	351.932,3	378.490,2	404.318,7	430.499,1	421.218,3
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	201.488,0	204.404,5	205.278,4	225.302,1	241.765,9
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	277.247,2	293.838,4	322.792,3	346.837,1	374.195,8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	115.955,4	131.001,4	142.898,6	152.564,8	158.413,1
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	343.097,6	318.017,1	306.053,3	310.263,1	314.391,4
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	429.587,2	426.568,7	438.024,2	472.977,9	495.085,0
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	884.077,4	890.732,6	935.009,2	938.695,9	925.055,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	460.662,9	494.955,9	542.431,8	562.134,1	582.981,7
	14 Industri Alat Angkutan	3.332,5	3.104,5	3.052,6	3.189,3	3.345,7
	15 Industri Furnitur	523.488,8	538.313,4	572.726,5	625.513,0	692.138,3
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	295.838,0	319.499,7	336.489,5	363.101,3	397.038,1
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>101.943,8</b>	<b>118.012,2</b>	<b>141.794,3</b>	<b>173.689,0</b>	<b>186.513,3</b>
	1 Ketenagalistrikan	100.951,3	117.037,3	140.746,6	172.558,0	185.375,1
	2 Gas	992,5	974,9	1.047,7	1.131,0	1.138,2
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>102.669,9</b>	<b>109.697,2</b>	<b>114.764,9</b>	<b>121.272,2</b>	<b>128.125,2</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>8.722.682,2</b>	<b>9.499.916,9</b>	<b>10.286.733,8</b>	<b>11.313.409,2</b>	<b>13.354.792,5</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>7.681.034,9</b>	<b>8.342.646,2</b>	<b>9.297.746,0</b>	<b>10.220.290,9</b>	<b>11.156.434,4</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.292.028,2	1.401.769,5	1.569.787,6	1.720.350,8	1.863.979,7
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6.389.006,7	6.940.876,7	7.727.958,4	8.499.940,0	9.292.454,6
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>5.313.232,9</b>	<b>5.763.846,2</b>	<b>6.248.794,0</b>	<b>6.783.602,2</b>	<b>7.469.963,5</b>
	1 Angkutan Rel	84.542,3	101.336,8	108.248,1	130.059,7	142.811,4
	2 Angkutan Darat	3.265.119,4	3.485.831,2	3.627.080,5	3.804.087,3	4.047.057,6
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	886.134,0	992.290,7	1.205.344,0	1.402.533,6	1.676.883,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.077.437,1	1.184.387,5	1.308.121,4	1.446.921,5	1.603.211,5
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>9.324.121,0</b>	<b>10.383.401,7</b>	<b>11.255.100,2</b>	<b>12.304.098,9</b>	<b>13.273.486,4</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	1.814.459,7	2.050.489,2	2.273.996,0	2.596.088,2	2.952.305,4
	2 Penyediaan Makan Minum	7.509.661,3	8.332.912,5	8.981.104,2	9.708.010,8	10.321.181,0
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>7.897.507,2</b>	<b>8.244.241,8</b>	<b>8.957.494,4</b>	<b>9.785.905,1</b>	<b>10.523.889,6</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>3.602.560,5</b>	<b>4.022.438,4</b>	<b>4.334.778,8</b>	<b>4.642.314,7</b>	<b>5.106.466,1</b>
	1 Bank	2.702.047,9	3.052.521,2	3.273.041,3	3.474.376,3	3.842.638,9
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	286.504,7	305.491,8	329.514,0	359.084,4	382.790,7
	3 Jasa Keuangan Lainnya	606.489,7	656.551,6	723.822,6	799.593,9	871.439,0
	4 Jasa Penunjang Keuangan	7.518,2	7.873,8	8.401,0	9.260,1	9.597,5
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>6.497.271,5</b>	<b>7.116.820,4</b>	<b>7.800.511,0</b>	<b>8.368.916,8</b>	<b>9.022.612,2</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>956.390,6</b>	<b>1.048.359,3</b>	<b>1.115.852,4</b>	<b>1.209.401,7</b>	<b>1.309.147,9</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>7.492.245,8</b>	<b>8.379.231,5</b>	<b>9.217.107,9</b>	<b>10.213.350,4</b>	<b>10.949.666,3</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>7.600.854,9</b>	<b>8.598.743,9</b>	<b>9.010.143,8</b>	<b>9.697.395,2</b>	<b>10.533.809,4</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>2.276.361,0</b>	<b>2.553.550,8</b>	<b>2.759.864,8</b>	<b>3.003.721,3</b>	<b>3.220.939,8</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2.351.975,0</b>	<b>2.589.171,1</b>	<b>2.824.989,7</b>	<b>3.109.029,3</b>	<b>3.375.735,3</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>92.842.484,2</b>	<b>101.440.518,4</b>	<b>109.962.353,6</b>	<b>119.130.999,9</b>	<b>129.877.458,0</b>

**Lampiran Tabel 2.**  
**PDRB DIY Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>7.508.980,3</b>	<b>7.667.601,7</b>	<b>7.779.801,3</b>	<b>7.930.182,1</b>	<b>8.101.333,3</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.539.528,2	6.666.702,6	6.766.494,7	6.883.545,6	7.069.776,5
	a. Tanaman Pangan	2.760.023,5	2.838.357,6	2.916.633,1	2.895.314,1	2.950.946,0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	212.590,9	220.477,6	219.115,2	223.213,2	229.613,1
	c. Perkebunan Semusim	41.666,1	40.253,7	38.481,5	40.244,1	41.785,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.731.959,8	1.709.503,9	1.694.434,8	1.751.517,6	1.791.571,1
	e. Perkebunan Tahunan	167.480,0	160.968,8	163.005,1	169.974,7	176.563,8
	f. Peternakan	1.478.301,7	1.548.209,3	1.581.601,3	1.643.457,2	1.715.413,1
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	147.506,3	148.931,6	153.223,6	159.824,7	163.884,4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	680.932,8	700.236,9	708.450,0	728.827,2	711.208,7
	3 Perikanan	288.519,3	300.662,1	304.856,6	317.809,3	320.348,1
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>470.734,6</b>	<b>471.323,2</b>	<b>473.298,7</b>	<b>489.349,2</b>	<b>541.183,6</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	470.734,6	471.323,2	473.298,7	489.349,2	541.183,6
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>10.469.748,6</b>	<b>10.693.035,7</b>	<b>11.234.472,6</b>	<b>11.878.962,4</b>	<b>12.487.005,4</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.550.764,0	5.724.930,3	6.111.908,0	6.505.523,4	6.954.983,1
	3 Pengolahan Tembakau	456.644,9	453.234,7	460.060,2	489.335,7	514.937,1
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.059.015,3	1.122.114,4	1.193.570,6	1.274.075,8	1.348.910,6
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	279.526,2	300.273,3	310.008,0	323.933,9	307.907,2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	190.616,0	186.553,1	183.513,3	198.305,1	209.431,9
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	248.636,7	253.685,7	268.713,7	278.534,7	287.372,3
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	125.873,3	135.404,1	144.381,0	152.557,2	154.825,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	292.300,2	265.704,0	246.688,5	254.141,5	253.462,1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	359.128,1	335.701,7	336.586,0	360.404,3	373.123,9
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	788.641,2	777.412,5	801.506,7	799.598,5	770.630,6
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	403.331,4	430.750,2	450.695,5	465.140,1	476.242,6
	14 Industri Alat Angkutan	2.831,6	2.631,5	2.514,7	2.610,9	2.703,0
	15 Industri Furnitur	466.972,4	453.940,5	470.527,2	503.683,8	545.914,7
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	245.467,5	250.699,7	253.799,2	271.117,6	286.560,5
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>124.960,1</b>	<b>127.701,3</b>	<b>145.910,1</b>	<b>151.680,9</b>	<b>156.706,5</b>
	1 Ketenagalistrikan	124.160,4	126.892,6	145.088,0	150.840,0	155.863,5
	2 Gas	799,8	808,7	822,1	840,9	843,0
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>82.855,4</b>	<b>85.260,2</b>	<b>87.268,2</b>	<b>90.288,8</b>	<b>94.923,3</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>7.508.543,3</b>	<b>7.826.700,7</b>	<b>8.250.608,3</b>	<b>8.830.612,3</b>	<b>9.987.059,2</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>6.540.107,5</b>	<b>6.944.902,7</b>	<b>7.366.324,7</b>	<b>7.787.488,0</b>	<b>8.219.289,3</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.058.936,0	1.091.042,1	1.165.920,9	1.229.214,5	1.291.655,4
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	5.481.171,5	5.853.860,6	6.200.403,8	6.558.273,5	6.927.634,0
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>4.377.849,8</b>	<b>4.541.309,5</b>	<b>4.750.172,8</b>	<b>4.976.405,7</b>	<b>5.304.843,6</b>
	1 Angkutan Rel	60.546,0	65.371,0	67.160,6	78.898,8	83.772,3
	2 Angkutan Darat	2.810.248,9	2.902.683,0	2.957.490,5	3.053.105,4	3.200.755,4
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	631.120,0	650.042,7	740.177,1	800.039,5	896.953,5
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	875.934,9	923.212,8	985.344,7	1.044.362,0	1.123.362,4
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>7.414.021,0</b>	<b>7.842.143,3</b>	<b>8.274.501,4</b>	<b>8.788.711,3</b>	<b>9.383.603,3</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	1.353.394,3	1.450.436,0	1.568.773,7	1.743.404,0	1.971.041,2
	2 Penyediaan Makan Minum	6.060.626,6	6.391.707,2	6.705.727,6	7.045.307,3	7.412.562,1
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>8.458.713,2</b>	<b>8.891.144,9</b>	<b>9.630.639,1</b>	<b>10.222.383,3</b>	<b>10.884.532,6</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>2.826.933,5</b>	<b>3.060.732,9</b>	<b>3.213.478,1</b>	<b>3.303.797,6</b>	<b>3.506.587,6</b>
	1 Bank	2.086.228,9	2.273.369,4	2.378.617,2	2.420.775,4	2.577.284,2
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	237.670,3	247.199,4	258.517,2	271.204,2	281.162,4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	496.979,2	533.921,7	569.907,8	605.103,1	641.227,9
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6.055,1	6.242,4	6.435,9	6.714,9	6.913,1
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>5.735.457,1</b>	<b>6.082.488,7</b>	<b>6.394.248,8</b>	<b>6.708.239,4</b>	<b>7.079.839,3</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>924.041,7</b>	<b>991.563,8</b>	<b>1.026.163,5</b>	<b>1.086.911,8</b>	<b>1.146.811,6</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>5.971.985,6</b>	<b>6.304.910,7</b>	<b>6.656.182,7</b>	<b>6.956.541,3</b>	<b>7.239.151,9</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>6.938.845,3</b>	<b>7.444.276,5</b>	<b>7.672.850,0</b>	<b>8.096.345,9</b>	<b>8.583.073,6</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>2.062.978,6</b>	<b>2.210.405,6</b>	<b>2.310.356,4</b>	<b>2.445.240,6</b>	<b>2.593.233,4</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2.119.325,9</b>	<b>2.288.950,1</b>	<b>2.419.533,0</b>	<b>2.558.881,6</b>	<b>2.717.386,1</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>79.536.081,8</b>	<b>83.474.451,5</b>	<b>87.685.809,6</b>	<b>92.302.022,4</b>	<b>98.026.563,6</b>

**Lampiran Tabel 3.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-2,10</b>	<b>2,11</b>	<b>1,46</b>	<b>1,93</b>	<b>2,16</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-2,99	1,94	1,50	1,73	2,71
	a. Tanaman Pangan	-1,72	2,84	2,76	-0,73	1,92
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-9,67	3,71	-0,62	1,87	2,87
	c. Perkebunan Semusim	0,77	-3,39	-4,40	4,58	3,83
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-10,86	-1,30	-0,88	3,37	2,29
	e. Perkebunan Tahunan	0,41	-3,89	1,27	4,28	3,88
	f. Peternakan	4,85	4,73	2,16	3,91	4,38
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	7,84	0,97	2,88	4,31	2,54
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,53	2,83	1,17	2,88	-2,42
	3 Perikanan	6,50	4,21	1,40	4,25	0,80
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>2,11</b>	<b>0,13</b>	<b>0,42</b>	<b>3,39</b>	<b>10,59</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,11	0,13	0,42	3,39	10,59
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>3,82</b>	<b>2,13</b>	<b>5,06</b>	<b>5,74</b>	<b>5,12</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,97	3,14	6,76	6,44	6,91
	3 Pengolahan Tembakau	-20,13	-0,75	1,51	6,36	5,23
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7,75	5,96	6,37	6,74	5,87
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-0,08	7,42	3,24	4,49	-4,95
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	-1,42	-2,13	-1,63	8,06	5,61
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	4,46	2,03	5,92	3,65	3,17
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,11	7,57	6,63	5,66	1,49
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-6,01	-9,10	-7,16	3,02	-0,27
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	1,53	-6,52	0,26	7,08	3,53
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	2,43	-1,42	3,10	-0,24	-3,62
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	7,46	6,80	4,63	3,20	2,39
	14 Industri Alat Angkutan	-9,80	-7,07	-4,44	3,83	3,53
	15 Industri Furnitur	-4,33	-2,79	3,65	7,05	8,38
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	-5,10	2,13	1,24	6,82	5,70
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>6,83</b>	<b>2,19</b>	<b>14,26</b>	<b>3,96</b>	<b>3,31</b>
	1 Ketenagalistrikan	6,85	2,20	14,34	3,96	3,33
	2 Gas	3,84	1,11	1,66	2,28	0,25
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>3,91</b>	<b>2,90</b>	<b>2,36</b>	<b>3,46</b>	<b>5,13</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>5,65</b>	<b>4,24</b>	<b>5,42</b>	<b>7,03</b>	<b>13,10</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>5,69</b>	<b>6,19</b>	<b>6,07</b>	<b>5,72</b>	<b>5,54</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	7,64	3,03	6,86	5,43	5,08
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	5,32	6,80	5,92	5,77	5,63
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>3,80</b>	<b>3,73</b>	<b>4,60</b>	<b>4,76</b>	<b>6,60</b>
	1 Angkutan Rel	18,72	7,97	2,74	17,48	6,18
	2 Angkutan Darat	1,75	3,29	1,89	3,23	4,84
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	5,70	3,00	13,87	8,09	12,11
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	8,46	5,40	6,73	5,99	7,56
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>6,79</b>	<b>5,77</b>	<b>5,51</b>	<b>6,21</b>	<b>6,77</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	4,93	7,17	8,16	11,13	13,06
	2 Penyediaan Makan Minum	7,21	5,46	4,91	5,06	5,21
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>6,13</b>	<b>5,11</b>	<b>8,32</b>	<b>6,14</b>	<b>6,48</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>8,27</b>	<b>8,27</b>	<b>4,99</b>	<b>2,81</b>	<b>6,14</b>
	1 Bank	9,92	8,97	4,63	1,77	6,47
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5,88	4,01	4,58	4,91	3,67
	3 Jasa Keuangan Lainnya	2,96	7,43	6,74	6,18	5,97
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5,28	3,09	3,10	4,34	2,95
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>7,77</b>	<b>6,05</b>	<b>5,13</b>	<b>4,91</b>	<b>5,54</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>7,61</b>	<b>7,31</b>	<b>3,49</b>	<b>5,92</b>	<b>5,51</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>5,90</b>	<b>5,57</b>	<b>5,57</b>	<b>4,51</b>	<b>4,06</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>7,91</b>	<b>7,28</b>	<b>3,07</b>	<b>5,52</b>	<b>6,01</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>7,65</b>	<b>7,15</b>	<b>4,52</b>	<b>5,84</b>	<b>6,05</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>5,29</b>	<b>8,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,76</b>	<b>6,19</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,17</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>

**Lampiran Tabel 4.**  
**Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (persen) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>10,52</b>	<b>10,64</b>	<b>10,42</b>	<b>10,02</b>	<b>9,78</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,20	9,31	9,13	8,75	8,59
	a. Tanaman Pangan	3,53	3,75	3,76	3,55	3,52
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,28	0,28	0,27	0,25	0,24
	c. Perkebunan Semusim	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,80	2,70	2,56	2,50	2,40
	e. Perkebunan Tahunan	0,25	0,22	0,23	0,23	0,22
	f. Peternakan	2,08	2,11	2,06	1,98	1,97
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,88	0,89	0,87	0,84	0,79
	3 Perikanan	0,44	0,44	0,42	0,42	0,41
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,58</b>	<b>0,56</b>	<b>0,54</b>	<b>0,52</b>	<b>0,53</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,58	0,56	0,54	0,52	0,53
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>13,59</b>	<b>13,11</b>	<b>13,23</b>	<b>13,12</b>	<b>12,99</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,17	7,00	7,22	7,18	7,23
	3 Pengolahan Tembakau	0,79	0,73	0,72	0,76	0,76
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,44	1,44	1,46	1,46	1,46
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,38	0,37	0,37	0,36	0,32
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0,22	0,20	0,19	0,19	0,19
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,37	0,31	0,28	0,26	0,24
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,46	0,42	0,40	0,40	0,38
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	0,95	0,88	0,85	0,79	0,71
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,50	0,49	0,49	0,47	0,45
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,56	0,53	0,52	0,53	0,53
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	0,32	0,31	0,31	0,30	0,31
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14
	2 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>9,40</b>	<b>9,37</b>	<b>9,35</b>	<b>9,50</b>	<b>10,28</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>8,27</b>	<b>8,22</b>	<b>8,46</b>	<b>8,58</b>	<b>8,59</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,39	1,38	1,43	1,44	1,44
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6,88	6,84	7,03	7,13	7,15
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>5,72</b>	<b>5,68</b>	<b>5,68</b>	<b>5,69</b>	<b>5,75</b>
	1 Angkutan Rel	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
	2 Angkutan Darat	3,52	3,44	3,30	3,19	3,12
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,95	0,98	1,10	1,18	1,29
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1,16	1,17	1,19	1,21	1,23
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>10,04</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>10,33</b>	<b>10,22</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	1,95	2,02	2,07	2,18	2,27
	2 Penyediaan Makan Minum	8,09	8,21	8,17	8,15	7,95
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>8,51</b>	<b>8,13</b>	<b>8,15</b>	<b>8,21</b>	<b>8,10</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>3,88</b>	<b>3,97</b>	<b>3,94</b>	<b>3,90</b>	<b>3,93</b>
	1 Bank	2,91	3,01	2,98	2,92	2,96
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>7,00</b>	<b>7,02</b>	<b>7,09</b>	<b>7,02</b>	<b>6,95</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>8,07</b>	<b>8,26</b>	<b>8,38</b>	<b>8,57</b>	<b>8,43</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>8,19</b>	<b>8,48</b>	<b>8,19</b>	<b>8,14</b>	<b>8,11</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>2,45</b>	<b>2,52</b>	<b>2,51</b>	<b>2,52</b>	<b>2,48</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2,53</b>	<b>2,55</b>	<b>2,57</b>	<b>2,61</b>	<b>2,60</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran Tabel 5.**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi DIY (persen) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,20</b>	<b>0,13</b>	<b>0,17</b>	<b>0,19</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-0,27	0,16	0,12	0,13	0,20
	a. Tanaman Pangan	-0,06	0,10	0,09	-0,02	0,06
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,01
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-0,28	-0,03	-0,02	0,07	0,04
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01
	f. Peternakan	0,09	0,09	0,04	0,07	0,08
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,03	0,02	0,01	0,02	-0,02
	3 Perikanan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,01	0,00	0,00	0,02	0,06
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>0,51</b>	<b>0,28</b>	<b>0,65</b>	<b>0,73</b>	<b>0,66</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,54	0,22	0,46	0,45	0,49
	3 Pengolahan Tembakau	-0,15	0,00	0,01	0,03	0,03
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,10	0,08	0,09	0,09	0,08
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,03	0,01	0,02	-0,02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,01
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,01	-0,03	0,00	0,03	0,01
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	0,02	-0,01	0,03	0,00	-0,03
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	-0,03	-0,02	0,02	0,04	0,05
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	-0,02	0,01	0,00	0,02	0,02
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01
	2 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>0,53</b>	<b>0,40</b>	<b>0,51</b>	<b>0,66</b>	<b>1,25</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>0,47</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	<b>0,48</b>	<b>0,47</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,10	0,04	0,09	0,07	0,07
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	0,37	0,47	0,42	0,41	0,40
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,25</b>	<b>0,26</b>	<b>0,36</b>
	1 Angkutan Rel	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
	2 Angkutan Darat	0,06	0,12	0,07	0,11	0,16
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	0,04	0,02	0,11	0,07	0,10
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,09	0,06	0,07	0,07	0,09
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>0,62</b>	<b>0,54</b>	<b>0,52</b>	<b>0,59</b>	<b>0,64</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,08	0,12	0,14	0,20	0,25
	2 Penyediaan Makan Minum	0,54	0,42	0,38	0,39	0,40
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>0,65</b>	<b>0,54</b>	<b>0,89</b>	<b>0,67</b>	<b>0,72</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,18</b>	<b>0,10</b>	<b>0,22</b>
	1 Bank	0,25	0,24	0,13	0,05	0,17
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,02	0,05	0,04	0,04	0,04
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>0,55</b>	<b>0,44</b>	<b>0,37</b>	<b>0,36</b>	<b>0,40</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>0,44</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,34</b>	<b>0,31</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>0,67</b>	<b>0,64</b>	<b>0,27</b>	<b>0,48</b>	<b>0,53</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,12</b>	<b>0,15</b>	<b>0,16</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>0,14</b>	<b>0,21</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,17</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>

**Lampiran Tabel 6.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (dalam juta rupiah) 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>62.875.141,0</b>	<b>68.730.528,0</b>	<b>74.429.796,0</b>	<b>81.335.810,0</b>	<b>86.753.197,0</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	24.286.650,0	26.286.556,0	28.460.385,0	30.686.630,0	32.605.372,0
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2.407.738,0	2.682.819,0	2.919.407,0	3.191.712,0	3.438.353,0
1.c. Pakaian	2.982.996,0	3.324.854,0	3.686.642,0	3.997.231,0	4.332.073,0
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	7.508.503,0	8.468.847,0	9.143.147,0	10.235.671,0	10.984.573,0
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemesinan	3.087.040,0	3.411.483,0	3.679.768,0	4.005.992,0	4.247.904,0
1.f. Kesehatan	3.021.534,0	3.312.124,0	3.671.351,0	4.046.100,0	4.341.324,0
1.g. Transportasi/Angkutan	8.002.514,0	8.753.886,0	9.276.225,0	10.122.089,0	10.863.212,0
1.h. Komunikasi	3.201.567,0	3.360.001,0	3.540.534,0	4.058.504,0	4.229.607,0
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.470.111,0	1.572.116,0	1.710.637,0	1.838.570,0	1.935.648,0
1.j. Pendidikan	3.717.179,0	4.047.224,0	4.473.539,0	4.873.266,0	5.114.141,0
1.k. Penginapan dan Hotel	1.916.780,0	2.073.547,0	2.254.386,0	2.454.164,0	2.616.591,0
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.272.529,0	1.437.070,0	1.613.774,0	1.825.880,0	2.044.400,0
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>2.948.427,0</b>	<b>3.171.193,0</b>	<b>3.225.070,0</b>	<b>3.756.395,0</b>	<b>4.095.046,0</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>15.347.428,0</b>	<b>17.214.154,0</b>	<b>18.321.761,0</b>	<b>19.508.072,0</b>	<b>21.346.113,0</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	8.667.188,0	9.679.422,0	10.298.756,0	10.967.170,0	11.981.062,0
3.b. Konsumsi Individu	6.680.240,0	7.534.733,0	8.023.005,0	8.540.901,0	9.365.051,0
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>27.744.794,0</b>	<b>30.798.881,0</b>	<b>33.428.978,0</b>	<b>37.111.436,0</b>	<b>43.173.678,0</b>
4.a. Bangunan	22.442.139,0	24.803.517,0	26.755.606,0	29.925.361,0	35.198.442,0
4.b. Non-Bangunan	5.302.656,0	5.995.364,0	6.673.371,0	7.186.074,0	7.975.236,0
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>980.197,0</b>	<b>1.151.797,0</b>	<b>1.295.788,0</b>	<b>1.368.184,0</b>	<b>1.435.491,0</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>5.465.423,0</b>	<b>6.266.264,0</b>	<b>6.495.282,0</b>	<b>7.436.959,0</b>	<b>8.749.632,0</b>
6.a. Barang	4.162.171,0	4.764.412,0	4.728.510,0	5.599.614,0	6.470.961,0
6.b. Jasa	1.303.252,0	1.501.852,0	1.766.772,0	1.837.345,0	2.278.671,0
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>4.085.245,0</b>	<b>5.066.145,0</b>	<b>5.922.732,0</b>	<b>6.540.719,0</b>	<b>7.206.068,0</b>
7.a. Barang	811.835,0	1.240.178,0	1.840.763,0	2.308.738,0	2.594.884,0
7.b. Jasa	3.273.410,0	3.825.967,0	4.081.969,0	4.231.980,0	4.611.184,0
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>(18.433.682,0)</b>	<b>(20.826.153,0)</b>	<b>(21.311.589,0)</b>	<b>(24.845.137,0)</b>	<b>(28.469.631,0)</b>
8.a. Ekspor	46.988.180,0	52.238.029,0	58.232.975,0	62.724.895,0	63.821.842,0
8.b. Impor	65.421.862,0	73.064.183,0	79.544.564,0	87.570.031,0	92.291.473,0
<b>P D R B</b>	<b>92.842.484,0</b>	<b>101.440.518,0</b>	<b>109.962.354,0</b>	<b>119.131.000,0</b>	<b>129.877.458,0</b>

**Lampiran Tabel 7.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (dalam juta rupiah) 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>47.923.893,0</b>	<b>50.193.386,0</b>	<b>52.619.164,0</b>	<b>55.364.064,0</b>	<b>57.552.317,0</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	16.669.147,0	17.270.490,0	17.895.500,0	18.710.657,0	19.380.268,0
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1.823.550,0	1.924.701,0	2.025.104,0	2.124.007,0	2.190.640,0
1.c. Pakaian	2.471.870,0	2.606.391,0	2.754.831,0	2.882.168,0	3.003.953,0
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	5.742.145,0	6.085.963,0	6.433.791,0	6.836.626,0	7.109.614,0
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemesinan	2.397.965,0	2.530.849,0	2.620.505,0	2.782.330,0	2.871.049,0
1.f. Kesehatan	2.396.396,0	2.519.983,0	2.652.280,0	2.811.784,0	2.971.091,0
1.g. Transportasi/Angkutan	6.642.175,0	6.978.324,0	7.405.227,0	7.792.662,0	8.182.345,0
1.h. Komunikasi	2.710.444,0	2.846.242,0	2.990.940,0	3.154.837,0	3.270.340,0
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.148.652,0	1.206.458,0	1.263.916,0	1.302.424,0	1.335.982,0
1.j. Pendidikan	3.229.912,0	3.387.527,0	3.576.074,0	3.748.691,0	3.829.719,0
1.k. Penginapan dan Hotel	1.587.293,0	1.677.578,0	1.783.261,0	1.900.445,0	2.006.475,0
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.104.343,0	1.158.880,0	1.217.736,0	1.317.433,0	1.400.839,0
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>2.317.123,0</b>	<b>2.384.374,0</b>	<b>2.362.344,0</b>	<b>2.589.250,0</b>	<b>2.657.427,0</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>12.056.063,0</b>	<b>12.719.134,0</b>	<b>12.949.746,0</b>	<b>13.104.559,0</b>	<b>13.559.566,0</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	6.507.500,0	6.857.276,0	6.975.741,0	7.062.282,0	7.307.206,0
3.b. Konsumsi Individu	5.548.563,0	5.861.859,0	5.974.005,0	6.042.277,0	6.252.360,0
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>21.358.622,0</b>	<b>22.286.615,0</b>	<b>23.616.948,0</b>	<b>24.791.862,0</b>	<b>27.313.862,0</b>
4.a. Bangunan	17.344.658,0	18.073.133,0	19.170.029,0	20.137.862,0	22.320.311,0
4.b. Non-Bangunan	4.013.965,0	4.213.481,0	4.446.919,0	4.654.000,0	4.993.552,0
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>930.599,0</b>	<b>974.645,0</b>	<b>1.045.164,0</b>	<b>1.066.314,0</b>	<b>1.104.088,0</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>4.278.248,0</b>	<b>4.416.252,0</b>	<b>4.400.889,0</b>	<b>4.808.527,0</b>	<b>5.424.803,0</b>
6.a. Barang	3.246.509,0	3.349.434,0	3.192.594,0	3.595.251,0	3.995.688,0
6.b. Jasa	1.031.739,0	1.066.818,0	1.208.295,0	1.213.277,0	1.429.114,0
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>3.228.540,0</b>	<b>3.728.749,0</b>	<b>4.492.511,0</b>	<b>4.905.222,0</b>	<b>5.210.391,0</b>
7.a. Barang	936.550,0	1.375.927,0	2.099.847,0	2.488.771,0	2.710.908,0
7.b. Jasa	2.291.990,0	2.352.822,0	2.392.664,0	2.416.451,0	2.499.483,0
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>(6.099.926,0)</b>	<b>(5.771.205,0)</b>	<b>(4.815.934,0)</b>	<b>(4.517.332,0)</b>	<b>(4.375.109,0)</b>
8.a. Ekspor	35.810.888,0	37.561.868,0	39.465.621,0	41.716.368,0	41.664.762,0
8.b. Impor	41.910.814,0	43.333.074,0	44.281.555,0	46.233.699,0	46.039.871,0
<b>P D R B</b>	<b>79.536.082,0</b>	<b>83.474.452,0</b>	<b>87.685.810,0</b>	<b>92.302.022,0</b>	<b>98.026.564,0</b>

**Lampiran Tabel 8.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (persen) 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>4,94</b>	<b>4,74</b>	<b>4,83</b>	<b>5,22</b>	<b>3,95</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2,60	3,61	3,62	4,56	3,58
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	6,88	5,55	5,22	4,88	3,14
1.c. Pakaian	3,85	5,44	5,70	4,62	4,23
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	7,46	5,99	5,72	6,26	3,99
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemesinan	5,53	5,54	3,54	6,18	3,19
1.f. Kesehatan	6,05	5,16	5,25	6,01	5,67
1.g. Transportasi/Angkutan	5,96	5,06	6,12	5,23	5,00
1.h. Komunikasi	5,77	5,01	5,08	5,48	3,66
1.i. Rekreasi dan Budaya	8,03	5,03	4,76	3,05	2,58
1.j. Pendidikan	5,84	4,88	5,57	4,83	2,16
1.k. Penginapan dan Hotel	9,04	5,69	6,30	6,57	5,58
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	4,25	4,94	5,08	8,19	6,33
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>10,58</b>	<b>2,90</b>	<b>-0,92</b>	<b>9,61</b>	<b>2,63</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>4,35</b>	<b>5,50</b>	<b>1,81</b>	<b>1,20</b>	<b>3,47</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	4,93	5,37	1,73	1,24	3,47
3.b. Konsumsi Individu	3,68	5,65	1,91	1,14	3,48
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>5,78</b>	<b>4,34</b>	<b>5,97</b>	<b>4,97</b>	<b>10,17</b>
4.a. Bangunan	5,53	4,20	6,07	5,05	10,84
4.b. Non-Bangunan	6,91	4,97	5,54	4,66	7,30
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>11,78</b>	<b>4,73</b>	<b>7,24</b>	<b>2,02</b>	<b>3,54</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>20,80</b>	<b>3,23</b>	<b>-0,35</b>	<b>9,26</b>	<b>12,82</b>
6.a. Barang	25,11	3,17	-4,68	12,61	11,14
6.b. Jasa	8,98	3,40	13,26	0,41	17,79
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>44,03</b>	<b>15,49</b>	<b>20,48</b>	<b>9,19</b>	<b>6,22</b>
7.a. Barang	11,36	46,91	52,61	18,52	8,93
7.b. Jasa	63,64	2,65	1,69	0,99	3,44
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>1,42</b>	<b>-5,39</b>	<b>-16,55</b>	<b>-6,20</b>	<b>-3,15</b>
8.a. Ekspor	5,36	4,89	5,07	5,70	-0,12
8.b. Impor	4,77	3,39	2,19	4,41	-0,42
<b>P D R B</b>	<b>5,17</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>



**Lampiran Tabel 9.**  
**Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (persen) 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>67,72</b>	<b>67,75</b>	<b>67,69</b>	<b>68,27</b>	<b>66,80</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	26,16	25,91	25,88	25,76	25,10
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2,59	2,64	2,65	2,68	2,65
1.c. Pakaian	3,21	3,28	3,35	3,36	3,34
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8,09	8,35	8,31	8,59	8,46
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemesinan	3,33	3,36	3,35	3,36	3,27
1.f. Kesehatan	3,25	3,27	3,34	3,40	3,34
1.g. Transportasi/Angkutan	8,62	8,63	8,44	8,50	8,36
1.h. Komunikasi	3,45	3,31	3,22	3,41	3,26
1.i. Rekreasi dan Budaya	1,58	1,55	1,56	1,54	1,49
1.j. Pendidikan	4,00	3,99	4,07	4,09	3,94
1.k. Penginapan dan Hotel	2,06	2,04	2,05	2,06	2,01
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,37	1,42	1,47	1,53	1,57
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>3,18</b>	<b>3,13</b>	<b>2,93</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>16,53</b>	<b>16,97</b>	<b>16,66</b>	<b>16,38</b>	<b>16,44</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	9,34	9,54	9,37	9,21	9,22
3.b. Konsumsi Individu	7,20	7,43	7,30	7,17	7,21
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>29,88</b>	<b>30,36</b>	<b>30,40</b>	<b>31,15</b>	<b>33,24</b>
4.a. Bangunan	24,17	24,45	24,33	25,12	27,10
4.b. Non-Bangunan	5,71	5,91	6,07	6,03	6,14
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>1,06</b>	<b>1,14</b>	<b>1,18</b>	<b>1,15</b>	<b>1,11</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>5,89</b>	<b>6,18</b>	<b>5,91</b>	<b>6,24</b>	<b>6,74</b>
6.a. Barang	4,48	4,70	4,30	4,70	4,98
6.b. Jasa	1,40	1,48	1,61	1,54	1,75
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>4,40</b>	<b>4,99</b>	<b>5,39</b>	<b>5,49</b>	<b>5,55</b>
7.a. Barang	0,87	1,22	1,67	1,94	2,00
7.b. Jasa	3,53	3,77	3,71	3,55	3,55
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>-19,85</b>	<b>-20,53</b>	<b>-19,38</b>	<b>-20,86</b>	<b>-21,92</b>
8.a. Ekspor	50,61	51,50	52,96	52,65	49,14
8.b. Impor	70,47	72,03	72,34	73,51	71,06
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran Tabel 10.**  
**Sumber Pertumbuhan PDRB DIY menurut Pengeluaran (persen) 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>2,98</b>	<b>2,85</b>	<b>2,91</b>	<b>3,13</b>	<b>2,37</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	0,56	0,76	0,75	0,93	0,73
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	0,16	0,13	0,12	0,11	0,07
1.c. Pakaian	0,12	0,17	0,18	0,15	0,13
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,53	0,43	0,42	0,46	0,30
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemesinan	0,17	0,17	0,11	0,18	0,10
1.f. Kesehatan	0,18	0,16	0,16	0,18	0,17
1.g. Transportasi/Angkutan	0,49	0,42	0,51	0,44	0,42
1.h. Komunikasi	0,20	0,17	0,17	0,19	0,13
1.i. Rekreasi dan Budaya	0,11	0,07	0,07	0,04	0,04
1.j. Pendidikan	0,24	0,20	0,23	0,20	0,09
1.k. Penginapan dan Hotel	0,17	0,11	0,13	0,13	0,11
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	0,06	0,07	0,07	0,11	0,09
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>0,29</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,26</b>	<b>0,07</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>0,66</b>	<b>0,83</b>	<b>0,28</b>	<b>0,18</b>	<b>0,49</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	0,40	0,44	0,14	0,10	0,27
3.b. Konsumsi Individu	0,26	0,39	0,13	0,08	0,23
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>1,54</b>	<b>1,17</b>	<b>1,59</b>	<b>1,34</b>	<b>2,73</b>
4.a. Bangunan	1,20	0,92	1,31	1,10	2,36
4.b. Non-Bangunan	0,34	0,25	0,28	0,24	0,37
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>0,13</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>0,97</b>	<b>0,17</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,46</b>	<b>0,67</b>
6.a. Barang	0,86	0,13	-0,19	0,46	0,43
6.b. Jasa	0,11	0,04	0,17	0,01	0,23
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>1,30</b>	<b>0,63</b>	<b>0,91</b>	<b>0,47</b>	<b>0,33</b>
7.a. Barang	0,13	0,55	0,87	0,44	0,24
7.b. Jasa	1,18	0,08	0,05	0,03	0,09
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,41</b>	<b>1,14</b>	<b>0,34</b>	<b>0,15</b>
8.a. Ekspor	2,41	2,20	2,28	2,57	-0,06
8.b. Impor	2,52	1,79	1,14	2,23	-0,21
<b>P D R B</b>	<b>5,17</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>

**Lampiran Tabel 11.**  
**PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>1.442.659,9</b>	<b>1.566.769,2</b>	<b>1.656.160,7</b>	<b>1.716.838,8</b>	<b>1.788.438,7</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	1.150.866,9	1.244.931,6	1.321.486,4	1.370.231,8	1.428.859,4
	a. Tanaman Pangan	299.783,3	346.208,9	369.753,0	377.786,6	396.319,8
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	39.445,3	43.783,9	45.801,4	45.304,1	46.491,6
	c. Perkebunan Semusim	7.962,8	8.398,6	8.879,6	9.681,8	10.888,9
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainny	295.791,4	309.306,5	321.746,0	343.204,6	352.200,4
	e. Perkebunan Tahunan	148.733,5	145.798,7	162.650,9	173.816,0	182.692,5
	f. Peternakan	332.450,4	363.690,6	382.984,2	388.637,5	404.315,1
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	26.700,2	27.744,4	29.671,3	31.801,2	35.951,2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	212.589,7	233.677,5	242.888,8	251.138,1	258.764,3
	3 Perikanan	79.203,3	88.160,2	91.785,6	95.469,0	100.815,0
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>101.818,1</b>	<b>109.892,1</b>	<b>115.205,9</b>	<b>131.993,5</b>	<b>168.785,2</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Biji Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	101.818,1	109.892,1	115.205,9	131.993,5	168.785,2
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>871.865,3</b>	<b>925.813,9</b>	<b>1.021.607,4</b>	<b>1.122.539,4</b>	<b>1.239.284,7</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	689.086,5	733.110,9	812.236,7	895.363,3	994.791,6
	3 Pengolahan Tembakau	57.291,4	57.169,4	60.158,6	65.038,1	69.775,6
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	32.853,8	35.445,9	38.687,8	42.276,7	47.112,2
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	637,8	675,4	723,2	752,0	815,8
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	9.925,8	10.156,4	10.153,4	11.024,5	12.045,7
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percet	357,2	371,4	399,6	422,4	478,7
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	24.903,9	27.278,5	29.365,6	31.127,0	32.303,6
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	520,4	504,0	516,6	539,4	565,3
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	15.991,6	15.948,3	16.674,5	18.074,4	19.705,2
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	591,6	592,3	625,8	653,5	681,1
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	5.269,0	7.529,0	13.096,3	15.293,9	16.255,9
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	8.236,0	8.582,3	9.096,7	9.997,8	11.125,8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	26.200,4	28.450,1	29.872,5	31.976,3	33.628,2
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>4.859,8</b>	<b>5.658,5</b>	<b>6.824,0</b>	<b>8.345,0</b>	<b>9.015,9</b>
	1 Ketenagalistrikan	4.819,0	5.617,7	6.780,4	8.292,2	8.956,0
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	40,8	40,8	43,6	52,8	59,9
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>10.007,7</b>	<b>10.522,2</b>	<b>11.157,2</b>	<b>11.956,4</b>	<b>12.979,3</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>602.695,7</b>	<b>649.776,4</b>	<b>708.409,5</b>	<b>825.928,3</b>	<b>1.376.340,6</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>928.413,4</b>	<b>1.008.690,0</b>	<b>1.135.901,2</b>	<b>1.270.912,3</b>	<b>1.374.164,0</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	42.421,7	46.424,9	50.818,3	58.920,3	65.911,2
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	885.991,7	962.265,2	1.085.082,9	1.211.992,0	1.308.252,9
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>593.001,4</b>	<b>636.391,4</b>	<b>668.232,5</b>	<b>708.736,7</b>	<b>766.582,2</b>
	1 Angkutan Rel	3.521,7	4.230,6	4.587,2	5.029,4	5.671,2
	2 Angkutan Darat	479.000,0	510.912,7	529.989,0	554.943,8	599.853,1
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	110.479,7	121.248,0	133.656,4	148.763,5	161.057,9
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>267.891,2</b>	<b>296.720,5</b>	<b>321.886,8</b>	<b>350.276,8</b>	<b>385.438,2</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	314,3	358,5	399,5	433,9	479,4
	2 Penyediaan Makan Minum	267.576,9	296.362,0	321.487,3	349.842,9	384.958,8
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>364.480,9</b>	<b>382.516,6</b>	<b>414.314,1</b>	<b>451.140,6</b>	<b>502.814,1</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>229.410,7</b>	<b>255.816,3</b>	<b>270.967,3</b>	<b>286.061,2</b>	<b>314.797,2</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	208.458,3	233.275,5	246.806,0	259.567,4	287.424,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	6.933,7	7.409,8	7.882,2	8.546,9	8.835,3
	3 Jasa Keuangan Lainnya	13.825,3	14.927,9	16.070,0	17.710,7	18.203,8
	4 Jasa Penunjang Keuangan	193,4	203,2	209,2	236,1	334,1
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>233.583,0</b>	<b>256.043,7</b>	<b>285.548,1</b>	<b>311.261,7</b>	<b>323.860,8</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>20.295,8</b>	<b>22.111,9</b>	<b>23.344,5</b>	<b>25.107,5</b>	<b>27.288,8</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>615.523,0</b>	<b>684.126,5</b>	<b>761.442,7</b>	<b>847.496,7</b>	<b>920.017,4</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>409.065,8</b>	<b>461.610,9</b>	<b>486.351,2</b>	<b>532.034,4</b>	<b>573.164,9</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>100.500,0</b>	<b>112.613,0</b>	<b>119.042,2</b>	<b>130.316,8</b>	<b>139.758,0</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>260.500,0</b>	<b>286.474,8</b>	<b>306.059,3</b>	<b>332.389,2</b>	<b>358.283,4</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>7.056.571,8</b>	<b>7.671.548,0</b>	<b>8.312.454,6</b>	<b>9.063.335,3</b>	<b>10.281.013,3</b>

**Lampiran Tabel 12.**  
**PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>1.120.167,9</b>	<b>1.138.920,2</b>	<b>1.155.841,0</b>	<b>1.178.301,0</b>	<b>1.196.634,0</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	873.914,4	885.581,2	899.696,0	919.489,0	939.342,0
	a. Tanaman Pangan	257.605,0	263.894,2	270.713,0	271.515,0	269.003,0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	31.205,3	32.967,2	32.629,0	33.148,0	33.050,0
	c. Perkebunan Semusim	6.412,6	6.266,3	6.229,0	6.567,0	7.083,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainny	195.447,9	194.626,8	194.780,0	205.284,0	217.737,0
	e. Perkebunan Tahunan	107.859,3	103.583,7	104.639,0	108.680,0	113.209,0
	f. Peternakan	253.614,0	261.909,5	267.872,0	270.862,0	274.987,0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	21.770,2	22.333,4	22.835,0	23.434,0	24.273,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	188.682,3	193.138,0	194.706,0	196.162,0	193.909,0
	3 Perikanan	57.571,2	60.201,0	61.439,0	62.650,0	63.382,0
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>91.487,5</b>	<b>91.992,8</b>	<b>93.339,0</b>	<b>106.252,0</b>	<b>133.555,0</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	91.487,5	91.992,8	93.339,0	106.252,0	133.555,0
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>755.840,4</b>	<b>782.466,7</b>	<b>828.768,0</b>	<b>892.372,0</b>	<b>963.640,0</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	608.868,5	631.880,2	669.495,0	723.753,0	786.957,0
	3 Pengolahan Tembakau	35.343,1	34.419,5	35.011,0	35.518,0	37.100,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	25.515,5	26.812,6	28.283,0	30.469,0	32.452,0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	510,1	538,5	550,0	554,0	572,0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	9.594,7	9.496,0	9.396,0	10.050,0	10.660,0
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percet	316,9	322,0	338,0	340,0	364,0
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	25.881,0	27.509,8	29.558,0	30.948,0	31.418,0
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	414,7	397,7	393,0	414,0	426,0
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	13.670,3	12.925,0	13.012,0	13.891,0	14.872,0
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	531,9	525,4	541,0	562,0	579,0
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4.520,0	6.406,0	10.663,0	12.389,0	13.414,0
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	-	-	-
	15 Industri Furnitur	7.705,2	7.643,4	8.095,0	8.744,0	9.585,0
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	22.968,4	23.590,5	23.434,0	24.739,0	25.240,0
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>6.026,7</b>	<b>6.205,3</b>	<b>7.129,0</b>	<b>7.395,0</b>	<b>7.685,0</b>
	1 Ketenagalistrikan	5.993,8	6.172,0	7.096,0	7.356,0	7.642,0
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	32,9	33,3	33,0	39,0	43,0
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>8.341,5</b>	<b>8.523,6</b>	<b>8.718,0</b>	<b>9.123,0</b>	<b>9.756,0</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>508.855,7</b>	<b>530.760,3</b>	<b>563.694,0</b>	<b>632.725,0</b>	<b>1.010.662,0</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>796.717,7</b>	<b>848.655,9</b>	<b>904.617,0</b>	<b>977.556,0</b>	<b>1.023.205,0</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	34.986,6	36.088,0	38.713,0	43.243,0	45.937,0
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	761.731,1	812.567,9	865.904,0	934.312,0	977.268,0
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>512.691,3</b>	<b>531.294,2</b>	<b>544.563,0</b>	<b>564.308,0</b>	<b>603.798,0</b>
	1 Angkutan Rel	2.551,7	2.751,0	2.867,0	3.072,0	3.351,0
	2 Angkutan Darat	416.835,4	430.148,0	437.027,0	449.648,0	480.218,0
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	-	-	-
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	93.304,3	98.395,1	104.669,0	111.588,0	120.229,0
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>219.373,9</b>	<b>231.152,4</b>	<b>244.233,0</b>	<b>256.893,0</b>	<b>277.939,0</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	238,9	254,9	270,0	283,0	305,0
	2 Penyediaan Makan Minum	219.135,0	230.897,5	243.963,0	256.610,0	277.634,0
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>378.090,0</b>	<b>398.651,2</b>	<b>430.630,0</b>	<b>455.881,0</b>	<b>499.529,0</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>175.745,1</b>	<b>189.970,4</b>	<b>197.983,0</b>	<b>200.122,0</b>	<b>212.649,0</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	157.888,7	171.024,4	178.323,0	179.427,0	191.269,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	6.006,9	6.236,9	6.357,0	6.583,0	6.834,0
	3 Jasa Keuangan Lainnya	11.690,9	12.545,2	13.139,0	13.937,0	14.299,0
	4 Jasa Penunjang Keuangan	158,6	163,9	164,0	175,0	247,0
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>213.562,4</b>	<b>226.908,2</b>	<b>238.852,0</b>	<b>254.090,0</b>	<b>266.078,0</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>19.560,5</b>	<b>20.889,2</b>	<b>21.558,0</b>	<b>22.680,0</b>	<b>24.011,0</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>488.812,0</b>	<b>513.344,6</b>	<b>545.212,0</b>	<b>571.316,0</b>	<b>596.544,0</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>378.043,9</b>	<b>405.420,5</b>	<b>420.142,0</b>	<b>450.228,0</b>	<b>473.038,0</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>91.000,0</b>	<b>97.499,8</b>	<b>102.755,0</b>	<b>109.624,0</b>	<b>116.835,0</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>240.000,0</b>	<b>259.240,5</b>	<b>272.743,0</b>	<b>284.759,0</b>	<b>298.791,0</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6.004.316,4</b>	<b>6.281.895,8</b>	<b>6.580.777,0</b>	<b>6.973.625,6</b>	<b>7.714.349,1</b>

**Lampiran Tabel 13.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-0,99</b>	<b>1,67</b>	<b>1,49</b>	<b>1,94</b>	<b>1,56</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-1,86	1,34	1,59	2,20	2,16
	a. Tanaman Pangan	0,60	2,44	2,58	0,30	-0,93
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-9,64	5,65	-1,03	1,59	-0,29
	c. Perkebunan Semusim	0,58	-2,28	-0,60	5,43	7,85
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainny	-11,88	-0,42	0,08	5,39	6,07
	e. Perkebunan Tahunan	0,68	-3,96	1,02	3,86	4,17
	f. Peternakan	3,74	3,27	2,28	1,12	1,52
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	8,41	2,59	2,24	2,62	3,58
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,59	2,36	0,81	0,75	-1,15
	3 Perikanan	4,32	4,57	2,06	1,97	1,17
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>1,49</b>	<b>0,55</b>	<b>1,46</b>	<b>13,83</b>	<b>25,70</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,49	0,55	1,46	13,83	25,70
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>8,55</b>	<b>3,52</b>	<b>5,92</b>	<b>7,67</b>	<b>7,99</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	12,07	3,78	5,95	8,10	8,73
	3 Pengolahan Tembakau	-20,19	-2,61	1,72	1,45	4,46
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7,02	5,08	5,49	7,73	6,51
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-2,26	5,57	2,13	0,64	3,38
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	-0,27	-1,03	-1,05	6,96	6,07
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percet	1,45	1,63	4,86	0,79	6,96
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,19	6,29	7,44	4,70	1,52
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,26	-4,10	-1,14	5,26	3,04
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	1,97	-5,45	0,67	6,76	7,06
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	2,62	-1,23	2,96	3,91	3,09
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	24,11	41,73	66,46	16,18	8,27
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	-1,32	-0,80	5,91	8,02	9,61
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	-6,26	2,71	-0,66	5,57	2,02
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>5,47</b>	<b>2,96</b>	<b>14,89</b>	<b>3,73</b>	<b>3,92</b>
	1 Ketenagalistrikan	5,47	2,97	14,97	3,67	3,88
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4,78	1,44	-0,26	16,57	11,58
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>1,21</b>	<b>2,18</b>	<b>2,28</b>	<b>4,65</b>	<b>6,94</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>5,17</b>	<b>4,30</b>	<b>6,21</b>	<b>12,25</b>	<b>59,73</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>5,22</b>	<b>6,52</b>	<b>6,59</b>	<b>8,06</b>	<b>4,67</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	7,70	3,15	7,27	11,70	6,23
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	5,11	6,67	6,56	7,90	4,60
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>2,05</b>	<b>3,63</b>	<b>2,50</b>	<b>3,63</b>	<b>7,00</b>
	1 Angkutan Rel	13,31	7,81	4,21	7,16	9,08
	2 Angkutan Darat	1,21	3,19	1,60	2,89	6,80
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	5,66	5,46	6,38	6,61	7,74
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>4,78</b>	<b>5,37</b>	<b>5,66</b>	<b>5,18</b>	<b>8,19</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	6,46	6,70	5,86	4,91	7,81
	2 Penyediaan Makan Minum	4,78	5,37	5,66	5,18	8,19
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>7,37</b>	<b>5,44</b>	<b>8,02</b>	<b>5,86</b>	<b>9,57</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>11,24</b>	<b>8,09</b>	<b>4,22</b>	<b>1,08</b>	<b>6,26</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	11,69	8,32	4,27	0,62	6,60
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	7,03	3,83	1,93	3,55	3,82
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7,59	7,31	4,74	6,07	2,59
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5,34	3,35	0,02	6,70	41,35
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>5,27</b>	<b>6,25</b>	<b>5,26</b>	<b>6,38</b>	<b>4,72</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>6,72</b>	<b>6,79</b>	<b>3,20</b>	<b>5,21</b>	<b>5,87</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>6,02</b>	<b>5,02</b>	<b>6,21</b>	<b>4,79</b>	<b>4,42</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>7,08</b>	<b>7,24</b>	<b>3,63</b>	<b>7,16</b>	<b>5,07</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>7,08</b>	<b>7,14</b>	<b>5,39</b>	<b>6,68</b>	<b>6,58</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>5,89</b>	<b>8,02</b>	<b>5,21</b>	<b>4,41</b>	<b>4,93</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,57</b>	<b>4,62</b>	<b>4,76</b>	<b>5,97</b>	<b>10,62</b>

**Lampiran Tabel 14.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>20,44</b>	<b>20,42</b>	<b>19,92</b>	<b>18,94</b>	<b>17,40</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	16,31	16,23	15,90	15,12	13,90
	a. Tanaman Pangan	4,25	4,51	4,45	4,17	3,85
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,56	0,57	0,55	0,50	0,45
	c. Perkebunan Semusim	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainny	4,19	4,03	3,87	3,79	3,43
	e. Perkebunan Tahunan	2,11	1,90	1,96	1,92	1,78
	f. Peternakan	4,71	4,74	4,61	4,29	3,93
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,01	3,05	2,92	2,77	2,52
	3 Perikanan	1,12	1,15	1,10	1,05	0,98
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>1,44</b>	<b>1,43</b>	<b>1,39</b>	<b>1,46</b>	<b>1,64</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,44	1,43	1,39	1,46	1,64
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>12,36</b>	<b>12,07</b>	<b>12,29</b>	<b>12,39</b>	<b>12,05</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	9,77	9,56	9,77	9,88	9,68
	3 Pengolahan Tembakau	0,81	0,75	0,72	0,72	0,68
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,47	0,46	0,47	0,47	0,46
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percet	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,35	0,36	0,35	0,34	0,31
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,23	0,21	0,20	0,20	0,19
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,07	0,10	0,16	0,17	0,16
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	0,37	0,37	0,36	0,35	0,33
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>8,54</b>	<b>8,47</b>	<b>8,52</b>	<b>9,11</b>	<b>13,39</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>13,16</b>	<b>13,15</b>	<b>13,67</b>	<b>14,02</b>	<b>13,37</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	0,60	0,61	0,61	0,65	0,64
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	12,56	12,54	13,05	13,37	12,72
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>8,40</b>	<b>8,30</b>	<b>8,04</b>	<b>7,82</b>	<b>7,46</b>
	1 Angkutan Rel	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
	2 Angkutan Darat	6,79	6,66	6,38	6,12	5,83
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	1,57	1,58	1,61	1,64	1,57
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>3,80</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,86</b>	<b>3,75</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan Makan Minum	3,79	3,86	3,87	3,86	3,74
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>5,17</b>	<b>4,99</b>	<b>4,98</b>	<b>4,98</b>	<b>4,89</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>3,25</b>	<b>3,33</b>	<b>3,26</b>	<b>3,16</b>	<b>3,06</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,95	3,04	2,97	2,86	2,80
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,20	0,19	0,19	0,20	0,18
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>3,31</b>	<b>3,34</b>	<b>3,44</b>	<b>3,43</b>	<b>3,15</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,27</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>8,72</b>	<b>8,92</b>	<b>9,16</b>	<b>9,35</b>	<b>8,95</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>5,80</b>	<b>6,02</b>	<b>5,85</b>	<b>5,87</b>	<b>5,57</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>1,42</b>	<b>1,47</b>	<b>1,43</b>	<b>1,44</b>	<b>1,36</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>3,69</b>	<b>3,73</b>	<b>3,68</b>	<b>3,67</b>	<b>3,48</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran Tabel 15.**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-0,19</b>	<b>0,31</b>	<b>0,27</b>	<b>0,34</b>	<b>0,26</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-0,29	0,19	0,22	0,30	0,28
	a. Tanaman Pangan	0,03	0,10	0,11	0,01	-0,04
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-0,06	0,03	-0,01	0,01	0,00
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainny	-0,46	-0,01	0,00	0,16	0,18
	e. Perkebunan Tahunan	0,01	-0,07	0,02	0,06	0,06
	f. Peternakan	0,16	0,14	0,09	0,05	0,06
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,05	0,07	0,02	0,02	-0,03
	3 Perikanan	0,04	0,04	0,02	0,02	0,01
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,20</b>	<b>0,39</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,02	0,01	0,02	0,20	0,39
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>1,04</b>	<b>0,44</b>	<b>0,74</b>	<b>0,97</b>	<b>1,02</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Industri Batu Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Industri Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	1,14	0,38	0,60	0,82	0,91
	3 Pengolahan Tembakau	-0,16	-0,02	0,01	0,01	0,02
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,02	0,03	0,07	0,03	0,01
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	-0,03	0,01	0,00	0,02	0,01
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>0,44</b>	<b>0,36</b>	<b>0,52</b>	<b>1,05</b>	<b>5,42</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>0,69</b>	<b>0,87</b>	<b>0,89</b>	<b>1,11</b>	<b>0,65</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	0,04	0,02	0,04	0,07	0,04
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	0,64	0,85	0,85	1,04	0,62
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>0,18</b>	<b>0,31</b>	<b>0,21</b>	<b>0,30</b>	<b>0,57</b>
	1 Angkutan Rel	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	0,09	0,22	0,11	0,19	0,44
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	0,09	0,08	0,10	0,11	0,12
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>0,17</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>	<b>0,19</b>	<b>0,30</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan Makan Minum	0,17	0,20	0,21	0,19	0,30
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>0,45</b>	<b>0,34</b>	<b>0,51</b>	<b>0,38</b>	<b>0,63</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>0,31</b>	<b>0,24</b>	<b>0,13</b>	<b>0,03</b>	<b>0,18</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,29	0,22	0,12	0,02	0,17
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>0,19</b>	<b>0,22</b>	<b>0,19</b>	<b>0,23</b>	<b>0,17</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>0,48</b>	<b>0,41</b>	<b>0,51</b>	<b>0,40</b>	<b>0,36</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>0,44</b>	<b>0,46</b>	<b>0,23</b>	<b>0,46</b>	<b>0,33</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>0,23</b>	<b>0,32</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>	<b>0,20</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,57</b>	<b>4,62</b>	<b>4,76</b>	<b>5,97</b>	<b>10,62</b>

**Lampiran Tabel 16.**  
**PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>2.476.292,0</b>	<b>2.556.405,7</b>	<b>2.821.402,7</b>	<b>3.010.874,3</b>	<b>3.148.388,5</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	2.308.295,0	2.364.759,1	2.606.846,3	2.784.396,6	2.906.098,6
	a. Tanaman Pangan	887.616,1	880.686,8	1.015.633,9	1.102.402,7	1.144.942,2
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	83.381,1	74.955,5	82.348,6	86.147,9	85.147,3
	c. Perkebunan Semusim	16.447,1	18.530,6	19.430,6	19.257,7	20.122,1
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainny	846.612,1	872.685,0	918.208,4	960.150,4	1.013.303,3
	e. Perkebunan Tahunan	31.445,8	34.264,9	34.783,2	39.274,4	42.490,6
	f. Peternakan	400.582,6	434.663,1	486.568,4	525.229,1	543.755,2
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	42.210,1	48.973,1	49.873,1	51.934,4	56.338,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	75.048,2	82.083,0	92.480,3	98.041,1	103.310,6
	3 Perikanan	92.948,8	109.563,6	122.076,1	128.436,6	138.979,4
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>106.879,3</b>	<b>116.953,1</b>	<b>125.530,4</b>	<b>128.516,3</b>	<b>129.076,0</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	106.879,3	116.953,1	125.530,4	128.516,3	129.076,0
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>2.491.084,2</b>	<b>2.741.391,6</b>	<b>2.909.864,1</b>	<b>3.176.265,8</b>	<b>3.449.821,2</b>
	<sup>1</sup> Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.159.273,9	1.363.459,8	1.472.594,8	1.633.223,0	1.761.300,8
	3 Pengolahan Tembakau	265.840,1	248.106,9	242.910,4	262.068,5	301.013,9
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	284.980,6	321.464,4	355.093,4	396.683,9	443.322,2
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	123.149,5	123.453,1	133.693,1	145.160,5	154.734,1
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	81.174,1	82.172,1	83.502,1	83.295,6	91.409,8
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	20.173,9	22.293,8	23.193,8	25.402,2	27.468,9
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	20.326,8	22.436,8	25.526,8	28.113,9	30.219,2
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	11.864,5	11.444,6	10.884,6	10.942,5	11.062,0
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	114.443,2	124.235,3	126.635,3	130.716,1	141.283,6
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	123.911,2	133.451,0	136.051,0	140.487,9	140.910,8
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	24.111,1	27.383,4	29.173,4	31.931,8	33.133,8
	14 Industri Alat Angkutan	2.966,9	2.764,9	2.579,9	2.541,8	2.635,9
	15 Industri Furnitur	208.403,2	206.725,6	211.725,6	225.553,5	246.764,9
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	50.465,1	51.999,8	56.299,8	60.144,8	64.561,3
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>15.918,6</b>	<b>18.773,7</b>	<b>21.882,0</b>	<b>26.436,0</b>	<b>32.302,6</b>
	1 Ketenagalistrikan	15.679,6	18.518,0	21.630,0	26.163,1	32.010,6
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	239,0	255,7	252,0	272,9	292,0
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>13.242,1</b>	<b>15.153,3</b>	<b>16.192,9</b>	<b>17.043,7</b>	<b>17.976,3</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>1.511.936,7</b>	<b>1.654.150,4</b>	<b>1.803.228,3</b>	<b>1.943.455,3</b>	<b>2.118.975,1</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>1.347.850,3</b>	<b>1.473.263,0</b>	<b>1.585.613,0</b>	<b>1.771.632,1</b>	<b>1.945.840,1</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	140.633,1	159.866,3	174.776,3	197.283,5	215.909,5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	1.207.217,2	1.313.396,7	1.410.836,7	1.574.348,6	1.729.930,6
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>789.917,8</b>	<b>874.460,7</b>	<b>940.530,7</b>	<b>1.000.983,6</b>	<b>1.070.507,3</b>
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	614.457,7	678.846,5	725.416,5	761.129,9	801.114,4
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	175.460,1	195.614,2	215.114,2	239.853,6	269.392,9
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>1.770.326,1</b>	<b>2.011.871,2</b>	<b>2.239.275,5</b>	<b>2.442.216,4</b>	<b>2.656.392,0</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	213.246,2	232.437,7	263.342,0	291.863,8	331.854,8
	2 Penyediaan Makan Minum	1.557.079,9	1.779.433,4	1.975.933,4	2.150.352,6	2.324.537,2
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>1.283.762,3</b>	<b>1.347.205,5</b>	<b>1.411.574,2</b>	<b>1.529.208,1</b>	<b>1.667.176,7</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>416.541,8</b>	<b>483.499,1</b>	<b>545.349,2</b>	<b>585.115,5</b>	<b>626.064,6</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	377.582,1	441.469,6	500.114,7	537.035,9	573.207,1
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	13.235,8	14.688,0	15.655,0	16.361,4	17.833,6
	3 Jasa Keuangan Lainnya	25.366,4	26.952,2	29.172,2	31.294,1	34.564,5
	4 Jasa Penunjang Keuangan	357,5	389,4	407,4	424,2	459,4
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>1.008.900,1</b>	<b>1.141.508,8</b>	<b>1.262.118,4</b>	<b>1.376.057,0</b>	<b>1.486.180,1</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>77.173,6</b>	<b>86.886,8</b>	<b>94.901,6</b>	<b>100.785,0</b>	<b>107.584,7</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>1.147.990,0</b>	<b>1.285.862,9</b>	<b>1.432.619,2</b>	<b>1.578.240,0</b>	<b>1.756.873,4</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>1.073.246,7</b>	<b>1.208.172,6</b>	<b>1.372.466,0</b>	<b>1.441.528,0</b>	<b>1.547.113,9</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>290.728,6</b>	<b>316.399,2</b>	<b>354.915,3</b>	<b>387.703,0</b>	<b>419.294,0</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>316.964,9</b>	<b>350.967,2</b>	<b>387.739,7</b>	<b>413.475,0</b>	<b>454.170,4</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>16.138.755,1</b>	<b>17.682.924,9</b>	<b>19.325.203,3</b>	<b>20.929.535,9</b>	<b>22.633.736,7</b>



**Lampiran Tabel 17.**  
**PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>1.912.487,9</b>	<b>1.952.982,7</b>	<b>1.982.709,1</b>	<b>2.032.344,0</b>	<b>2.073.022,1</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	1.767.746,1	1.801.653,8	1.828.449,5	1.872.873,4	1.914.592,6
	a. Tanaman Pangan	726.357,6	747.387,2	767.608,8	777.825,1	793.832,3
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	59.538,0	63.611,6	62.850,7	64.186,0	65.826,1
	c. Perkebunan Semusim	14.406,9	13.902,3	13.236,3	13.530,1	14.021,9
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	574.894,0	568.012,3	562.485,3	580.639,2	586.970,7
	e. Perkebunan Tahunan	25.399,2	25.256,5	25.618,6	26.646,9	27.690,0
	f. Peternakan	331.495,1	347.556,0	359.977,2	371.952,3	387.200,0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	35.655,4	35.928,0	36.672,6	38.093,9	39.051,7
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	69.058,3	71.635,1	72.601,7	74.527,2	72.687,8
	3 Perikanan	75.683,4	79.693,9	81.658,0	84.943,3	85.741,7
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>101.804,8</b>	<b>102.422,6</b>	<b>102.781,3</b>	<b>102.845,1</b>	<b>103.909,5</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	101.804,8	102.422,6	102.781,3	102.845,1	103.909,5
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>2.224.275,1</b>	<b>2.283.703,1</b>	<b>2.404.767,2</b>	<b>2.558.218,3</b>	<b>2.703.162,5</b>
	<sup>1</sup> Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.116.885,1	1.161.311,1	1.238.366,6	1.322.109,4	1.416.507,3
	3 Pengolahan Tembakau	150.321,8	143.721,7	146.903,4	157.327,9	165.464,6
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	257.648,6	278.748,6	302.234,6	326.282,9	345.839,0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	98.341,6	106.241,6	111.297,2	116.201,1	114.635,6
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	77.115,7	75.515,7	74.516,7	79.401,6	83.148,7
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	19.486,0	19.872,0	20.945,2	21.734,8	22.420,9
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	23.658,6	25.522,6	27.129,5	28.839,3	29.223,2
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	10.200,6	9.500,8	9.107,6	9.309,1	9.287,4
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	102.770,2	98.450,2	98.700,9	105.124,3	107.427,5
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	117.922,0	117.721,0	119.563,6	119.232,5	117.476,1
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	23.515,5	24.915,5	26.129,8	26.936,5	27.610,2
	14 Industri Alat Angkutan	2.350,3	2.185,3	2.092,4	2.142,8	2.223,7
	15 Industri Furniture	181.179,8	176.117,8	183.029,8	196.042,2	211.838,7
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	42.879,2	43.879,2	44.749,8	47.533,9	50.059,6
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>23.520,2</b>	<b>24.243,8</b>	<b>28.020,3</b>	<b>29.138,7</b>	<b>30.552,3</b>
	1 Ketenagalistrikan	23.312,4	24.033,5	27.804,4	28.919,2	30.332,4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	207,8	210,3	216,0	219,5	219,9
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>12.649,0</b>	<b>13.022,1</b>	<b>13.407,7</b>	<b>13.834,6</b>	<b>14.548,3</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>1.447.564,0</b>	<b>1.506.241,3</b>	<b>1.567.472,5</b>	<b>1.660.496,6</b>	<b>1.780.777,2</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>1.232.188,2</b>	<b>1.315.611,2</b>	<b>1.401.507,7</b>	<b>1.482.797,1</b>	<b>1.570.466,5</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	127.492,1	132.420,2	141.670,3	150.773,8	158.328,4
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	1.104.696,1	1.183.191,1	1.259.837,4	1.332.023,3	1.412.138,1
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>749.086,1</b>	<b>777.541,9</b>	<b>809.961,0</b>	<b>841.691,9</b>	<b>888.209,6</b>
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	583.998,9	603.298,9	623.673,4	641.722,8	672.655,8
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	165.087,2	174.242,9	186.287,6	199.969,0	215.553,8
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>1.555.098,5</b>	<b>1.646.727,0</b>	<b>1.750.671,5</b>	<b>1.851.038,5</b>	<b>1.976.106,5</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	178.419,3	191.349,3	207.258,6	228.532,4	255.610,2
	2 Penyediaan Makan Minum	1.376.679,2	1.455.377,7	1.543.412,9	1.622.506,1	1.720.496,3
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>1.454.258,1</b>	<b>1.536.406,9</b>	<b>1.664.675,1</b>	<b>1.762.378,5</b>	<b>1.869.376,1</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>385.477,1</b>	<b>418.450,3</b>	<b>437.803,4</b>	<b>450.167,2</b>	<b>479.912,2</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	348.753,2	379.506,4	396.535,0	406.520,2	434.066,8
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	13.193,9	13.673,9	14.156,4	14.862,2	15.533,2
	3 Jasa Keuangan Lainnya	23.197,1	24.927,1	26.759,5	28.421,8	29.938,3
	4 Jasa Penunjang Keuangan	333,0	343,0	352,6	362,9	373,8
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>989.905,3</b>	<b>1.057.941,5</b>	<b>1.119.537,2</b>	<b>1.175.156,4</b>	<b>1.238.685,0</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>81.440,8</b>	<b>87.194,2</b>	<b>90.911,3</b>	<b>94.797,2</b>	<b>99.885,6</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>1.010.099,0</b>	<b>1.063.245,3</b>	<b>1.125.300,6</b>	<b>1.181.300,9</b>	<b>1.235.060,1</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>1.073.653,8</b>	<b>1.157.438,0</b>	<b>1.194.995,4</b>	<b>1.256.613,3</b>	<b>1.330.500,2</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>281.683,2</b>	<b>302.837,0</b>	<b>318.577,5</b>	<b>334.917,6</b>	<b>350.195,0</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>315.933,2</b>	<b>342.511,4</b>	<b>363.114,3</b>	<b>383.485,7</b>	<b>410.868,3</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>14.851.124,1</b>	<b>15.588.520,4</b>	<b>16.376.213,1</b>	<b>17.211.221,5</b>	<b>18.155.237,0</b>

**Lampiran Tabel 18.**  
**Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-2,62</b>	<b>2,12</b>	<b>1,52</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-3,28	1,92	1,49	2,43	2,23
	a. Tanaman Pangan	-1,31	2,90	2,71	1,33	2,06
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-13,20	6,84	-1,20	2,12	2,56
	c. Perkebunan Semusim	0,63	-3,50	-4,79	2,22	3,64
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-9,09	-1,20	-0,97	3,23	1,09
	e. Perkebunan Tahunan	-0,46	-0,56	1,43	4,01	3,91
	f. Peternakan	4,22	4,84	3,57	3,33	4,10
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	8,61	0,76	2,07	3,88	2,51
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,82	3,73	1,35	2,65	-2,47
	3 Perikanan	8,41	5,30	2,46	4,02	0,94
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>1,54</b>	<b>0,61</b>	<b>0,35</b>	<b>0,06</b>	<b>1,03</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,54	0,61	0,35	0,06	1,03
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>4,02</b>	<b>2,67</b>	<b>5,30</b>	<b>6,38</b>	<b>5,67</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	10,23	3,98	6,64	6,76	7,14
	3 Pengolahan Tembakau	-20,02	-4,39	2,21	7,10	5,17
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	9,23	8,19	8,43	7,96	5,99
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-1,96	8,03	4,76	4,41	-1,35
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	-0,66	-2,07	-1,32	6,56	4,72
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	4,21	1,98	5,40	3,77	3,16
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,19	7,88	6,30	6,30	1,33
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-4,00	-6,86	-4,14	2,21	-0,23
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	1,26	-4,20	0,25	6,51	2,19
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	4,52	-0,17	1,57	-0,28	-1,47
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	7,65	5,95	4,87	3,09	2,50
	14 Industri Alat Angkutan	-9,26	-7,02	-4,25	2,41	3,77
	15 Industri Furnitur	-3,60	-2,79	3,92	7,11	8,06
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	-5,70	2,33	1,98	6,22	5,31
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>7,34</b>	<b>3,08</b>	<b>15,58</b>	<b>3,99</b>	<b>4,85</b>
	1 Ketenagalistrikan	7,37	3,09	15,69	4,01	4,89
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4,62	1,20	2,69	1,66	0,15
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>3,49</b>	<b>2,95</b>	<b>2,96</b>	<b>3,18</b>	<b>5,16</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>5,80</b>	<b>4,05</b>	<b>4,07</b>	<b>5,93</b>	<b>7,24</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>6,55</b>	<b>6,77</b>	<b>6,53</b>	<b>5,80</b>	<b>5,91</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	10,08	3,87	6,99	6,43	5,01
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	6,16	7,11	6,48	5,73	6,01
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>3,77</b>	<b>3,80</b>	<b>4,17</b>	<b>3,92</b>	<b>5,53</b>
	1 Angkutan Rel	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Angkutan Darat	2,40	3,30	3,38	2,89	4,82
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	8,94	5,55	6,91	7,34	7,79
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>7,73</b>	<b>5,89</b>	<b>6,31</b>	<b>5,73</b>	<b>6,76</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	6,25	7,25	8,31	10,26	11,85
	2 Penyediaan Makan Minum	7,92	5,72	6,05	5,12	6,04
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>7,04</b>	<b>5,65</b>	<b>8,35</b>	<b>5,87</b>	<b>6,07</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>9,53</b>	<b>8,55</b>	<b>4,62</b>	<b>2,82</b>	<b>6,61</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	10,12	8,82	4,49	2,52	6,78
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	7,65	3,64	3,53	4,99	4,52
	3 Jasa Keuangan Lainnya	2,38	7,46	7,35	6,21	5,34
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4,43	3,00	2,81	2,93	3,01
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>8,78</b>	<b>6,87</b>	<b>5,82</b>	<b>4,97</b>	<b>5,41</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>6,59</b>	<b>7,06</b>	<b>4,26</b>	<b>4,27</b>	<b>5,37</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>5,28</b>	<b>5,26</b>	<b>5,84</b>	<b>4,98</b>	<b>4,55</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>7,71</b>	<b>7,80</b>	<b>3,24</b>	<b>5,16</b>	<b>5,88</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>7,31</b>	<b>7,51</b>	<b>5,20</b>	<b>5,13</b>	<b>4,56</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>6,66</b>	<b>8,41</b>	<b>6,02</b>	<b>5,61</b>	<b>7,14</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,04</b>	<b>4,97</b>	<b>5,05</b>	<b>5,10</b>	<b>5,48</b>

**Lampiran Tabel 19.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>14,46</b>	<b>14,60</b>	<b>14,39</b>	<b>13,91</b>	<b>13,79</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	13,37	13,49	13,30	12,84	12,76
	a. Tanaman Pangan	4,98	5,26	5,27	5,06	5,05
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,42	0,43	0,41	0,38	0,36
	c. Perkebunan Semusim	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4,94	4,75	4,59	4,48	4,42
	e. Perkebunan Tahunan	0,19	0,18	0,19	0,19	0,18
	f. Peternakan	2,46	2,52	2,51	2,40	2,42
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,28	0,26	0,25	0,25	0,24
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,46	0,48	0,47	0,46	0,43
	3 Perikanan	0,62	0,63	0,61	0,61	0,60
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,66</b>	<b>0,65</b>	<b>0,61</b>	<b>0,57</b>	<b>0,55</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,66	0,65	0,61	0,57	0,55
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>15,50</b>	<b>15,06</b>	<b>15,18</b>	<b>15,24</b>	<b>15,06</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,71	7,62	7,80	7,78	7,73
	3 Pengolahan Tembakau	1,40	1,26	1,25	1,33	1,33
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,82	1,84	1,90	1,96	1,95
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,70	0,69	0,69	0,68	0,64
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	0,46	0,43	0,40	0,40	0,39
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,70	0,66	0,62	0,62	0,60
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	0,75	0,70	0,67	0,62	0,58
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
	14 Industri Alat Angkutan	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	15 Industri Furnitur	1,17	1,10	1,08	1,09	1,11
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,10	0,11	0,13	0,14	0,14
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>9,35</b>	<b>9,33</b>	<b>9,29</b>	<b>9,36</b>	<b>9,63</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>8,33</b>	<b>8,20</b>	<b>8,46</b>	<b>8,60</b>	<b>8,69</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	0,90	0,90	0,94	0,95	0,95
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	7,43	7,30	7,52	7,64	7,74
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>4,95</b>	<b>4,87</b>	<b>4,78</b>	<b>4,73</b>	<b>4,72</b>
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	3,84	3,75	3,64	3,54	3,51
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	1,11	1,11	1,15	1,19	1,22
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>11,38</b>	<b>11,59</b>	<b>11,67</b>	<b>11,74</b>	<b>11,72</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	1,31	1,36	1,39	1,47	1,53
	2 Penyediaan Makan Minum	10,06	10,22	10,27	10,27	10,20
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>7,62</b>	<b>7,30</b>	<b>7,31</b>	<b>7,37</b>	<b>7,26</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>2,73</b>	<b>2,82</b>	<b>2,80</b>	<b>2,77</b>	<b>2,83</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,50	2,59	2,57	2,53	2,61
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>6,46</b>	<b>6,53</b>	<b>6,57</b>	<b>6,57</b>	<b>6,53</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>7,27</b>	<b>7,41</b>	<b>7,54</b>	<b>7,76</b>	<b>7,80</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>6,83</b>	<b>7,10</b>	<b>6,89</b>	<b>6,84</b>	<b>6,83</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>1,79</b>	<b>1,84</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,84</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>1,98</b>	<b>2,01</b>	<b>1,98</b>	<b>2,01</b>	<b>2,04</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran Tabel 20.**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bantul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-0,36</b>	<b>0,27</b>	<b>0,19</b>	<b>0,30</b>	<b>0,24</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-0,42	0,23	0,17	0,27	0,24
	a. Tanaman Pangan	-0,07	0,14	0,13	0,06	0,09
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-0,06	0,03	0,00	0,01	0,01
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainny	-0,41	-0,05	-0,04	0,11	0,04
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	f. Peternakan	0,09	0,11	0,08	0,07	0,09
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,02	0,02	0,01	0,01	-0,01
	3 Perikanan	0,04	0,03	0,01	0,02	0,00
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>0,61</b>	<b>0,40</b>	<b>0,78</b>	<b>0,94</b>	<b>0,84</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Industri Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Industri Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,73	0,30	0,49	0,51	0,55
	3 Pengolahan Tembakau	-0,27	-0,04	0,02	0,06	0,05
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,15	0,14	0,15	0,15	0,11
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-0,01	0,05	0,03	0,03	-0,01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,02
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percet	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,01	-0,03	0,00	0,04	0,01
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	0,04	0,00	0,01	0,00	-0,01
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	-0,05	-0,03	0,04	0,08	0,09
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	-0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>0,56</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	<b>0,57</b>	<b>0,70</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>0,54</b>	<b>0,56</b>	<b>0,55</b>	<b>0,50</b>	<b>0,51</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	0,08	0,03	0,06	0,06	0,04
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	0,45	0,53	0,49	0,44	0,47
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,21</b>	<b>0,19</b>	<b>0,27</b>
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	0,10	0,13	0,13	0,11	0,18
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	0,10	0,06	0,08	0,08	0,09
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>0,79</b>	<b>0,62</b>	<b>0,67</b>	<b>0,61</b>	<b>0,73</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,07	0,09	0,10	0,13	0,16
	2 Penyediaan Makan Minum	0,71	0,53	0,56	0,48	0,57
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>0,68</b>	<b>0,55</b>	<b>0,82</b>	<b>0,60</b>	<b>0,62</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>0,24</b>	<b>0,22</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	<b>0,17</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,23	0,21	0,11	0,06	0,16
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>0,57</b>	<b>0,46</b>	<b>0,40</b>	<b>0,34</b>	<b>0,37</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,40</b>	<b>0,34</b>	<b>0,31</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>0,54</b>	<b>0,56</b>	<b>0,24</b>	<b>0,38</b>	<b>0,43</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>0,14</b>	<b>0,18</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,16</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,04</b>	<b>4,97</b>	<b>5,05</b>	<b>5,10</b>	<b>5,48</b>

**Lampiran Tabel 21.**  
**PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>3.150.565,0</b>	<b>3.535.656,7</b>	<b>3.787.293,3</b>	<b>3.964.000,0</b>	<b>4.247.159,9</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	2.579.953,8	2.893.983,8	3.107.888,0	3.236.231,5	3.503.173,8
	a. Tanaman Pangan	1.421.015,0	1.654.410,2	1.791.821,4	1.836.776,9	1.992.958,0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	7.688,8	8.291,0	8.677,1	8.611,5	9.074,2
	c. Perkebunan Semusim	4.241,7	4.493,2	4.552,8	4.965,4	5.415,7
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	422.137,3	442.591,4	460.530,8	493.003,5	518.796,1
	e. Perkebunan Tahunan	22.683,6	22.330,0	24.722,2	26.844,7	28.331,6
	f. Peternakan	642.772,5	700.251,6	750.359,2	791.706,5	870.651,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	59.414,8	61.616,5	67.224,5	74.323,0	77.946,7
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	456.036,4	513.727,3	545.492,0	579.575,4	586.668,1
	3 Perikanan	114.574,8	127.945,6	133.913,2	148.193,1	156.748,0
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>178.643,4</b>	<b>188.772,5</b>	<b>195.599,8</b>	<b>201.718,5</b>	<b>213.330,9</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	178.643,4	188.772,5	195.599,8	201.718,5	213.330,9
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>1.204.712,4</b>	<b>1.284.288,4</b>	<b>1.406.422,4</b>	<b>1.535.319,3</b>	<b>1.657.720,0</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	756.613,1	818.833,9	916.222,2	1.003.715,1	1.091.834,1
	3 Pengolahan Tembakau	717,7	723,5	786,0	899,7	969,3
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	17.761,0	19.618,4	21.509,0	24.011,0	26.754,7
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3.203,5	3.396,8	3.694,0	3.988,3	3.952,7
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	45.571,1	46.244,4	46.931,7	51.848,4	55.651,0
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	5.671,8	5.921,8	6.551,1	7.130,4	7.725,9
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21.419,4	24.253,5	26.803,9	28.549,3	29.583,0
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4.169,9	3.936,4	3.855,4	3.981,9	4.074,7
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	102.467,1	104.925,5	107.745,7	117.681,2	123.874,8
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Bara	56.260,6	57.098,5	60.097,3	60.398,7	59.586,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	18.909,4	20.086,2	22.234,6	23.789,5	24.723,0
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	129.259,2	133.428,5	141.812,2	157.153,5	171.801,5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	42.688,7	45.821,1	48.179,4	52.172,5	57.188,8
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>8.991,0</b>	<b>10.404,2</b>	<b>12.444,1</b>	<b>15.436,4</b>	<b>16.786,6</b>
	1 Ketenagalistrikan	8.828,7	10.243,3	12.269,4	15.249,6	16.598,4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	162,3	161,0	174,7	186,8	188,2
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>22.134,7</b>	<b>23.520,7</b>	<b>24.682,0</b>	<b>26.247,7</b>	<b>27.654,1</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>1.198.556,4</b>	<b>1.298.853,1</b>	<b>1.407.758,0</b>	<b>1.563.746,8</b>	<b>1.758.729,9</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>1.126.233,7</b>	<b>1.218.309,9</b>	<b>1.381.432,0</b>	<b>1.519.918,4</b>	<b>1.659.974,5</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	62.536,0	67.967,5	76.273,1	83.278,9	91.416,7
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	1.063.697,7	1.150.342,4	1.305.159,0	1.436.639,5	1.568.557,8
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>659.675,5</b>	<b>707.695,0</b>	<b>756.686,7</b>	<b>805.855,1</b>	<b>859.503,1</b>
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	520.332,7	553.254,7	584.595,8	614.442,4	648.746,1
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	139.342,8	154.440,2	172.090,8	191.412,7	210.757,0
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>726.389,4</b>	<b>813.608,1</b>	<b>883.856,8</b>	<b>958.922,0</b>	<b>1.023.601,8</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	13.190,2	15.062,6	16.703,7	19.187,0	21.064,6
	2 Penyediaan Makan Minum	713.199,2	798.545,6	867.153,1	939.735,0	1.002.537,2
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>916.149,7</b>	<b>963.597,6</b>	<b>1.052.120,4</b>	<b>1.157.454,9</b>	<b>1.252.635,6</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>284.852,3</b>	<b>322.775,3</b>	<b>346.143,7</b>	<b>361.954,0</b>	<b>404.314,0</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	253.061,6	288.479,6	308.834,6	320.454,8	359.601,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	12.354,6	13.212,4	14.160,7	15.560,1	16.692,9
	3 Jasa Keuangan Lainnya	19.340,3	20.982,9	23.041,9	25.822,1	27.897,6
	4 Jasa Penunjang Keuangan	95,8	100,3	106,5	117,0	122,5
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>430.299,2</b>	<b>474.733,5</b>	<b>528.958,9</b>	<b>578.583,4</b>	<b>631.984,6</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>55.035,7</b>	<b>60.222,3</b>	<b>64.966,4</b>	<b>70.298,4</b>	<b>75.779,8</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>1.166.153,8</b>	<b>1.289.112,2</b>	<b>1.411.268,5</b>	<b>1.564.517,3</b>	<b>1.678.921,9</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>772.874,0</b>	<b>876.367,3</b>	<b>919.058,6</b>	<b>994.408,6</b>	<b>1.077.730,5</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>247.287,8</b>	<b>277.851,2</b>	<b>299.358,7</b>	<b>324.943,0</b>	<b>346.612,6</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>408.817,1</b>	<b>452.888,9</b>	<b>502.230,6</b>	<b>556.518,0</b>	<b>606.189,6</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>12.557.371,3</b>	<b>13.798.656,9</b>	<b>14.980.280,9</b>	<b>16.199.841,9</b>	<b>17.538.629,4</b>

**Lampiran Tabel 22.**  
**PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>2.493.155,8</b>	<b>2.557.403,2</b>	<b>2.613.031,8</b>	<b>2.664.845,1</b>	<b>2.724.792,1</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	2.039.894,2	2.087.324,1	2.135.102,1	2.167.740,7	2.236.132,9
	a. Tanaman Pangan	1.203.663,7	1.238.415,9	1.272.198,9	1.265.537,9	1.294.161,1
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	6.443,5	6.719,0	6.714,2	6.857,5	7.072,8
	c. Perkebunan Semusim	3.376,1	3.284,3	3.179,6	3.334,6	3.482,5
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	287.592,9	285.079,0	282.904,5	296.745,5	303.727,7
	e. Perkebunan Tahunan	16.088,2	15.476,2	15.643,2	16.395,6	17.170,8
	f. Peternakan	476.208,5	491.092,1	505.490,9	527.099,3	557.465,0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	46.521,3	47.257,6	48.971,0	51.770,3	53.053,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	369.673,8	382.529,1	388.647,8	403.526,9	393.579,5
	3 Perikanan	83.587,8	87.550,0	89.281,9	93.577,4	95.079,7
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>160.985,2</b>	<b>161.383,4</b>	<b>162.657,3</b>	<b>167.046,1</b>	<b>174.847,9</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	160.985,2	161.383,4	162.657,3	167.046,1	174.847,9
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>1.008.531,4</b>	<b>1.035.163,3</b>	<b>1.090.255,5</b>	<b>1.164.612,3</b>	<b>1.225.540,2</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	614.314,3	644.235,3	689.251,2	737.314,6	780.106,1
	3 Pengolahan Tembakau	441,6	434,4	446,4	475,5	502,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	13.485,7	14.495,8	15.592,3	16.740,0	18.123,8
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.683,9	2.814,1	2.905,2	3.033,5	2.919,5
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	42.615,2	41.981,3	41.213,5	45.253,7	47.829,5
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	5.007,7	5.112,1	5.426,2	5.644,0	5.861,2
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	23.629,0	25.342,3	27.252,7	28.722,4	29.199,7
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.475,4	3.218,6	3.045,1	3.150,3	3.163,5
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	86.256,3	82.204,4	82.544,9	88.962,1	92.558,2
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	50.380,1	49.946,6	52.264,1	52.226,3	50.410,3
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	16.214,7	17.092,5	18.095,3	18.799,2	19.321,0
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	113.772,1	111.399,3	114.919,8	124.382,5	133.104,4
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	36.255,4	36.886,5	37.298,9	39.908,2	42.441,1
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>10.775,4</b>	<b>11.030,5</b>	<b>12.662,6</b>	<b>13.308,9</b>	<b>13.926,0</b>
	1 Ketenagalistrikan	10.644,9	10.898,3	12.527,4	13.169,9	13.786,6
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	130,5	132,2	135,3	139,1	139,4
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>17.437,0</b>	<b>17.940,0</b>	<b>18.301,0</b>	<b>19.033,9</b>	<b>19.890,7</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>993.510,4</b>	<b>1.036.792,6</b>	<b>1.092.138,3</b>	<b>1.176.314,7</b>	<b>1.268.187,8</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>971.903,7</b>	<b>1.038.835,3</b>	<b>1.111.128,3</b>	<b>1.179.089,8</b>	<b>1.249.923,7</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	50.812,5	52.659,0	56.297,0	59.296,0	63.179,1
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	921.091,2	986.176,3	1.054.831,2	1.119.793,8	1.186.744,6
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>561.987,4</b>	<b>582.657,8</b>	<b>603.642,2</b>	<b>626.905,1</b>	<b>653.464,6</b>
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	449.507,6	463.407,5	475.301,8	491.287,2	508.715,8
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	112.479,8	119.250,2	128.340,5	135.617,9	144.748,8
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>596.989,2</b>	<b>635.346,4</b>	<b>670.616,2</b>	<b>708.164,6</b>	<b>747.951,9</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	9.863,8	10.592,9	11.466,8	12.801,3	13.941,7
	2 Penyediaan Makan Minum	587.125,5	624.753,5	659.149,4	695.363,3	734.010,2
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>957.028,2</b>	<b>1.011.119,7</b>	<b>1.100.399,7</b>	<b>1.174.524,5</b>	<b>1.258.021,5</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>220.771,0</b>	<b>239.629,5</b>	<b>250.560,2</b>	<b>252.667,9</b>	<b>272.032,7</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	194.619,7	211.890,4	221.288,8	221.318,5	239.220,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	10.261,8	10.669,1	11.075,5	11.708,7	12.179,9
	3 Jasa Keuangan Lainnya	15.811,0	16.988,9	18.112,8	19.554,1	20.543,0
	4 Jasa Penunjang Keuangan	78,4	81,0	83,1	86,6	89,8
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>368.705,2</b>	<b>393.209,3</b>	<b>420.060,4</b>	<b>442.615,4</b>	<b>471.461,0</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>52.936,8</b>	<b>56.662,6</b>	<b>59.527,9</b>	<b>63.147,0</b>	<b>66.419,8</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>939.395,0</b>	<b>988.811,7</b>	<b>1.040.788,4</b>	<b>1.088.902,2</b>	<b>1.135.166,8</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>692.197,5</b>	<b>744.844,8</b>	<b>768.101,1</b>	<b>814.691,6</b>	<b>861.120,4</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>223.760,5</b>	<b>239.841,1</b>	<b>250.576,0</b>	<b>265.932,1</b>	<b>280.269,7</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>369.722,6</b>	<b>401.692,0</b>	<b>431.708,9</b>	<b>459.756,5</b>	<b>490.063,9</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>10.639.792,3</b>	<b>11.152.363,1</b>	<b>11.696.155,8</b>	<b>12.281.557,9</b>	<b>12.913.080,8</b>



**Lampiran Tabel 23.**  
**Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-0,62</b>	<b>2,58</b>	<b>2,18</b>	<b>1,98</b>	<b>2,25</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-1,30	2,33	2,29	1,53	3,15
	a. Tanaman Pangan	-1,87	2,89	2,73	-0,52	2,26
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-3,08	4,28	-0,07	2,14	3,14
	c. Perkebunan Semusim	1,97	-2,72	-3,19	4,88	4,44
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-10,36	-0,87	-0,76	4,89	2,35
	e. Perkebunan Tahunan	1,26	-3,80	1,08	4,81	4,73
	f. Peternakan	5,96	3,13	2,93	4,27	5,76
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	5,41	1,58	3,63	5,72	2,48
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,18	3,48	1,60	3,83	-2,47
	3 Perikanan	4,41	4,74	1,98	4,81	1,61
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>1,60</b>	<b>0,25</b>	<b>0,79</b>	<b>2,70</b>	<b>4,67</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,60	0,25	0,79	2,70	4,67
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>4,11</b>	<b>2,64</b>	<b>5,32</b>	<b>6,82</b>	<b>5,23</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6,61	4,87	6,99	6,97	5,80
	3 Pengolahan Tembakau	-14,96	-1,64	2,76	6,51	5,57
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7,81	7,49	7,56	7,36	8,27
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,63	4,85	3,24	4,42	-3,76
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	-0,16	-1,49	-1,83	9,80	5,69
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	4,10	2,09	6,14	4,02	3,85
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,80	7,25	7,54	5,39	1,66
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,52	-7,39	-5,39	3,45	0,42
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	4,40	-4,70	0,41	7,77	4,04
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	3,08	-0,86	4,64	-0,07	-3,48
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	6,50	5,41	5,87	3,89	2,78
	14 Industri Alat Angkutan	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	15 Industri Furnitur	-5,90	-2,09	3,16	8,23	7,01
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	-0,73	1,74	1,12	7,00	6,35
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>7,48</b>	<b>2,37</b>	<b>14,80</b>	<b>5,10</b>	<b>4,64</b>
	1 Ketenagalistrikan	7,56	2,38	14,95	5,13	4,68
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,61	1,29	2,33	2,81	0,25
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>3,88</b>	<b>2,88</b>	<b>2,01</b>	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>5,06</b>	<b>4,36</b>	<b>5,34</b>	<b>7,71</b>	<b>7,81</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>6,77</b>	<b>6,89</b>	<b>6,96</b>	<b>6,12</b>	<b>6,01</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	10,04	3,63	6,91	5,33	6,55
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	6,60	7,07	6,96	6,16	5,98
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>2,43</b>	<b>3,68</b>	<b>3,60</b>	<b>3,85</b>	<b>4,24</b>
	1 Angkutan Rel	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Angkutan Darat	1,42	3,09	2,57	3,36	3,55
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	6,71	6,02	7,62	5,67	6,73
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>8,61</b>	<b>6,43</b>	<b>5,55</b>	<b>5,60</b>	<b>5,62</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	4,63	7,39	8,25	11,64	8,91
	2 Penyediaan Makan Minum	8,68	6,41	5,51	5,49	5,56
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>7,90</b>	<b>5,65</b>	<b>8,83</b>	<b>6,74</b>	<b>7,11</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>11,05</b>	<b>8,54</b>	<b>4,56</b>	<b>0,84</b>	<b>7,66</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	11,73	8,87	4,44	0,01	8,09
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	6,94	3,97	3,81	5,72	4,02
	3 Jasa Keuangan Lainnya	5,77	7,45	6,62	7,96	5,06
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6,81	3,23	2,65	4,22	3,71
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>8,09</b>	<b>6,65</b>	<b>6,83</b>	<b>5,37</b>	<b>6,52</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>6,37</b>	<b>7,04</b>	<b>5,06</b>	<b>6,08</b>	<b>5,18</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>5,79</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>4,62</b>	<b>4,25</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>8,13</b>	<b>7,61</b>	<b>3,12</b>	<b>6,07</b>	<b>5,70</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>7,37</b>	<b>7,19</b>	<b>4,48</b>	<b>6,13</b>	<b>5,39</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>6,42</b>	<b>8,65</b>	<b>7,47</b>	<b>6,50</b>	<b>6,59</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,54</b>	<b>4,82</b>	<b>4,88</b>	<b>5,01</b>	<b>5,14</b>

**Lampiran Tabel 24.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>25,09</b>	<b>25,62</b>	<b>25,28</b>	<b>24,47</b>	<b>24,22</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	20,55	20,97	20,75	19,98	19,97
	a. Tanaman Pangan	11,32	11,99	11,96	11,34	11,36
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
	c. Perkebunan Semusim	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3,36	3,21	3,07	3,04	2,96
	e. Perkebunan Tahunan	0,18	0,16	0,17	0,17	0,16
	f. Peternakan	5,12	5,07	5,01	4,89	4,96
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,47	0,45	0,45	0,46	0,44
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,63	3,72	3,64	3,58	3,35
	3 Perikanan	0,91	0,93	0,89	0,91	0,89
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>1,42</b>	<b>1,37</b>	<b>1,31</b>	<b>1,25</b>	<b>1,22</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,42	1,37	1,31	1,25	1,22
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>9,59</b>	<b>9,31</b>	<b>9,39</b>	<b>9,48</b>	<b>9,45</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6,03	5,93	6,12	6,20	6,23
	3 Pengolahan Tembakau	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	0,36	0,34	0,31	0,32	0,32
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,17	0,18	0,18	0,18	0,17
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,82	0,76	0,72	0,73	0,71
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Bara	0,45	0,41	0,40	0,37	0,34
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	1,03	0,97	0,95	0,97	0,98
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	0,34	0,33	0,32	0,32	0,33
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,18</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>9,54</b>	<b>9,41</b>	<b>9,40</b>	<b>9,65</b>	<b>10,03</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>8,97</b>	<b>8,83</b>	<b>9,22</b>	<b>9,38</b>	<b>9,46</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	0,50	0,49	0,51	0,51	0,52
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	8,47	8,34	8,71	8,87	8,94
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>5,25</b>	<b>5,13</b>	<b>5,05</b>	<b>4,97</b>	<b>4,90</b>
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	4,14	4,01	3,90	3,79	3,70
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	1,11	1,12	1,15	1,18	1,20
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>5,78</b>	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>	<b>5,92</b>	<b>5,84</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
	2 Penyediaan Makan Minum	5,68	5,79	5,79	5,80	5,72
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>7,30</b>	<b>6,98</b>	<b>7,02</b>	<b>7,14</b>	<b>7,14</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>2,27</b>	<b>2,34</b>	<b>2,31</b>	<b>2,23</b>	<b>2,31</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,02	2,09	2,06	1,98	2,05
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>3,43</b>	<b>3,44</b>	<b>3,53</b>	<b>3,57</b>	<b>3,60</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>9,29</b>	<b>9,34</b>	<b>9,42</b>	<b>9,66</b>	<b>9,57</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>6,15</b>	<b>6,35</b>	<b>6,14</b>	<b>6,14</b>	<b>6,14</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>1,97</b>	<b>2,01</b>	<b>2,00</b>	<b>2,01</b>	<b>1,98</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>3,26</b>	<b>3,28</b>	<b>3,35</b>	<b>3,44</b>	<b>3,46</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**Lampiran Tabel 25.**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,60</b>	<b>0,50</b>	<b>0,44</b>	<b>0,49</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-0,26	0,45	0,43	0,28	0,56
	a. Tanaman Pangan	-0,23	0,33	0,30	-0,06	0,23
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-0,33	-0,02	-0,02	0,12	0,06
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01
	f. Peternakan	0,26	0,14	0,13	0,18	0,25
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,08	0,12	0,05	0,13	-0,08
	3 Perikanan	0,03	0,04	0,02	0,04	0,01
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,02	0,00	0,01	0,04	0,06
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>0,39</b>	<b>0,25</b>	<b>0,49</b>	<b>0,64</b>	<b>0,50</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Industri Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Industri Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,37	0,28	0,40	0,41	0,35
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,02
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,04	-0,04	0,00	0,05	0,03
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	-0,07	-0,02	0,03	0,08	0,07
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>0,47</b>	<b>0,41</b>	<b>0,50</b>	<b>0,72</b>	<b>0,75</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>0,61</b>	<b>0,63</b>	<b>0,65</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	0,05	0,02	0,03	0,03	0,03
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	0,56	0,61	0,62	0,56	0,55
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>0,13</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,20</b>	<b>0,22</b>
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	0,06	0,13	0,11	0,14	0,14
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	0,07	0,06	0,08	0,06	0,07
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>0,46</b>	<b>0,36</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	2 Penyediaan Makan Minum	0,46	0,35	0,31	0,31	0,31
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>0,69</b>	<b>0,51</b>	<b>0,80</b>	<b>0,63</b>	<b>0,68</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>0,22</b>	<b>0,18</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,16</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,20	0,16	0,08	0,00	0,15
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>0,27</b>	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>	<b>0,19</b>	<b>0,23</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>0,51</b>	<b>0,46</b>	<b>0,47</b>	<b>0,41</b>	<b>0,38</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>0,51</b>	<b>0,49</b>	<b>0,21</b>	<b>0,40</b>	<b>0,38</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>0,22</b>	<b>0,30</b>	<b>0,27</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,54</b>	<b>4,82</b>	<b>4,88</b>	<b>5,01</b>	<b>5,14</b>

**Lampiran Tabel 26.**  
**PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>2.574.199,3</b>	<b>2.826.715,0</b>	<b>2.972.354,3</b>	<b>3.074.178,6</b>	<b>3.234.968,2</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	2.419.559,8	2.656.007,0	2.793.689,4	2.883.415,6	3.038.304,0
	a. Tanaman Pangan	683.578,0	788.383,7	860.017,3	863.500,5	917.149,0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	140.352,4	152.636,0	157.858,6	155.451,9	165.062,5
	c. Perkebunan Semusim	21.070,3	21.865,3	22.840,2	24.207,8	25.848,1
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.004.807,8	1.064.913,3	1.084.610,3	1.140.767,1	1.171.594,3
	e. Perkebunan Tahunan	24.708,2	24.133,1	27.503,8	29.860,1	30.839,7
	f. Peternakan	491.989,4	548.606,1	579.805,6	603.083,6	658.253,0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	53.053,7	55.469,6	61.053,5	66.544,5	69.557,4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	58.660,8	64.826,9	68.533,4	71.406,7	71.145,0
	3 Perikanan	95.978,8	105.881,1	110.131,5	119.356,3	125.519,1
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>137.850,2</b>	<b>147.413,2</b>	<b>152.783,8</b>	<b>153.989,8</b>	<b>169.102,3</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	137.850,2	147.413,2	152.783,8	153.989,8	169.102,3
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>4.311.424,1</b>	<b>4.543.920,0</b>	<b>4.963.607,9</b>	<b>5.323.135,7</b>	<b>5.777.650,6</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.932.243,4	2.070.675,7	2.331.041,6	2.480.702,5	2.728.844,5
	3 Pengolahan Tembakau	397.367,6	400.624,1	432.159,8	496.617,2	537.335,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	773.357,4	841.914,8	932.334,8	1.000.789,2	1.093.271,6
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	98.587,8	106.789,0	113.556,5	120.625,5	118.325,0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	55.101,8	55.664,8	54.238,9	59.502,3	64.020,4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	174.220,1	183.991,5	200.443,7	216.597,3	234.282,6
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	42.873,9	48.866,0	53.211,7	57.184,5	59.526,6
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	310.620,6	290.209,2	276.745,7	281.502,3	285.247,9
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	171.954,9	170.680,4	175.705,6	187.886,2	197.218,0
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Bara	8.394,6	8.586,6	8.978,8	9.018,7	8.907,6
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	52.871,6	56.932,3	60.696,1	62.043,0	64.343,9
	14 Industri Alat Angkutan	588,2	545,0	531,0	558,8	586,2
	15 Industri Furnitur	157.488,1	161.489,8	170.748,1	184.723,9	204.899,4
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	135.754,2	146.951,0	153.215,6	165.384,5	180.842,0
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>27.895,9</b>	<b>32.016,3</b>	<b>38.678,7</b>	<b>47.254,0</b>	<b>50.236,1</b>
	1 Ketenagalistrikan	27.612,2	31.732,5	38.376,0	46.929,0	49.909,0
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	283,6	283,8	302,7	325,0	327,1
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>16.069,8</b>	<b>17.198,3</b>	<b>17.998,6</b>	<b>19.099,0</b>	<b>19.930,2</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>3.365.673,5</b>	<b>3.671.128,5</b>	<b>3.961.585,0</b>	<b>4.378.854,3</b>	<b>5.159.977,8</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>2.362.696,9</b>	<b>2.574.664,1</b>	<b>2.894.590,8</b>	<b>3.160.936,4</b>	<b>3.441.651,5</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	574.589,7	624.929,2	702.511,6	767.519,9	829.987,8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	1.788.107,2	1.949.734,9	2.192.079,2	2.393.416,6	2.611.663,6
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>2.164.299,8</b>	<b>2.377.612,6</b>	<b>2.687.158,8</b>	<b>2.971.925,7</b>	<b>3.367.000,7</b>
	1 Angkutan Rel	1.130,3	1.364,8	1.470,1	1.729,5	1.894,2
	2 Angkutan Darat	818.941,1	880.008,6	919.987,0	956.223,2	1.008.835,0
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	886.133,4	992.291,0	1.205.344,0	1.402.533,6	1.676.883,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	458.095,0	503.948,2	560.357,7	611.439,4	679.388,5
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>3.086.048,1</b>	<b>3.450.076,4</b>	<b>3.778.347,6</b>	<b>4.129.771,9</b>	<b>4.457.070,3</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	661.704,5	751.632,1	834.614,6	950.242,3	1.086.873,7
	2 Penyediaan Makan Minum	2.424.343,6	2.698.444,3	2.943.733,0	3.179.529,6	3.370.196,6
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>2.612.761,5</b>	<b>2.726.066,7</b>	<b>2.963.963,3</b>	<b>3.246.628,5</b>	<b>3.480.673,0</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>992.908,7</b>	<b>1.114.723,3</b>	<b>1.198.586,9</b>	<b>1.280.647,4</b>	<b>1.422.868,0</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	760.582,2	862.638,0	923.699,0	975.859,0	1.092.000,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	39.800,8	42.630,1	46.244,9	51.148,1	54.524,9
	3 Jasa Keuangan Lainnya	191.189,8	208.056,0	227.165,3	252.007,5	274.650,8
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.335,9	1.399,0	1.477,6	1.632,8	1.692,3
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>2.383.940,9</b>	<b>2.626.348,2</b>	<b>2.936.364,4</b>	<b>3.149.558,2</b>	<b>3.380.571,7</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>528.106,6</b>	<b>578.396,9</b>	<b>616.791,5</b>	<b>668.865,1</b>	<b>723.570,9</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>2.021.715,0</b>	<b>2.251.056,6</b>	<b>2.523.927,4</b>	<b>2.785.754,1</b>	<b>2.987.918,7</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>2.943.821,9</b>	<b>3.346.591,6</b>	<b>3.523.397,4</b>	<b>3.801.540,9</b>	<b>4.124.553,9</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>701.977,8</b>	<b>791.283,7</b>	<b>868.689,9</b>	<b>947.867,0</b>	<b>1.016.163,6</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>680.848,8</b>	<b>751.294,1</b>	<b>838.216,8</b>	<b>923.426,9</b>	<b>989.677,4</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>30.912.238,7</b>	<b>33.826.505,4</b>	<b>36.937.043,2</b>	<b>40.063.433,6</b>	<b>43.803.584,6</b>

**Lampiran Tabel 27.**  
**PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>1.968.070,7</b>	<b>2.003.474,9</b>	<b>2.016.941,4</b>	<b>2.040.301,7</b>	<b>2.071.594,2</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	1.848.247,5	1.879.168,7	1.891.253,1	1.909.957,6	1.942.965,1
	a. Tanaman Pangan	582.884,2	599.870,0	613.977,8	589.527,9	590.715,3
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	112.232,1	116.944,7	116.758,5	119.178,1	123.423,0
	c. Perkebunan Semusim	17.469,9	16.869,4	16.009,3	16.819,8	17.175,5
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	674.276,7	664.643,7	655.543,3	674.115,3	678.329,1
	e. Perkebunan Tahunan	18.129,9	17.432,2	17.254,5	18.096,7	18.479,3
	f. Peternakan	401.635,5	420.727,9	427.754,6	446.425,9	468.108,1
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	41.619,1	42.680,8	43.955,1	45.793,9	46.734,7
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	51.327,0	52.717,8	53.241,2	54.605,9	52.285,9
	3 Perikanan	68.496,2	71.588,4	72.447,2	75.738,2	76.343,2
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>115.316,4</b>	<b>115.517,4</b>	<b>115.645,9</b>	<b>115.878,5</b>	<b>126.081,2</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	115.316,4	115.517,4	115.645,9	115.878,5	126.081,2
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>3.513.598,4</b>	<b>3.582.533,8</b>	<b>3.762.148,7</b>	<b>3.974.964,1</b>	<b>4.202.918,3</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0			
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.591.997,5	1.648.531,5	1.775.120,4	1.877.286,7	2.012.398,8
	3 Pengolahan Tembakau	254.690,4	249.932,6	255.080,9	271.455,7	286.428,3
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	609.964,2	646.225,2	694.248,8	738.004,0	783.458,9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	78.843,1	85.213,8	87.975,7	91.772,7	87.467,5
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	52.799,4	51.640,4	49.708,6	53.930,8	57.110,5
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	158.512,2	161.418,5	170.012,2	175.495,0	181.551,6
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	47.233,3	50.959,8	54.610,6	58.064,6	59.086,9
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	264.777,6	241.434,6	222.992,7	230.080,3	229.434,1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	145.151,6	136.284,9	136.350,4	145.333,5	150.868,4
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Bara	7.536,8	7.529,5	7.711,8	7.708,2	7.449,0
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	46.862,7	50.012,0	51.160,8	51.967,4	53.351,3
	14 Industri Alat Angkutan	498,4	460,6	438,1	459,8	477,3
	15 Industri Furnitur	143.200,6	138.977,7	142.915,7	151.277,9	164.403,9
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	111.530,6	113.912,5	113.822,0	122.127,5	129.432,0
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>33.932,0</b>	<b>34.426,8</b>	<b>39.848,2</b>	<b>41.413,6</b>	<b>42.353,6</b>
	1 Ketenagalistrikan	33.702,4	34.192,0	39.611,0	41.174,0	42.113,4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	229,6	234,8	237,2	239,6	240,2
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>13.051,2</b>	<b>13.445,4</b>	<b>13.693,3</b>	<b>14.140,3</b>	<b>14.687,2</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>2.975.378,7</b>	<b>3.107.439,5</b>	<b>3.252.179,9</b>	<b>3.481.206,1</b>	<b>3.936.107,4</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>2.003.871,3</b>	<b>2.132.734,9</b>	<b>2.275.934,0</b>	<b>2.396.461,4</b>	<b>2.524.080,0</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	474.735,9	494.492,7	530.355,3	557.416,1	584.741,9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	1.529.135,4	1.638.242,2	1.745.578,7	1.839.045,3	1.939.338,1
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>1.708.682,4</b>	<b>1.775.484,4</b>	<b>1.905.956,6</b>	<b>2.009.238,3</b>	<b>2.171.373,7</b>
	1 Angkutan Rel	862,5	931,2	963,3	1.108,4	1.173,6
	2 Angkutan Darat	711.859,4	739.902,5	751.724,2	772.504,3	803.370,8
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	631.131,2	650.043,1	740.177,1	800.039,5	896.953,5
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	364.829,3	384.607,6	413.092,0	435.586,1	469.875,7
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>2.581.614,6</b>	<b>2.738.288,4</b>	<b>2.892.050,2</b>	<b>3.069.588,3</b>	<b>3.276.656,3</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	494.344,9	530.855,6	576.227,2	638.530,7	726.299,6
	2 Penyediaan Makan Minum	2.087.269,7	2.207.432,8	2.315.823,0	2.431.057,6	2.550.356,7
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>2.757.450,5</b>	<b>2.908.483,0</b>	<b>3.151.445,2</b>	<b>3.352.083,7</b>	<b>3.557.799,5</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>778.030,1</b>	<b>845.349,5</b>	<b>886.438,5</b>	<b>911.738,4</b>	<b>977.050,9</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	579.972,0	632.965,0	661.808,0	671.965,0	723.880,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	33.351,5	34.707,1	35.875,4	38.210,6	39.613,7
	3 Jasa Keuangan Lainnya	163.538,7	176.472,8	187.526,7	200.275,1	212.231,6
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.167,9	1.204,2	1.228,5	1.287,6	1.325,7
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>2.188.665,9</b>	<b>2.333.477,3</b>	<b>2.458.358,7</b>	<b>2.581.857,8</b>	<b>2.713.511,7</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>515.392,4</b>	<b>552.150,3</b>	<b>569.749,9</b>	<b>602.866,6</b>	<b>636.152,6</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>1.618.043,2</b>	<b>1.702.107,9</b>	<b>1.804.158,7</b>	<b>1.877.009,0</b>	<b>1.953.565,1</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>2.681.853,4</b>	<b>2.893.218,8</b>	<b>2.996.310,7</b>	<b>3.166.723,1</b>	<b>3.352.494,9</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>641.582,9</b>	<b>690.675,4</b>	<b>720.867,6</b>	<b>764.436,2</b>	<b>810.579,0</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>618.537,2</b>	<b>669.199,2</b>	<b>702.047,4</b>	<b>741.233,6</b>	<b>777.210,0</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>26.713.071,2</b>	<b>28.098.006,9</b>	<b>29.563.775,2</b>	<b>31.141.140,6</b>	<b>33.144.215,4</b>

Lampiran Tabel 28.

Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-4,76</b>	<b>1,80</b>	<b>0,67</b>	<b>1,16</b>	<b>1,53</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-5,16	1,67	0,64	0,99	1,73
	a. Tanaman Pangan	-2,92	2,91	2,35	-3,98	0,20
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-10,47	4,20	-0,16	2,07	3,56
	c. Perkebunan Semusim	0,72	-3,44	-5,10	5,06	2,11
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-11,66	-1,43	-1,37	2,83	0,63
	e. Perkebunan Tahunan	-0,68	-3,85	-1,02	4,88	2,11
	f. Peternakan	4,26	4,75	1,67	4,36	4,86
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	6,86	2,55	2,99	4,18	2,05
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,39	2,71	0,99	2,56	-4,25
	3 Perikanan	1,48	4,51	1,20	4,54	0,80
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>1,01</b>	<b>0,17</b>	<b>0,11</b>	<b>0,20</b>	<b>8,80</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,01	0,17	0,11	0,20	8,80
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>2,06</b>	<b>1,96</b>	<b>5,01</b>	<b>5,66</b>	<b>5,73</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,00	3,55	7,68	5,76	7,20
	3 Pengolahan Tembakau	-20,39	-1,87	2,06	6,42	5,52
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7,87	5,94	7,43	6,30	6,16
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-0,07	8,08	3,24	4,32	-4,69
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	-0,08	-2,20	-3,74	8,49	5,90
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	4,27	1,83	5,32	3,22	3,45
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,51	7,89	7,16	6,32	1,76
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-5,44	-8,82	-7,64	3,18	-0,28
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	1,28	-6,11	0,05	6,59	3,81
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	2,14	-0,10	2,42	-0,05	-3,36
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	7,01	6,72	2,30	1,58	2,66
	14 Industri Alat Angkutan	-9,92	-7,58	-4,90	4,97	3,81
	15 Industri Furnitur	-4,29	-2,95	2,83	5,85	8,68
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	-4,80	2,14	-0,08	7,30	5,98
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>3,62</b>	<b>1,46</b>	<b>15,75</b>	<b>3,93</b>	<b>2,27</b>
	1 Ketenagalistrikan	3,62	1,45	15,85	3,95	2,28
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	2,57	2,29	1,03	0,99	0,25
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>4,02</b>	<b>3,02</b>	<b>1,84</b>	<b>3,26</b>	<b>3,87</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>5,64</b>	<b>4,44</b>	<b>4,66</b>	<b>7,04</b>	<b>13,07</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>6,45</b>	<b>6,43</b>	<b>6,71</b>	<b>5,30</b>	<b>5,33</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	8,46	4,16	7,25	5,10	4,90
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	5,84	7,14	6,55	5,35	5,45
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>5,40</b>	<b>3,91</b>	<b>7,35</b>	<b>5,42</b>	<b>8,07</b>
	1 Angkutan Rel	6,61	7,97	3,44	15,07	5,89
	2 Angkutan Darat	3,60	3,94	1,60	2,76	4,00
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	5,70	3,00	13,87	8,09	12,11
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	8,53	5,42	7,41	5,45	7,87
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>6,02</b>	<b>6,07</b>	<b>5,62</b>	<b>6,14</b>	<b>6,75</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	4,61	7,39	8,55	10,81	13,75
	2 Penyediaan Makan Minum	6,36	5,76	4,91	4,98	4,91
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>7,25</b>	<b>5,48</b>	<b>8,35</b>	<b>6,37</b>	<b>6,14</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>9,02</b>	<b>8,65</b>	<b>4,86</b>	<b>2,85</b>	<b>7,16</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	11,01	9,14	4,56	1,53	7,73
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	6,72	4,06	3,37	6,51	3,67
	3 Jasa Keuangan Lainnya	2,96	7,91	6,26	6,80	5,97
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5,28	3,11	2,02	4,82	2,95
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>8,37</b>	<b>6,62</b>	<b>5,35</b>	<b>5,02</b>	<b>5,10</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>9,03</b>	<b>7,13</b>	<b>3,19</b>	<b>5,81</b>	<b>5,52</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>6,60</b>	<b>5,20</b>	<b>6,00</b>	<b>4,04</b>	<b>4,08</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>8,57</b>	<b>7,88</b>	<b>3,56</b>	<b>5,69</b>	<b>5,87</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>8,01</b>	<b>7,65</b>	<b>4,37</b>	<b>6,04</b>	<b>6,04</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>5,80</b>	<b>8,19</b>	<b>4,91</b>	<b>5,58</b>	<b>4,85</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,30</b>	<b>5,18</b>	<b>5,22</b>	<b>5,34</b>	<b>6,43</b>

**Lampiran Tabel 29.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>8,33</b>	<b>8,36</b>	<b>8,05</b>	<b>7,67</b>	<b>7,39</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	7,83	7,85	7,56	7,20	6,94
	a. Tanaman Pangan	2,21	2,33	2,33	2,16	2,09
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,45	0,45	0,43	0,39	0,38
	c. Perkebunan Semusim	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3,25	3,15	2,94	2,85	2,67
	e. Perkebunan Tahunan	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
	f. Peternakan	1,59	1,62	1,57	1,51	1,50
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,19	0,19	0,19	0,18	0,16
	3 Perikanan	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</b>	<b>0,41</b>	<b>0,38</b>	<b>0,39</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,45	0,44	0,41	0,38	0,39
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>13,95</b>	<b>13,43</b>	<b>13,44</b>	<b>13,29</b>	<b>13,19</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6,25	6,12	6,31	6,19	6,23
	3 Pengolahan Tembakau	1,29	1,18	1,17	1,24	1,23
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2,50	2,49	2,52	2,50	2,50
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,32	0,32	0,31	0,30	0,27
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	0,18	0,16	0,15	0,15	0,15
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	0,56	0,54	0,54	0,54	0,53
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,00	0,86	0,75	0,70	0,65
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,56	0,50	0,48	0,47	0,45
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,51	0,48	0,46	0,46	0,47
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	0,44	0,43	0,41	0,41	0,41
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,09	0,09	0,10	0,12	0,11
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>10,89</b>	<b>10,85</b>	<b>10,73</b>	<b>10,93</b>	<b>11,78</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>7,64</b>	<b>7,61</b>	<b>7,84</b>	<b>7,89</b>	<b>7,86</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	1,86	1,85	1,90	1,92	1,89
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	5,78	5,76	5,93	5,97	5,96
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>7,00</b>	<b>7,03</b>	<b>7,27</b>	<b>7,42</b>	<b>7,69</b>
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	2,65	2,60	2,49	2,39	2,30
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	2,87	2,93	3,26	3,50	3,83
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	1,48	1,49	1,52	1,53	1,55
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>9,98</b>	<b>10,20</b>	<b>10,23</b>	<b>10,31</b>	<b>10,18</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	2,14	2,22	2,26	2,37	2,48
	2 Penyediaan Makan Minum	7,84	7,98	7,97	7,94	7,69
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>8,45</b>	<b>8,06</b>	<b>8,02</b>	<b>8,10</b>	<b>7,95</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>3,21</b>	<b>3,30</b>	<b>3,24</b>	<b>3,20</b>	<b>3,25</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,46	2,55	2,50	2,44	2,49
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>7,71</b>	<b>7,76</b>	<b>7,95</b>	<b>7,86</b>	<b>7,72</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,65</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>6,54</b>	<b>6,65</b>	<b>6,83</b>	<b>6,95</b>	<b>6,82</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>9,52</b>	<b>9,89</b>	<b>9,54</b>	<b>9,49</b>	<b>9,42</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>2,27</b>	<b>2,34</b>	<b>2,35</b>	<b>2,37</b>	<b>2,32</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2,20</b>	<b>2,22</b>	<b>2,27</b>	<b>2,30</b>	<b>2,26</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran Tabel 30.**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Sleman Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-0,39</b>	<b>0,13</b>	<b>0,05</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-0,40	0,12	0,04	0,06	0,11
	a. Tanaman Pangan	-0,07	0,06	0,05	-0,08	0,00
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-0,05	0,02	0,00	0,01	0,01
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-0,35	-0,04	-0,03	0,06	0,01
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Peternakan	0,06	0,07	0,03	0,06	0,07
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
	3 Perikanan	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>0,28</b>	<b>0,26</b>	<b>0,64</b>	<b>0,72</b>	<b>0,73</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Industri Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Industri Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,41	0,21	0,45	0,35	0,43
	3 Pengolahan Tembakau	-0,26	-0,02	0,02	0,06	0,05
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,18	0,14	0,17	0,15	0,15
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,02	0,01	0,01	-0,01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	0,03	0,01	0,03	0,02	0,02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,06	-0,09	-0,07	0,02	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,01	-0,03	0,00	0,03	0,02
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	-0,03	-0,02	0,01	0,03	0,04
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	-0,02	0,01	0,00	0,03	0,02
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>0,63</b>	<b>0,49</b>	<b>0,52</b>	<b>0,77</b>	<b>1,46</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,51</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	0,15	0,07	0,13	0,09	0,09
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	0,33	0,41	0,38	0,32	0,32
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>0,34</b>	<b>0,25</b>	<b>0,46</b>	<b>0,35</b>	<b>0,52</b>
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	0,10	0,10	0,04	0,07	0,10
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,13	0,07	0,32	0,20	0,31
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	0,11	0,07	0,10	0,08	0,11
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>0,58</b>	<b>0,59</b>	<b>0,55</b>	<b>0,60</b>	<b>0,66</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,09	0,14	0,16	0,21	0,28
	2 Penyediaan Makan Minum	0,49	0,45	0,39	0,39	0,38
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>0,73</b>	<b>0,57</b>	<b>0,86</b>	<b>0,68</b>	<b>0,66</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,15</b>	<b>0,09</b>	<b>0,21</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,23	0,20	0,10	0,03	0,17
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,02	0,05	0,04	0,04	0,04
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>0,67</b>	<b>0,54</b>	<b>0,44</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,17</b>	<b>0,14</b>	<b>0,06</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>0,40</b>	<b>0,31</b>	<b>0,36</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>0,83</b>	<b>0,79</b>	<b>0,37</b>	<b>0,58</b>	<b>0,60</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>0,19</b>	<b>0,18</b>	<b>0,11</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>0,13</b>	<b>0,19</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,30</b>	<b>5,18</b>	<b>5,22</b>	<b>5,34</b>	<b>6,43</b>



**Lampiran Tabel 31.**  
**PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>41.998,0</b>	<b>45.154,5</b>	<b>46.844,5</b>	<b>47.858,9</b>	<b>50.620,9</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	41.196,9	44.299,3	45.944,7	46.915,2	49.628,1
	a. Tanaman Pangan	3.454,1	3.878,8	3.904,7	4.015,4	4.340,3
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	265,8	285,9	291,5	283,1	297,1
	c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	6.155,8	6.592,5	6.796,4	6.959,4	7.410,3
	e. Perkebunan Tahunan	5,3	5,5	6,1	6,7	7,0
	f. Peternakan	30.488,8	32.682,6	34.067,8	34.717,0	36.592,3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	827,2	854,0	878,3	933,5	981,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Perikanan	801,1	855,2	899,8	943,7	992,8
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>1.017,4</b>	<b>1.041,0</b>	<b>1.087,0</b>	<b>1.120,6</b>	<b>1.149,5</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.017,4	1.041,0	1.087,0	1.120,6	1.149,5
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>3.503.705,6</b>	<b>3.659.952,7</b>	<b>3.961.459,2</b>	<b>4.217.233,8</b>	<b>4.485.033,1</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.938.840,9	2.028.045,2	2.227.896,8	2.417.733,6	2.650.336,8
	3 Pengolahan Tembakau	36.540,7	35.944,0	38.721,4	44.601,7	48.492,7
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	178.274,8	193.756,4	208.423,0	224.887,2	244.837,4
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	123.869,1	134.743,1	142.910,0	152.344,6	142.526,3
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	11.811,5	12.077,2	12.090,5	12.460,1	13.358,2
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	79.210,4	83.205,0	91.017,3	96.006,2	103.483,2
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4.557,4	5.104,8	5.543,5	5.881,8	6.095,5
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	15.284,2	14.325,5	14.199,6	13.415,8	13.593,0
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	8.606,6	9.005,0	9.312,3	9.518,9	9.944,3
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Bara	684.596,4	691.446,5	726.811,5	730.934,0	719.031,9
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	355.834,5	382.482,6	411.020,1	430.440,9	445.974,0
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	26.305,7	26.981,5	28.441,9	30.520,0	33.648,8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	39.973,5	42.835,9	45.071,2	48.488,9	53.711,2
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>41.416,1</b>	<b>48.055,5</b>	<b>57.414,6</b>	<b>70.344,7</b>	<b>75.277,3</b>
	1 Ketenagalistrikan	41.173,3	47.813,8	57.157,0	70.070,1	75.002,0
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	242,7	241,7	257,6	274,6	275,3
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>39.433,3</b>	<b>42.035,3</b>	<b>43.862,7</b>	<b>45.993,1</b>	<b>48.378,1</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>1.993.618,2</b>	<b>2.133.134,0</b>	<b>2.265.491,9</b>	<b>2.422.777,8</b>	<b>2.683.150,9</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>1.773.124,2</b>	<b>1.923.298,6</b>	<b>2.130.571,8</b>	<b>2.345.123,5</b>	<b>2.550.074,6</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	446.139,0	486.831,5	541.459,8	595.786,4	645.307,1
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	1.326.985,2	1.436.467,1	1.589.111,9	1.749.337,1	1.904.767,6
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>1.011.503,3</b>	<b>1.094.829,6</b>	<b>1.152.941,9</b>	<b>1.238.619,8</b>	<b>1.326.611,9</b>
	1 Angkutan Rel	79.890,7	95.741,3	102.191,5	123.300,6	135.286,1
	2 Angkutan Darat	767.846,4	818.178,8	850.572,3	891.234,2	947.481,0
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	163.766,2	180.909,4	200.178,1	224.085,0	243.844,8
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>3.177.195,7</b>	<b>3.540.966,4</b>	<b>3.862.455,8</b>	<b>4.241.593,1</b>	<b>4.578.376,5</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	888.517,5	1.005.818,8	1.129.563,6	1.294.139,7	1.472.606,4
	2 Penyediaan Makan Minum	2.288.678,2	2.535.147,6	2.732.892,2	2.947.453,4	3.105.770,2
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>2.671.115,1</b>	<b>2.767.355,9</b>	<b>2.999.250,3</b>	<b>3.270.519,6</b>	<b>3.521.879,0</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>1.612.478,4</b>	<b>1.790.994,2</b>	<b>1.936.084,3</b>	<b>2.083.550,7</b>	<b>2.269.743,3</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	1.038.975,8	1.174.140,0	1.257.923,0	1.343.788,0	1.467.341,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	213.675,8	226.695,4	245.730,8	264.461,0	283.314,4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	354.266,1	384.333,2	426.214,4	468.494,0	512.052,1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5.560,7	5.825,6	6.216,1	6.807,7	7.035,8
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>2.304.808,7</b>	<b>2.496.071,1</b>	<b>2.664.981,3</b>	<b>2.850.160,9</b>	<b>3.072.636,6</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>270.552,0</b>	<b>296.115,3</b>	<b>311.413,0</b>	<b>338.219,8</b>	<b>365.438,3</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>2.408.848,6</b>	<b>2.682.897,3</b>	<b>2.941.107,9</b>	<b>3.261.124,0</b>	<b>3.486.756,3</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>2.251.404,1</b>	<b>2.535.454,3</b>	<b>2.660.407,1</b>	<b>2.850.179,4</b>	<b>3.101.517,7</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>903.928,4</b>	<b>1.016.645,1</b>	<b>1.085.552,8</b>	<b>1.181.954,2</b>	<b>1.283.065,1</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>658.138,5</b>	<b>717.935,4</b>	<b>774.487,0</b>	<b>842.671,4</b>	<b>919.144,1</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>24.664.285,5</b>	<b>26.791.936,3</b>	<b>28.895.413,0</b>	<b>31.309.045,2</b>	<b>33.818.853,1</b>

**Lampiran Tabel 32.**  
**PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>35.733,8</b>	<b>36.052,7</b>	<b>36.377,3</b>	<b>36.766,9</b>	<b>37.296,9</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	35.075,5	35.380,3	35.694,1	36.071,3	36.595,8
	a. Tanaman Pangan	3.119,4	3.166,7	3.183,3	3.147,0	3.200,8
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	232,7	235,8	235,2	237,1	242,0
	c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4.761,3	4.716,7	4.704,5	4.719,3	4.805,9
	e. Perkebunan Tahunan	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2
	f. Peternakan	26.226,3	26.524,7	26.823,0	27.205,5	27.572,7
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	731,6	732,3	744,1	758,2	770,2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Perikanan	658,3	672,4	683,2	695,6	701,1
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>850,0</b>	<b>851,2</b>	<b>856,1</b>	<b>876,7</b>	<b>886,6</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	850,0	851,2	856,1	876,7	886,6
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>2.943.904,5</b>	<b>2.996.573,4</b>	<b>3.127.536,8</b>	<b>3.276.812,3</b>	<b>3.394.676,6</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.614.793,0	1.633.407,2	1.718.974,1	1.836.545,0	1.959.005,7
	3 Pengolahan Tembakau	22.827,9	21.646,2	22.309,4	23.939,3	25.293,7
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	134.580,7	142.673,0	150.254,5	158.465,4	168.133,5
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	95.294,4	103.412,9	107.428,8	112.594,2	102.487,0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	10.576,4	10.410,3	10.176,8	10.342,4	10.919,5
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	67.248,8	68.700,6	71.937,8	75.485,3	77.953,7
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	5.016,6	5.315,7	5.551,8	5.827,4	5.900,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	12.821,8	11.796,7	11.282,8	11.388,3	11.354,2
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	7.253,2	7.066,1	7.088,7	7.148,7	7.393,9
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Bara	604.042,1	601.150,8	621.437,2	620.441,4	597.219,4
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	311.670,4	333.074,6	342.510,2	352.693,9	362.488,0
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	23.971,7	23.293,0	24.064,5	25.081,0	27.155,2
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	33.807,4	34.626,4	34.520,3	36.859,8	39.371,9
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>50.700,6</b>	<b>51.794,6</b>	<b>58.253,3</b>	<b>60.420,3</b>	<b>62.198,7</b>
	1 Ketenagalistrikan	50.506,8	51.596,8	58.050,0	60.211,0	61.989,4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	193,7	197,8	203,3	209,3	209,3
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>31.963,4</b>	<b>32.797,8</b>	<b>33.527,3</b>	<b>34.601,9</b>	<b>36.204,7</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>1.674.189,0</b>	<b>1.722.508,1</b>	<b>1.783.818,9</b>	<b>1.877.754,4</b>	<b>1.981.260,9</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>1.480.894,1</b>	<b>1.569.644,8</b>	<b>1.659.173,7</b>	<b>1.754.131,8</b>	<b>1.845.196,0</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	364.016,1	373.699,6	395.900,4	418.792,8	440.276,9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	1.116.877,9	1.195.945,2	1.263.273,3	1.335.338,9	1.404.919,1
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>838.086,9</b>	<b>870.912,2</b>	<b>895.301,9</b>	<b>938.000,0</b>	<b>987.436,2</b>
	1 Angkutan Rel	57.131,8	61.688,8	63.331,2	74.718,3	79.272,7
	2 Angkutan Darat	646.826,9	667.836,5	680.935,0	702.434,3	735.794,1
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	134.128,2	141.386,9	151.035,8	160.847,3	172.369,3
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>2.444.064,8</b>	<b>2.589.749,8</b>	<b>2.739.335,5</b>	<b>2.926.573,7</b>	<b>3.127.938,8</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	662.200,6	714.829,4	772.195,5	861.738,3	974.707,5
	2 Penyediaan Makan Minum	1.781.864,2	1.874.920,4	1.967.140,0	2.064.835,4	2.153.231,3
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>2.898.953,3</b>	<b>3.035.921,6</b>	<b>3.281.050,1</b>	<b>3.474.909,1</b>	<b>3.704.297,6</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>1.273.749,8</b>	<b>1.374.111,3</b>	<b>1.443.196,6</b>	<b>1.488.716,7</b>	<b>1.564.443,2</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	807.905,0	880.574,7	920.662,0	941.544,7	988.848,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	179.444,2	185.159,7	193.116,4	199.750,6	206.958,2
	3 Jasa Keuangan Lainnya	282.049,0	303.891,0	324.786,5	342.619,3	363.711,6
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4.351,7	4.485,9	4.631,6	4.802,0	4.925,0
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>1.972.048,8</b>	<b>2.074.601,9</b>	<b>2.167.878,8</b>	<b>2.264.807,4</b>	<b>2.388.465,9</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>259.521,0</b>	<b>278.211,9</b>	<b>285.922,7</b>	<b>304.281,7</b>	<b>320.469,5</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>1.914.203,7</b>	<b>2.021.480,1</b>	<b>2.140.289,8</b>	<b>2.238.654,4</b>	<b>2.328.916,2</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>2.088.605,8</b>	<b>2.235.519,7</b>	<b>2.307.655,3</b>	<b>2.424.677,3</b>	<b>2.574.870,8</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>818.611,5</b>	<b>879.118,7</b>	<b>920.126,8</b>	<b>973.057,3</b>	<b>1.035.916,8</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>581.682,5</b>	<b>623.162,3</b>	<b>655.987,2</b>	<b>693.384,2</b>	<b>738.176,8</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>21.307.763,6</b>	<b>22.393.012,2</b>	<b>23.536.288,1</b>	<b>24.768.426,1</b>	<b>26.128.652,1</b>



Lampiran Tabel 33.

Laju Pertumbuhan Pdrb Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>-1,01</b>	<b>0,89</b>	<b>0,90</b>	<b>1,07</b>	<b>1,44</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	-1,07	0,87	0,89	1,06	1,45
	a. Tanaman Pangan	-1,47	1,52	0,53	-1,14	1,71
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-0,64	1,32	-0,27	0,83	2,06
	c. Perkebunan Semusim	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,76	-0,94	-0,26	0,32	1,83
	e. Perkebunan Tahunan	0,83	-1,41	0,55	0,78	2,56
	f. Peternakan	-1,36	1,14	1,12	1,43	1,35
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	-0,49	0,10	1,61	1,89	1,59
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Perikanan	1,76	2,14	1,60	1,82	0,79
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>1,31</b>	<b>0,14</b>	<b>0,58</b>	<b>2,41</b>	<b>1,12</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,31	0,14	0,58	2,41	1,12
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>4,62</b>	<b>1,79</b>	<b>4,37</b>	<b>4,77</b>	<b>3,60</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6,55	1,15	5,24	6,84	6,67
	3 Pengolahan Tembakau	-16,78	-5,18	3,06	7,31	5,66
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4,58	6,01	5,31	5,46	6,10
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,65	8,52	3,88	4,81	-8,98
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	-2,23	-1,57	-2,24	1,63	5,58
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	3,72	2,16	4,71	4,93	3,27
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4,80	5,96	4,44	4,96	1,26
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-6,90	-7,99	-4,36	0,94	-0,30
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	1,36	-2,58	0,32	0,85	3,43
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	1,86	-0,48	3,37	-0,16	-3,74
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	6,24	6,87	2,83	2,97	2,78
	14 Industri Alat Angkutan	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	15 Industri Furnitur	-4,69	-2,83	3,31	4,22	8,27
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	-2,57	2,42	-0,31	6,78	6,82
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>6,52</b>	<b>2,16</b>	<b>12,47</b>	<b>3,72</b>	<b>2,94</b>
	1 Ketenagalistrikan	6,52	2,16	12,51	3,72	2,95
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	5,89	2,10	2,77	2,93	0,03
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>4,07</b>	<b>2,61</b>	<b>2,22</b>	<b>3,21</b>	<b>4,63</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>4,63</b>	<b>2,89</b>	<b>3,56</b>	<b>5,27</b>	<b>5,51</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>5,23</b>	<b>5,99</b>	<b>5,70</b>	<b>5,72</b>	<b>5,19</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	6,94	2,66	5,94	5,78	5,13
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	4,69	7,08	5,63	5,70	5,21
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>2,73</b>	<b>3,92</b>	<b>2,80</b>	<b>4,77</b>	<b>5,27</b>
	1 Angkutan Rel	19,18	7,98	2,66	17,98	6,10
	2 Angkutan Darat	0,42	3,25	1,96	3,16	4,75
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	8,37	5,41	6,82	6,50	7,16
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>5,33</b>	<b>5,96</b>	<b>5,78</b>	<b>6,84</b>	<b>6,88</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	4,23	7,95	8,03	11,60	13,11
	2 Penyediaan Makan Minum	5,75	5,22	4,92	4,97	4,28
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>4,31</b>	<b>4,72</b>	<b>8,07</b>	<b>5,91</b>	<b>6,60</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>6,48</b>	<b>7,88</b>	<b>5,03</b>	<b>3,15</b>	<b>5,09</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	7,72	8,99	4,55	2,27	5,02
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	7,32	3,19	4,30	3,44	3,61
	3 Jasa Keuangan Lainnya	2,58	7,74	6,88	5,49	6,16
	4 Jasa Penunjang Keuangan	7,05	3,08	3,25	3,68	2,56
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>6,68</b>	<b>5,20</b>	<b>4,50</b>	<b>4,47</b>	<b>5,46</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>5,72</b>	<b>7,20</b>	<b>2,77</b>	<b>6,42</b>	<b>5,32</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>5,54</b>	<b>5,60</b>	<b>5,88</b>	<b>4,60</b>	<b>4,03</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>6,55</b>	<b>7,03</b>	<b>3,23</b>	<b>5,07</b>	<b>6,19</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>6,84</b>	<b>7,39</b>	<b>4,66</b>	<b>5,75</b>	<b>6,46</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>4,41</b>	<b>7,13</b>	<b>5,27</b>	<b>5,70</b>	<b>6,46</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,28</b>	<b>5,09</b>	<b>5,11</b>	<b>5,24</b>	<b>5,49</b>

**Lampiran Tabel 34.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15
	a. Tanaman Pangan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Peternakan	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>14,21</b>	<b>13,66</b>	<b>13,71</b>	<b>13,47</b>	<b>13,26</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,86	7,57	7,71	7,72	7,84
	3 Pengolahan Tembakau	0,15	0,13	0,13	0,14	0,14
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,50	0,50	0,49	0,49	0,42
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus da	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Baran	2,78	2,58	2,52	2,33	2,13
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1,44	1,43	1,42	1,37	1,32
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>	<b>0,20</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,17	0,18	0,20	0,22	0,22
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>8,08</b>	<b>7,96</b>	<b>7,84</b>	<b>7,74</b>	<b>7,93</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>7,19</b>	<b>7,18</b>	<b>7,37</b>	<b>7,49</b>	<b>7,54</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	1,81	1,82	1,87	1,90	1,91
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	5,38	5,36	5,50	5,59	5,63
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>4,10</b>	<b>4,09</b>	<b>3,99</b>	<b>3,96</b>	<b>3,92</b>
	1 Angkutan Rel	0,32	0,36	0,35	0,39	0,40
	2 Angkutan Darat	3,11	3,05	2,94	2,85	2,80
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	0,66	0,68	0,69	0,72	0,72
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>12,88</b>	<b>13,22</b>	<b>13,37</b>	<b>13,55</b>	<b>13,54</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	3,60	3,75	3,91	4,13	4,35
	2 Penyediaan Makan Minum	9,28	9,46	9,46	9,41	9,18
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>10,83</b>	<b>10,33</b>	<b>10,38</b>	<b>10,45</b>	<b>10,41</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>6,54</b>	<b>6,68</b>	<b>6,70</b>	<b>6,65</b>	<b>6,71</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	4,21	4,38	4,35	4,29	4,34
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,87	0,85	0,85	0,84	0,84
	3 Jasa Keuangan Lainnya	1,44	1,43	1,48	1,50	1,51
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>9,34</b>	<b>9,32</b>	<b>9,22</b>	<b>9,10</b>	<b>9,09</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>1,10</b>	<b>1,11</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>9,77</b>	<b>10,01</b>	<b>10,18</b>	<b>10,42</b>	<b>10,31</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>9,13</b>	<b>9,46</b>	<b>9,21</b>	<b>9,10</b>	<b>9,17</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>3,66</b>	<b>3,79</b>	<b>3,76</b>	<b>3,78</b>	<b>3,79</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2,67</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>	<b>2,69</b>	<b>2,72</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran Tabel 35.**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Yogyakarta Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>0,64</b>	<b>0,25</b>	<b>0,58</b>	<b>0,63</b>	<b>0,48</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Industri Batu Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Industri Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,49	0,09	0,38	0,50	0,49
	3 Pengolahan Tembakau	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,04	0,02	0,02	-0,04
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Perce	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Bara	0,05	-0,01	0,09	0,00	-0,09
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,09	0,10	0,04	0,04	0,04
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi da	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>0,37</b>	<b>0,23</b>	<b>0,27</b>	<b>0,40</b>	<b>0,42</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	<b>0,36</b>	<b>0,42</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,37</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Repa	0,12	0,05	0,10	0,10	0,09
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil	0,25	0,37	0,30	0,31	0,28
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>0,11</b>	<b>0,15</b>	<b>0,11</b>	<b>0,18</b>	<b>0,20</b>
	1 Angkutan Rel	0,05	0,02	0,01	0,05	0,02
	2 Angkutan Darat	0,01	0,10	0,06	0,09	0,13
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan,	0,05	0,03	0,04	0,04	0,05
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>0,61</b>	<b>0,68</b>	<b>0,67</b>	<b>0,80</b>	<b>0,81</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,13	0,25	0,26	0,38	0,46
	2 Penyediaan Makan Minum	0,48	0,44	0,41	0,42	0,36
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>0,59</b>	<b>0,64</b>	<b>1,09</b>	<b>0,82</b>	<b>0,93</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>0,38</b>	<b>0,47</b>	<b>0,31</b>	<b>0,19</b>	<b>0,31</b>
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,29	0,34	0,18	0,09	0,19
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,06	0,03	0,04	0,03	0,03
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,04	0,10	0,09	0,08	0,09
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>0,61</b>	<b>0,48</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>	<b>0,50</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,03</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,53</b>	<b>0,42</b>	<b>0,36</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>0,63</b>	<b>0,69</b>	<b>0,32</b>	<b>0,50</b>	<b>0,61</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>0,26</b>	<b>0,28</b>	<b>0,18</b>	<b>0,22</b>	<b>0,25</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>0,12</b>	<b>0,19</b>	<b>0,15</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,28</b>	<b>5,09</b>	<b>5,11</b>	<b>5,24</b>	<b>5,49</b>



